

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2018 - 2023

TANJUNGPANDAN, TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023

SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat;

b. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah dan peningkatan belanja daerah serta pembiayaan khususnya untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana....

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah....

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik....

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);

17. Peraturan....

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerahg Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan....

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana....

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah.
23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

sebagai....

sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

24. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact).*
25. Keluaran (*output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome)* dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
27. Dampak (*impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* beberapa program.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi:
   a. BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

b. BAB....

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH memuat realisasi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH memuat strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja

pada....

pada aspek kesejahteraan, pelayanan, dan daya saing melalui indikator kinerja.

i. BAB IX : PENUTUP memuat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (10.79/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Belitung untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Belitung dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung ini dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejak Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ditetapkan pada Bulan Juni 2019, telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintahan....

Pemerintahan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah ditetapkan pada awal Tahun 2020 dan menjadi pedoman pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan pembangunan nasional ini dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, di awal Tahun 2020 telah merebak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berawal dari Cina. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan sampai saat ini masih terus menyebar. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan dan yang lainnya. Berbagai permasalahan muncul dan menyebabkan Pemerintah dan pemerintah daerah mengambil kebijakan dan langkah konkrit termasuk aspek pendanaan untuk percepatan penanganan COVID-19 antara lain dengan melakukan realokasi dan *refocusing* APBN dan APBD Tahun 2020.

Dalam rangka keselarasan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah serta merespon perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen RPJMD. Perubahan RPJMD didahului dengan evaluasi hasil pembangunan selama 1 (satu) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan evaluasi hasil RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Hal ini dikarenakan memiliki beberapa acuan dasar hukum, sebagai berikut:

a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan

Perkembangan....

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

b. Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

   1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
   3. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan....

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung diharapkan dapat mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, dan mampu merespon perubahan dan perkembangan keadaan.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
   e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

f. surat....

f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

2. hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023; dan
3. adanya bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK ix

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 9
1.3 Hubungan antar Dokumen 13
1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 13
1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 14
1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan RPJPD Kabupaten Belitung 15
1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan RTRW 16
1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan KLHS 17
1.3.6 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 19
1.4. Maksud dan Tujuan 20
1.5 Sistematika Penulisan 20

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 22

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 22
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 22
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana 37
2.1.3 Aspek Demografi 46
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 54
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 54
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 89
2.2.3 Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga 105
2.3 Aspek Pelayanan Umum 108
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib 108
2.3.1.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 109
2.3.1.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 125
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan 158
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 176
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 176
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 180
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 188
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia 200

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 203

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 203
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 204
3.1.2 Neraca Daerah 223
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 227
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 228
3.2.2 Analisis Pembiayaan 231

3.3 Kerangka Pendanaan.....234
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 237
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.....241

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....244

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....244
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 245
4.1.2 Permasalahan Kualitas Sumber daya manusia 247
4.1.3 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan.....250
4.1.4 Permasalahan daya saing potensi ekonomi 252
4.1.5 Permasalahan Lingkungan.....254
4.1.6 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan.....255
4.2 Isu Strategis 269
4.2.1 Isu Strategis Internasional.....270
4.2.2 Isu Strategis Nasional 272
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 284
4.2.4 Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Belitung 295
4.2.5 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.....297
4.2.6 Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.....300
4.2.7 Kebijakan pembangunan daerah Lainnya 303
4.2.8 Isu Strategis Daerah Kabupaten Belitung 305
4.3. Kajian Lingkungan Hidup 309

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 322

5.1 Visi.....322
5.2 Misi.....324
5.3 Tujuan dan Sasaran.....326
5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023.....331

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....339

6.1 Strategi.....339
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....350
6.3 Program Pembangunan Daerah 371

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 372

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....397

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....460
8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....461
8.2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target.....461
8.2.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Target.....462

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 KESELARASAN HUBUNGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 DAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 14
TABEL 1.2 KESELARASAN HUBUNGAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022 DAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 15
TABEL 1.3 KESELARASAN RPJP KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005-2025 DAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 16
TABEL 2.1 PENYEBARAN PULAU MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG 23
TABEL 2.2 RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN BELITUNG 36
TABEL 2.3 PERSENTASE LUAS WILAYAH PRODUKTIF KABUPATEN BELITUNG 37
TABEL 2.4 POTENSI BAHAYA DI KABUPATEN BELITUNG 38
TABEL 2.5 REKAPITULASI RISIKO BENCANA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021-2025 ... 38
TABEL 2.6 TINGKAT KERENTANAN BENCANA DI KABUPATEN BELITUNG 40
TABEL 2.7 POTENSI PENDUDUK TERPAPAR BENCANA DI KABUPATEN BELITUNG 41
TABEL 2.8 POTENSI KERUGIAN BENCANA DI KABUPATEN BELITUNG 41
TABEL 2.9 TINGKAT KAPASITAS BENCANA DI KABUPATEN BELITUNG 42
TABEL 2.10 TINGKAT RESIKO BENCANA DI KABUPATEN BELITUNG 43
TABEL 2.11 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 46
TABEL 2.12 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG 48
TABEL 2.13 JUMLAH PENDUDUK USIA DISTRIBUSI PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG 48
TABEL 2.14 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR 50
TABEL 2.15 DATA PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2020 52
TABEL 2.16 PDRB ADHB DAN ADHK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 - 2020 (DALAM JUTA) 55
TABEL 2.17 NILAI DAN KONTRIBUSI KATEGORI DALAM PDRB KABUPATEN BELITUNG MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) TAHUN 2016 – 2020 (DALAM JUTA RP) 58
TABEL 2.18 NILAI DAN KONTRIBUSI KATEGORI DALAM PDRB KABUPATEN BELITUNG MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2016-2020 SERI TAHUN DASAR 2010 (DALAM JUTA RP) 60
TABEL 2.19 LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BELITUNG MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016- 2020 63
TABEL 2.20 PDRB PER KAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – TAHUN 2019 (DALAM RIBU RUPIAH) 66
TABEL 2.21 INDEKS SPESIALISASI (SPECIALIZATION INDEX) KABUPATEN BELITUNG 68
TABEL 2.22 ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) KABUPATEN BELITUNG 69
TABEL 2.23 INTERPRETASI HASIL ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) 71
TABEL 2.24 INFLASI BULANAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 (PERSEN) 71
TABEL 2.25 PERBANDINGAN LAJU INFLASI DI TANJUNGPANDAN,PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 74
TABEL 2.26 INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI TANJUNGPANDAN TAHUN 2015-2019 75
TABEL 2.27 INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI TANJUNGPANDAN TAHUN 2020 75
TABEL 2.28 ANDIL / SUMBANGAN KELOMPOK PENGELUARAN TERHADAP INFLASI KOTA TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015-2019 77

TABEL 2.29 ANDIL / SUMBANGAN KELOMPOK PENGELUARAN TERHADAP INFLASI KOTA TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 77
TABEL 2.30 SEPULUH KOMODITAS TERBESAR PENYUMBANG INFLASI DI TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016-2020 79
TABEL 2.31 GARIS KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TERHADAP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 (DALAM RUPIAH) 83
TABEL 2.32 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019 88
TABEL 2.33 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BELITUNG,PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA 91
TABEL 2.34 KOMPONEN PENYUSUN IPM KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020 91
TABEL 2.35 ANGKA MELEK HURUF TAHUN 2015-2019 94
TABEL 2.36 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016-2020 95
TABEL 2.37 ANGKA PARTISIPASI KASAR JENJANG SD DAN SMP TAHUN 2015-2019 96
TABEL 2.38 RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015-2019 97
TABEL 2.39 ANGKA PUTUS SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 97
TABEL 2.40 ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 98
TABEL 2.41 ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 - 2020 100
TABEL 2.42 ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 100
TABEL 2.43 STATUS GIZI BALITA DI KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016 – 2020 101
TABEL 2.44 DATA INDIKATOR KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 103
TABEL 2.45 PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL TAHUN 2015-2019 104
TABEL 2.46 JUMLAH SARANA SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015-2019 105
TABEL 2.47 JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM 106
TABEL 2.48 CAPAIAN PEROLEHAN MEDALI TINGKAT PROVINSI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 107
TABEL 2.49 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DI KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2014-2018 108
TABEL 2.50 HASIL KINERJA URUSAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 110
TABEL 2.51 DATA AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BELITUNG 114
TABEL 2.52 DATA AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BELITUNG 114
TABEL 2.53 HASIL KINERJA URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 115
TABEL 2.54 HASIL KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019 118
TABEL 2.55 HASIL KINERJA URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANPEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 120
TABEL 2.56 HASIL KINERJA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 122
TABEL 2.57 JUMLAH PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 122
TABEL 2.58 HASIL KINERJA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 123
TABEL 2.59 HASIL KINERJA URUSAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019 124
TABEL 2.60 HASIL KINERJA URUSAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 127

TABEL 2.61 HASIL KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 130
TABEL 2.62 HASIL KINERJA URUSAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019 131
TABEL 2.63 HASIL KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 132
TABEL 2.64 HASIL KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 134
TABEL 2.65 HASIL KINERJA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019..... 135
TABEL 2.66 HASIL KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016– 2020 137
TABEL 2.67 JUMLAH DESA DENGAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016-2020 138
TABEL 2.68 HASIL KINERJA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 139
TABEL 2.69 JUMLAH PENYULUH KB SE-KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020..... 141
TABEL 2.70 HASIL KINERJA URUSAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 142
TABEL 2.71 HASIL KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 144
TABEL 2.72 HASIL KINERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 144
TABEL 2.73 DATA PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI TAHUN 2016-2020 145
TABEL 2.74 HASIL KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 149
TABEL 2.75 HASIL KINERJA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 152
TABEL 2.76 HASIL KINERJA URUSAN STATISTIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2020..... 153
TABEL 2.77 HASIL KINERJA URUSAN PERSANDIAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 – 2018..... 154
TABEL 2.78 HASIL KINERJA URUSAN KEBUDAYAANPEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019..... 155
TABEL 2.79 HASIL KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019..... 156
TABEL 2.80 HASIL KINERJA URUSAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 158
TABEL 2.81 HASIL KINERJA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 159
TABEL 2.82 HASIL KINERJA URUSAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 161
TABEL 2.83 HASIL KINERJA URUSAN PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 164
TABEL 2.84 PERKEMBANGAN AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2016-2020 165
TABEL 2.85 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 166
TABEL 2.86 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020..... 166
TABEL 2.87 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020..... 167
TABEL 2.88 HASIL KINERJA URUSAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020..... 168
TABEL 2.89 PERKEMBANGAN JUMLAH INDUSTRI KECIL TAHUN 2016-2020 (UNIT) 169

TABEL 2.90 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 170
TABEL 2.91 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 171
TABEL 2.92 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 172
TABEL 2.93 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 173
TABEL 2.94 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 – 2019 174
TABEL 2.95 HASIL KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 175
TABEL 2.96 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (DALAM RUPIAH) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2015-2019 178
TABEL 2.97 RATA-RATA PENGELUARAN (RUPIAH) KONSUMSI MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2015-2019 179
TABEL 2.98 PERSENTASE (%) JALAN BERKONDISI BAIK TAHUN 2015–2019 181
TABEL 2.99 PROFIL KONDISI JALAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016–2020 181
TABEL 2.100 JUMLAH DAN PANJANG JEMBATAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015–2019 182
TABEL 2.101 ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA BANDARA UDARA H.AS HANANDJOEDINTAHUN 2015–2019 183
TABEL 2.102 ARUS LALU LINTAS PELABUHAN PENUMPANG LASKAR PELANGI KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2015–2019 184
TABEL 2.103 ARUS LALU LINTAS PENUMPANG DAN BUS YANG MASUK TERMINAL TANJUNGPANDANTAHUN 2015 – 2019 184
TABEL 2.104 PERKEMBANGAN JUMLAH HOTEL DAN PENGINAPAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 185
TABEL 2.105 PERKEMBANGAN JUMLAH RESTORAN DAN RUMAH MAKANTAHUN 2016 – 2020 186
TABEL 2.106 PERKEMBANGAN BANYAKNYA PELANGGAN, PEMAKAI DAN PENJUALAN AIR MINUM PDAM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 186
TABEL 2.107 PERKEMBANGAN JUMLAH PELANGGAN, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN AIR SPAM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2019 187
TABEL 2.108 PERKEMBANGAN JUMLAH PELANGGAN DAN DAYA TERSAMBUNG LISTRIK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 188
TABEL 2.109 JUMLAH TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015-2019 189
TABEL 2.110 PERKEMBANGAN JUMLAH IJIN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 196
TABEL 2.111 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN MACAM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 197
TABEL 2.112 PERKEMBANGAN JUMLAH PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 198
TABEL 2.113 DATA PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2020 200
TABEL 2.114 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BELITUNG 2016-2020 201
TABEL 3.1 RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAHTAHUN 2016 S.D 2020 205
TABEL 3.2 RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TAHUN 2016-2020 207
TABEL 3.3 ANGKA PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 209
TABEL 3.4 PERSENTASE REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2016 - 2020 211

TABEL 3.5 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 - 2020 213
TABEL 3.6 RATA - RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016-2020.....217
TABEL 3.7 TARGET DAN REALISASI APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 – 2020.....219
TABEL 3.8 RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAHTAHUN 2016 – 2020.....222
TABEL 3.9 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2019.....224
TABEL 3.10 ANALISIS RASIO LIKUIDITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 226
TABEL 3.11 RASIO SOLVABILITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019.....227
TABEL 3.12 PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016 – 2020 228
TABEL 3.13 ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR TAHUN 2016-2020.....229
TABEL 3.14 REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2020.....230
TABEL 3.15 PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 232
TABEL 3.16 KOMPOSISI PENUTUP DIFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020.....233
TABEL 3.17 REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2020 233
TABEL 3.18 SISA LEBIH (RIIL) PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 – 2019 234
TABEL 3.19 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 – 2023 238
TABEL 3.20 PROYEKSI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023.....240
TABEL 3.21 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH.....242
TABEL 3.22 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH 243
TABEL 4.1 HASIL TELAAHAN SASARAN POKOK, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA RPJPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005-2025 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.....301
TABEL 6.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 VISI : MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG 2023.....341
TABEL 6.2 VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI 351
TABEL 6.3 KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ANTARA RPJMD PROVINSI KEPUALUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022 DAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 353
TABEL 6.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG ..355
TABEL 6.5 PENTAHAPAN PELAKSANAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2023.....362
TABEL 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023 KABUPATEN BELITUNG.....395
TABEL 7.2 KERANGKA PERUBAHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2023 KABUPATEN BELITUNG 396
TABEL 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BELITUNG ……..398
TABEL 7.4 PERUBAHAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BELITUNG ……..……..44

TABEL 8.1 TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN RPJMD 2018 – 2023 KABUPATEN BELITUNG.....464
TABEL 8.2 TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD 2018 – 2023 KABUPATEN BELITUNG.....465
TABEL 8.3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.....465

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG 49
GRAFIK 2.2 PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020.....51
GRAFIK 2.3 KELOMPOK PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 MENURUT GENERASI 53
GRAFIK 2.4 PDRB ADHB DAN ADHK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 - 2020 (DALAM JUTA).....56
GRAFIK 2.5 KONTRIBUSI SEKTOR PEMBENTUK PDRB ADHB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 57
GRAFIK 2.6 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2016- TAHUN 2020 (DALAM PERSEN).....64
GRAFIK 2.7 PDRB PER KAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BELITUNG,PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2015-2019 (DALAM RIBU RUPIAH) 67
GRAFIK 2.8 INFLASI BULANAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 73
GRAFIK 2.9 PERBANDINGAN LAJU INFLASI DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020.....74
GRAFIK 2.10 SEPULUH KOMODITI TERBESAR PENYUMBANG INFLASI DI TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016-2020 80
GRAFIK 2.11 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BELITUNG TERHADAP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 82
GRAFIK 2.12 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020.....83
GRAFIK 2.13 GARIS KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020.....84
GRAFIK 2 14 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) KABUPATEN BELITUNG TERHADAP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020 85
GRAFIK 2.15 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 86
GRAFIK 2.16 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATENBELITUNG, PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DAN INDONESIA TAHUN 2016-2020.....87
GRAFIK 2.17 PERSENTASE PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN BELITUNG PER AGUSTUS 2020.....89
GRAFIK 2.18 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 90
GRAFIK 2.19 IPM DAN PERTUMBUHAN IPM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 ...93
GRAFIK 2.20 PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL TAHUN 2015-2019.....104
GRAFIK 2.21 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 128
GRAFIK 2.22 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015-2019.....129
GRAFIK 2.23 RATIO AKSEPTOR KB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 140

GRAFIK 2.24 PERTUMBUHAN KOPERASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 (UNIT) 146
GRAFIK 2.25 OMSET USAHA MIKRO DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 (DALAM RIBU RUPIAH) 148
GRAFIK 2.26 JUMLAH INVESTOR DALAM NEGERI BESERTA REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG 150
GRAFIK 2.27 JUMLAH INVESTOR DALAM NEGERI BESERTA REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 150
GRAFIK 2.28 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (DALAM RUPIAH) PENDUDUK DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN INDONESIATAHUN 2015-2019 177
GRAFIK 2.29 ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA BANDARA UDARA H.AS HANANDJOEDIN TAHUN 2015-2019 183
GRAFIK 2.30 RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 201
GRAFIK 3.1 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAHTAHUN 2016 – 2020 206
GRAFIK 3.2 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 208
GRAFIK 3.3 REALISASI DANA PERIMBANGAN KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016 – 2020 210
GRAFIK 3.4 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN DANA PERIMBANGANTAHUN 2016 – 2020 210
GRAFIK 3.5 RATA-RATA PROPORSI KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2016 – 2020 211
GRAFIK 3.6 REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016 – 2020 212
GRAFIK 3.7 KOMPOSISI BELANJA DAERAHTAHUN 2016 – 2020 214
GRAFIK 3.8 REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 216
GRAFIK 3.9 PERSENTASE REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2016 – 2020 218
GRAFIK 3.10 PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2016 – 2020 220
GRAFIK 3.11 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 – 2020 221

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN 19
GAMBAR 2.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG 2014 – 2034.....24
GAMBAR 2.2 PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL TANJUNGKELAYANG DAN SEKITARNYA 33
GAMBAR 2.3 LUASAN WILAYAH PRODUKTIF KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN RTRW TAHUN 2014-2034 36
GAMBAR 2.4 PETA RESIKO BENCANA DI KABUPATEN BELITUNG 45
GAMBAR 2.5 ANGKATAN KERJA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 125
GAMBAR 2.6 TPT DAN TPAK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016-2020 .....**126**
GAMBAR 3.1 BEBERAPA PERATURAN YANG DITERBITKAN SEBAGAI PENJABARAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 235
GAMBAR 3.2 STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 .....**236**
GAMBAR 4.1 VISI DAN MISI PRESIDEN RI TAHUN 2020 – 2024.....273
GAMBAR 4.2 ARAH KEBIJAKAN PRESIDEN RI 274
GAMBAR 4.3 DAFTAR PROYEK PRIORITAS STRATEGIS RPJMN 2020 – 2024 275
GAMBAR 4.4 PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 278
GAMBAR 4.5 PERSEBARAN DESTINASI PARIWISATA SUMATERA – JAWA – BALI 278
GAMBAR 4.6 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS.....279
GAMBAR 4.7 KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 279
GAMBAR 4.8 PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS DI WILAYAH SUMATERA 281
GAMBAR 4.9 LOKASI 62 KPPN SUMATERA – JAWA – BALI 282
GAMBAR 4.10 KOMODITAS UNGGULAN DI WILAYAH SUMATERA **283**
GAMBAR 5.1 POLA KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BELITUNG **338**
GAMBAR 6.1 IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL BERDASARKAN ANALISIS SWOT.....340
GAMBAR 6.2 TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG 2019 – 2023 .....**354**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup berbagai perubahan dari struktur sosial dengan tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dalam penanganan ketimpangan pendapatan, serta dalam penanganan kemiskinan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan perencanaan melalui siklus perencanaan pembangunan. Pada perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat terwujud, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan nya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif, serta program perangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2018-2023 yaitu: “Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Belitung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan;
3. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sejalan dengan waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada Bulan Juni 2019, telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah ditetapkan pada awal Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 menjadi pedoman pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi selama 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi ini dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada kurun waktu tersebut mengalami banyak perubahan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 yang berawal dari Cina. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan sampai saat ini masih terus menyebar. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan dan yang lainnya.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (year on year/yoy). Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi, setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif. Adapun secara kuartalan, ekonomi sudah mulai tumbuh sebesar 5,05 persen dan secara kumulatif masih terkontraksi 2,03 persen. Dibandingkan kuartal II-2020, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik. Pasalnya, pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni mencapai 5,32 persen.

Berbagai permasalahan muncul dan menyebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dan langkah konkrit termasuk aspek

pendanaan untuk percepatan penanganan COVID-19 antara lain dengan melakukan realokasi dan *refocusing* APBN dan APBD Tahun 2020.

Dalam rangka keselarasan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah serta merespon perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen RPJMD. Perubahan RPJMD didahului dengan evaluasi hasil pembangunan selama 1 (satu) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan evaluasi hasil RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Hal ini dikarenakan memiliki beberapa acuan dasar hukum, sebagai berikut:

a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
b. Pasal 342 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
    2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
    3) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung diharapkan dapat mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, dan mampu merespon perubahan dan perkembangan keadaan.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat.
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
   e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa:
   a. Perlunya koreksi terhadap Pendapatan Daerah dan Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Masih terdapat ketidakselarasan/kesesuaian muatan antar RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
   c. Masih terdapat ketidakselarasan perencanaan kerangka pendanaan antara RPJMD, Renstra serta RKPD.
   d. Penentuan Indikator dan Target RPJMD belum memenuhi Kriteria **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound);* atau spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis dan relevan berbatas waktu.
   e. RPJMD dan Renstra Belum disusun Dengan kerangka berfikir logis.
   f. Perencanaan anggaran belum berdasaran prioritas dan tema pembangunan yang berkenaan.

Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Belitung oleh Kementerian PAN dan RB dengan rekomendasi sebagai berikut :

1) Memperbaiki Indikator yang belum memenuhi kriteria *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound);*
2) Mengintegrasikan penyusunan perencanaan kinerja hingga perjanjian kinerja level tertentu untuk menunjang kinerja daerah;
3) Melaksanakan pengukuran berkala terhadap pencapaian target- target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga level ynag paling rendah;
4) Memperbaiki laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah OPD) supaya menyajikan analisis faktor/penghambat capaian kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah agar memberikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja sebagai umpan balik untuk mendorong perbakan kinerja tahun berikutnya;
5) Membuat pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data yang terbaharui (*update);*
6) Melakukan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengakomodir analisis kondisi serta rekomendasinya secara spesifik perkomponen, sehingga kualitasnya optimal;
7) Membuat analisa capaian supaya memadai, relevan dan spesifik menganalisis penyebab keberhasilan/hambatan tiap sasaran kinerja; dan
8) Memperhatikan progres/tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Belitung tahun 2018.

Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung bertujuan untuk memberikan pedoman pembangunan daerah yang merespon perkembangan daerah dan masyarakat, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Implikasi penerapan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Implikasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung juga mengalami perubahan. Bersamaan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

juga harus diterapkan dalam perencanaan pembangunan maupun keuangan daerah. Penerapan peraturan tersebut akan mempengaruhi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, yang semula hanya terdiri dari program dan kegiatan, maka saat ini terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, terkait dengan komponen Belanja Daerah pada APBD juga mengalami perubahan. Belanja yang semula diklasifikasikan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berubah menjadi Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung akan menerapkan amanat peraturan sebagaimana diuraikan diatas. Penerapan tersebut juga diikuti dengan perubahan Rencana Strategis seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang semula diatur dalam RPJMD dan Renstra PD akan diubah seluruhnya, mulai klasifikasi, kode, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020.

Dengan demikian, Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD Kabupaten Belitung akan berpedoman pada RKPD, untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu.

2. Implikasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan menerapkan kerangka berfikir logis serta memperbaiki kelemahan indikator kinerja pemerintah dan perangkat daerah dengan suatu kerangka berfikir yang lebih konstruktif dan saling beririsan. Perubahan ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki serta menindaklanjuti hasil evaluasi Kementrian Apartur Negara (Kemenpan) dan evaluasi Inspektorat Kabupaten Belitung dan Inspektorat Provinsi.
3. Implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, perubahan RPJMD Kabupaten Belitung diharapkan akan mendorong dan mempercepat pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum, dan daya saing daerah. Indikator-indikator tersebut akan dilanjutkan sampai dengan akhir periode RPJMD dan tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkan/dilengkapi dengan indikator kinerja lainnya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Belitung menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan Perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan Teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan Atas-Bawah (*Top* Down) dan Bawah-Atas (*Bottom* Up)** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi hingga Nasional.

RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, antara lain:

a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
   1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
   2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
   3) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Kabupaten Belitung diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Belitung serta terdapat beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Kabupaten Belitung. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

Tabel 1.1
Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
	Visi	Visi
	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023
	Misi	Misi
1.	Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan
2.	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	3. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
6.	Penegakan Sistem Hukum Yang BebasKorupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya	
7.	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	
8.	Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya	
9.	Sinergi Pemerintahan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	

1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas

untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Tabel 1.2
Keselarasan Hubungan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
	Visi	Visi
	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi	Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023
	Misi	Misi
1.	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan
2.	Meningkatkan kesehatan masyarakat	
3.	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah	2. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4.	Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	
5.	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup	
6.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	3. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan

1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan RPJPD Kabupaten Belitung

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPJMD Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap terakhir dari perencanaan pembangunan jangka panjang

tahun 2005 - 2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

Tabel 1.3
Keselarasan RPJP Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No.	RPJP Tahun 2005-2025	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
	Visi	Visi
	Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023
	Misi	Misi
1.	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
2.	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan 2. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
3.	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan RTRW

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2014 - 2034 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

Tabel 1.4
Keselarasan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No.	RTRW Tahun 2014-2034	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
	Tujuan	Visi
	mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya	Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023
	Strategi	Misi
1.	pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
2	pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup	
3.	pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah	
4.	peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
5.	pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan
6.	penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten	

1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan KLHS

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS

dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

1. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah; dan
2. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 289 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 154 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan;
2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan;
3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera;
4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas;
5. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender;
6. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi;
7. Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi;
8. Tujuan 8 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak;
9. Tujuan 9 : Infrastruktur, Industri dan Inovasi;
10. Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan;
11. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan;
12. Tujuan 12 : Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan;
13. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim;
14. Tujuan 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem

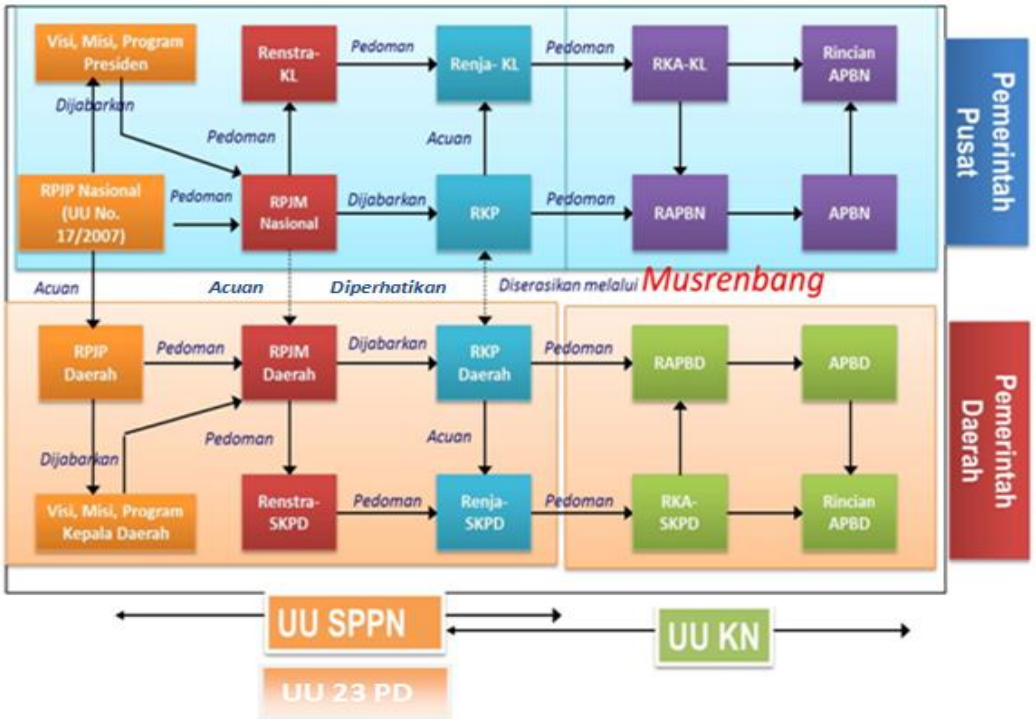
Lautan;

15. Tujuan 15 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan;
16. Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh;
17. Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

1.3.6 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target pagu indikatif program dalam RPJMD masih bersifat indikatif, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

Dalam diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Diagram Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud sebagai arah pembangunan dan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainnya) dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2. Sebagai tindaklanjut dalam rangka Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
5. Menjadi Pedoman dalam pengukuran Kinerja dan atau penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Mewujudkan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi;
7. Merumuskan indikator program beserta indikator kinerja untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan serta menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat penjelasan tentang realisasi kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Belitung.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran wajib dan mengikat.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

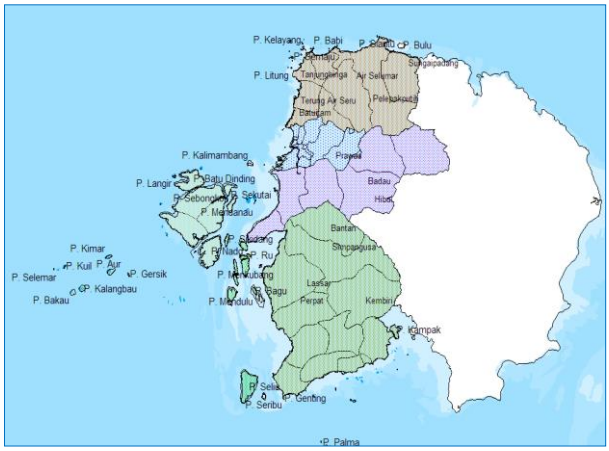
BAB IX PENUTUP

Bagian ini menyampaikan harapan pencapaian dari Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD sesuai peraturan perundangan berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah



Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari daratan dengan luas 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan yaitu 6.363 km². Luas wilayah daratan berdasarkan letak wilayah di tiap kecamatan, yaitu a) Kecamatan Membalong dengan luas wilayah 909,55 km²; b) Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 378,45 km²; c) Kecamatan Badau dengan luas wilayah 458,20 km²; d) Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 413,99 km²; dan e) Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 133,50 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08'-107°58' BT dan 02°30'-03°15' LS, dengan batas wilayah meliputi :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 163 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau di setiap kecamatan digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1 Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Jumlah Pulau (Buah)
(1)	(2)	(3)
1.	Membalong	35
2.	Tanjungpandan	17
3.	Sijuk	55
4.	Badau	18
5.	Selat Nasik	38
	Jumlah	**163**

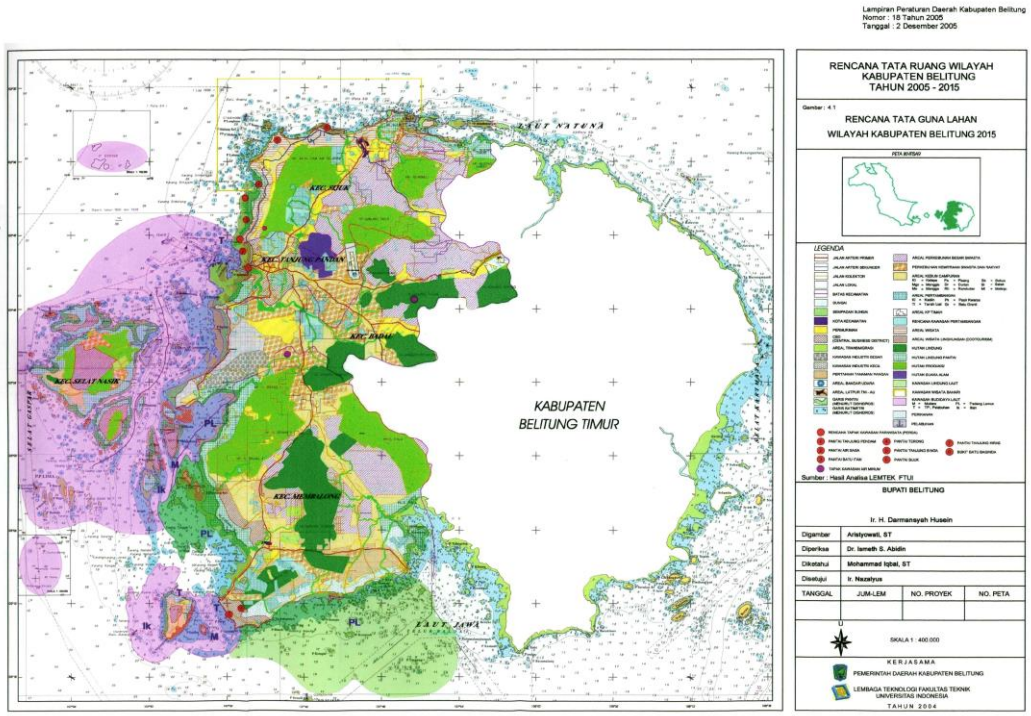
Sumber data : Belitung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan kondisi topografi, daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Daerah pedalaman Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit yang kemudian membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai, sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungai yang berbentuk seperti pohon. Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865,0 ha atau 56,98 % dari luas Kabupaten Belitung.

Batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km² atau 5,82 % dari luas Kabupaten Belitung. Daerah aliran sungai yang dimiliki Kabupaten Belitung meliputi :

a. Sebelah Utara oleh Daerah Aliran Sungai Buding;
b. Sebelah Selatan oleh Daerah Aliran Sungai Pala dan Kembiri;
c. Sebelah Barat oleh Daerah Aliran Sungai Brang dan Cerucuk.

Kabupaten Belitung memiliki iklim tropis dan basah dengan variasi hujan bulanan antara 0,00 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai dengan 25 hari setiap bulannya.



Gambar 2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung 2014 – 2034

Mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034, maka rencana pola ruang Kabupaten Belitung meliputi:

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Lindung

   Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan ini terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 39.306 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam) hektar dan terletak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

   Kawasan Perlindungan setempat terdiri dari :

   a. Sempadan pantai, sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tersebar di wilayah Kabupaten.

b. Sempadan sungai.
c. Sempadan sekitar kolong dan/atau waduk yang diperuntukkan sebagai sumber air baku dan/atau kawasan mata air.
d. Ruang terbuka hijau pantai terdapat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk.

3. Kawasan Hutan Konservasi

Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan ini terdiri atas kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Gunung Lalang seluas kurang lebih 2.590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh) hektar.

4. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan ini terdiri dari : Bangunan Gedung Eks. Kantor Pusat PT. Timah (Jam Gede); Wisma Bougenville (Bekas Rumah *Hoofadministratur*); Eks *Chineesche Hospital*; RSUD Kab. Belitung (Eks *Europeesch Kliniek*); Rumah Tipe Kolonial I; Rumah Tipe Kolonial II; Museum Pemerintah Kabupaten Belitung; Wisma Pantai; Bekas Kapel Regina Pacis; Eks *Societeit*; Rumah Kapiten Pang Tjong-Toen; Kelenteng Hok Tek Che; Kian Sien; SMPN 1 Tanjungpandan (Eks *Holland Indisch School*); Kantor Dinas P dan K Kabupaten Belitung; Gedung PWRI (Eks *Tuindienst*); Eks. Kantor Asisten Residen (Dinas P dan K); Kantor Kodim 0414 Garuda Dempo; Galangan Kapal (*Dockyard*); Wisma Dian (Benteng Kuehn); Gedung Nasional; Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung); *Kherkhof* (Pemakaman Belanda); Situs Makam KA. Rahat; Situs Bukit Luday; Mercusuar Pulau Sumedang; Situs Lempak Tuk Layang; Museum Badau; Makam Datuk Mayang Geresik; Situs Kota Tanah Cerucuk (Cakraningrat X); Makam Tuk Kundo; Struktur Gerbang Bentek Kenupuk; Situs Gunung Tajam (Makam Syech Abubakar Abdullah); Situs Mentikus; Masjid Al Ikhlas; Kelenteng Hok Tek Che; Mercusuar Pulau Lengkuas; Situs Padang Kelarin; Situs Padang Pendam; Kelenteng Piet Tie Miauw; dan Mercusuar Tanjung Lancur.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

   Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi :

   a. Banjir, terdapat di Kelurahan Parit, Kelurahan Kampung Damai, Desa Air Raya, Desa Badau, Desa Membalong, dan Desa Sijuk.
   b. Angin puting beliung, terdapat di Desa Padang Kandis, Desa Pelepak Putih, Desa Kacang Butor, Desa Perawas, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Juru Seberang, dan Desa Pegantungan.
   c. Banjir rob, tersebar di sekitar muara sungai Desa Cerucuk, sepanjang pantai Air Saga, Desa Juru Seberang, Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan, Desa Padang Kandis, Desa Mentigi, Desa Tanjung Rusa, Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Pulau Gersik, Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Sumedang
   d. Abrasi/erosi, tersebar di sepanjang pantai Air Saga, Juru Seberang, Sungai Samak, Pegantungan, Dudat, Padang Kandis, Mentigi, Tanjung Rusa, Keciput, Tanjungtinggi, Pulau Gersik, Pulau Sumedang, Pulau Buntar, Suak Gual dan Pulau Kuil.
   e. Badai laut tropis, tersebar di perairan utara pulau Belitung, pemukiman pulau-pulau dan kawasan pesisir pantai yang *mangrove* dan karang rusak.
   f. Petir, terdapat di Desa Tanjung Rusa, laut sekitar Desa Pegantungan, Batu Itam, Tanjung Binga, Keciput dan Sijuk.
   g. Kebakaran, tersebar di Kecamatan Tanjungpandan dan Desa Suak Gual (daerah gambut).

6. Kawasan Lindung Geologi

   Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki keunikan alam batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi yang perlu dilindungi.

7. Kawasan Lindung Lainnya

   Kawasan Lindung Lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah, yang meliputi :

   a. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Pohon Kruing di Air Batu Buding, pohon Blangeran (*Shorea belangeran*) di hutan produksi Batu Itam Air Gelarak, dan pohon Bulin di Petaling; dan
   b. Kawasan Habitat Satwa Tupai Selat Nasik di Selat Nasik, Pelile'an (*Tarsius Bancanus Saltator*) di Kecamatan Badau.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, termasuk di dalamnya diperuntukan sebagai hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah seluas kurang lebih 41.530 (empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdiri atas :
   a) Pertanian lahan basah terdiri atas :
      i. Budidaya tanaman pangan kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar dengan luas lahan sawah 2.000 (dua ribu) hektar dan luas lahan palawija 1.000 (seribu) hektar yang tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Membalong dengan irigasi sepanjang 40 km (40.000 m);
      ii. Budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong, dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) hektar.
   b) Pertanian lahan kering, terdiri atas :
      i. Kawasan budidaya tanaman pangan hotikultura dan palawija seluas 3000 (tiga ribu) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong. dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) hektar.
      ii. Perkebunan besar swasta dengan luas kurang lebih 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar yang terdiri dari perkebunan besar swasta komoditas kelapa sawit 30.000 (tiga puluh ribu) hektar dan perkebunan besar swasta komoditas non sawit 5000 (lima ribu) hektar terletak di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan

Kecamatan Sijuk.

iii. Kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 31.090 (tiga puluh satu ribu sembilan puluh) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.

3. Pengembangan kegiatan peternakan, terdiri atas :
   a) Budidaya peternakan skala sedang dan besar menurut jenis ternak tersebar di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.
   b) Rumah Pemotongan Hewan Terpadu seluas lebih kurang 5 (lima) hektar terletak di Desa Juru Seberang.
4. Kawasan Peruntukan Perikanan.
   a) Kawasan perikanan tangkap, terletak di perairan umum daratan tersebar di seluruh kecamatan.
   b) Kawasan budidaya perikanan, terdiri atas :
      i. Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luas lebih kurang 249,78 (dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan.
      ii. Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 179,7 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh) Hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan
   c) Kawasan pengolahan hasil perikanan, terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.
5. Kawasan Minapolitan, terdiri dari :
   a) Zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan; dan
   b) Zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Badau.
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan :
   a) Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan, luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) hektar meliputi wilayah darat terdapat di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.

b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan, luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari yang berada di luar kawasan hutan seluas kurang lebih 29.900 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar dan potensi yang berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 10.564 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat) hektar.

7. Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari :
   a) Kawasan industri, dengan luas kurang lebih 1.414 (seribu empat ratus empat belas) hektar terletak di Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan Kecamatan Badau, dan Desa Bantan Kecamatan Membalong.
   b) Area industri berbasis produksi, terletak di seluruh kecamatan.
   c) Pengembangan industri kecil dan menengah, tersebar diseluruh kecamatan.
   d) Pengembangan industri rumah tangga, tersebar diseluruh kecamatan.
8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

   Kawasan Peruntukan Pariwisata memiliki luas kurang lebih 11. 602 (sebelas ribu enam ratus dua) hektar, meliputi:
   a) Kawasan Pariwisata Alam, terdiri atas :
      i. Pariwisata alam pantai, meliputi : Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Binga, Pantai Secupak, Pantai Mabai, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Pendaunan Indah, Pantai Penyaeran, Pantai Batu Rakit, Pantai Marina, Pantai Bebilai, Pantai Siantu, Pantai Batu Bukit, Pantai Sengkelik, Pantai Batu Bedil, Pantai Tanjung Genting, Pantai Tanjung Rusa, Pantai Mentigi, Pantai Tanjungpendam, Pantai Cawat, Pantai Cepun, Pantai Tanjung Kiras, Pantai Teluk Gembira, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang, Pantai Awan Mendung, Pantai Pulau Bayan, Pantai Pegantungan, Pantai Pasir Panjang, Pantai Tanah Tinggi, dan Pantai Gilang.
      ii. Pariwisata alam pulau, meliputi : Pulau Kera, Pulau Burung, Pulau Pasir, Pulau Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Aji, Pulau Siantu, Pulau Buluh/ Mempalik, Pulau Kemulutan Besar, Pulau Kemulutan Kecil, Pulau Kambing, Pulau Rengit, Pulau Naduk, Pulau Batu Dinding, Pulau Kalamoa, Pulau Lima, Gugusan Pulau di Desa Juru Seberang, Pulau Mentikus, Pulau Seliu, Pulau Gersik, Pulau

Kalimambang, Pulau Sekupuk, Pulau Sekudang, Pulau Kampak, Pulau Katan, Pulau Kepayang, Pulau Batu Layar, Pulau Gusong Are, Pulau Bayan, Pulau Emperut, Pulau Genting, Pulau Pelema Besar, Pulau Pelema Kecil, Pulau Tupai, Pulau Seribu, Pulau Kapak, pulau Betangan, pulau Liak Besar, Pulau Liak Kecil, Pulau Belatuk, Pulau Sebongkok, Pulau Sepindang, Pulau Sekutai, Pulau Piling, Pulau Punai dan pulau-pulau lainnya.

iii. Pariwisata alam sungai, meliputi: Sungai Petaling, Sungai Cerucuk, Sungai Padang, dan Sungai Brang.

iv. Pariwisata alam lainnya, meliputi : Bukit Batu Baginde, Bukit Batu Telaga Bulan, Goa Nek Santen, Bukit Paramont, Air Terjun Gurok Beraye, Hutan Kemasyarakatan Desa Juru Seberang, Hutan Kemasyarakatan Munsang, Hutan Produksi Konversi Tanjung Siantu, Goa di Juru Seberang, Pemandian Alam Jerry, Pemandian Tirta Marundang Indah, Pemandian Suci Indah, Batu Siang, Air Terjun Gunung Kubing, Air Lembung Dalam dan Air Terjun**,** Batu Mentas *Sanctuary*, Danau Kaolin Kolong Murai**,** Taman Hiburan Kolong Keramik,Desa Wisata Tanjung Tinggi, Kampong Oranye, Rindu Kampung, Mercusuar Tanjung Lancur.

b) Kawasan Pariwisata Budaya, terdiri atas :

i. Kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Membalong meliputi: Situs Ai' Labu (makam KA Rahat/Depati Tjakraningrat VIII), Situs Luday dan Membalong (makam Raja Belantu dan keturunan), Situs Lempak Tuk Layang, Mercusuar Pulau Sumedang.

ii. Kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Badau meliputi : Situs Kota Tanah Cerucuk (makam KA Hatam/Depati Tjakraningrat VII dan makam KA Muhammad Saleh/Depati Tjakraningrat IX), Kawasan Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik) dan Museum Badau, Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah) dan Situs Parit Gunong (makam Tuk Kundo).

iii. Pariwisata budaya di Kecamatan Sijuk meliputi : Desa Balitung, Situs Mentikus Air Selumar, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Mercusuar Pulau Lengkuas, Situs Padang Kelaring Sungai Padang.

iv. Pariwisata budaya di Kecamatan Selat Nasik meliputi Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lancur).

v. Pariwisata budaya di Kecamatan Tanjungpandan meliputi Museum Pemkab Belitung, Rumah Adat Belitung, Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. *NV GMB* Jam Gede, Rumah tipe kolonial I dan tipe kolonial II, Benteng Penutuk Perawas, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, *Kian Sien*, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. *Societeit* Toapekong Ho A Joen, Rumah Tuan Kuase, Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. *Europeesche Kliniek*, Museum Tanjungpandan, eks Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks *Tuindienst*, Eks *Landraad*, Eks *Holland Indisch-School* (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen (Kantor KODIM), Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn, Situs Dockyard, Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda), Mesjid Al Mabrur, Eks Kantor Asisten Residence, Gedung Nasional Padang Miring.

c) Kawasan Pariwisata Buatan, tersebar di seluruh kecamatan.

d) Kawasan Agrowisata, meliputi kebun durian Dusun Aik Gede, Kebun Buah Badau, Taman Kehati Aik Selumar, Taman Kehati Desa Lassar.

9. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri atas :

a) kawasan permukiman perkotaan, dengan luas kurang lebih 9.170 (sembilan ribu seratus tujuh puluh) hektar, terletak di kawasan perkotaan Tanjungpandan yang merupakan *Central Bussines District.*

b) kawasan permukiman perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.020 (dua puluh ribu dua puluh) hektar terletak di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik.

10. Kawasan Peruntukan Lainnya, adalah kawasan latihan tempur *Air Weapon Range (AWR)* TNI Angkatan Udara Republik Indonesia mendukung pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Hektar di Desa Buding Kecamatan Badau dan Kawasan Radar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia di Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk.

c. Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:

1. Kawasan strategis provinsi sebagaimana pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdiri atas:

a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Selat Nasik,
b. Kawasan pengembangan ekonomi secara khusus Suge, meliputi pelabuhan Laut Regional Tanjung Batu dan Kawasan Industri Terpadu Suge sebagai simpul transportasi barang dan orang skala nasional serta kegiatan industri yang berpotensi sebagai pemicu ekonomi wilayah provinsi.
c. Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk.
d. Kawasan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan.
e. Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk.
f. Kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk.
g. Cagar alam Gunung Lalang di Kecamatan Tanjungpandan.
h. Taman Kehati di Kecamatan Sijuk.

2. Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas :
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai telah dijelaskan di atas, meliputi:

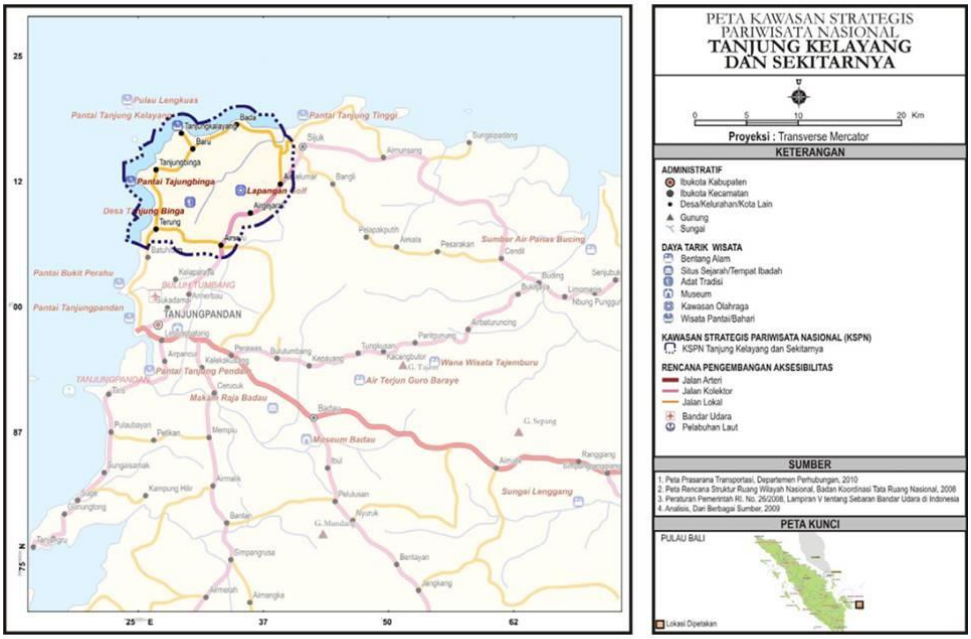
a. Kawasan Perkotaan Tanjungpandan sebagai *Central Bussines District (CBD);*
b. Kawasan Wisata Kecamatan Sijuk dan Membalong;
c. Kawasan Industri Suge dan Kawasan Pelabuhan Regional Tanjung Batu sebagai kawasan pengembangan ekonomi secara khusus;
d. Kawasan agropolitan Kecamatan Membalong;
e. Kawasan minapolitan yang terdiri dari zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan dan zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Badau;
f. Kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sijuk, Badau dan Membalong;
g. Kawasan pengembangan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin;
h. Kawasan pariwisata.

Sebagai pengejawantahan dari penentuan sebagai kawasan wisata

sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pemerintah pusat menetapkan kawasan strategis nasional, antara lain sebagai berikut:

a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kecamatan Sijuk;
b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kecamatan Sijuk;
c. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik;
d. Geopark Nasional.

   Substansi pengembangan Geopark adalah suatu kawasan yang dapat memberikan perlindungan geologi dan geomorfologi secara berkelanjutan. Hal tersebut merupaan faktor utama dalam pengembangan kepariwisataan daerah.



Gambar 2.2 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjungkelayang dan Sekitarnya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

a. Kawasan makam bersejarah yaitu Situs Kota Tanah Cerucuk (makam Depati Tjakraningrat VII dan IX), Situs Ai' Labu (makam KA Rahat), Situs Luday (makam Datuk Ahmad Mempawah), Situs Membalong (makam KA Deraip), Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik), Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah), Situs Parit Gunung (makam Tuk Kundo), Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda

b. Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. NV GMB Jam Gede, Rumah Tipe Kolonial I dan Rumah Tipe Kolonial II, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, Kian Sien, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. Societeit Toapekong Ho A Jun, Rumah Tuan Kuase (Wisma Bougenville), Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. Europeesche Kliniek (RSUD Kab. Belitung), Museum Tanjungpandan, Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks. Tuindienst (Sekretariat PWRI), Eks Landraad (UPTD TK/SD Tanjungpandan), Eks. Holland Indisch-School (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen(Kantor KODIM), Eks. Districthoofd (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn;

c. Kawasan bersejarah lainnya yaitu Museum Badau, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Situs Mentikus Air Selumar, Mercusuar Pulau Lengkuas, Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lacur), Mercusuar Pulau Sumedang

d. Kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk; dan

e. Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Sijuk

Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

a. Kawasan hutan konservasi Gunung Lalang;

b. Kawasan konservasi perairan di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;

c. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Sijuk;

d. Kawasan keanekaragaman hayati di Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong;

e. Kawasan rawan bencana alam

f. Kawasan perlindungan sumber air baku

Adapun Struktur Ruang Kabupaten Belitung meliputi:

a. Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, sistem prasarana wilayah di Tanjungpandan; PKL di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik; dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di pusat-pusat desa/kelurahan sebagai pusat pelayanan bagi desa/kelurahan itu sendiri atau beberapa desa/kelurahan di

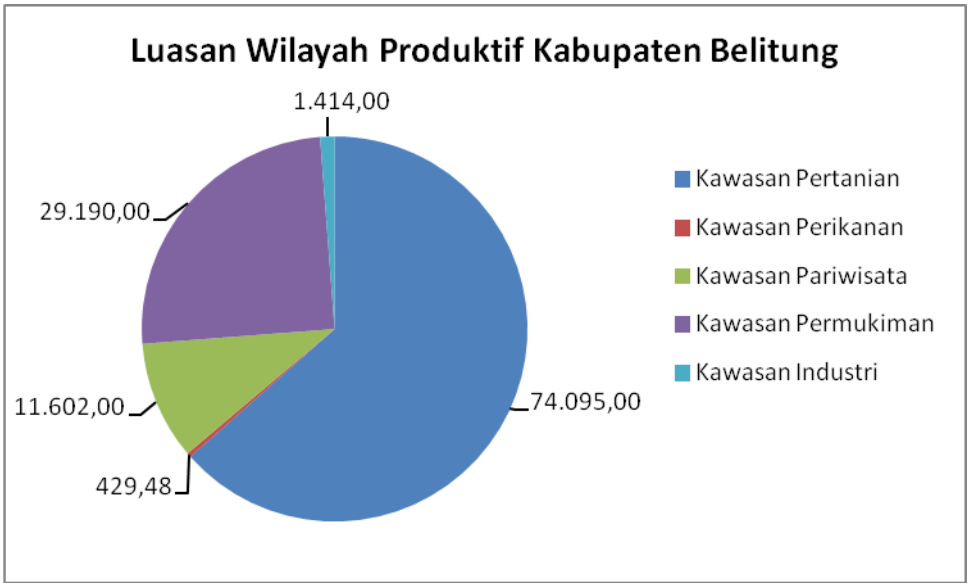
sekitarnya. Adapun Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat nasik mempunyai pusat pelayanan lingkungan yang berada di Desa nya masing-masing yaitu Kecamatan Sijuk yang dilayani oleh Desa Sijuk, Kecamatan Badau oleh Desa Badau, Kecamatan Membalong oleh Desa Membalong dan Kecamatan Selat Nasik oleh Desa Selat Nasik. Jadi keempat kecamatan tersebut selain Pusat Kegiatan Lokal, Kecamatan tersebut diatas juga menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani beberapa desa disekitarnya.

b. Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi:

1. Sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas sistem jaringan jalan, jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
2. Sistem jaringan prasarana energi, terdiri atas jaringan batubara, minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan prasarana kelistrikan.
3. Jaringan telekomunikasi terdiri atas penyelenggaraan jaringan tetap, penyelenggaraan jaringan bergerak.
4. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air terdiri atas sistem wilayah sungai, sistem daerah irigasi dan sistem jaringan air baku.

   Sistem prasarana lainnya, terdiri atas sistem pengelolaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah, pengembangan prasarana perikanan, dan pengembangan prasarana pemakaman umum.

Sementara untuk kawasan produktif yang ada di Kabupaten Kabupaten Belitung meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan industri. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Beliung Tahun 2014 – 2034, luas kawasan produktif di Kabupaten Belitung seluas 158.558,48 Ha yang terdiri dari kawasan pertanian seluas 74.095,00 Ha, luas kawasan perikanan sebesar 429,48 Ha, luas kawasan pariwisata sebesar 11.620 Ha, luas kawasan pemukiman sebesar 29.190 Ha dan luas kawasan industri sebesar 1.414 Ha. Maka luasan seluruh wilayah produktif sebesar 117.028,48 atau sebesar 73,81% dari luas kawasan budidaya yang diusahakan menjadi lahan produktif.



Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (diolah)

Gambar 2.3 Luasan Wilayah Produktif Kabupaten Belitung berdasarkan RTRW Tahun 2014-2034

Tabel di bawah ini menggambarkan klasifikasi peruntukan wilayah budidaya sesuai dengan luasannya berdasarkan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

Tabel 2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Belitung

No.	Uraian	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	41.530,00
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	
	A. Pertanian Lahan Basah	
	- Budidaya Tanaman Pangan	3.000,00
	- Budidaya Hortikultura	2.000,00
	B. Pertanian Lahan Kering	
	- Kawasan Budidaya Tanaman Pangan Holtikultura dan Palawija	3.000,00
	- Perkebunan Besar Swasta	35.000,00
	- Kawasan Perkebunan Rakyat	31.090,00
	C. Pengembangan Kegiatan Peternakan	5,00
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	- Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau	249,78
	- Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	179,70
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40.464,00
5	Kawasan Peruntukan Industri	1,414,00
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	11.602,00
7	Kawasan Peruntukan Permukiman	
	- Kawasan Permukiman Perkotaan	9,170,00
	- Kawasan Permukiman Perdesaan	20.020,00
8	Kawasan Peruntukan Lainnya	298,00

Sumber : RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (diolah)

Tabel 2.3 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Belitung

No	Uraian	Luasan (Ha)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kawasan Budidaya	199.022,48	
2	Kawasan Pertanian	74.095,00	37,23
3	Kawasan Perikanan	429,48	0,22
4	Kawasan Pariwisata	11.602,00	5,83
5	Kawasan Permukiman	29.190,00	14,67
6	Kawasan Industri	1.414,00	0,71

Sumber : RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, luasan wilayah produktif pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya, Kawasan pariwisata buatan dan Kawasan pariwisata Agrowisata. Wilayah produktif permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan yang terletak di kawasan perkotaan Tanjungpandan yang merupakan *Central Bussines District* dan kawasan permukiman perdesaan yang terletak di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik. Sedangkan wilayah produktif industri terdiri dari kawasan industri, area industri berbasis produksi, pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengembangan industri rumah tangga.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Belitung terletak di sebelah timur pulau sumatera. Secara geografis dan kondisi geologi, Kabupaten Belitung bukan berada pada gugusan lempeng bumi yang rawan gempa, namun tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Belitung juga berpotensi terkena bencana yang lain berdasarkan hasil kajian resiko bencana kabupaten belitung tahun 2021-2025 terdapat 8 (delapan) jenis bencana yaitu :1) Banjir 2) Banjir Bandang 3) Gempabumi 4) Tanah longsor 5) Kekeringan 6) Cuaca Ekstrim 7) Gelombang Ekstrim dan Abrasi 8) Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bencana di Kabupaten Belitung dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko. Penentuan potensi bencana mengacu kepada catatan sejarah kejadian bencana pada BPBD Kabupaten Belitung dan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Belitung

Pengkajian resiko terhadap 8 (delapan) potensi bencana tersebut menghasilkan tingkat resiko untuk semua potensi bencana di Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung Tahun 2021-2025.

Kajian risiko bencana meliputi komponen-komponen yang dapat mempengaruhi munculnya risiko setiap bancana yaitu **komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas**. Kajian tingkat bahaya dilakukan untuk menentukan besarnya potensi bahaya di Kabupaten Belitung. Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

1. Tingkat Bahaya dan Resiko

Adapun Tingkat Bahaya dan Resiko bencana di Kabupaten Belitung dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Potensi Bahaya Di Kabupaten Belitung

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	BANJIR	22.936,70	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	2.380,14	TINGGI
3	GEMPA BUMI	219.944,00	RENDAH
4	TANAH LONGSOR	12.584,97	RENDAH
5	KEKERINGAN	219.944,00	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	180.881,60	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	9.949,50	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	182.626,58	TINGGI

Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa hasil kajian bahaya di Kabupaten Belitung untuk bencana banjir banjir bandang, dan Kebakaran hutan berada kelas Tinggi.

Resiko bencana Kabupaten Belitung per kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Risiko Bencana Kabupaten Belitung Tahun 2021-2025

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
	BADAU		
1	BANJIR	5.281,74	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	652,23	TINGGI
3	GEMPA BUMI	49.051	RENDAH
4	TANAH LONGSOR	4.226,22	RENDAH

5	KEKERINGAN	49.051,00	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	40.649	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	1.098,72	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	43.620,85	TINGGI
	MEMBALONG		
1	BANJIR	11.236,23	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	1.727,91	TINGGI
3	GEMPA BUMI	91.037	RENDAH
4	TANAH LONGSOR	6.129,54	RENDAH
5	KEKERINGAN	91.037,00	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	83.001	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	3.420,45	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	84.454,58	TINGGI
	SELAT NASIK		
1	BANJIR	813,87	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	-	
3	GEMPA BUMI	13.350	RENDAH
4	TANAH LONGSOR	844,92	RENDAH
5	KEKERINGAN	13.350,00	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	11.075	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	3.554,94	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	11.730,82	TINGGI
	SIJUK		
1	BANJIR	2.912,60	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	-	
3	GEMPA BUMI	45.200	RENDAH
4	TANAH LONGSOR	1.160,91	RENDAH
5	KEKERINGAN	45.200,00	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	34.876	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	1.433,34	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	33.633,88	SEDANG
	TANJUNGPANDAN		
1	BANJIR	2.692,26	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	-	
3	GEMPA BUMI	21.306	RENDAH
4	TANAH LONGSOR	223,38	RENDAH
5	KEKERINGAN	21.306,00	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	11.281	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	445,05	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	93186,45	TINGGI

Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa Kecamatan Badau mempunyai resiko Banjir dan Banjir Bandang serta Kebakaran hutan Kelas TINGGI, Kecamatan Membalong, Banjir Bandang dan Kebakaran Hutan kelas TINGGI, Kecamatan Selat Nasik, Kebakaran Hutan Kelas TINGGI, Kecamatan Tanjungpandan, Banjir dan Kabakaran Hutan kelas TINGGI. Sedangkan kecamatan sijuk tidak ada jenis bahaya yang tinggi.

2. Kerentanan

Kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan/atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kajian kerentanan dilakukan untuk menghitung potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian berdasarkan komponen kerentanan. Komponen kerentanan terdiri dari sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan.

Dilihat dari Tingkat Kerentanan yang didasarkan pada nilai indeks kerentanan yang diperoleh dari indeks penduduk yang terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk yang terpapar dikaji berdasarkan komponen sosial budaya. Sementara itu indeks kerugian dikaji berdasarkan komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Tingkat kerentanan bencana Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6 Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Belitung

No	JENIS BENCANA	KELAS			TINGKAT KERENTANAN
		PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN	
1	BANJIR	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	GEMPA BUMI	SEDANG	RENDAH	-	SEDANG
4	TANAH LONGSOR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	SEDANG	SEDANG	-	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	RENDAH	TINGGI	TINGGI

Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa potensi penduduk terpapar bencana adalah kelas SEDANG, serta kelas keruginya kelas SEDANG dan kelas RENDAH, untuk Kerusakan lingkungan berada pada kelas TINGGI dan kelas SEDANG. Secara keseluruhan Tingkat Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan pada Tingkat Kerentanan kelas TINGGI.

Tabel 2.7 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Belitung

No	JENIS BENCANA	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KELOMPOK RENTAN (Jiwa)			KELAS
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	BANJIR	23.934	1.249	756	12	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	181	134	55	2	SEDANG
3	GEMPA BUMI	179.621	2.208	1.432	22	SEDANG
4	TANAH LONGSOR	130	140	85	1	SEDANG
5	KEKERINGAN	179.621	2.208	1.432	22	SEDANG
6	CUACA EKSTRIM	179.300	2.208	1.432	22	SEDANG
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	13.931	911	782	9	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-

Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

Dari Tabel di atas terlihat Potensi penduduk terpapar bencana di Kabupaten Belitung berada pada kelas SEDANG.

Tabel 2.8 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Belitung

No	JENIS BENCANA	KERUGIAN RUPIAH (Juta Rupiah))				KERUSAKAN LINGKUNGAN	
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	BANJIR	87.389,46	431.330,02	518.719,49	SEDANG	3.286,39	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	490,00	72.747,99	73.237,99	SEDANG	576,63	SEDANG
3	GEMPA BUMI	-	-	-	RENDAH	-	-
4	TANAH LONGSOR	1.415,00	60.191,60	61.606,60	SEDANG	614,52	SEDANG
5	KEKERINGAN		5.592.720,26	5.592.720,26	RENDAH	42.330,24	TINGGI
6	CUACA EKSTRIM	211.994,85	4.745.127,66	4.957.122,51	TINGGI	-	-
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	33.593,33	225.793,22	259.386,55	SEDANG	3.947,31	SEDANG
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	5.894.748,63	5.894.748,63	RENDAH	69.374,06	TINGGI

Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

Dari Tabel di atas terlihat potensi kerugian bencana di Kabupaten Belitung berada pada kelas TINGGI untuk Jenis cuaca ekstim, sedangkan kerusakan

lingkungan potensi TINGGI pada jenis bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan lahan.

3. Kapasitas Daerah

Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimilikinya untuk mengurangi risiko bencana

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Berikut adalah tingkat Kapasitas Bencana di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.9 Tingkat Kapasitas Bencana di Kabupaten Belitung

No	JENIS BENCANA	KELAS		TINGKAT KAPASITAS
		KETAHANAN DAERAH	KESIAPSIAGAAN	
1	Banjir	Rendah	Sedang	Sedang
2	Banjir Bandang	Rendah	Rendah	Rendah
3	Gempa Bumi	Rendah	Sedang	Sedang
4	Tanah Longsor	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kekeringan	Rendah	Sedang	Sedang
6	Cuaca Ekstrim	Rendah	Sedang	Sedang
7	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Rendah	Sedang	Sedang
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kapasitas ketahanan daerah terhadap Jenis bencana seluruhnya dalam kelas RENDAH dan Tingkat kesiapsiagaan pada kelas SEDANG dan RENDAH.

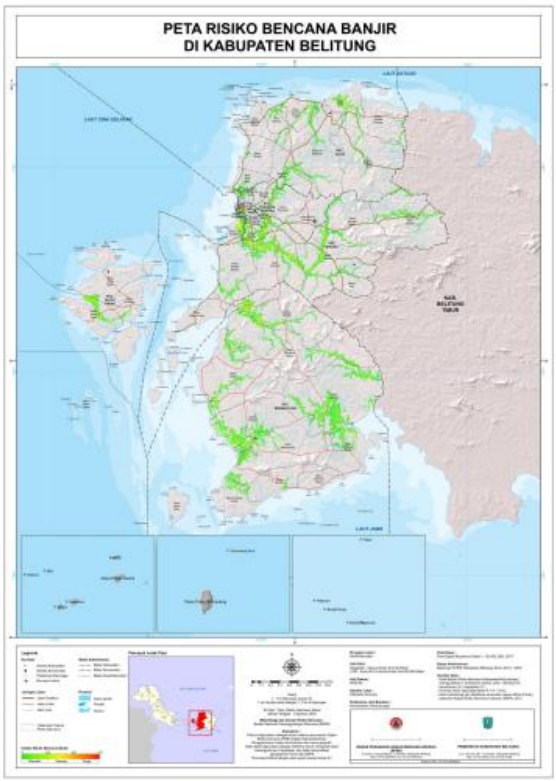
Dari hasil pengkajian dan pemeringkatan risiko yang merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ kapasitas

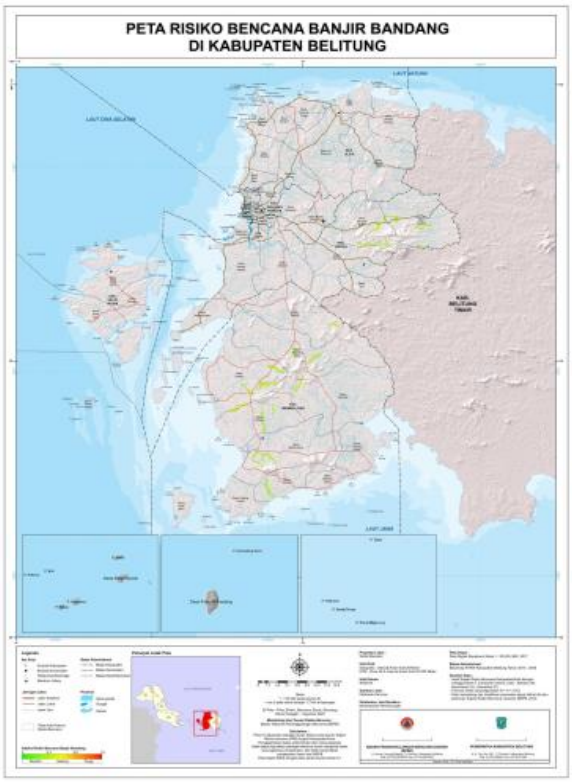
suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana di Kabupaten belitung adalah sebagaimana tabel berikut.

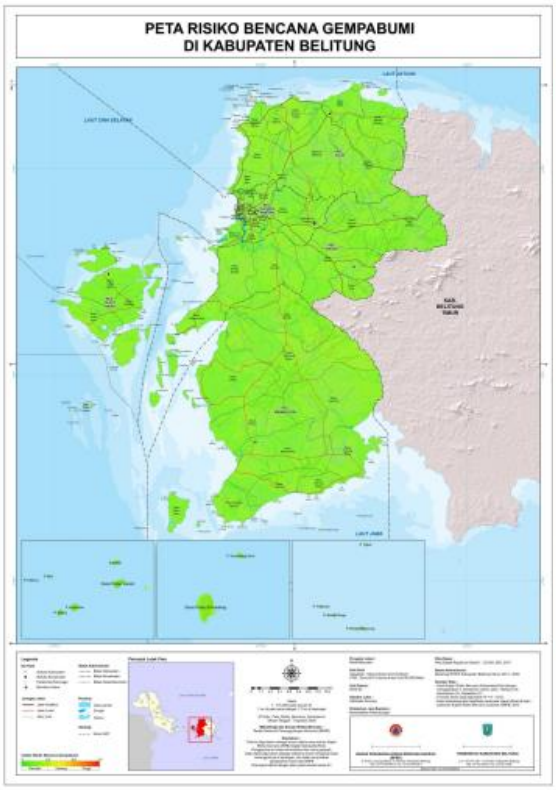
Tabel 2.10 Tingkat Resiko Bencana di Kabupaten Belitung

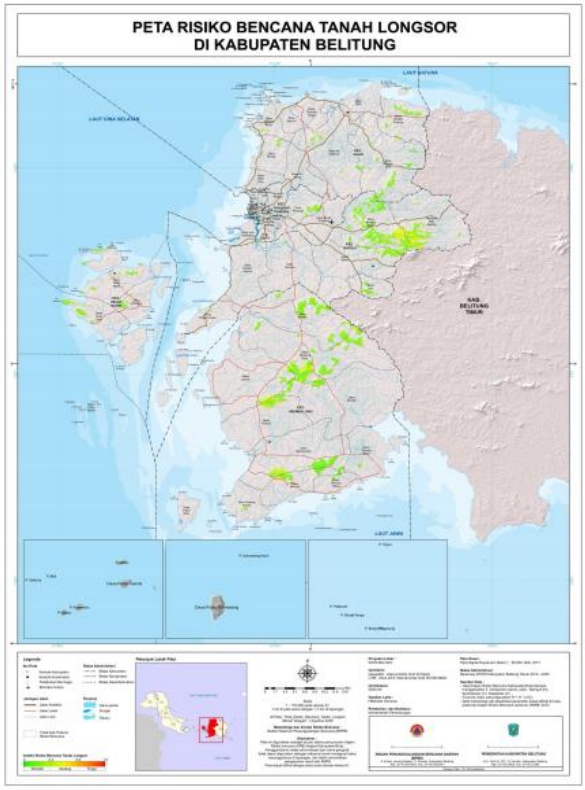
No	JENIS BENCANA	TINGKAT			
		BAHAYA	KERENTANAN	KAPASITAS	RESIKO
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Gempa Bumi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
4	Tanah Longsor	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6	Cuaca Ekstrim	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
7	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

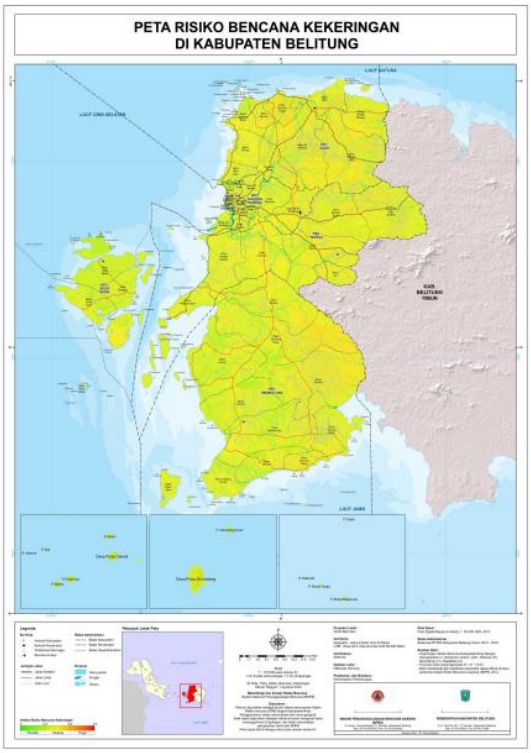
Sumber : BPPBD Kab Belitung tahun 2020

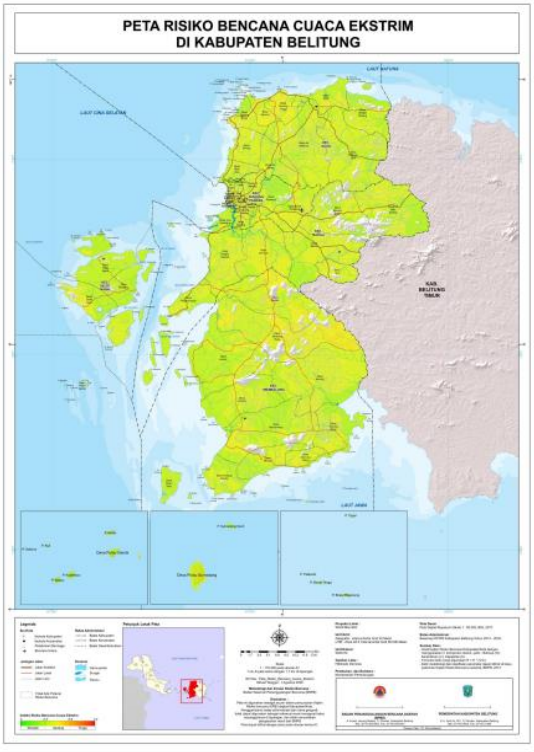


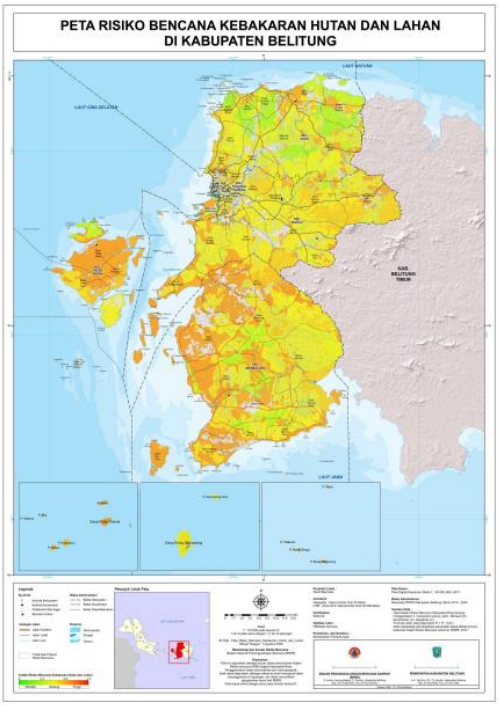


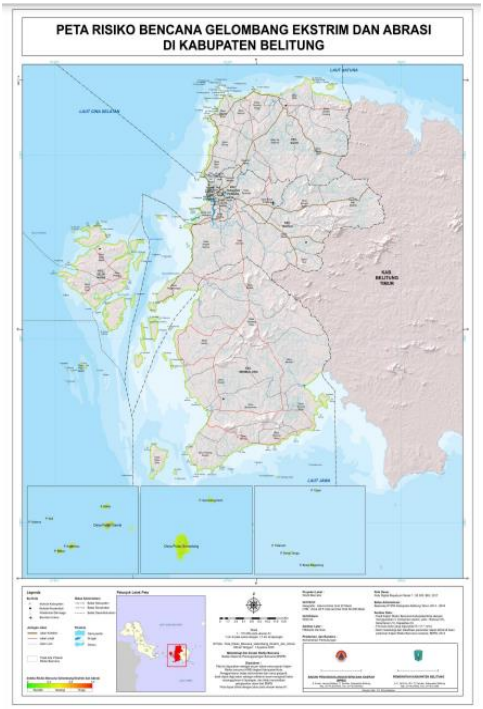

PETA RISIKO BENCANA GEMPABUMI
DI KABUPATEN BELITUNG

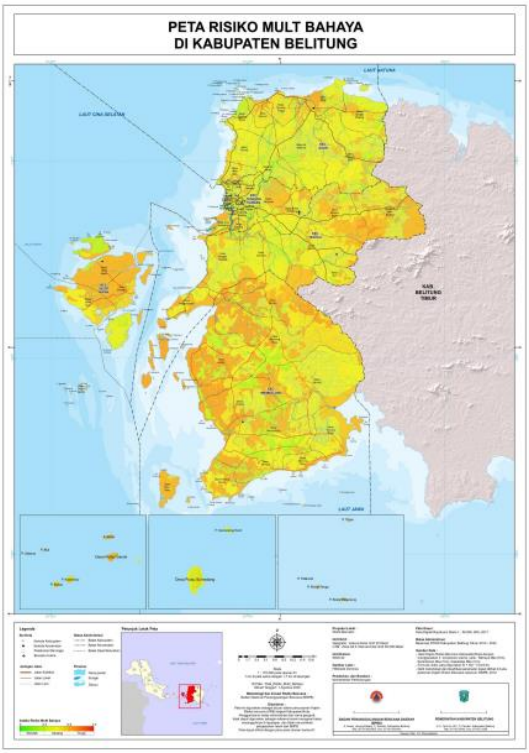

PETA RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BELITUNG


PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN BELITUNG


PETA RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM
DI KABUPATEN BELITUNG







Gambar 2.4 Peta Resiko Bencana di Kabupaten Belitung

2.1.3 Aspek Demografi

Salah satu komponen penyusun perencanaan pembangunan daerah adalah analisis kependudukan. Adapun proses perencanaan pembangunan itu sendiri mutlak memerlukan variabel demografi dan variabel pembangunan. Perubahan yang terjadi dalam jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada berbagai aspek pembangunan yang selanjutnya akan mempengaruhi dinamika kependudukan. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menerbitkan data kependudukan nasional per semester.

Selanjutnya berdasarkan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tahun 2020 semester 1 atau per tanggal 30 Juni 2020, Kabupaten Belitung memiliki jumlah penduduk sebesar 177.472 jiwa. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung masih mendominasi dan lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,62 persen dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 90.176 jiwa (50,81%) dan penduduk perempuan sebesar 87.296 jiwa (49,19%). Selain itu nilai *sex ratio* total penduduk Kabupaten Belitung adalah sebesar 103,30. Berikut data penduduk Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk	156,892	161,706	169,053	173,717	177.472
2	Komposisi menurut Jenis Kelamin:					
a.	Laki-laki	79,704	82,197	85,855	88,177	90,176
b.	Perempuan	77,188	79,509	83,198	85,540	87,296
3	Sex ratio	103.26	103.38	103.19	103.08	103.30
4	Pertumbuhan (%)	2.64	3.07	4.54	2.76	2.16
5	Tingkat kepadatan (km2)	68.40	70.50	73.70	75.74	77.37

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari 2,64 % di tahun 2016 menjadi 4,54 % pada tahun 2018. Namun perlambatan terjadi pada tiga tahun berikutnya hingga menjadi 2,16% di tahun 2020. Selain itu jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin/ *sex ratio* lebih dari 100 persen. Artinya terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Selain itu kepadatan peduduk di Kabupaten Belitung selalu mengalami peningkatan dalam rentang lima tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,83 persen tiap tahunnya.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Belitung dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor tingginya angka kelahiran yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas/ kelahiran maupun mortalitas/ kematian penduduk Kabupaten Belitung dan faktor demografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kabupaten Belitung. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan risiko bagi munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan tindak kriminal. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan hidup dari berbagai aspek.

Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2020 rata-rata mencapai 77,37 jiwa/ km^2 dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Tanjungpandan (266,92 jiwa/km^2) dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Membalong (27,91 jiwa/km^2). Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka Kecamatan Tanjungpandan termasuk dalam kategori “cukup padat” karena berada di kisaran 251 – 400 km^2. Sementara itu Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik masuk dalam kategori “tidak padat” karena kurang dari 50 jiwa per km^2. Hanya Kecamatan Sijuk yang berada dalam kategori “ kurang padat” dengan kepadatan 73,86 jiwa per km^2.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Keluraha n	Luas Daerah (km^2)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa / km^2)	Keterangan
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Membalong	12	909,550	13,049	12,340	25,389	27.91	Tidak Padat
2	Tanjungpandan	16	378,448	50,944	50,072	101,016	266.92	Cukup Padat
3	Badau	7	458,200	7,488	7,029	14,517	31.68	Tidak Padat
4	Sijuk	10	413,992	15,597	14,980	30,577	73.86	Kurang Padat
5	Selat Nasik	4	133,500	3,098	2,875	5,973	44.74	Tidak Padat
	Jumlah	**49**	**2,293,690**	**90,176**	**87,296**	**177,472**	**77,37**	**Kurang Padat**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2021

Penduduk Kabupaten Belitung tersebar di 49 Desa/Kelurahan, kondisi persebaran penduduk di Kabupaten Belitung masih belum merata, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk disetiap kecamatan sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah kecamatan yang berbeda-beda, namun permukiman penduduk terpadat terkonsentrasi di Tanjungpandan, Hal ini terjadi karena Tanjungpandan merupakan ibu kota Kabupaten dan merupakan pusat pusat perdagangan, perhotelan, rumah makan/restoran dan juga pusat pendidikan.

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Belitung adalah kecamatan Tanjungpandan sebesar 56,92 %, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Belitung secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Selat Nasik sebesar 3,37%. Pada tabel 2.5 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di setiap kecamatan dengan rasio jenis kelamin antara 102 sampai 108.

Adapun Kecamatan Selat Nasik berada di pulau tersendiri yang terpisah dari Pulau Belitung dan dengan luas wilayah yang juga tidak terlalu besar. Distribusi pertumbuhan Penduduk kabupaten Belitung per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

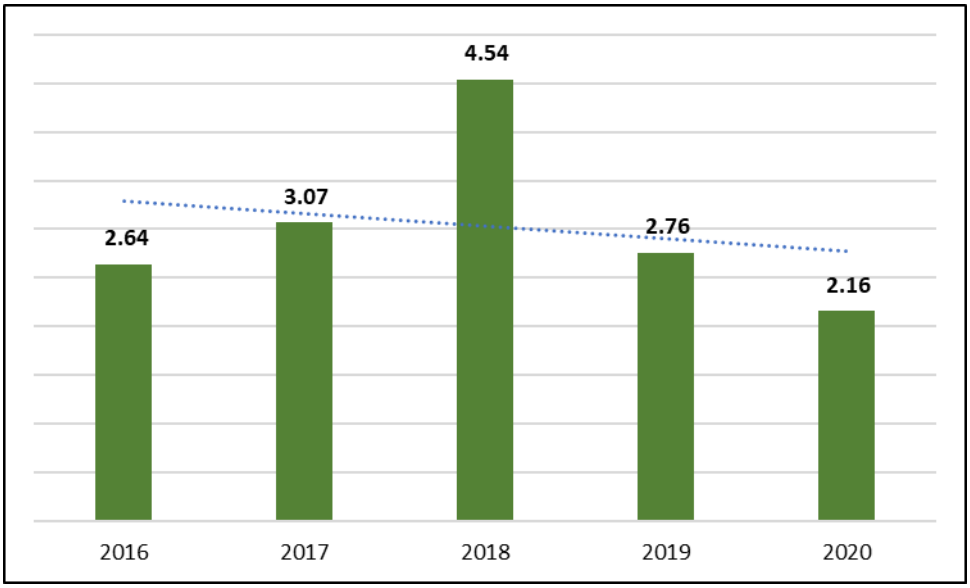
Tabel 2.13 Jumlah penduduk usia Distribusi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanjungpandan	86,539	89,889	94,441	98,233	101,016
2.	Membalong	23,537	23,904	25,039	25,226	25,389
3.	Selat Nasik	5,867	5,893	6,004	5,911	5,973
4.	Sijuk	27,805	28,559	29,477	30,091	30,577
5.	Badau	13,144	13,461	14,092	14,256	14,517
	Jumlah	**156,892**	**161,706**	**169,053**	**173,717**	**177.472**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kelahiran, tingkat kematian serta migrasi atau mobilitas.

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2021 (diolah)

Grafik di atas menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,16% dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,76%. Di tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung sempat mencapai 4,54%. Dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 2% selama periode 2016-2020, maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung dapat dikategorikan “tinggi”. Hal ini salah satunya merupakan dampak dari program pengendalian penduduk yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Adapun komposisi penduduk Kabupaten Belitung sebagian besar didominasi oleh kelompok muda, tingkat kelahiran bayi yang tinggi, kelompok balita dan remaja masih sangat besar serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Gambaran dari karakteristik penduduk ini menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0-4	12,381	11,185	12,944	12,863	13,132
2	5-9	13,417	13,833	14,486	15,569	15,873
3	10-14	13,715	13,707	13,530	14,379	15,323
4	15-19	11,852	13,589	13,618	12,167	12,826
5	20-24	12,856	13,472	13,940	14,187	14,788
6	24-29	12,713	13,264	13,472	14,029	14,136
7	30-34	13,795	13,418	13,580	13,850	13,892
8	35-39	13,807	14,803	15,496	15,679	15,217
9	40-44	12,440	12,844	13,166	13,899	14,520
10	45-49	10,306	11,193	11,932	12,145	12,252
11	50-54	9,060	8,965	9,437	9,894	10,174
12	55-59	7,223	7,617	7,991	8,374	8,480
13	60-64	5,559	5,683	6,108	6,355	6,760
14	65-69	3,576	3,859	4,302	4,732	4,607
15	70-74	2,242	2,200	2,517	2,806	2,835
16	>75	1,950	2,074	2,534	2,789	2,657
	JUMLAH	**156,892**	**161,706**	**169,053**	**173,717**	**177.472**

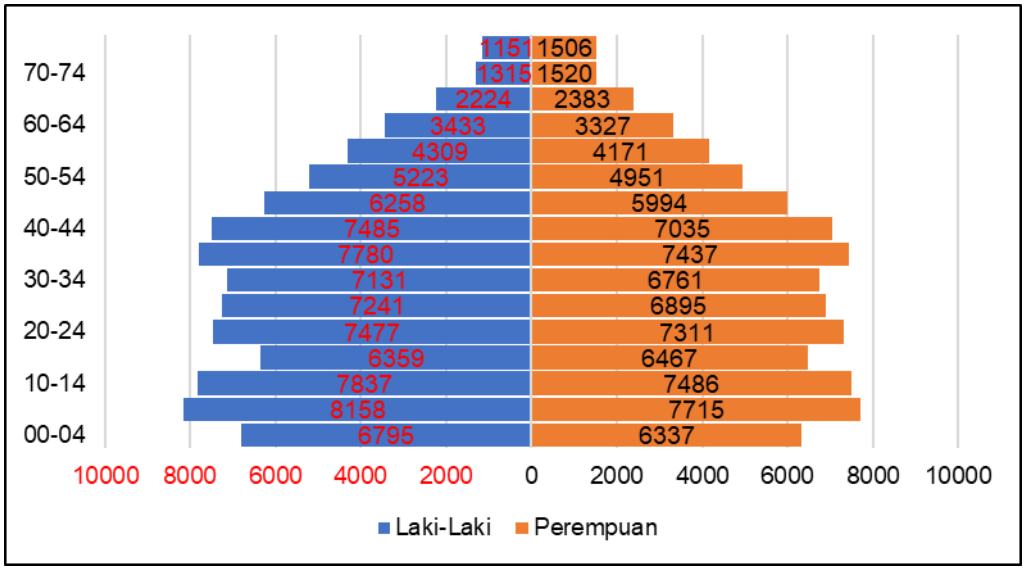
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Belitung memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor. Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan usianya pada tahun 2020, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,33%, usia muda (0-14 tahun) ada 24,98%, dan usia lanjut (65 tahun keatas) sebesar 5,69%.

Apabila ditinjau dari piramida penduduk, Kabupaten Belitung memiliki bentuk yang cenderung rata mulai dari kelompok usia 44 tahun kebawah. Hal ini

menunjukkan adanya peralihan struktur penduduk kabupaten Belitung di mana tingkat kelahiran mulai menurun walau cenderung melambat.

Grafik 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diolah)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa penduduk berusia 35-44 tahun baik laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah terbesar dari total penduduk atau 16,8%. Selain itu proporsi usia penduduk produktif mengalami peningkatan seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia muda.

Meskipun sudah mengarah ke bentuk yang lebih stasioner, piramida penduduk Kabupaten Belitung tahun 2020 masih cenderung berbentuk lebar dibawah (ekspansif), sehingga dapat digolongkan sebagai piramida penduduk muda yang dapat diartikan bahwa penduduk usia produktif/ usia kerja dan usia muda masih mendominasi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung. Dominasi jenis kelamin laki-laki tampak pada hampir semua golongan umur kecuali pada kelompok usia tua atau >65 tahun, yang menandakan bahwa perempuan cenderung hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki di Kabupaten Belitung. Adapun cekungan pada kelompok usia 15-19 tahun mengindikasikan bahwa terdapat migrasi keluar daerah untuk menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan. Dalam menyikapi hal tersebut hendaknya fokus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong terbukanya lapangan kerja dalam pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Belitung.

Struktur penduduk juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Selama periode 2016-2020 terdapat peningkatan jumlah penduduk yang lulus sarjana. Selain itu terdapat penurunan penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II karena cenderung melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Belitung dengan ijazah tertinggi berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung kecuali untuk penduduk yang pendidikannya tidak/belum tamat SD dan Tamat SD/MI/Sederajat, sedangkan penduduk yang berijazah SLTP/MTs/Sederajat, SMU/MA/Sederajat dan perguruan tinggi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sebagian besar masyarakat dengan tingkat pendidikan SD/sederajat yaitu sebesar 24,78 %, SLTP/ sederajat sebesar 14,30% dan SLTA/sederajat 19,82%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan SLTA/sederajat mengalami peningkatan hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Belitung semakin tinggi dan kesadaran penduduk untuk mengakses layanan pendidikan sudah baik.

Perbandingan persentase tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Data Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2016 – 2020

No	Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak/Belum Sekolah	30,532	28,354	29,685	31,174	33,110
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	23,938	26,124	26,942	28,913	29,875
3.	Tamat SD/Sederajat	41,733	42,752	44,089	44,225	43,986
4.	SLTP/Sederajat	22,858	24,013	24,809	25,250	25,379
5.	SLTA/Sederajat	30,387	32,127	33,485	34,543	35,175
6.	Diploma I/II	1,184	1,139	1,439	1,087	1,062
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2,332	2,560	3,424	2,908	2,996
8.	Diploma IV/Strata I	3,820	4,486	5,009	5,433	5,692
9.	Strata II	107	150	169	181	194
10.	Strata III	1	1	2	3	3
	Jumlah	**156,892**	**161,706**	**169,053**	**173,717**	**177,472**

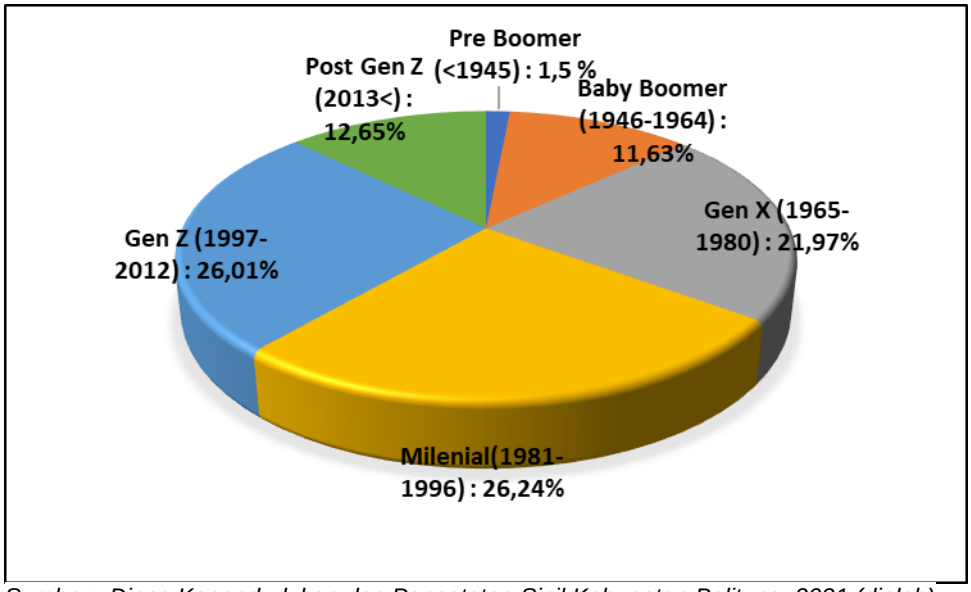
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila jika diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yang rendah hanya akan menjadi beban

bagi pembangunan disuatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertambahannya akan tetapi lebih dititik beratkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

Selain dilihat dari struktur umur dan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten Belitung juga dapat dijelaskan dari pengklasifikasian yang dibuat oleh William H. Frey dari literatur "Analysis of Census Bureau Population Estimates" (June, 2020), di mana penduduk dibagi menurut tahun lahirnya dan dikelompokkan dalam beberapa generasi. Berikut disajikan grafik Kelompok Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Generasi pada tahun 2020.

Grafik 2.3 Kelompok Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2020 Menurut Generasi



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Belitung didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z dengan proporsi masing-masing sebesar 26,24% dan 26,01% dari total penduduk. Adapun Generasi Milenial adalah kelompok penduduk yang lahir mulai tahun 1981 sampai 1996, sedangkan Generasi Z adalah kelompok penduduk yanh lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dua kelompok generasi ini termasuk dalam usia produktif yang disinyalir dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung. Kelompok berikutnya yang mendominasi ketiga adalah Generasi X yaitu sebanyak 21,97%. Sementara itu, jumlah penduduk paling kecil berdasarkan usia saat ini di Kabupaten Belitung adalah Pre-Boomer yaitu kelahiran sebelum 1945 dengan jumlah 1,50 persen dari

total penduduk. Per 2020, usia Pre-Boomer diperkirakan mulai 75 tahun ke atas. Adapun Generasi Baby Boomer yang merupakan kelompok penduduk kelahiran tahun 1946–1964 akan semakin berkurang.

Pada rilis Badan Pusat Statistik dalam "Potret Sensus Penduduk 2020" tannggal 21 Januari 2021 dinyatakan bahwa seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020, sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif yang diperkirakan tujuh tahun lagi, seluruh kelompok generasi ini akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini jelas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah karena generasi inilah yang berpotensi menjadi tokoh utama dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan daerah, khususnya di Kabupaten Belitung. Apalagi saat ini jumlah penduduk usia produktif telah mencapai hampir 70 persen dari total penduduk di Kabupaten Belitung.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir yang ingin dicapai daerah dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terintegerasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, pembahasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat terbagi kedalam 3 fokus pembahasan, yaitu 1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) kesejahteraan sosial; dan 3) seni budaya dan olah raga. Gambaran tingkat keberhasilan berikut capaian indikator dari masing-masing fokus kesejahteraan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat diukur dan digambarkan melalui capaian beberapa indikator ekonomi makro daerah seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Mengacu kepada capaian indikator ekonomi makro yang dicapai daerah tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat berada dalam kategori baik.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku berguna untuk melihat struktur perekonomian, sehingga akan tergambar sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian wilayah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi dan produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000, melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Implikasi perubahan ini, salah satunya adalah berubahnya struktur ekonomi yang semula hanya 9 (sembilan) sektor ekonomi menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha.

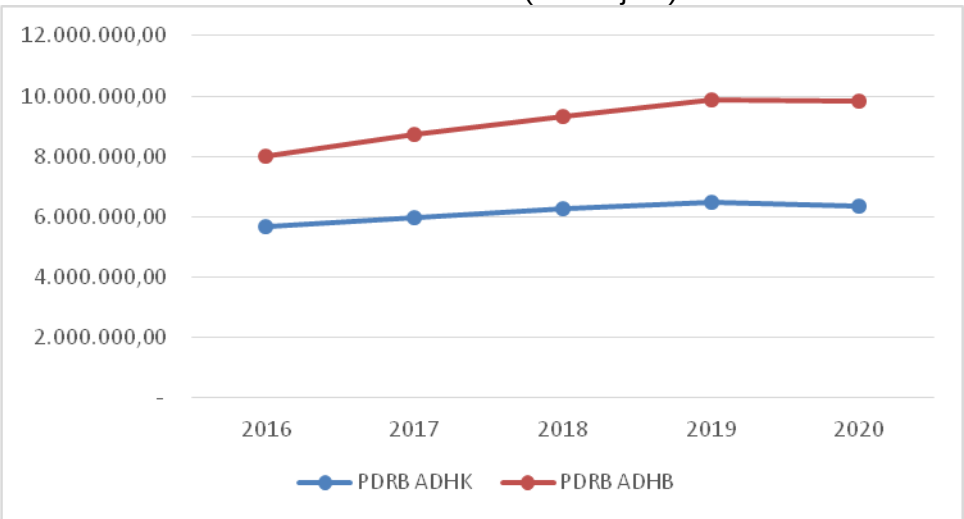
Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Demikian halnya dengan PDRB ADHK, juga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Berikut adalah tabel dan diagram besaran PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.16 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Tahun 2016 - 2020 (dalam juta)

Tahun	PDRB ADHB	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK	Pertumbuhan (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2016	8.000.984	9,19	5.660.665	4,97
2017	8.738.186	9,20	5.969.673	5,29
2018	9.318.342	6,64	6.290.363	5,37
2019	9.856.802	5,78	6.502.017	3,36
2020	9.838.613	-0,18	6.352.027	-2,31

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021

Grafik 2.4 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung
Tahun 2016 - 2020 (dalam juta)



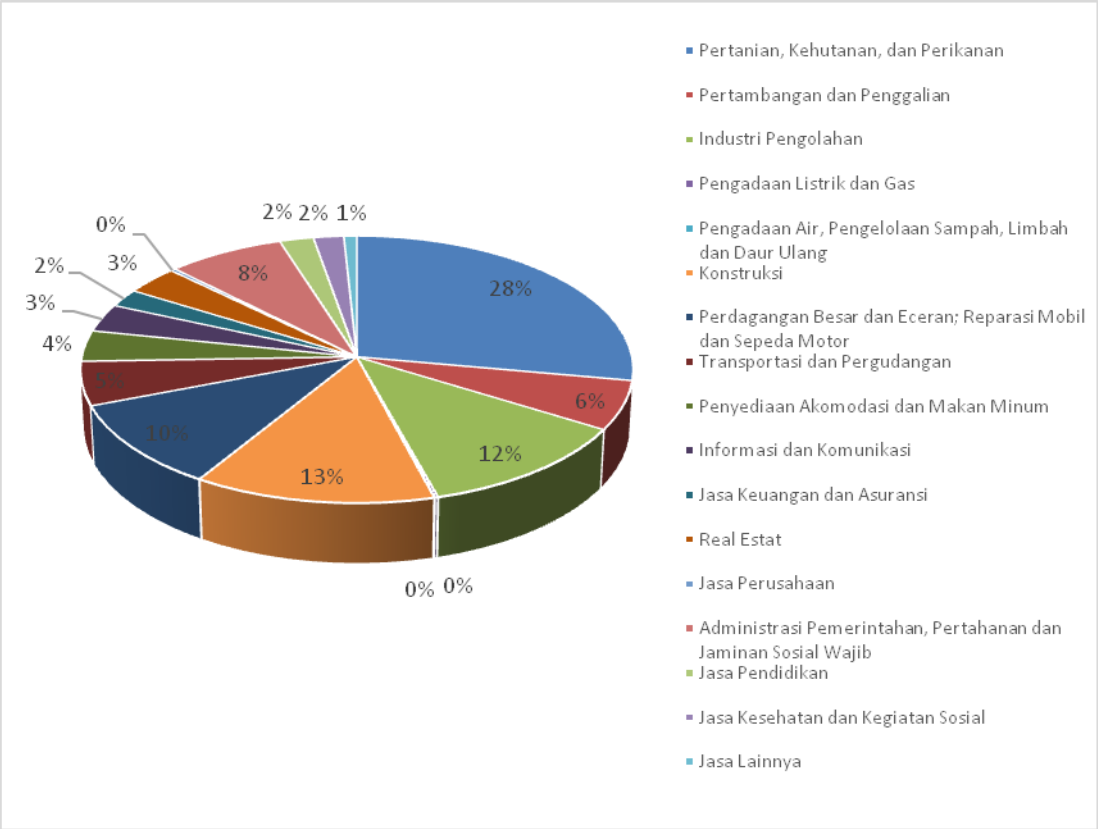
Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan tabel dan diagram di atas terlihat adanya peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari Rp. 8,0 trilliun pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 8,7 trilliun pada tahun 2017, yang berarti struktur perekonomian Kabupaten Belitung meningkat pada 2 (dua) tahun tersebut. Namun, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ini terus mengalami perlambatan sejak 2018 hingga 2020. Terutama pada tahun 2020, karena dampak pandemi Covid-19 pertumbuhan PDRB ADHB mengalami kontraksi sedalam -0,18. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada besaran yang relatif stabil, yaitu Rp. 5,67 trilliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,50 trilliun pada tahun 2019, dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi Rp. 6,35 triliun. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Belitung cenderung berjalan lambat, dan bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sedalam -2,31. Perlambatan tersebut secara umum juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nasional bahkan global. Adanya pandemi Covid-19 memberi dampak pada buruknya pertumbuhan ekonomi global, karena terhentinya banyak aktivitas ekonomi di seluruh dunia akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Berdasarkan strukturnya, kategori yang menjadi *leading sector* dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 26,38%. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2016-2020 adalah kategori Konstruksi dengan

kontribusi rata-rata sebesar 12,07%. Kontribusi terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Belitung adalah kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,05%. Tingginya kontribusi kategori industri pengolahan didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan setengah jadi Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut tetap dominan dan memberikan **kontribusi** tertinggi. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung yang salah satu prioritasnya adalah pada sektor perikanan. Berikut adalah diagram *pie* kontribusi sektor pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun Tahun 2020.

Grafik 2.5 Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2020

Nilai dan kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2020 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detil dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 – 2020 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.207.368	27,59	2.290.449	26,21	2.354.359	25,27	2.464.904	25,01	2.737.936	27,83
B	Pertambangan dan Penggalian	671.930	8,40	698.006	7,99	677.476	7,27	650.443	6,60	584.016	5,94
C	Industri Pengolahan	985.938	12,32	1.070.595	12,25	1.150.502	12,35	1.124.621	11,41	1.171.822	11,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.371	0,17	15.931	0,18	17.360	0,19	17,538	0,18	17.512	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.436	0,03	2.785	0,03	2.720	0,03	2.827	0,03	3.102	0,03
F	Konstruksi	832.897	10,41	975.977	11,17	1.163.773	12,49	1.315.344	13,34	1.272.593	12,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	871.713	10,90	1.001.626	11,46	1.080.430	11,59	1.107.315	11,23	1.017.073	11,10
H	Trasportasi dan Pergudangan	521.746	6,52	585.328	6,70	638.910	6,86	689.589	7,00	521.872	6,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263.766	3,30	295.483	3,38	325.440	3,49	377.584	3,83	368.570	3,55
J	Informasi dan Komunikasi	199.822	2,50	222.279	2,54	244.502	2,62	289.154	2,93	333.968	2,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	185.029	2,31	198.410	2,27	215.040	2,31	232.851	2,36	214.243	2,29
L	Real Estat	259.610	3,24	282.157	3,23	297.883	3.20	317.403	3,22	339.655	3,27
M, N	Jasa Perusahaan	26.602	0,33	29.289	0,34	31.857	0,34	35.849	0,36	30.501	0,34

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	590.741	7,38	657.535	7,52	678.566	7,28	745.726	7,57	740.031	7,46
P	Jasa Pendidikan	163.235	2,04	183.793	2.10	192.863	2,07	210.576	2,14	213.490	2,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141.952	1,77	155.515	1,78	167.789	1,80	185.855	1,89	190.775	1,84
R,S,T,U	Jasa Lainnya	64.827	0,79	73.029	0,84	78.872	0,85	89.223	0,91	81.454	0,84
		8.003.984	**100**	**8.738.186**	**100**	**9.318.342**	**100**	**9.856.802**	**100**	**9.838.613**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021

Tabel 2.18 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 seri Tahun Dasar 2010 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.556.409	27,45	1.565.386	26,22	1.613.151	25,64	1.657.637	25,49	1.779.075	28,01
B	Pertambangan dan Penggalian	536.216	9,46	540.625	9,06	542.032	8,62	546.868	8,41	485.051	7,64
C	Industri Pengolahan	709.116	12,51	738.523	12,37	782.768	12,44	733.657	11,28	736.970	11,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.884	0,16	9.306	0,16	9.921	0,16	9.817	0,15	9.725	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.761	0,03	1.933	0,03	1.845	0,03	1.890	0,03	2.054	0,03
F	Konstruksi	608.999	10,74	682.968	11,44	768.351	12,21	832.642	12,81	798.636	12,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	628.087	11,08	685.710	11,49	713.913	11,34	727.948	11,20	661.004	10,41
H	Trasportasi dan Pergudangan	332.619	5,87	365.029	6,11	394.610	6,27	399.199	6,14	316.255	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185.699	3,28	201.154	3,37	214.155	3,40	231.509	3,56	206.449	3,25
J	Informasi dan Komunikasi	172.073	3,04	186.413	3,12	209.560	3,33	244.714	3,76	285.434	4,49

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	133.773	2,37	138.046	2,31	144.590	2,30	154.134	2,37	142.334	2,24
L	Real Estat	184.144	3,25	193.975	3,25	202.640	3,22	208.539	3,21	210.862	3,32
M, N	Jasa Perusahaan	19.780	0,35	20.694	0,35	21.364	0,34	21.955	0,34	17.505	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	340.035	6,00	365.242	6,12	383.668	6,10	418.570	6,44	398.269	6,27
P	Jasa Pendidikan	104.705	1,85	113.935	1,91	119.590	1,90	129.019	1,98	124.879	1,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104.983	1,85	114.272	1,91	119.810	1,90	130.008	2,00	131.392	2,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	41.833	0,74	46.461	0,78	49.296	0,78	53.911	0,83	46.133	0,73
	TOTAL	**5.669.543**	**100**	**5.969.543**	**100**	**6.290.363**	**100**	**6.505.320**	**100**	6.352.027	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan tabel nilai dan kontribusi PDRB ADHK di atas, terlihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang kontribusinya terus meningkat dari 27,45% tahun 2016 menjadi 28,01% pada tahun 2020, yang berarti hal ini mengalami perlambatan aktivitas ekonomi. Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori Industri Pengolahan dan kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori Konstruksi. Jika melihat perkembangan PDRB ADHK sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas terlihat terjadinya perlambatan di beberapa sektor. Perlambatan perkembangan tersebut diakibatkan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas perekonomian secara global, karena adanya kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Beberapa kategori yang mengalami perlambatan, antara lain kategori pertambangan dan penggalian dari 9,64% pada tahun 2016 menjadi 7,64% tahun 2020. Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi sebesar 11,08% pada tahun 2016 menjadi 10,41% pada tahun 2020. Demikian juga halnya dengan kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib mengalami perlambatan dari 6% pada tahun 2016 menjadi 6,27% pada tahun 2020. Sedangkan beberapa kategori lainnya berkontribusi di bawah 5%. Adanya perlambatan kontribusi PDRB ADHK pada beberapa kategori tersebut di atas menandakan bahwa terjadi perlambatan aktivitas ekonomi pada kategori tersebut, yang juga berarti lambatnya jumlah produksi pada kategori tersebut.

Di sisi lain, meski aktivitas ekonomi di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perlambatan, tapi kontribusi terbesar dari sektor ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit *(multiplier effect)* bagi aktivitas ekonomi lapangan usaha lainnya. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa aktivitas Sektor pertambangan dan penggalian juga masih berkontribusi cukup besar, walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2016 sebesar 9,46% menjadi 7,64% pada tahun 2020. Mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak *sustainable*, maka perlu dipikirkan strategi-strategi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya sebagai sektor utama untuk meningkatkan kontribusi PDRB ADHK.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perekonomian daerah tersebut. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat pertumbuhan kategori pembentuk PDRB tumbuh secara bervariasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,42	0,58	3,05	2,76	7,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,82	0,26	0,89	-11,30
C	Industri Pengolahan	1,90	4,15	5,99	-6,27	0,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,23	4,75	6,61	-1,05	-0,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	9,76	-4,57	2,44	8,68
F	Konstruksi	7,67	12,15	12,50	8,37	-4,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,92	9,17	3,98	2,09	-9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	5,99	9,74	8,10	1,16	-20,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,97	8,32	6,46	8,10	-10,82
J	Informasi dan Komunikasi	6,62	8,33	12,42	16,78	16,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	3,19	4,74	6,60	-7,66
L	Real Estat	3,94	5,34	4,47	2,91	1,11
M, N	Jasa Perusahaan	2,48	4,62	3,24	2,77	-20,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6,84	7,41	5,04	9,10	-4,85
P	Jasa Pendidikan	8,26	8,82	4.96	7,88	-3,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,23	8,85	4,85	8,51	1,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,25	11,06	6,10	9,36	-14,43
	Laju Pertumbuhan	**4,97**	**5,30**	**5,37**	**3,36**	**-2,31**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2020

Berdasarkan penjabaran pada tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami penurunan pada hampir seluruh lapangan usaha. Bahkan ada beberapa kategori yang mengalami kontraksi cukup dalam. Sektor yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Transportasi dan Pergudangan yang terkontraksi -20,78%; kemudian sektor Jasa Perusahaan sedalam -20,27% dan sektor Jasa Lainnya -14,43%.

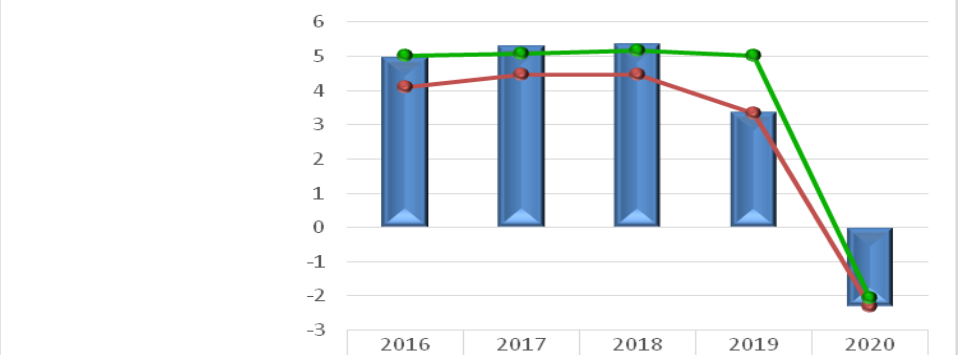
Di sisi lain, beberapa kategori mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan di era pandemi, yaitu kategori Informasi dan Komunikasi yang tumbuh dari 6,62% pada tahun 2016 menjadi 16,64% pada tahun 2020. Kemudian sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,68% pada tahun 2020 dari 5,96% pada tahun 2016; dan pertumbuhan ketiga terbesar pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,33% pada tahun 2020 dari pertumbuhan tahun 2016 yang hanya sebesar 5,42%.

Secara umum kontraksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung merupakan dampak dari adanya pandemi *Covid-19* yang telah melumpuhkan aktivitas ekonomi hampir di semua sektor secara global di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Adanya kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan banyak lapangan usaha dan tenaga kerja terdampak, dan juga berimplikasi kepada melemahnya tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan daya ungkit bagi sektor lapangan usaha lainnya.

Tren kontraksi pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tingkat provinsi maupun nasional. Berikut adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional.

Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016- Tahun 2020 (dalam persen)



	2016	2017	2018	2019	2020
LPE Kabupaten Belitung	4,96	5,30	5,36	3,36	-2,31
LPE Prov. Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30
LPE Nasional	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : BPS, 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan bahkan dunia juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional.

C. PDRB Per Kapita

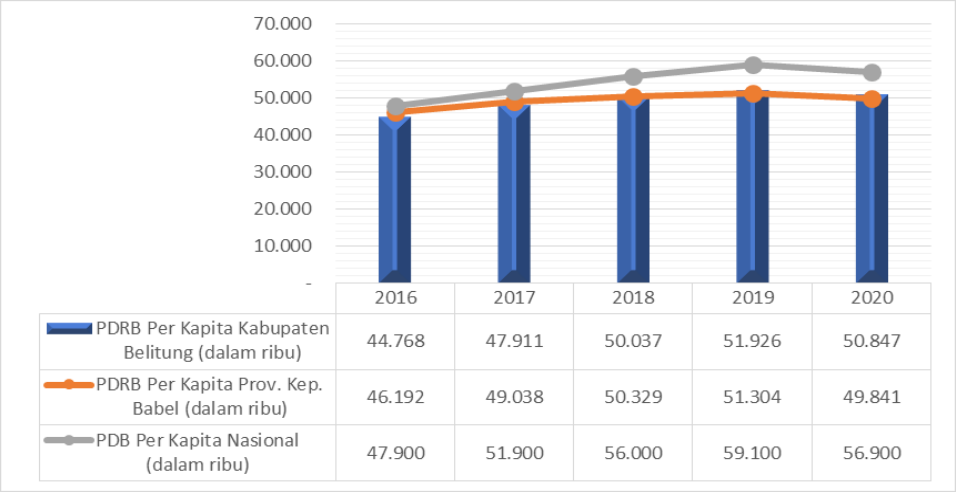
Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai alat ukur. Secara umum, kinerja tersebut diukur dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang baik dan terjadi peningkatan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung, menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dan grafik yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Tahun 2015 – Tahun 2019 (dalam ribu rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.446	12.351	12.556	12.647	12.914
B	Pertambangan dan Penggalian	3.755	3.760	3.826	3.639	3.470
C	Industri Pengolahan	5.380	5.517	5.869	6.180	5.881
D	Pengadaan Listrik dan Gas	57	75	87	93	93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13	14	15	15	15
F	Konstruksi	4.269	4.660	5.350	6.252	6.984
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.451	4.878	5.491	5.804	5.940
H	Transportasi dan Pergudangan	2.751	2.925	3.218	3.432	3.633
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.348	1.476	1.620	1.748	1.996
J	Informasi dan Komunikasi	1.045	1.118	1.219	1.313	1.490
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	954	1.035	1.088	1.155	1.227
L	Real Estat	1.371	1.453	1.547	1.600	1.674
M, N	Jasa Perusahaan	142	149	161	171	183
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	3.032	3.305	3.605	3.645	3.929
3.929	Jasa Pendidikan	805	913	1.008	1.036	1.109
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	722	794	853	901	987
R,S,T,U	Jasa Lainnya	322	352	400	424	470
	PDRB Per Kapita	**41.864**	**44.768**	**47.911**	**50.057**	**51.994**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2020

Grafik 2.7 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (dalam ribu rupiah)



	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita Kabupaten Belitung (dalam ribu)	44.768	47.911	50.037	51.926	50.847
PDRB Per Kapita Prov. Kep. Babel (dalam ribu)	46.192	49.038	50.329	51.304	49.841
PDB Per Kapita Nasional (dalam ribu)	47.900	51.900	56.000	59.100	56.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Belitung meningkat dari tahun 2016 sebesar 44.768.000,- namun mengalami perlambatan pada tahun 2019 dan bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2020 menjadi Rp. 50.847.000,- pada tahun 2020 dengan pertumbuhan minus 2,08%. Rata-rata peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung adalah 4,02% per tahun. Penurunan pendapatan per kapita tersebut akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penurunan pendapatan per kapita tidak hanya terjadi di Kabupaten Belitung, namun juga di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga tingkat nasional. Kondisi tersebut merupakan tantangan terbesar bagi Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi perekonomian sebelumnya terus meningkat, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Oleh karena itu, diperlukan semangat dan energi positif, serta sinergi dari semua pihak untuk pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi Covid-19.

d. Indeks Spesialisasi

Dalam pengembangan ekonomi wilayah atau pembangunan daerah, ada berbagai indikator dan beragam analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Pembangunan ekonomi seyogyanya dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dalam daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan

analisis mengenai beragam sektor unggulan yang ada pada suatu daerah, untuk menyusun rencana pembangunan daerah kedepannya.

Analisis Indeks Spesialisasi (SI) merupakan salah satu cara untuk mengukur perilaku dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan untuk menganalisis tingkat konsentrasi sektor kegiatan secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (provinsi). Berikut adalah tabel Indeks Spesialisasi Kabupaten Belitung.

Tabel 2.21 Indeks Spesialisasi (Specialization Index) Kabupaten Belitung

Kategori	Uraian	SI 2016	SI 2017	SI 2018	SI 2019	SI 2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,042	0,040	0,036	0,036	0,039
B	Pertambangan dan Penggalian	0,021	0,021	0,020	0,019	0,019
C	Industri Pengolahan	0,049	0,052	0,051	0,054	0,049
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
F	Konstruksi	0,012	0,015	0,018	0,020	0,018
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,015	0,015	0,015	0,015	0,017
H	Transportasi dan Pergudangan	0,011	0,012	0,012	0,012	0,009
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,005	0,005	0,005	0.006	0,004
J	Informasi dan Komunikasi	0,005	0,006	0,006	0.007	0,009
0.003K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,003	0,003	0,002	0.003	0,002
L0.000	Real Estat	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001
M, N	Jasa Perusahaan	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	0,004	0,005	0,003	0,003	0,003
P	Jasa Pendidikan	0,003	0,002	0,003	0,004	0,003
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,003	0,004	0,003	0,004	0,004
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Nilai SI	**0,175**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,176**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

Skala interval nilai Indeks Spesialisasi antara 0 -100, atau pada skala maksimal 1, maka nilai spesialisasi antara 0 sampai dengan 1. Oleh karena itu, apabila nilai SI = 0 atau mendekati 0, maka tidak terjadi konsentrasi sektor i di suatu kabupaten, jika dibandingkan dengan tingkat provinsinya. Begitupun sebaliknya apabila nilai SI = 1 atau mendekati 1, maka disimpulkan terjadi konsentrasi pada sektor tersebut.

Berdasarkan data hasil analisis di atas, nilai SI disetiap sektor cenderung mendekati 0 bahkan beberapa sektor = 0 dan total nilai SI hanya sebesar 0,176 pada tahun 2020, yang berarti juga mendekati 0. Ada 2 (dua) sektor yang mempunyai nilai SI relatif lebih besar dibanding sektor lainnya, yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan nilai SI 0,049 dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai SI 0,039.

Dari hasil analisis di atas bisa diinterpretasi atau disimpulkan bahwa masih belum terjadi fokus pembangunan yang terkonsentrasi pada sektor tertentu di Kabupaten Belitung. Walaupun analisis SI ini masih bersifat sangat makro, namun bisa menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan kedepan supaya dapat lebih fokus berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

e. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ merupaan suatu metode analisis yang sederhana, namun cukup bermanfaat untuk mengidentifikasi sektor basis dari suatu daerah. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis suatu daerah yang mampu mengekspor (ke luar daerah maupun ke luar negeri) sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Dengan mengetahui sektor basis tersebut, maka pemerintah daerah bisa menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah ke depannya. Berikut adalah tabel Location Quotient Kabupaten Belitung.

Tabel 2.22 Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Belitung

Kategori	Uraian	LQ 2016	LQ 2017	LQ 2018	LQ 2019	LQ 2020	Rata-rata LQ	Ket.
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)		(8)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,44	1,44	1,40	1,39	0,51	0,54	Sektor non basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,70	0,68	0,68	0,69	1.55	**1,46**	**Sektor basis**
C	Industri Pengolahan	0,56	0,54	0,55	0,51	1.76	**1,76**	**Sektor basis**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,72	1,70	1,67	1.55	**1.45**	**1,41**	**Sektor basis**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	1,72	1.72	1.76	0.79	0,76	Sektor non basis
F	Konstruksi	**1,28**	**1,35**	**1,42**	**1.45**	1,60	**1,52**	**Sektor basis**
G	Perdagangan Besar dan	0,79	0,79	0,80	0.79	1,47	**1,34**	**Sektor**

Kategori	Uraian	LQ 2016	LQ 2017	LQ 2018	LQ 2019	LQ 2020	Rata-rata LQ	Ket.
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)		(8)
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor							**basis**
H	Transportasi dan Pergudangan	1,61	1,60	1,62	1,60	1,58	**1,62**	**Sektor basis**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,45	1,44	1,47	1,47	1.29	**1,28**	**Sektor basis**
J	Informasi dan Komunikasi	1,60	1,57	1,57	1,58	1,00	**0,97**	Sektor non basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,32	1,32	1,28	1.29	1,32	**1,22**	**Sektor basis**
L	Real Estat	1,04	1,04	0,99	1,00	1,13	**1,11**	**Sektor basis**
M, N	Jasa Perusahaan	1,39	1,39	1,30	1,32	0,77	0,76	Sektor non basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	1,15	1,16	1,12	1,13	1,56	**1,55**	**Sektor basis**
P	Jasa Pendidikan	0,77	0,78	0,77	0,77	1,06	**0,97**	Sektor non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,58	1,57	1,56	0,51	0,54	Sektor non basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,07	1,06	1,07	1,06	1.55	**1,46**	**Sektor basis**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

Interpretasi nilai LQ terhadap suatu sektor dilihat dari seberapa besar nilai hasil analisis LQ. Semakin tinggi nilai LQ, maka semakin tinggi *comparative advantage* suatu daerah dalam mengembangkan sektor tersebut. Dilihat dari hasil analisis pada tabel di atas, terlihat bahwa ada 1 (sebelas) sektor di Kabupaten Belitung yang menjadi sektor basis untuk dapat dikembangkan. Konsentrasi pengembangan pada sektor basis diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, karena sektor-sektor basis tersebut mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah Kabupaten Belitung. Berikut akan ditampilkan tabel mengenai standar interpretasi Analisis LQ.

Tabel 2.23 Interpretasi Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Nilai LQ	Sektor Basis/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ>1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ<1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak tersepesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar negeri
LQ=1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanya mampu melayani pasar dalam wilayah

Sumber : Muta'ali, 2015

f. Laju Inflasi

Laju Inflasi menggambarkan persentase kenaikan harga dari beberapa indeks kelompok pengeluaran yang dapat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Perubahan indeks harga dari waktu ke waktu memperlihatkan fluktuasi harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan data Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi makro penting yang dapat menggambarkan laju inflasi sekaligus pola konsumsi masyarakat di suatu daerah yang dihitung setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 82 kota di Indonesia. Laju inflasi dan perubahan IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi dua kota, yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang.

Tabel 2.24 Inflasi Bulanan Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020 (persen)

No	Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Januari	-0.02	1.71	0.44	1.23	0.46
2	Februari	1.02	-0.29	-0.29	-0.82	-1.20
3	Maret	-1.22	-1.49	-0.05	0.27	-0.13
4	April	-0.66	0.93	-0.27	1.14	-0.19
5	Mei	1.30	0.90	0.32	0.21	1.20
6	Juni	1.46	1.83	1.28	-0.41	0.27
7	Juli	2.34	-0.12	0.85	1.23	0.26
8	Agustus	-0.58	-0.70	0.50	-0.35	-0.67
9	September	-0.68	-0.87	-1.12	0.48	0.20
10	Oktober	0.31	0.29	0.60	0.08	0.45
11	Nopember	0.70	0.26	-0.38	-1.06	-0.03
12	Desember	0.90	1.50	0.84	1.17	1.49

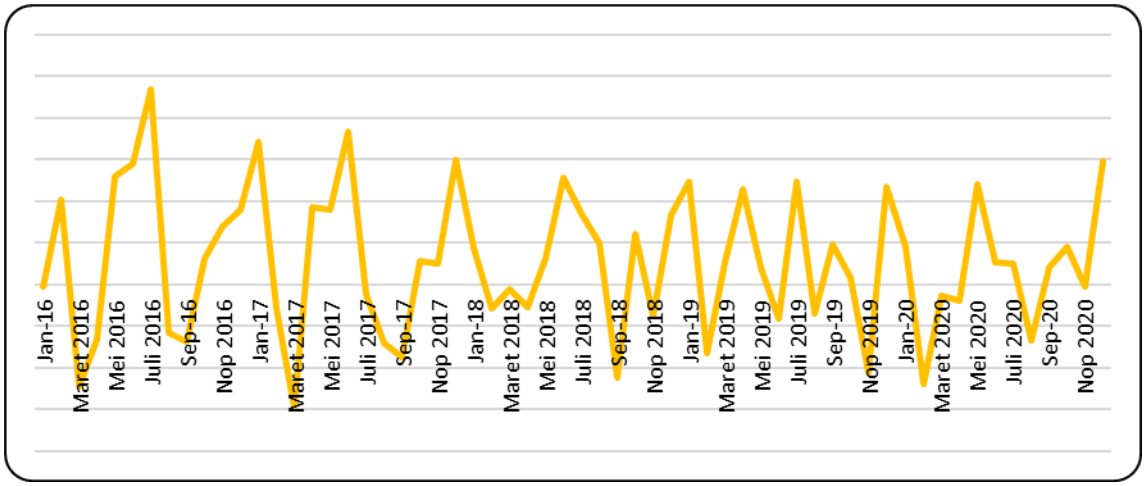
Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun lima tahun terakhir telah terjadi perubahan secara fluktuatif terhadap laju inflasi bulanan di Kabupaten Belitung, dalam hal ini kota Tanjungpandan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2016, yaitu sebesar 2,34 persen, dan inflasi terendah di bulan Maret 2017, yaitu -1,49 persen. Terlihat bahwa pada bulan-bulan tertentu terjadi inflasi setiap tahunnya. Inflasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bulan Mei, Oktober dan Desember, sementara pada bulan Maret cenderung deflasi dalam kurun 2016-2020.

Rata-rata inflasi bulanan di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung masih tergolong inflasi “ringan”atau dibawah 10% per tahun yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah. Inflasi Kota Tanjungpandan mengalami lonjakan di poin tertinggi, yaitu 4,92 persen pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019, laju inflasi di Kota Tanjungpandan mulai dapat dikendalikan dengan kisaran di bawah 4 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 di mana laju inflasi turun dari semula 3,97 persen menjadi 2,72 persen. Namun pada tahun berikutnya ada kenaikan menjadi sebesar 3,19 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 1,08 poin yaitu 2,11 persen. Memang selama Januari hingga Desember 2020, kota Tanjungpandan mengalami fluktuasi tingkat inflasi/ deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember seebsar 1,49 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di bulan September sebesar 0,2 persen. Adapun deflasi tertinggi terjadi di bulan Februari sebesar 1,20 persen dan terendah di bulan November yakni sebesar 0,03 persen. Rendahnya rata-rata inflasi pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung salah satunya dikarenakan perubahan perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya di masa pandemi COVID-19.

Grafik 2.8 Inflasi Bulanan Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik di atas menggambarkan pola inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dalam kurun 2016-2020 yang cenderung bersifat stasioner atau tidak mengandung tren sebagaimana dinyatakan bahwa “Sekumpulan data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan varian dari data time series tersebut tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu, atau sebagian ahli menyatakan rata-rata dan variannya konstan”. (Nachrowi dan Haridus Usman, 2006)

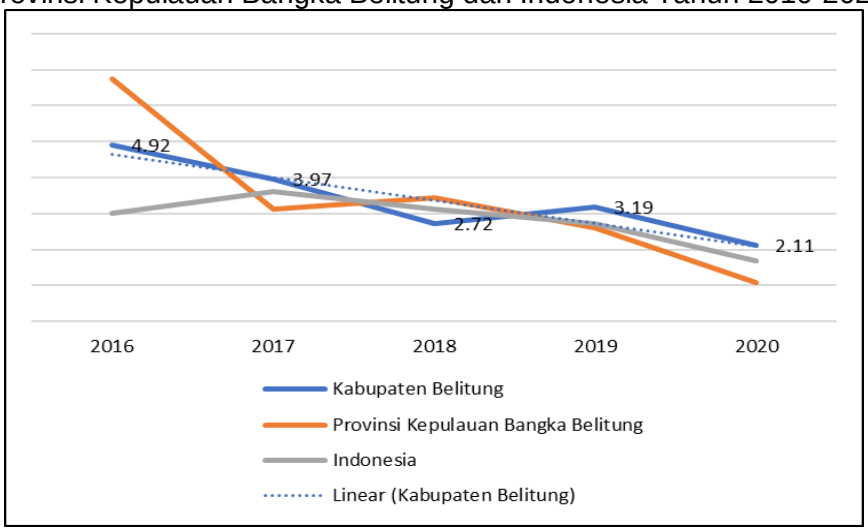
Secara umum, Tanjungpandan mengalami kenaikan inflasi pada bulan-bulan tertentu sepanjang tahun 2016-2020. Rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan pada kurun 2016-2020 masih cukup stabil, yaitu 3,38 persen. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Pada tahun 2020, Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 2,11% dan masih berada di atas inflasi nasional yang pada tahun 2020 sebesar 1,68% dan inflasi gabungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 1,08% sebagaimana diperlihatkan oleh tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.25 Perbandingan Laju Inflasi di Tanjungpandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Uraian		Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	4.92	3.97	2.72	3.19	2.11
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.75	3.13	3.45	2.62	1.08
3	Indonesia	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Grafik 2.9 Perbandingan Laju Inflasi di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Perhitungan inflasi di Kabupaten Belitung diperoleh dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup tujuh kelompok pengeluaran pada tahun 2015-2019 dan sebelas kelompok pengeluaran pada tahun 2020 sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.26 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Tanjungpandan Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bahan Makanan	-4.52	7.92	1.25	-1.35	5.86
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4.63	10.25	6.58	3.43	2.05
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2.91	0.72	6.35	3.53	1.74
4	Sandang	1.26	2.15	2.44	4.62	2.55
5	Kesehatan	3.87	2.33	6.34	4.58	1.95
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8.07	3.31	3.58	5.87	7.85
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0.42	0.43	1.75	6.73	0.51
8	Umum	0.88	4.92	3.97	2.72	3.19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2.27 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Tanjungpandan Tahun 2020

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	4.41
2	Pakaian dan Alas Kaki	0.62
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.66
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.48
5	Kesehatan	0.89
6	Transportasi	-2.31
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.27
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0.44
9	Pendidikan	0.88
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	3.96
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4.02
	Umum	2.11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Sebagaimana dikutip dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung bahwa mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut

didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018, dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), adalah sebagai berikut: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pada tabel 2.19 di atas terlihat bahwa kelompok pengeluaran Bahan Makanan atau *volatile food* masih menjadi pemicu kenaikan harga di Tanjungpandan pada tahun 2016 dan 2019. Selain itu kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau juga ikut andil terhadap inflasi setiap tahunnya secara fluktuatif. Beberapa komoditas yang sangat dominan menyumbang inflasi selama tahun 2019 di antaranya adalah cumi-cumi, udang basah, nasi dengan lauk, sewa rumah dan uang sekolah menengah pertama. Setiap kelompok pengeluaran memiliki andil yang bervariasi setiap tahunnya. Pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, dan kelompok Kesehatan, mengalami penurunan inflasi yang cukup signifikan di tahun 2018 bila dibandingkan empat tahun sebelumnya yang cenderung tidak stabil.

Kenaikan yang agak tajam terjadi pada kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan, yaitu dari 1,75 di tahun 2017, menjadi 6,73 di tahun 2018. Selanjutnya terjadi dua kali deflasi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan, yaitu di tahun 2015 dan 2018.

Berikutnya pada tabel 2.20 memperlihatkan bahwa dari sebelas kelompok pengeluaran, hanya dua kelompok yang mengalami deflasi pada tahun 2020, yaitu kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Adapun sembilan kelompok lainnya mengalami inflasi sepanjang

tahun 2020, terutama pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Andil inflasi menurut kelompok barang dan jasa dan penyumbang komoditi inflasi terbesar tahun 2015-2020 di Kabupaten Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Andil / Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Umum	0.88	4.92	3.97	2.72	3.19
1	Bahan Makanan	-1.36	2.26	0.37	-0.39	1.60
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.88	2.01	1.36	0.73	0.44
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.66	0.17	1.42	0.81	0.40
4	Sandang	0.08	0.15	0.16	0.30	0.17
5	Kesehatan	0.16	0.1	0.27	0.20	0.09
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0.41	0.18	0.19	0.31	0.43
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0.05	0.05	0.20	0.76	0.06

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.29 Andil / Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
	Umum	2.11
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1.61
2	Pakaian dan Alas Kaki	0.04
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.12
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.07
5	Kesehatan	0.02
6	Transportasi	-0.27
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.01
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0.01
9	Pendidikan	0.01
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0.30
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tabel 2.28 dan tabel 2.29 di atas memperlihatkan andil/ sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi di Tanjungpandan dalam enam tahun terakhir. Secara umum kelompok Bahan Makanan masih mendominasi andil terhadap inflasi pada rentang 2015-2019. Adapun pada tahun 2020, terdapat kelompok yang memiliki andil inflasi terbesar yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan masing-masing andil berturut-turut sebesar 1,61 persen, 0,30 persen dan 0,21 persen. Andil deflasi yang terlihat signifikan adalah pada kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan dengan sumbangan berturut-turut sebesar -0.27 persen dan -0.01 persen.

Pengaruh pandemi COVID-19 di tahun 2020 mempengaruhi pola masyarakat dalam membelanjakan uang mereka. Mereka lebih memprioritaskan konsumsi kebutuhan pribadi seperti makanan, minuman dan perawatan pribadi dan jasa lainnya dalam rangka menjaga kesehatan masing-masing. Selain itu adanya kebijakan pemerintah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah juga turut andil dalam menyebabkan anjloknya jasa angkutan/ transportasi dan rendahnya inflasi pendidikan karena siswa lebih banyak belajar secara daring di rumah. Hal ini merupakan imbas dari turunnya permintaan dan perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas ekonomi karena COVID-19. Pergerakan inflasi pada awal tahun 2020 hingga bulan-bulan berikutnya menjadi sinyal telah terjadi pelemahan daya beli masyarakat.

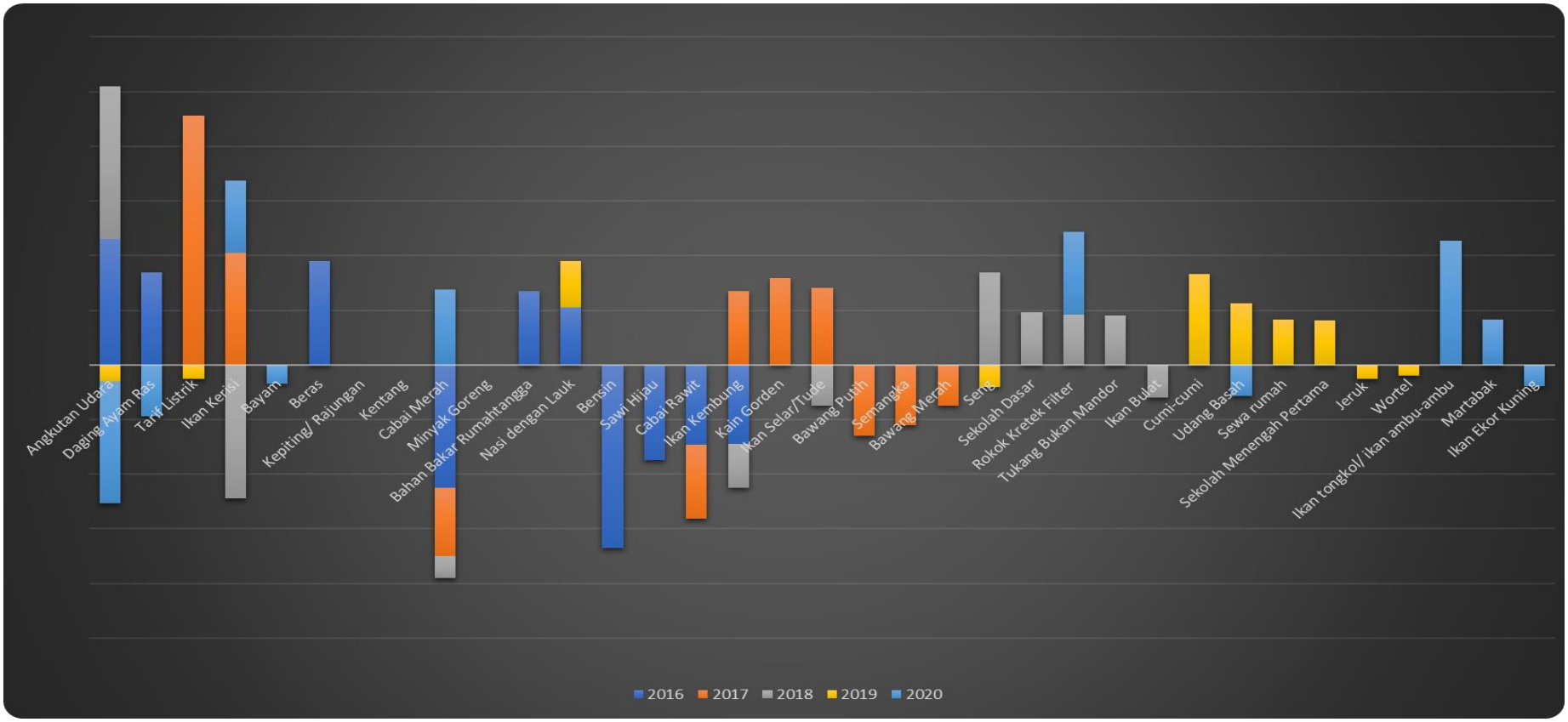
Di Kabupaten Belitung selain faktor harga yang diatur oleh pemerintah pusat, seperti BBM dan tarif listrik, faktor penyebab inflasi lainnya adalah tarif angkutan udara dan ikan segar. Pada tabel 2.23 terlihat bahwa kelompok Bahan Makanan atau kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau berperan sebagai penyumbang inflasi terbanyak selama tahun 2016-2020. Hal itu ditunjukkan oleh mendominasinya antara lain ikan segar, beras, cabai merah dan daging ayam ras sebagai komoditi penyumbang inflasi terbesar dalam kurun lima tahun terakhir. Adapun rokok menjadi penyumbang kedua terbesar inflasi di tahun 2020 dengan andil sebesar 0,30 persen atau lebih tinggi 0,12 poin dari tahun 2018 di mana rokok menjadi penyumbang terbesar keempat dengan andil sebesar 0,18 persen.

Tabel 2.30 Sepuluh Komoditas Terbesar Penyumbang Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten BelitungTahun 2016-2020

No.	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angkutan Udara	0.46	Tarif Listrik	0.91	Angkutan Udara	0.56	Cumi-cumi	0.33	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0.46
2	Beras	0.38	Ikan Kerisi	0.41	Seng	0.34	Udang Basah	0.22	Rokok kretek/ filter	0.30
3	Daging Ayam Ras	0.34	Kain Gorden	0.32	Sekolah Dasar	0.19	Nasi dengan lauk	0.17	Cabai Merah	0.28
4	Bahan Bakar Rumahtangga	0.27	Ikan Selar/Tude	0.28	Rokok Kretek Filter	0.18	Sewa rumah	0.17	Ikan Kerisi	0.26
5	Nasi dengan Lauk	0.21	Ikan Kembung/ Gembung/Banyer/ Gembolo/ Aso-aso	0.27	Tukang Bukan Mandor	0.18	Sekolah Menengah Pertama	0.16	Martabak	0.17
6	Bensin	-0.67	Cabai Rawit	-0.27	Ikan Kerisi	-0.49	Seng	-0.08	Angkutan Udara	-0.45
7	Cabai Merah	-0.45	Bawang Putih	-0.26	Ikan Kembung	-0.16	Angkutan Udara	-0.06	Daging ayam ras	-0.19
8	Sawi Hijau	-0.35	Cabai Merah	-0.25	Ikan Selar	-0.15	Tarif Listrik	-0.05	Udang Basah	-0.11
9	Cabai Rawit	-0.29	Semangka	-0.22	Ikan Bulat	-0.12	Jeruk	-0.05	Ikan Ekor Kuning	-0.08
10	Ikan Kembung	-0.29	Bawang Merah	-0.15	Cabai Merah	-0.08	Wortel	-0.04	Bayam	-0.07
	Laju Inflasi Tahunan	4,92		3,97		2,72		3.19		2.11

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Grafik 2.10 Sepuluh Komoditi Terbesar Penyumbang Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten BelitungTahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Sebenarnya besaran inflasi akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat bergantung pada komponen penyebab inflasi itu sendiri. Jika komponen penyumbang inflasi tidak banyak terkait dengan hajat hidup sebagian besar penduduk, maka tidak perlu dikhawatirkan. Demikian juga sebaliknya, jika faktor penyebab inflasi terkait dengan masyarakat banyak maka perlu dilakukan pengendalian terhadap inflasi tersebut.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif ini perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok mengingat Kabupaten Belitung bukan sebagai produsen namun pasar yang mamasok sebagian besar kebutuhan dari luar daerah. Pengendalian terhadap inflasi juga menjadi penting karena keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun.

Inflasi yang rendah sepanjang tahun 2020 salah satunya karena penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang terjadi. Daya beli masyarakat yang rendah karena cadangan keuangan sudah terkuras habis selama pandemi berlangsung. Selain itu Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) juga berperen mengakibatkan perputaran uang terhambat. Hal tersebut hendaknya dapat disikapi bersama dalam pemulihan ekonomi di daerah termasuk pengendalian inflasi. Jadi, meskipun inflasi di Kabupaten Belitung tergolong “ringan”dan fluktuatif, namun tetap perlu ada pengendalian dari pemerintah daerah terkait pengambilan kebijakan dalam stabilisasi harga.

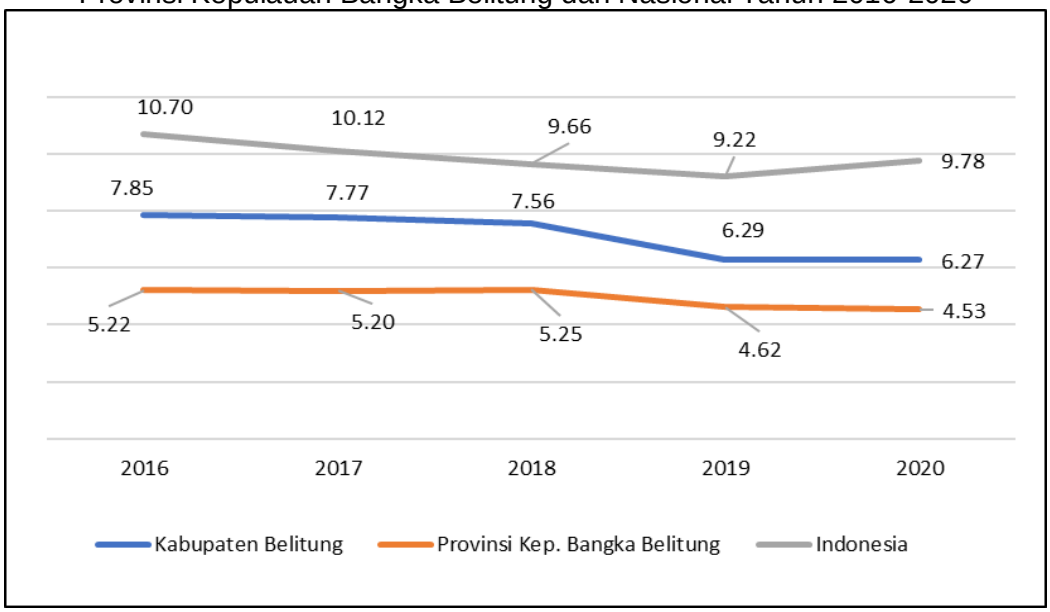
g. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun tertentu atau persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Definisi kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-

makanan. Jadi, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir dinyatakan dalam grafik berikut :

Grafik 2.11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020



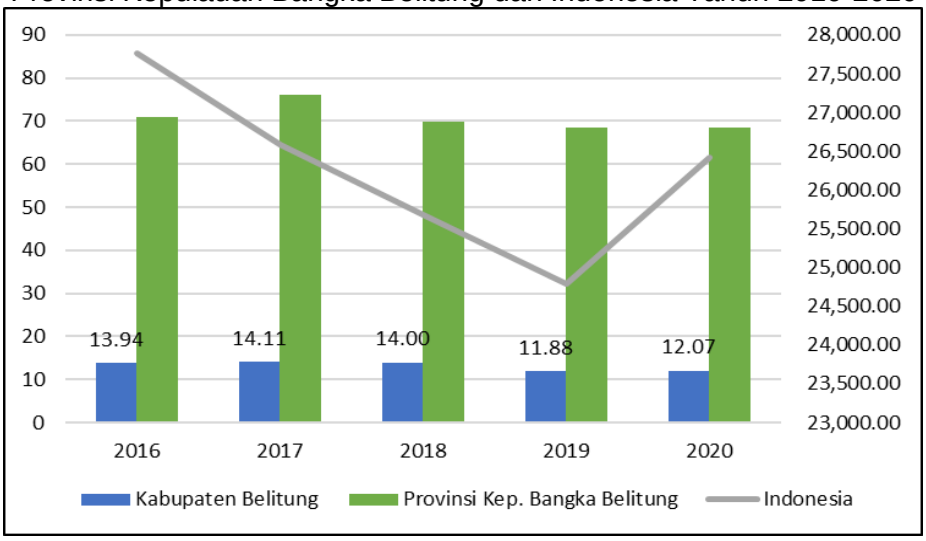
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Grafik di atas memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung cenderung menurun dari tahun 2016 – 2020, namun perlambatan penurunannya terjadi secara signifikan pada dua tahun terakhir. Angka kemiskinan Kabupaten Belitung tahun 2020 adalah sebesar 6,27% atau turun 0,02 poin dari tahun 2019 yang sebesar 6,29%. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab bertambahnya penduduk miskin di Kabupaten Belitung seiring dengan adanya pemberhentian kerja sementara bagi pekerja informal yang mayoritas bekerja di sektor penopang pariwisata meski jumlahnya hanya 8,9% dari jumlah penduduk Kabupaten Belitung .

Pemerintah Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun telah berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 yang mencapai 13.940 jiwa mengalami penurunan menjadi 11.880 jiwa pada tahun 2019 atau 6,29 persen dari total penduduk. Namun peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 menjadi 12.070 jiwa atau 6,27 persen dari total penduduk. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Belitung, provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia dalam lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.12 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Adapun pendekatan garis kemiskinan makanan menggunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 kilo kalori yang didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan garis kemiskinan non makanan berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian serta aneka barang dan jasa. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

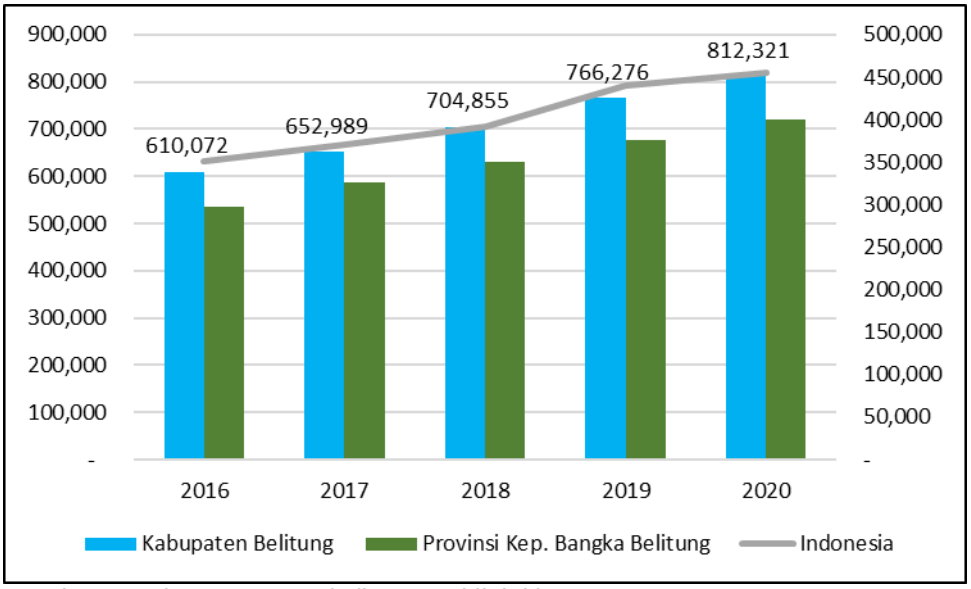
Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018 dinyatakan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.31 Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Belitung	610,072	652,989	704,855	766,276	812,321
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	534,229	587,530	631,467	677,716	721,455
3	Indonesia	350,420	370,910	392,154	440,538	454,652

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Grafik 2.13 Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

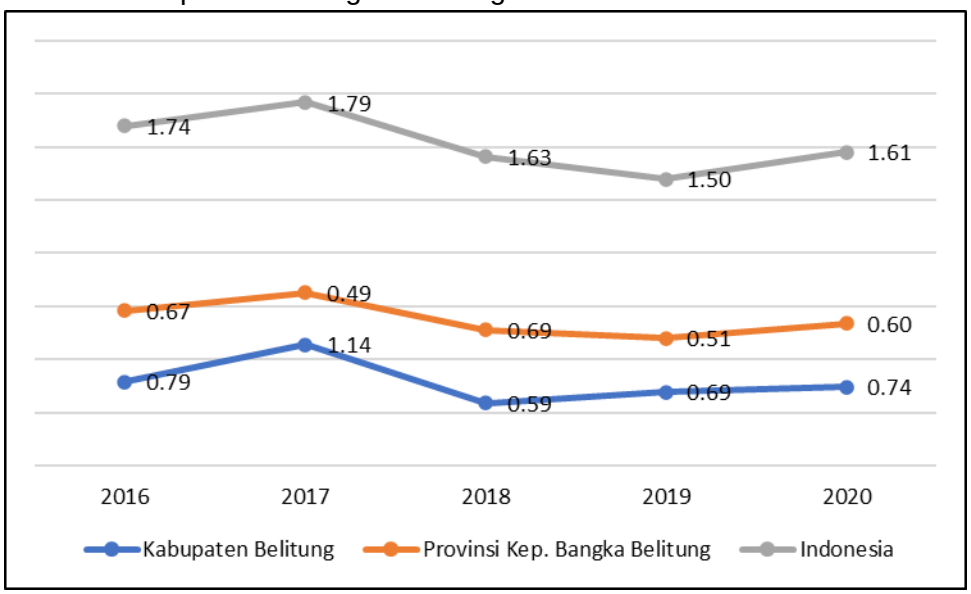
Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sama halnya dengan garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, namun garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2014-2018 masih berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Belitung untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan masih cukup tinggi. Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 812.321,- per bulan per orang atau naik Rp 202.249,- dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 610.072,- per bulan per orang. Nilai ini jauh melampaui garis kemiskinan nasional dan bahkan merupakan garis kemiskinan yang tertinggi di Indonesia. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Belitung khususnya, antara lain disebabkan harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Dengan asumsi garis

kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp25.000 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp 45.000 sehari.

Berikut disajikan grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia pada tahun 2016-2020.

Grafik 2 14 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

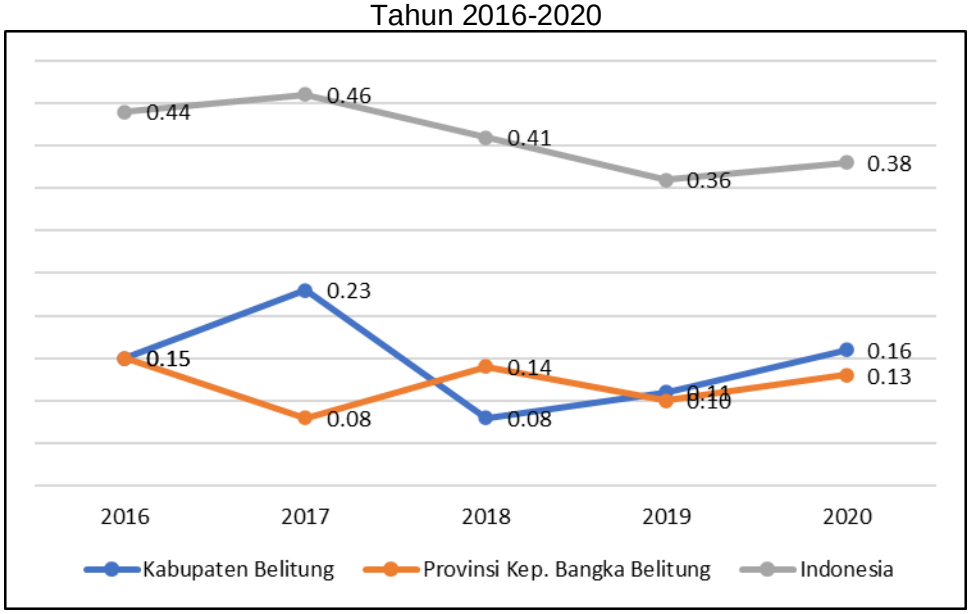
Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung yang tertinggi sebesar 1,14 persen terjadi pada tahun 2017 dan terendah sebesar 0,59 persen pada tahun 2018. Adapun nilai Indeks Kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0,74 persen. Angka ini masih berada di bawah nasional yang sebesar 1,61 persen namun diatas provinsi yang hanya terpaut 0,14 poin atau sebesar 0,60 persen. Perkembangan Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin lebih cenderung menjauh dari garis kemiskinan namun sifatnya tidak stabil. Artinya rata-rata pendapatan orang miskin di kabupaten Belitung tahun 2020 adalah 0,74 kali lebih rendah dari Garis Kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dan

memang persoalan kemiskinan ini benar-benar kompleks karena tidak sekedar jumlah dan persentasenya, namun juga tingkat kedalaman dan tingkat keparahan penduduk miskin itu sendiri sehingga dapat ditentukan kebijakan yang lebih tepat dalam menanggulangi kemiskinan tersebut.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,23 persen dan capaian terendah di tahun 2018 dengan nilai 0,08 persen. Pada tahun 2020, Indek Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 0,16 persen. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut agar dapat keluar dari kemiskinan.

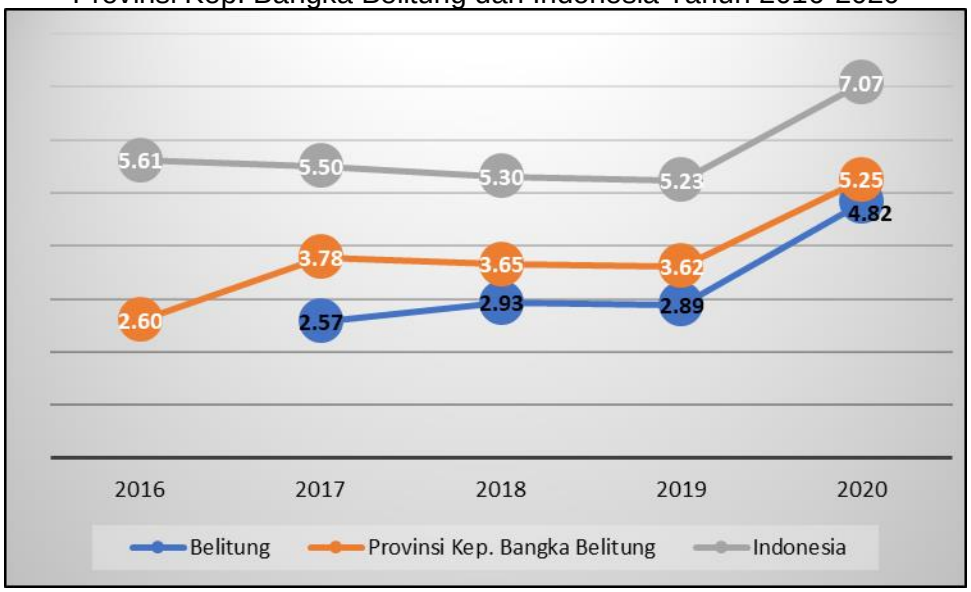
h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting karena digunakan untuk mengukur dan menganalisa capaian pembangunan. TPT diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Belitung cenderung menurun dalam kurun 2017-2019

namun mengalami lonjakan yang cukup tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,82 persen. Adapun data untuk tahun 2016 belum tersedia karena pergeseran anggaran yang awalnya untuk Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) - BPS (bulan Agustus) oleh pemerintah pusat dialihkan untuk kepentingan yang lain.

Dari grafik 2.14 di bawah ini terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung masih berada di bawah provinsi dan nasional, dengan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 2,89 di tahun 2019 menjadi 4,82 di tahun 2020 atau naik 1,93 poin. Pola serupa terjadi di Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia yang juga mengalami lonjakan kenaikan pada tahun 2020 berturut-turut sebesar 1,63 poin dan 1,84 poin. Hal ini tidak lepas dari efek pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Tekanan yang berat amat dirasakan di semua sektor usaha, baik yang berskala besar dan formal maupun di sektor informal yang berimbas pada pengurangan penghasilan dan bahkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja informal.

Grafik 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka KabupatenBelitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini bisa dilihat dari jenis kelamin maupun tingkat pendidikan pekerja tersebut. Di Kabupaten Belitung sendiri memiliki TPAK yang

cenderung tidak stabil dalam kurun lima tahun terakhir sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2015-2019

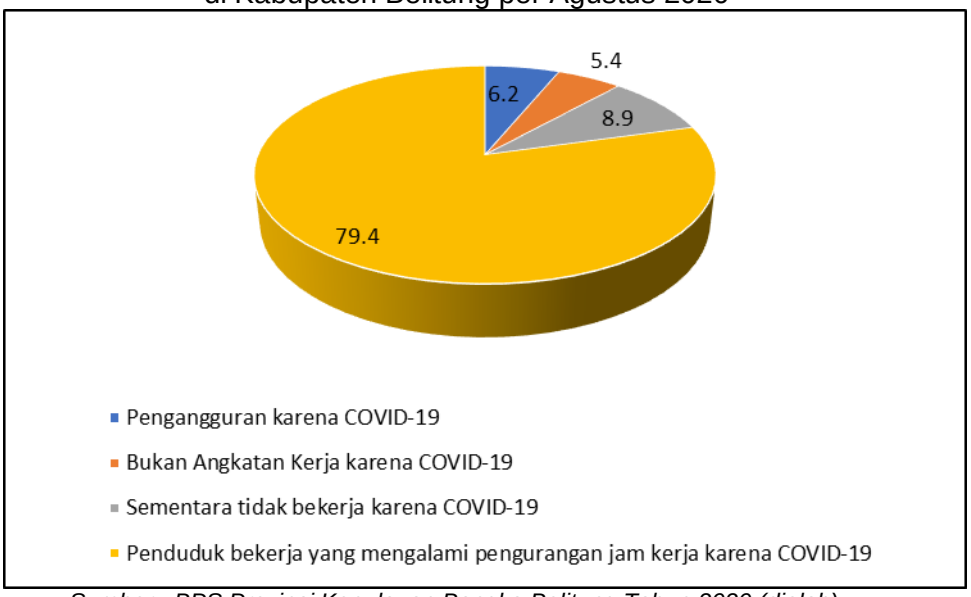
No	Kab/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	-	65.75	64.10	64.30	63.93
2	Belitung	-	69.29	70.36	68.74	69.32
3	Bangka Barat	-	68.17	70.47	66.99	65.76
4	Bangka Tengah	-	69.26	70.99	69.65	70.85
5	Bangka Selatan	-	64.70	67.40	68.12	68.86
6	Belitung Timur	-	68.00	71.93	71.37	71.33
7	Pangkalpinang	-	63.42	63.64	68.35	62.37
8	Provinsi Kep. Bangka Belitung	68.93	66.72	67.79	67.70	66.89

Sumber : BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, Tahun 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung pada tahun 2020 adalah 69,32% atau dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang di antaranya memasuki pasar lapangan kerja. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan TPAK tahun sebelumnya yang sebesar 68,74%. Hal yang serupa juga ternyata terjadi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Memang diharapkan dengan kenaikan TPAK ini maka akan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, khususnya di Kabupaten Belitung. Tentunya dari nilai TPAK yang tinggi maka dapat memicu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang berarti semakin sedikit angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja yang ada.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik mengenai Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus 2020 yang dirilis oleh BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung pada 5 November 2020 menyatakan bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: 1) Penganggur; 2) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada bulan Februari-Agustus 2020; 3) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan 4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Grafik 2.17 Persentase Penduduk Usia Kerja terdampak COVID-19 di Kabupaten Belitung per Agustus 2020



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (diolah)

Grafik di atas menggambarkan bahwa sebanyak 79,4 persen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 atau 10.122 orang dari total 12.747 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung. Sementara itu hanya 5,4 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung yang bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 selama bulan Februari-Agustus 2020 dan sebanyak 1.139 orang atau 8,9 persen penduduk yang sementara tidak bekerja karena COVID-19. Kelompok ini umumnya merupakan pekerja informal di sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena merupakan sektor penopang pariwisata di Kabupaten Belitung.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

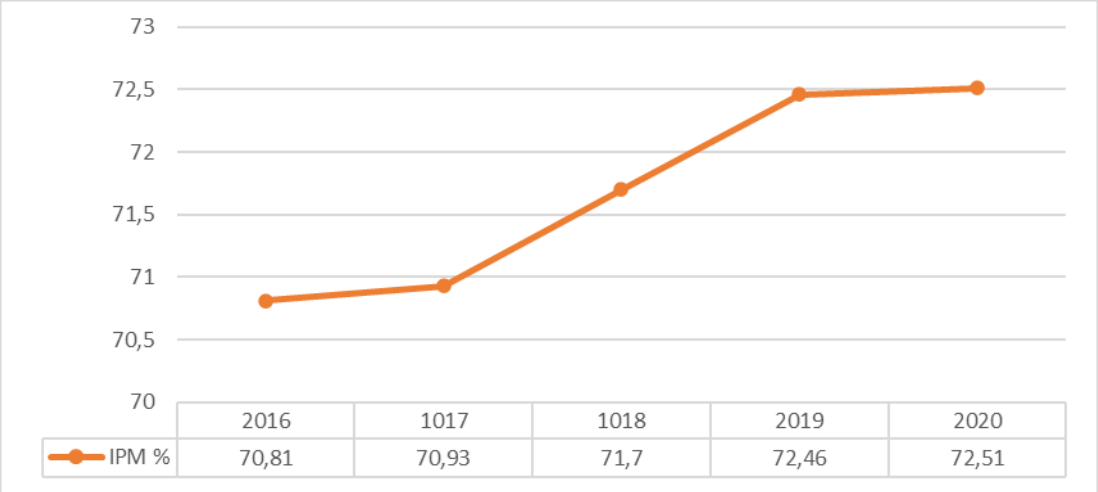
Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga dilihat dari kesehatan dan pendidikan. pada sub bab ini akan dilihat analisis kinerja kesejahteraan sosial yang dilakukan pada indikator-indikator yang relevan.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami tren yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir ini, namun pada tahun 2020 capaian pembangunan manusia di Kabupaten Belitung cenderung melambat. Hal ini sebagaimana data yang dirilis

oleh Badan Pusat Satistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2020 mencapai 72,51 dengan capaian pertumbuhan 0,07 %. Pertumbuhan IPM ini merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 disinyalir berpengaruh terhadap capaian pembangunan manusia tahun 2020. Dengan capaian IPM tersebut maka Kabupaten Belitung masih berada pada kelompok status pembangunan manusia "tinggi" bersama-sama dengan Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2016-2020 disajikan sebagaimana Grafik 2.18 berikut :

Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, IPM Kabupaten Belitung berada di peringkat kedua tertinggi setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 78,22. Sementara itu untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami peningkatan IPM yang semula 71,30 pada tahun 2019 menjadi 71,47 di tahun 2020. Nilai IPM kabupaten Belitung juga berada di atas nilai IPM nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 72,46 menjadi 72,51 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,03%. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2016-2020:

Tabel 2.33 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belitung	70,81	70,93	71,7	72,46	72,51
Belitung Timur	69,70	69,57	70,22	70,84	70,92
Bangka	70,43	71,09	71,8	72,39	72,40
Bangka Tengah	68,36	68,99	69,52	70,33	70,45
Bangka Barat	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08
Bangka Selatan	64,57	65,02	65,98	66,54	66,90
Pangkalpinang	76,73	76,86	77,43	77,97	78,22
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), dimensi pendidikan (pengetahuan) dan dimensi ekonomi (standar hidup layak). Indikator dari umur panjang dan hidup sehat adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH adalah umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Selanjutnya pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Adapun Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Kemudian indikator untuk standar hidup layak adalah pengeluaran per kapita. Berikut ini diuraikan masing-masing komponen yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung sebagaimana tertera pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.34 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2020

1) Umur Harapan Hidup

No.	Uraian	Umur Harapan Hidup				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	70,38	70,44	70,64	70,94	71,05
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	69,92	69,95	70,18	70,5	70,64
3	Indonesia	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47

2) Harapan Lama Sekolah

No.	Uraian	Harapan Lama Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	11,47	11,51	11,83	11,84	11,85
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	11,71	11,83	11,87	11,94	12,05
3	Indonesia	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

3) Rata-rata Lama Sekolah

No.	Uraian	Rata-rata Lama Sekolah				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	8,10	8,11	8,15	8,41	8,46
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	7,62	7,78	7,84	7,98	8,06
3	Indonesia	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48

4) Pengeluaran per Kapita

No	Uraian	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	12.865	12.910	13.281	13.662	13.554
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	11.960	12.066	12.666	12.959	12.794
3	Indonesia	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013

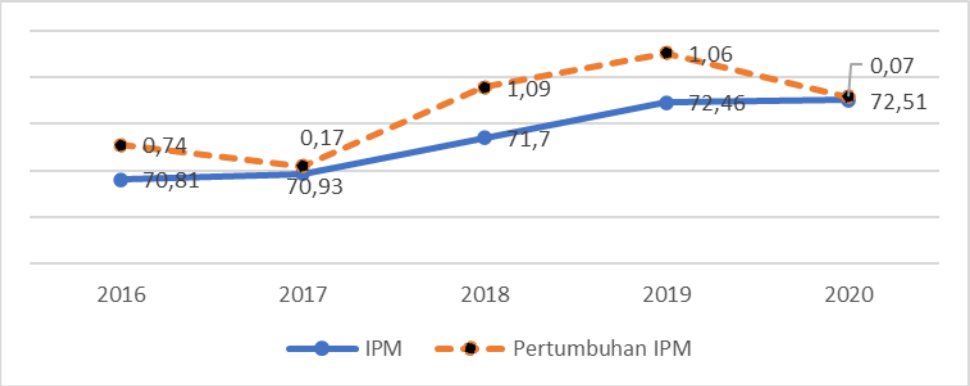
Sumber : Badan Pusat Statistik,2021

Berdasarkan komponen penyusunan IPM tersebut di atas, dapat diketahui bahwa komponen penyusun IPM yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah cenderung mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya yaitu pengeluaran per kapita mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Penurunan rata-rata per kapita ini juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan IPM. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan disektor ekonomi.

Berdasarkan nilai setiap komponen penyusun IPM Kabupaten Belitung di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Belitung mengalami perlambatan. Jadi, meskipun nilai IPM meningkat setiap tahunnya, tapi capaian pertumbuhan IPM itu sendiri justru mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan IPM yang hanya 0,07% pada tahun 2020 dan 1,06% di tahun 2019. Demikian juga perbandingan nilai setiap komponen penyusun IPM yang meningkat namun tidak terlalu signifikan.

Grafik 2.19 IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Umur Harapan Hidup terkait erat dengan angka kematian bayi di suatu daerah. Semakin tinggi angka kematian bayi, maka nilai UHH akan semakin rendah dan demikian juga sebaliknya. UHH akan naik secara signifikan jika pemerintah dapat menurunkan angka kematian bayi yang berarti meminimalisir faktor yang mempengaruhi kematian bayi, seperti usia kawin muda, sanitasi/jamban dan kebersihan lingkungan rumah, cakupan kunjungan ibu hamil, bidan yang memiiliki standar kompetensi, pola pengasuhan dan pemberian makanan bayi dan sebagainya. Selain itu fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu dimaksimalkan, salah satunya dengan membentuk rumah tunggu bersalin.

Di bidang pendidikan, pemerintah dapat lebih mengaktifkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), pengawasan dan pencegahan siswa putus sekolah, pemberian beasiswa atau bantuan lainnya bagi anak berprestasi yg ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi namun terkendala ekonomi, pemberian kursus bagi masyarakat miskin dan pendirian PAUD (dalam hal ini pendirian PAUD dan pengelolaannya dapat menggunakan dana desa). Jadi, dana desa juga punya peran dalam meningkatkan IPM khususnya di Kabupaten Belitung.

Selanjutnya di sektor ekonomi, peningkatan pengeluaran perkapita diperolah dari daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan produktivitas. Salah satu upaya tersebut dapat melalui pembentukan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan peningkatan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

b. Aspek pendidikan

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Investasi pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumberdaya manusia yang handal dengan tingkat kompetensi yang tinggi sangatlah dibutuhkan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kualitas layanan pendidikan Kabupaten Belitung tergambarkan melalui capaian beberapa indikator di bawah ini:

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator paling dasar untuk mengevaluasi taraf literasi penduduk di suati daerah adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis minimal kalimat sederhana. Angka melek huruf selama tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang memuaskan seperti ditunjukkan pada tabel **berikut ini:**

Tabel 2.35 Angka Melek Huruf Tahun 2015-2019

Angka Melek Huruf (%)	Tahun				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	98,86	97,35	98,69	98,29	98,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Peningkatan capaian Angka Melek Huruf tahun 2015-2019 di atas menunjukkan semakin baiknya kualitas kinerja pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait didalam peningkatan kualitas pendidikan daerah, Angka melek huruf di Kabupaten Belitung tahun 2019 sebesar 98,89 % yang artinya masyarakat di Kabupaten Belitung hampir semua dapat membaca dan menulis selain itu indikator di atas juga menunjukkan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat didalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Berikut ini tabel perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.36 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten BelitungTahun 2016-2020

No	APM Jenjang Pendidikan (%)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI	107,34	108,95	99,59	94,39	94,99
2.	SMP/MTs	100,15	81,69	79,92	78,50	81,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2021

Data tabel 2.36 di atas memperlihatkan bahwa angka APM jenjang SD/MI mengalami fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2019.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94,99 % dari 108,95 % pada tahun 2017, hal tersebut disebabkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan usia anak sekolah untuk duduk sekolah jenjang SD/MI yaitu usia 7 tahun sampai dengan usia 12 tahun, namun masih terdapat anak SD/MI yang berusia lebih dari usia yang telah ditetapkan tersebut. Begitu pula dengan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 81,18% dari 78,50% dari tahun sebelumnya.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Belitung selama periode 2016-2020.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD dan SMP Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan (%)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD	122,53	119,17	117,88	105,71	102,69
2.	SMP	111,07	100,1	98,52	102,01	100,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2021

4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif (15 tahun ke atas). Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik sehingga produktivitas perekonomian daerah juga bisa meningkat. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Belitung selama periode 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Lama Sekolah	8,10	8,11	8,15	8,41	8,46

Sumber : BPS Provinsi Babel 2021

Upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung terus dilakukan setiap tahunnya seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pedidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Berikut adalah tabel angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Belitung tahun 2016-2020.

Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	0,61	0,11	0,14	0,13	0,15
2.	SMP/MTs	0,44	0,74	0,17	0,11	0,30

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Persentase angka putus sekolah (DO) pada semua jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts merupakan salah satu prioritas dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Angka DO untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif, tapi menunjukkan peningkatan pada tahun 2020. Pada jenjang SD/MI menunjukkan peningkatan 0,02 poin dari 0,13 di tahun 2019 menjadi 0,15 pada tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs menunjukkan lonjakan angka putus sekolah hingga 0,19 poin dari 0,11 di tahun 2019 menjadi 0,30 di tahun 2020. Jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun 2020 mencapai dua kali lebih banyak. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan diganti dengan Belajar Dari Rumah (BDR). Proses pembelajaran itu dianggap tidak efektif untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan.
2. Siswa terutama pada jenjang SMP sudah memiliki kesibukan lain selama belajar dari rumah, seperti membantu orang tuanya. Sehingga berakibat malasnya siswa bersekolah.
3. Siswa SMP pada suatu wilayah dan kondisi tertentu memliki aktivitas sendiri dan memiliki penghasilan. Sehingga tidak lagi memiliki motivasi untuk bersekolah.

Hal ini masih menjadi perhatian pemerintah agar angka putus sekolah (DO) segera tuntas sehingga anak usia sekolah benar-benar bersekolah sesuai jenjang pendidikannya. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menjamin anak-anak usia wajib belajar untuk bersekolah melalui pendidikan gratis, namun kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi perkembangan sosial dan motivasi belajar siswa sehingga dengan alasan ikut meringankan beban keluarga mereka harus bekerja.

c. Aspek kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2020 tercatat 14,30 perseribu kelahiran hidup atau 46 bayi dari 3.197 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kelahiran hidup sebesar 2.951, sebagaimana digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.40 Angka Kematian Bayi Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kasus Kematian Bayi	AKB Kab Belitung per 1.000 KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016	3.155	33	10
2.	2017	2.887	29	10
3.	2018	3.048	37	12,1
4.	2019	2.951	52	14
5.	2020	3.197	46	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara dan kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung, karena kesehatan bayi yang baru lahir sangat dipengaruhi oleh keadaan tempat tinggalnya dan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai dan adat istiadat serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia.

Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Penyebab kematian terbesar dari tahun ke tahun adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), *asfiksia* (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas dengan teratur dan spontan), yang disebabkan karena *prematuritas* sehingga organ belum matang atau belum siap bertahan hidup serta kematian disebabkan kelainan kongenital dan kelainan bawaan. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan Angka kematian bayi antara lain memberikan Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil KEK agar tidak terlahir bayi dengan kondisi BBLR. Selain itu dilakukan sosialisasi tentang cara perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif dan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan (bidan dan dokter) dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan komplikasi pada bayi.

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 94 per 100.000 KH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 137 per 100.000 Kelahiran Hidup, namun hal tersebut menggambarkan masih terjadinya kasus kematian ibu yang disebabkan karena kasus pendarahan

dan *eklampsi* pada ibu hamil, Hamil di luar kandungan serta adanya risiko tinggi ibu hamil seperti penyakit gagal jantung, sepsis, diabetes melitus dan stroke. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Belitung selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.41 Angka Kematian Ibu Kabupaten Belitung Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kasus Kematian Ibu	AKI Kab. Belitung per 100.000 KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016	3.155	4	127
2.	2017	2.887	6	208
3.	2018	3.048	6	196
4.	2019	2.951	4	1367
5	2020	3.197	3	94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2021

3. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Usia Harapan Hidup)

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, angka ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir kabupaten mengalami *trend* peningkatan, semula 70,38 tahun pada tahun 2016 menjadi 71,05 tahun pada tahun 2020, sebagaimana terlihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.42 Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
(1)	(2)	(3)
1.	2016	70,38
2.	2017	70,44
3.	2018	70,64
4.	2019	70,94
5.	2020	71,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

4. Status Gizi Balita

Status gizi balita diukur berdasarkan indikator umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB/PB). Variabel BB dan TB/PB balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Penilaian status gizi balita diperoleh dengan melakukan konversi angka berat badan dan tinggi badan setiap balita ke dalam nilai terstandar (*Zscore*), menggunakan baku antropometri balita WHO 2005. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U terbagi menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berdasarkan indeks TB/U terbagi menjadi sangat pendek, pendek, normal, dan berdasarkan indeks BB/TB terbagi menjadi gemuk, normal, kurus, sangat kurus.

Kekurangan gizi merupakan masalah utama kesehatan pada anak balita karena dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangannya serta berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas anak. Untuk menentukan masalah gizi di suatu wilayah digunakan istilah *underweight* (gabungan gizi buruk dan gizi kurang), *stunting* (gabungan sangat pendek dan pendek), dan *wasting* (gabungan sangat kurus dan kurus). Keadan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal, Rendahnya status gizi berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Data status gizi balita di Kabupaten Belitung berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tahun 2016 – 2020 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43 Status Gizi Balita di Kabupaten BelitungTahun 2016 – 2020

No	Masalah Gizi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Underweight	7,3	15,7	9,38	9,38	5,56
2	Stunting	18,9	27,6	10,76	10,39	6,98
3	Wasting	4,0	7,7	5,65	5,62	2,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2021

Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita stunting kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Karakteristik masalah gizi di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 yaitu masalah gizi dengan kategori akut. Ada kecenderungan

penurunan yang signifikan persentase balita pendek (TB/U), serta sedikit penurunan pada balita kurus (BB/U).

Masalah pesentase balita pendek berdasarkan indikator TB/U sebagai akibat dari keadaan berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak bersih dan sehat, dan asupan makanan kurang dalam jangka waktu yang lama sejak usia bayi, bahkan semenjak janin sehingga menyebabkan anak menjadi pendek. Sedangkan masalah gizi bersifat akut berdasarkan indikator BB/U sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

Kejadian balita *stunting* (pendek) merupakan masalah gizi yang sudah mendapatkan penanganan dengan cukup baik. Meskipun prevalensi balita stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi kurang dan gizi kurus. Prevalensi balita pendek mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 10,39% menjadi 6,98% pada tahun 2020. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor, yaitu: kondisi kesehatan dan gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, kurangnya asupan gizi pada bayi serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.

Kondisi sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh buruknya higiene sanitasi yang buruk (misalnya diare dan kecacingan) dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan stunting.

Data indikator kesehatan lingkungan di Kabupaten Belitung selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.44 Data Indikator Kesehatan Lingkungan Di Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah Tangga ber-PHBS	36,3	75,6	34,32	39,88	39,99
2	Rumah Sehat	68,8	75,9	74,33	77,433	82,20
3	Akses Air Minum Berkualitas	74,29	76,08	76,69	81,38	82,1
4	Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak	75,36	77,96	76,37	91,79	91,52
5	Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan	71,50	84,09	81,33	76,09	87,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2021

Rumah tangga yang yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2020 sebanyak 39,99%, itu artinya hanya 39,99% masyarakat Belitung yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penurunan jumlah Rumah Tangga yang sudah ber-PHBS di tahun 2018, 2019 dan 2020 dibandingkan tahun 2017 karena ada perbedaan perhitungan data, yaitu jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di Kabupaten Belitung. Sedangkan pada tahun 2017 hanya menggunakan data jumlah Rumah Tangga yang disurvey. Namun, melihat trend data tersebut ada peningkatan jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Bila dibandingkan dengan target PHBS dari Renstra Kesehatan RI tahun 2014-2019 sebesar 80%, angka yang rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Belitung masih dibawah target nasional. Perilaku hidup bersih dan sehat seseorang sangat berkaitan dengan peningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

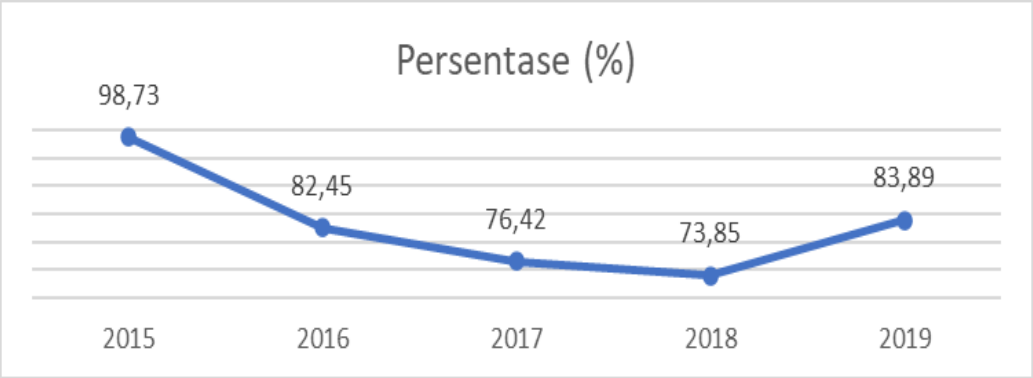
d. Kesejahteraan Sosial

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah indikator yang menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun tersebut. Persentase penanganan PMKS di Kabupaten Belitung selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik 2.20 Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2015-2019



Sumber data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung Tahun 2020

Penanganan PMKS pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 73,85% pada tahun 2018 menjadi 83,89% pada tahun 2019. Data jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Belitung terhadap Jumlah PMKS yang ada sebagai berikut :

Tabel 2.45 Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Sosial yang Tertangani	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	9.041	8.908	98,53
2015	9.722	9.599	98,73
2016	9.656	7.961	82,45
2017	14.618	11.171	76,42
2018	13.534	9.995	73,85
2019	14.337	12.027	83,89

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung

2. Jumlah Sarana Sosial

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin satu diantranya adalah tersedianya panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.46 Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

No	Sarana Sosial	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Panti Asuhan (Unit)	4	4	3	3	3
2.	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1	1
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	2	2	2	2
	Jumlah	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana panti sosial selama 5 (lima) tahun terakhir tetap tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Semua sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak terlantar dan lanjut usia terlantar sehingga dapat ditangani dan dibina sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan salah satu kebutuhan dasar yang layak.

2.2.3 Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera Dalam pembangunan daerah, bidang seni, budaya dan olahraga merupakan bidang strategis yang menjadi salah satu indikator keberhasilan

pembangunan. Hal ini terutama terkait tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal, serta keberlanjutan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dalam berbagai pertandingan atau *event* olahraga yang diikuti oleh daerah.

a. Seni Budaya

Kabupaten Belitung mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Belitung seperti upacara adat, benda cagar budaya dan kesenian tradisional. Keragaman seni dan budaya tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang akan. Selain sebagai upaya pelesetarian agar bisa menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Jenis Kesenian dan Group Kesenian di Kabupaten Belitung dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu Tradisi, Kreasi dan Campuran (Tradisi dan Kreasi). Kesenian Tradisi adalah kesenian yang tidak merubah ciri khas kesenian tersebut dari zaman dahulu sampai saat ini masih orisinil, sedangkan kesenian kreasi adalah kesenian yang memodifikasi kesenian yang sudah ada yang bersifat kontemporer, adapun kesenian campuran merupakan pembauran atau gabungan dua jenis kesenian tersebut.

Jumlah sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Belitung berjumlah 50 buah, Gedung kesenian sebanyak 1 (satu) buah dan musiam Kabupaten Belitung ada 2 (dua) buah, sedangkan jumlah Cagar Budaya dan museum yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Jumlah Cagar Budaya dan Museum

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Benda Cagar Budaya	0	0	0	0	0
2.	Bangunan Cagar Budaya	27	27	27	27	27
3.	Struktur Cagar Budaya	1	1	1	1	1
4.	Situs Cagar Budaya	10	10	10	10	10
5.	Museum	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2021

b. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana

olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah.

Jumlah pemuda yang mendapatkan pelayanan kepemudaan sebanyak 400 orang untuk seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Belitung, yang terpilih sebanyak 32 orang untuk Paskibraka ringkat Kabupaten (16 putra dan 16 putri). Pemerintah Kabupaten Belitung melalui PD terkait memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi kepemudaan yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan peningkatan kompetensi kepemudaan, yang salah satunya pada kegiatan pengemblengan Paskibraka Tahun 2021 dari mulai seleksi telah menghasilkan prestasi antara lain :

1. Pengiriman Paskibraka Tingkat Nasional 1 Orang (Putri).
2. Pengiriman Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 orang (1 Putri dan 3 Putri).

Peningkatan prestasi olah raga diupayakan oleh daerah melalui perangkat daerah terkait dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga serta melakukan pembinaan terpadu terhadap para atlet dan pelatih pada cabang-cabang olah raga.

Untuk meningkatkan motivasi masyarakat akan gemar berolah raga maka dilaksanakan beberapa program yang nantinya diterjemahkan ke dalam beragam kegiatan berupa penyelenggaraan kejuaraan serta pembinaan terhadap cabang olah raga termasuk olah raga tradisional.

Berikut capaian perolehan medali kejuaraan olahraga di tingkat provinsi, regional, Nasional dan Internasional Tahun 2018 - 2020.

Tabel 2.48 Capaian Perolehan Medali Tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Intenasional Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Perolehan Medali			Ket
		Emas	Perak	Perunggu	
1	2018	39	39	64	Pekan Olahraga Provinsi IV (Bangka Tengah)
2	2019	3	1	3	Pada Even Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan pada tingkat Provinsi,Regional,Nasional dan Internasional
3	2020	2	4	8	

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Untuk gedung olahraga Kabupaten Belitung memiliki 1 (satu) buah yaitu gedung olahraga yaitu Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan sedangkan

sarana prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49 Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga per Tahun (Unit)						
		2016	2017	2018	2019	2020		
						Standar	Tidak Standar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	-	1
2.	Stadion Sepakbola	1	1	1	1	1	-	1
3.	Sepak bola	44	45	46	118	87	31	118
4.	Futsal	-	-	-	37	37	-	37
5.	Tenis lapangan	6	6	6	11	11	-	11
6.	Bola voli	72	72	72	195	158	37	195
7.	Bola voli pantai	-	-	3	3	3	-	3
8.	Bola basket	7	7	7	16	16	-	16
9.	Bulu tangkis	47	47	47	63	44	19	63
10.	Sepak takraw	37	37	37	37	6	31	37
11.	Atletik	1	1	1	5	5	-	5
12.	Tenis meja	43	43	43	43	43	-	43
13.	Taekwondo	2	2	2	2	2	-	2
14.	Karate	2	2	2	2	2	-	2
15.	Pencak silat	3	3	3	3	3	-	3
16.	Panjat tebing	1	1	1	1	1	-	1
17.	Kolam renang	5	5	5	9	4	5	9
18	Golf	-	-	1	2	2	2	

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung, Tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah daerah berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, hal ini diterjemahkan kedalam bentuk pelayanan umum/publik yang diberikan kepada masyarakat yang berorientasikan kepada kualitas pelayanan yang baik. Secara umum, pelayanan ini terbagi kedalam dua kelompok kecil, yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Adapun gambaran perkembangan dan keberhasilan indikator kinerja dari kedua layanan tersebut, sebagai berikut:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Kualitas layanan urusan wajib yang dilaksanakan daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat diukur dengan

mempergunakan indikator kinerja penyelenggaraan beberapa urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu urusan a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; f) sosial.

Sementara urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar antara lain : a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) lingkungan hidup; e) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; f) pemberdayaan masyarakat dan desa; g) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; h) perhubungan; i) komunikasi dan informatika; j) koperasi, usaha kecil dan menengah; k) penanaman modal; l) kepemudaan dan olahraga; m) statistik; n) kebudayaan; o) perpustakaan dan r) kearsipan. Berikut ini gambaran pencapaian indikator dari setiap urusan wajib tersebut :

2.3.1.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Pemerintah telah berupaya memenuhi berbagai kriteria dasar dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung. Sebagai tolok ukur capaian kinerja di bidang pendidikan dapat diperhatikan dari berbagai indikator yang dipergunakan untuk menunjukkan kualitas layanan pendidikan. Berikut merupakan gambaran umum hasil kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Belitung selama periode 2016-2020:

Tabel 2.50 Hasil Kinerja urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Kasar					
	- PAUD	77,84	61,36	62,19	55,20	59,88
	- SD/MI/Paket A	122,53	119,17	117,88	105,71	102,69
	- SMP/MTs/Paket B	111,07	100,1	98,52	102,01	100,38
2	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	107,34	108,95	99,59	94,39	94,99
	- SMP/MTs/Paket B	100,15	81,69	79,92	78,5	81,18
3	Angka Partisipasi Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	98,89	99,64	99,59	n/a	n/a
	- SMP/MTs/Paket B	97,86	82,63	97,41	n/a	n/a
4	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	0,61	0,11	0,14	0,13	0,15
	- SMP/MTs/Paket B	0,44	0,74	0,17	0,11	0,30
5	Angka Kelulusan					
	- SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan					
	- SD/MI/Paket A	97,29	97,34	96,59	99,83	96,70
	- SMP/MTs/Paket B	96,51	94,06	n/a	94,33	87,11
7	Rasio Ketersediaan Sekolah					
	- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	59,83	61,26	62,46	58,37	55,78
8	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar					
	- SD/MI/Paket A	605,32	561,14	559,31	621,79	622,59
	- SMP/MTs/Paket B	481,28	453,08	464,79	548,34	603,81
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	79,56%	82,36%	82,84%	88,22%	80,30%
10	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1	8,11	8,15	8,41	8,46
11	Angka Harapan Lama Sekolah				11,84	11,85
12	Persentase SD/MI berakreditasi Minimal B	98,39	98,39	98,39	98,37	n/a
13	Persentase Jumlah SD yang terakreditasi A					10,66
14	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	93,33	93,33	93,33	93,75	n/a
15	Persentase Jumlah SMP yang terakreditasi A					46,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun 2021

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara umum dapat dikatakan baik.

Dari data tabel di atas menunjukkan APK yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2016 hingga 2017 nilainya mengalami penurunan dari 77,84% menjadi 61,36% dan naik sebesar 0.83 poin menjadi 62,19% pada tahun 2018 sebelum turun kembali pada tahun 2019 sebesar 55,20%. Terjadinya peningkatan pada tahun 2020 yang berarti bahwa hanya sekitar 59,88% dari jumlah penduduk usia 3 sampai dengan 6 atau penduduk yang mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Belajar di Kabupaten.

APK jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini berarti masih banyak penduduk di luar usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI, namun sudah menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan bersekolah sesuai batas usia pada jenjang tersebut. Sedangkan APK SMP/MTs menunjukkan peningkatan lagi sebesar 3,49 dari 98,52% tahun 2018 menjadi 102,01% di tahun 2019 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 100,38%. Hal ini berarti adanya peningkatan jumlah murid SMP/MTs di luar usia 13-15 tahun. Pemahaman masyarakat yang semakin meningkat tentang pentingnya pendidikan merupakan hasil upaya keras Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap peningkatan sarana prasana pendidikan dan fasilitas publik. Selain itu, adanya program bantuan pendidikan salah satunya Program Indonesia Pintar yang dapat membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Capaian APM pada jenjang SD/MI di Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif, capaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 108,95%, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 99,59% dan turun lagi sebesar 5,2 poin menjadi 94,39%sebelum naik lagi sebesar 0,60 point pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu sesuai batas usia jenjang sekolahnya. Demikian juga dengan APM jenjang SMP/MTs yang juga cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 100,15% kemudian terus menurun hingga sebesar 78,50% pada tahun 2019 sebelum kembali meningkat pada tahun 2020 menjasi 81,18%.

Penurunan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tersebut karena adanya kecenderungan usia masuk SD/MI yang makin muda (kurang dari 7 tahun). Adanya anak yang berusia 6 tahun yang berada di SD/MI dan anak

yang berusia 12 tahun di jenjang SMP/MTs tidak terhitung dalam menentukan APM. Trend ini juga terjadi hampir di semua wilayah Indonesia, anak yang belum cukup umur sudah dimasukkan pada pendidikan formal. Sehingga kecenderungan Angka Partisipasi Murni (APM) akan menurun dari tahun ke tahun.

Prosentase angka putus sekolah (DO) pada semua jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts merupakan salah satu prioritas dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Angka DO untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif, tapi menunjukkan penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada jenjang SD/MI menunjukkan penurunan 0,01 poin dari 0,14 di tahun 2018 menjadi 0,13 pada tahun 2019. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs menunjukkan penurunan 0,06 poin dari 0,17 di tahun 2018 menjadi 0,11 di tahun 2019. Kondisi ini cukup menggembirakan dan tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan persuasif serta pemberian bantuan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu agar keinginan siswa untuk tetap bersekolah dapat terwujud. Namun hal ini masih menjadi perhatian pemerintah agar angka putus sekolah (DO) segera tuntas sehingga anak usia sekolah benar-benar bersekolah sesuai jenjang pendidikannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya siswa yang putus sekolah di tingkat SD, SMP, yaitu faktor sosial ekonomi masyarakat, dan perlunya peningkatan dukungan dan motivasi orang tua, terutama di daerah-daerah pedesaan tertentu. Baik orang tua maupun anak yang bersangkutan belum menyadari akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Selain itu juga terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan yang tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menjamin anak-anak usia wajib belajar untuk bersekolah melalui pendidikan gratis, namun kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi perkembangan sosial dan motivasi belajar siswa sehingga dengan alasan ikut meringankan beban keluarga mereka harus bekerja.

Angka Kelulusan untuk jenjang SD dan SMP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan angka kelulusan sempurna yaitu 100%, sedangkan untuk prosentase kelulusan tingkat SMP juga 100% selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2016-2020. Dengan meningkatnya angka kelulusan baik di SD dan SMP maka peserta paket dari peserta gagal formal semakin sedikit. Namun

bukan berarti perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan paket A,B, dan C di Kabupaten Belitung menjadi berkurang, tetapi sebaliknya akan berusaha meningkatkan sehingga menjadi sebuah lembaga yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui program wajib belajar 9 tahun berusaha mencapai target Angka Melanjutkan (AM) 100%. Prosentase angka melanjutkan SD/MI (dari SD/MI ke SMP/MTs) Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif, namun menunjukkan peningkatan 3,24 poin dari tahun 2018 sebesar 96,59% menjadi 99,83% pada tahun 2019 sebelum turun pada tahun 2020. Sedangkan untuk angka melanjutkan SMP/MTs (dari SMP ke SMA/SMK/MA) juga masih fluktuatif, dan menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 94,06% menjadi 94,33% pada tahun 2019 sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 87,11%. Angka melanjutkan SMP pada tahun 2018 tidak dapat dijelaskan, karena tidak tersedianya data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan sepanjang tahun 2020 telah dilakukan dimulai dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa melalui pelatihan dan lomba, serta melengkapi sarana prasarana dalam upaya peningkatan mutu baik guru maupun siswanya.

Rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 62,36 sekolah per 10.000 penduduk menjadi 55,78 sekolah per 10.00 penduduk pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang terus meningkat, sementara persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTs tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan.

Jumlah guru yang berpendidikan S1/DIV juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari capaian lima tahun terakhir, persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV pada tahun 2016 sebesar 79,56% meningkat menjadi 80,30% pada tahun 2020. Beberapa guru yang belum berpendidikan S1/DIV disebabkan oleh faktor usia, guru yang sudah berusia lebih dari 50 tahun enggan melanjutkan ke jenjang pendidikan S1/DIV dengan pertimbangan sudah mendekati usia pensiun.

b. Kesehatan

Disamping pelayanan publik di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga perlu mendapatkan gambaran yang proporsional dari sisi ketersediaan, penyebaran, dan kualitas pelayanan. Dari sisi ketersediaan sarana dan

prasarana kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 telah memiliki sarana prasarana sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51 Data Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Belitung

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
1.	Puskesmas Non Perawatan Telah Terakreditasi	6	Unit
2.	Puskesmas Perawatan (Terakreditasi)	3	Unit
3.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	31	Unit
4.	Poskesdes	35	Unit
5.	Polindes	5	Unit
6.	Posyandu	178	Unit
7.	Desa Siaga	49	Desa/kel
8.	Puskesmas Keliling	13	Unit
9.	Ambulance SPGDT	1	Unit
10.	RSUD Type C	1	Unit
11.	RSU Swasta	2	Unit
12.	Klinik Swasta	11	Unit
13.	Poliklinik	4	Unit
14.	Pusling Perarairan	3	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Puskesmas sebagai unit layanan kesehatan tingkat dasar di Kabupaten Belitung belum 100% memiliki status terakreditasi madya, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan status layanan tersebut. Adapun data akreditasi puskesmas sebagai berikut:

Tabel 2.52 Data Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Belitung

Tahun	2018								
Puskesmas	**Tanjungpandan**	**Air Saga**	**Perawas**	**Badau**	**Sijuk**	**Tanjung Binga**	**Membalong**	**Simpang Rusa**	**Selat Nasik**
Status Akreditasi	Madya	Madya	Dasar	Utama	Madya	Dasar	Madya	Dasar	Dasar
	2019								
Status Akreditasi	Utama	Madya	Madya	Utama	Madya	Dasar	Utama	Dasar	Dasar
	2020								
Status Akreditasi	Utama	Madya	Madya	Utama	Madya	Dasar	Utama	Dasar	Dasar

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono pada tahun 2020 sudah berstatus Akreditasi Paripurna dengan dengan keseluruhan 16 pokja yang sudah terpenuhi yaitu :

1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
2. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS);
3. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK);
4. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO);
5. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS);

6. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK);
7. Asesmen Pasien (AP);
8. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP);
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB);
10. Program Nasional
    - Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
    - Menurunkan Angka Kesakitan HIV/AIDS.
    - Pelayanan Geriatri.
    - Penyelenggaraan Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA).
11. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP);
12. Hak Pasien dan Keluarga (HPK);
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
14. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE);
15. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM);
16. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan di Rumah Sakit (IPKP).

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berkualitas tidaknya sumberdaya manusia, oleh karena itu daerah sangat memperhatikan pembangunan kesehatan melalui pembangunan urusan kesehatan. Berikut hasil kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Belitung selama periode 2016 – 2020:

Tabel 2.53 Hasil kinerja urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek/ Fokus/ Bidang urusan/Indkator Kinerja pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran Hidup	10	10	12,1	14	15
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup	127	208	196	137	94
3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	70,38	70,44	70,64	70,94	70,94
4	Rasio Posyandu per 100 Balita	1,26	1,71	1,31	1,36	1,16
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,31	95,63	117,1	132,6	107,38
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82,07	91,18	96,10	101	98,28
7	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	73,47	95,92	95,92	100	100
8	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang urusan/Indkator Kinerja pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
	pasien masyarakat miskin					
11	Cakupan kunjungan bayi	88,83	91,77	98,69	98,9	109,33
12	Angka kejadian malaria	0,01	0,05	0	0	0
13	Cakupan Puskesmas	180	180	180	180	180
14	Prevalensi gizi kurang	0,63	0,49	0,53	9,47	2,21
15	Cakupan pelayanan kasus HIV	-	50,33	60,96	60,96	95,72
16	Cakupan pelayanan kasus diabetes mellitus	-	74	20	134,3	120
17	Cakupan pelayanan kasus hipertensi	-	30,45	32,79	41,4	37,69
18	Cakupan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	98	100	76,7	97.63
19	Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	-	-	98%	93,10%	95,46%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan pada tahun 2020, yaitu sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup. Dari observasi umum dan pendataan unit layanan kesehatan, kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Belitung disebabkan oleh Asfiksia, kelainan congenital dan kelainan bawaan, dan kematian yang disebabkan BBLR.

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kematian ibu melahirkan adalah meningkatkan peran bidan. Dalam hal ini, bidan di desa benar-benar difungsikan sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB dan AKI.

Rasio Posyandu per satuan Balita Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 masih belum memenuhi target dan sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan, dimana standarnya adalah 12–50 posyandu per 1.000 balita. Pada Tahun 2020 rasio posyandu sebesar 1,16 per 100 Balita. Terkait ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat di Kabupaten Belitung terdapat 9 unit Puskesmas dengan tiga puskesmas rawat inap dan enam puskesmas non rawat inap. Tiga puskesmas rawat inap tersebut, antara lain Puskesmas Tanjung Binga, Puskesmas Membalong dan Puskesmas Selat Nasik. Untuk cakupan puskesmas di Kabupaten Belitung sudah mencapai 180%, kecamatan Tanjungpandan terdapat tiga Puskesmas, kecamatan Sijuk sebanyak dua puskesmas, Kecamatan Membalong dua puskesmas,

Kecamatan Selat Nasik dan Badau masing-masing satu puskesmas, begitu pula dengan puskesmas pembantu dimana jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu disetiap kecamatan telah tersedia.

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Belitung selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Pada tahun 2016 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 98,31%, dan kemudian meningkat menjadi 107,38 % di tahun 2020.

Perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Belitung selama periode 2016-2020 bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2019 telah mencapai 100%, namun pada tahun 2020 *Universal Child Immunization* (UCI) hanya mencapai 83,67%. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Sedangkan untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di kabupaten Belitung sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2016 hingga 2020 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah faktor penting didalam menunjang menunjang perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Belitung, yang mana menggambarkan dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Berikut hasil kinerja urusan Pekerjan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sepanjang 867 km. Kondisi jalan kabupaten sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 umumnya baik. Pada tahun 2020, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 607,22 km atau setara dengan 70,01% dari total panjang jalan kabupaten. Sedangkan jalan yang mendapat pemeliharaan bertambah menjadi sepanjang 586,70 km. Jalan yang mendapat pemeliharaan rutin sepanjang 538,69 km. Terdapat penambahan 30,94 km jalan kabupaten dalam

kondisi baik, serta terdapat penambahan 2,9 km jalan yang dilebarkan menurut standar lebar jalan kabupaten.

Standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) masih belum optimal karena ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Peemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan. Tahun 2020, Pemerintah Daerah telah menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan. Namun hal ini masih terkendala oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama kesediaan menghibahkan lahannya kepada pemerintah untuk kepentingan umum.

Jaringan irigasi yang dibangun pada tahun 2019 sepanjang 1.085,16 m, sedangkan jumlah irigasi yang direhabilitasi sepanjang 1.128 m. Jaringan irigasi tersebut mengairi sawah seluas 556,45 ha dari total luas sawah 1.030 ha, atau setara 54,02%. Kondisi air irigasi di Kabupaten Belitung sangat dipengaruhi oleh air tadah hujan. Sedangkan sebagai upaya pengendalian daya rusak air, maka Dinas PUPR telah membangun turap/talud/bronjong, dengan realisasi 10,07% dari yang direncanakan.

Tabel 2.54 Hasil kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Pekerjaan Umum:					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	67,69	73,68	76,46	83,44	88,09
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah Ada (%)	58,85	61,23	66,75	52,10	54,02
3	Persentase Pengendalian daya rusak air (%)	13,20	20,01	26,24	7,18	n/a
4	Rasio Jaringan Irigasi	34,01	38,01	53,79	68,57	n/a
	Penataan Ruang:					
5	Ketaatan terhadap RTRW1)	100%	100%	100%	100%	97,60 %
6	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 2)	100%	100%	100%	100%	n/a

7	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang.2)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya.2)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota.2)	Belum tersedia	Belum tersedia	30%	30%	31%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2021

Tingkat ketaatan tata ruang di kabupaten Belitung terlihat sedikit menunjukkan penurunan menjadi 97,60% dari sebelumnya 100%. Hal tersebut sudah cukup baik dan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sudah cukup sesuai dan tidak melanggar RTRW. Pemerintah daerah juga telah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam pengurusan izin tata ruang yang mana permohonnya langsung ditujukan kepada sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan persyaratan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait dengan luasan RTH Publik, berdasarkan data yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung, terdapat 5.899,96 hektar atau setara 31% luas RTH di wilayah Kecamatan Tanjungpandan yang merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Belitung.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan perumahan yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman. Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Kinerja atas layanan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Belitung mengacu pada cakupan rumah dan permukiman layak huni, permukiman kumuh, air bersih, air limbah dan drainase. Berikut hasil kinerja urusan Perumahan dan Permukiman selama tahun 2016-2020.

Tabel 2.55 Hasil kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman:					
1	Rasio permukiman layak huni	0.99	0.99	0,99	0,99	0,99
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	99.23	99,97	100	100	77,29
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	N/A	83,22	51,27	16,76	6,78
4	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Hektar)	N/A	17,31	32,96	35,61	10,29
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	N/A	5,42	n/a	0,10	1,26
7	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	65,10	67,43	n/a	79,31	80,48
8	Persentase pelayanan air bersih (%)	17,75	19,57	37,93	30,41	30,41
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (%)	81,32	81,60	81,81	83,80	83,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penetapan Basis Data Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Belitung diputuskan bahwa rumah tidak layak huni harus dituntaskan dalam periode 2013-2018, yaitu sebanyak 914 rumah. Ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Belitung telah mencapai 100%. Luas permukiman layak huni sebesar 288,98 ha dari seluruh total luas permukiman di Kabupaten Belitung sebesar 29.190 ha.

Terkait dengan luas permukiman kumuh, terlihat trend yang semakin menurun menjadi sebesar 6,78% atau 7,00 hektar dari sebelumnya di tahun 2019 sebesar 16,76% atau 17,29 hektar. Pada tahun 2020 telah dilakukan pengurangan kawasan kumuh seluas 10,29 hektar dari kondisi awal tahun 2019 seluas 17,29 hektar, dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBDes, APBN, maupun BPN KOTAKU.

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Belitung mengalami trend peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rumah

tangga pengguna air bersih sebesar 65,10%, dan 80,48% pada tahun 2020. Selama tahun 2020 telah terpasang 850 Sambungan Rumah (SR) baru, sehingga terdapat penambahan sekitar 2.788 jiwa penduduk yang telah terlayani air minum yang layak. Sedangkan persentase pelayanan air bersih Kabupaten Belitung masih sangat cukup rendah yaitu 30,41% pada tahun 2019, menurun dari tahun 2018 sebesar 37,93%. Hal ini disebabkan karena sumber air baku yang terkelola dengan baik masih belum optimal. Dari 17 unit sumber air baku di Kabupaten Belitung, hanya 1 unit sumber air baku yang sudah dikelola dengan baik.

Sedangkan untuk indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai semakin baik sejak 2016 hingga 2019 karena mengalami trend peningkatan setiap tahunnya yaitu dimulai pada tahun 2016 sebesar 81,32%, yang terus meningkat hingga 83,80% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, dari 16 unit SPALD-T tidak ada satu unit pun yang berhasil dibangun karena adanya *refocusing* dana DAK sanitasi dari pemerintah pusat.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(1) Pengelolaan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan diajarkan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan dalam aspek ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berikut hasil kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2016-2020:

Tabel 2.56 Hasil Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penegakan PERDA dan Perkada	100%	100%	100%	100%	98,8%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2021

Pada tahun 2020, hasil kinerja urusan ketentraman dan ketertiban melalui indikator kinerja penegakan PERDA dan PERKADA mencapai 98,8%. Penegakan PERDA dan PERKADA ini merupakan upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, serta mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib dan tentram. Selain anggota Satuan Polisi Pamong Praja, upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah satuan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	556	550	490	490	490

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) pada tahun 2020 sebanyak 490 orang, sehingga jumlah satlinmas pada setiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Belitung sebanyak 10 orang. Satpol PP harus berkolaborasi dengan satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

(2) Penanggulangan Bencana Kebakaran

Untuk memberikan pelayanan publik berupa proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, suatu daerah perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen

Kebakaran). Jumlah minimal WMK pada suatu daerah tergantung dari luas daerah tersebut dengan minimal satu WMK.

Response Time (waktu tanggap) merupakan waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran. Berikut hasil indikator kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2016-2020

Tabel 2.58 Hasil Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) *	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%
Persentase (%) korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : * Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2017, 2018, 2019, 2020*
*** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan bencana Kabupaten Belitung belum maksimal hanya 7,68% dengan 1 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Cakupan tersebut diukur dari perbandingan banyaknya jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk, serta didukung dengan keberadaan pos pemadam kebakaran.

Penanggulangan bencana kebakaran wajib dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai ditempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Sehingga

dibutuhkan penambahan Infrastruktur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran agar cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Belitung merata.

f. Sosial

Pada urusan sosial terdapat beberapa indikator yang menjadi ukuran kinerja, diantaranya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perkembangan pada urusan Sosial dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59 Hasil kinerja urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah PMKS	9.656	14.618	13.534	14.337	13.606
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	82,45	76,42	73,85	83,89	94,77
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap(%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	82,45	76,42	73,85	83,89	94,77

Sumber : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung, 2021

Dari data di atas pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 731 menjadi 13.606, dan persentase dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 94,77%. Terjadi peningkatan persentase penanganan PMKS karena didukung berbagai kebijakan bahwa penanganan PMKS merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal), artinya pelayanan dasar yang wajib dipenuhi.

2.3.1.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

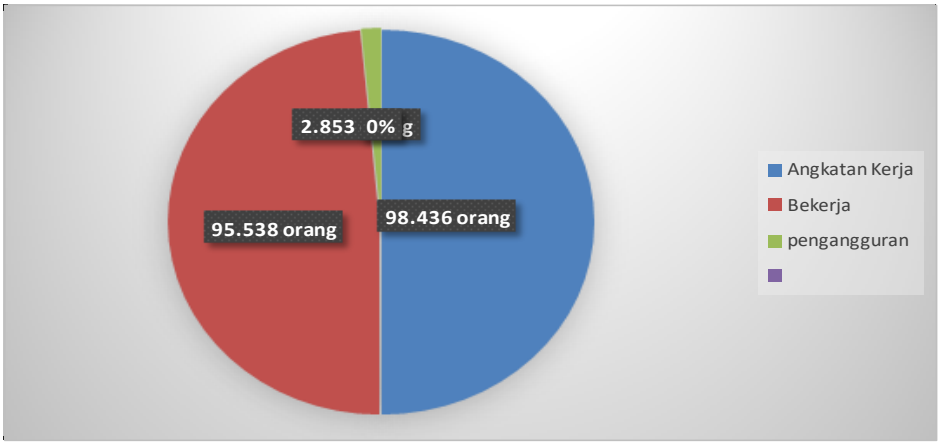
a. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, makin tinggi angka TPAK suatu wilayah mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Selain itu Indikator yang umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi makro ketenagakerjaan daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 98.436 orang. Adapun Komponen pembentuk angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 95.538 orang sedangkan 2,5 % menganggur atau sebanyak 2.853 orang. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pandemi covid yang sedang mewabah di seluruh negara.

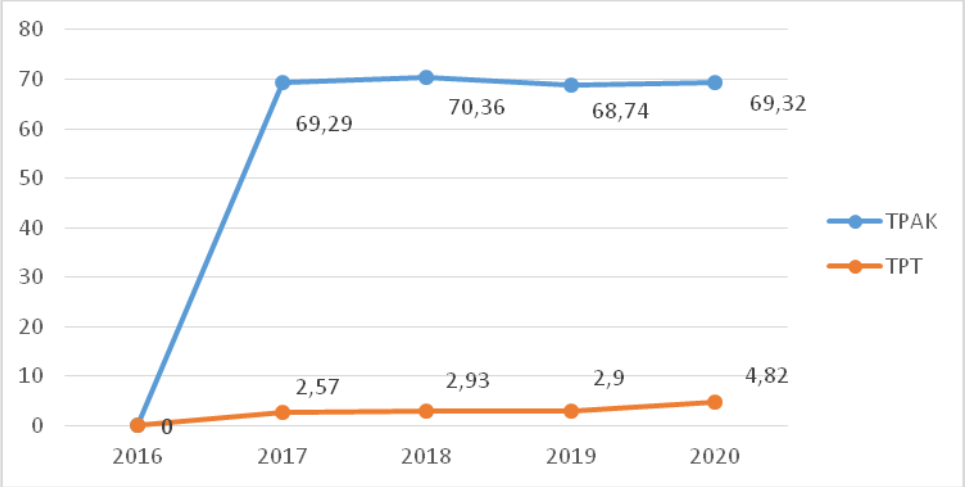
Gambar 2.5 Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Tahun 2020



Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung 2021 (Data diolah)

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung mengalami kenikan dan penurunan dalam lima tahun terakhir secara fluktuatif.

Gambar 2.6 TPT dan TPAK Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Belitung Tahun 2021 (diolah)

TPAK Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sebesar 69.29% menjadi 70,36% di tahun 2018, Adapun data untuk tahun 2016 belum tersedia karena pergeseran anggaran yang awalnya untuk Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) - BPS (bulan Agustus) oleh pemerintah pusat dialihkan untuk kepentingan yang lain.

Pada tahun 2019 turun sebesar 1,62% menjadi 68,74%. Kemudian meningkat menjadi 69,72% di Tahun 2020. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja. Semakin tinggi TPAK mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja dan demikian pula sebaliknya, sehingga tingkat ekonomi masyarakat pun semakin baik.

TPT Kabupaten Belitung pada tahun 2020 mengalami peningkatan 1.92% dari tahun sebelumnya atau sebesar 4.82% dari capaian tahun 2019 yang hanya sebesar 2,90%. Angka ini kenaikan menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja dan menjadi pengangguran.

Pemerintah daerah dalam hal ini terus melakukan upaya melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja atau Balai Latihan Kerja, membuka akses dunia kerja secara lebih luas dan mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung berkembangnya usaha baru kreatif yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

Selain TPT dan TPAK terdapat beberapa indikator kinerja lain yang terkait dengan urusan tenaga kerja seperti yang dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Hasil kinerja urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pencari Kerja (Orang)	1.123	562	246	3.370	2.908
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	180	120	49	174	187
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	16,03	21,35	30%	5,16%	6,43%
4	Penyelesaian perselesaian hubungan industrial/PHK (kasus)	16	14	12	24	34
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	73,94	73,96	79,35	81	n/a

Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung, 2021

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan dalam rangka upaya mengurangi jumlah pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Tabel diatas menyatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap jumlah pencari kerja hingga mencapai 2.908 orang dari tahun 2019 yang sejumlah 3.370 orang. Selain itu, besaran pencari kerja yang terdafar dan ditempatkan juga mengalami peningkatan. Ini menjadi isyarat bagi pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan penciptaan lapangan kerja serta perluasan lapangan kerja dan ketersediaan lapangan usaha baru terutama yang berbasis sumber daya lokal.

Terkait dengan jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK tahun 2020 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 24 kasus. Sementara itu besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek mengalami peningkatan selama periode 2015-2019.

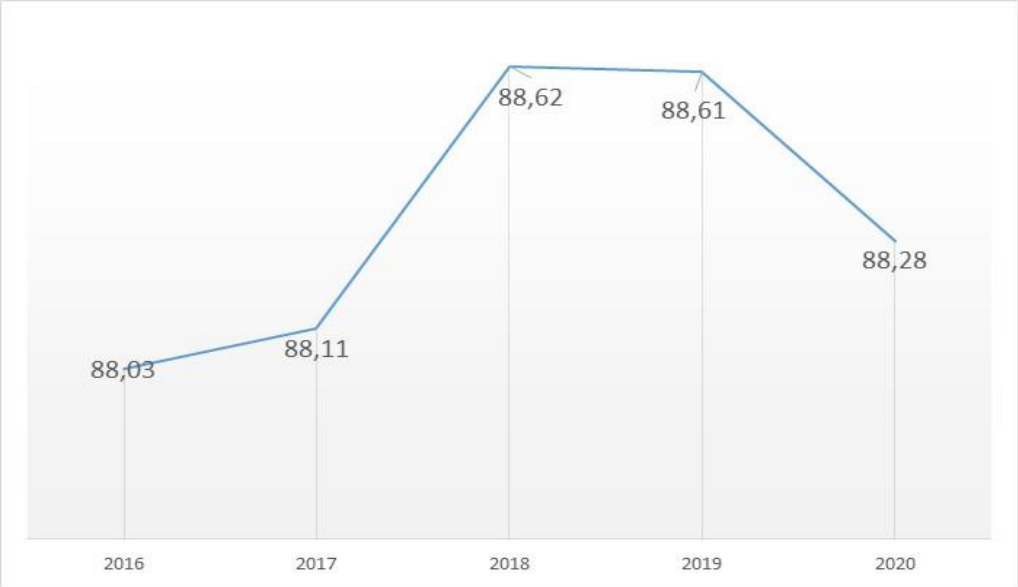
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Konsep dan Definisi BPS adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dnegan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPM memberikan gambaran pembangunan kapabilitas dasar manusia di bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sedangkan IPG mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan membandingkan kedua indicator tersebut dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Lebih rendahnya pencapaian IPG dibandingkan IPM menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender pada ketiga bidang pembangunan tersebut, sehingga kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut data capaian IPG di Kabupaten Belitung tahun 2016-2020.

Grafik 2.21 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber Data : Publikasi BPS Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

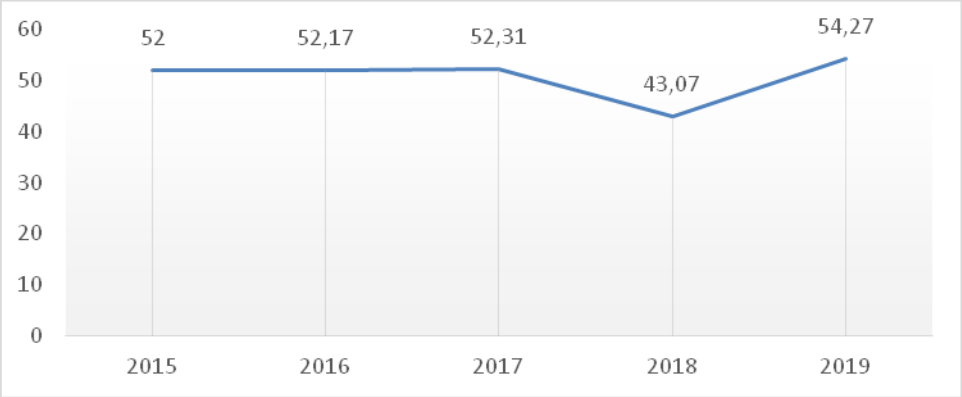
Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2020 sebesar 88,28 sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 sebesar 72,51 artinya masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan IPG Belitung masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2016-2020. Meskipun demikian, peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Kemajuan ini disebabkan oleh komponen-komponen pembangunan perempuan terus tumbuh lebih cepat bahkan nilainya lebih tinggi dibanding laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan Indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi, IDG

digunakan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Interpretasi IDG adalah semakin tinggi maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, meskipun secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun peranan perempuan dalam pengambilan keputusan terus menunjukan perkembangan yang dapat dilihat dari pencapaian IDG yang terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Belitung pada Tahun 2015-2019.

Grafik 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019



Sumber Data : Publikasi BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61 Hasil kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	0	0	0	1	2
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	40,8	N/A	N/A	N/A	20,9
3	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga	77	88	51	44	28
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	35,9	N/A	N/A	62	33,6
5	Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan data capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung selama tahun 2016-2020 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat satu perwakilan perempuan di DPRD dengan status pengganti antar waktu, sedangkan untuk pemilihan periode 2019 – 2024 terpilih dua perwakilan perempuan yang duduk di DPRD.

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 28 kasus dari sebelumnya berjumlah 44 kasus pada tahun 2019. Peningkatan data rasio KDRT tersebut menunjukkan peran masyarakat

akan kepedulian dalam menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga jika dilihat dalam penyampaian informasi ke lembaga terkait.

c. Pangan

Peningkatan urusan pangan dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Peningkatan ketersediaan pangan, dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang.

Tabel 2.62 Hasil Kinerja Urusan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pangan					
1	Pengawasan dan pembinaan keamanan	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan pangan Utama	115,53	115,72	107,24	116,29	99,60
3	Ketersediaan Enargi dan protein perkapita	181.49	162.85	1.341,98	1.614,82	168,20
4	Penguatan cadangan pangan	50	60	4	6,5	15
5	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,73	86,98	82,09	76,5	81,7
6	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	60	60	5,59	14,69	35,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2021

Ketersedian pangan utama di Kabupaten Belitung terus berfluktuasi. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan tersedia sebesar 99,60 Ton/Tahun, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 116,29 Ton/Tahun, begitu juga apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya ketersediaan pangan tersebut dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Selain itu ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh penyediaan dalam negeri dan perubahan stok.

Berdasarkan data Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pangan masyarakat terhadap ketiga kelompok pangan di atas masih cukup rendah yaitu untuk konsumsi 1) umbi-umbian, 2) kacang-kacangan; 3) gula sedangkan untuk 6 (enam) kelompok pangan, yaitu 1) padi-padian; 2) pangan hewan; 3) minyak

dan lemak; 4) buah/biji berminyak; 5) sayur dan buah 6) lain-lain, di mana tingkat konsumsi pangan masyarakat (Gram/Kapita/Hari) sudah memenuhi standar Pemerintah Pusat yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012. Sedangkan 3 (tiga) kelompok pangan yang lainnya belum memenuhi standar WNPG X Tahun 2012.

d. Lingkungan Hidup

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung semakin tahun semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan antara lainnya tingginya produksi sampah serta pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan sangat perlu untuk memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperkecil pengaruh negatif yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalaisasi ruang terbuka hijau menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan lingkungan hidup tercermin dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkupdan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 67.62 melebihi target yang ditetapkan 62,73. Namun Angka ini masih berada di bawah target Pemerintah pusat yang menargetkan IKLH tahun 2020 sebesar 70,27. Selama lima tahun terakhir IKLH mengalami peningkatan secara fluktuatif. Pada tahun 2020 naik sebesar 2,8 poin dari tahun 2019 sebesar 64,82, hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Belitung semakin baik.

Tabel 2.63 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,44	62,53	58,18	64,82	67,62
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	62,05	66,25	57,34	50	53,16
3	Hasil Pengukuran indeks kualitas Udara	80,40	94,97	89,40	96,32	92,63
4	Hasil Pengukuran indeks kualitas Tutupan Lahan	36,77	35,40	35,40	52,31	46,19

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2021

Dari tabel di atas menggambarkan tiga indikator yang menjadi dasar penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu masing masing indikator dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran indeks kualitas air pada tahun 2019 sebesar 50,00 mengalami kenaikan sebesar 3,16 poin di tahun 2020 sebesar 53,16. Kenaikan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Belitung lebih disebabkan karena berkurangnya aktivitas penambangan, sehingga kualitas air sungai semakin baik dikarenakan berkurangnya pembuangan limbah akibat dari aktivitas penambangan. Kualitas Udara di Kabupaten Belitung mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 92,63 atau sebesar 3,69 poin lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 96,32.

Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Belitung disebabkan belum tertatanya pengelolaan lingkungan, baik dalam pengawasan dan pemantauan area kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah. Sedangkan Indeks Tutupan lahan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan wilayah administrasi kota. Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Belitung tahun 2020 menurun sebesar 6,12 point atau 46,19 dari tahun sebelumnya sebesar 52,31. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya belum memadainya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Ketiga indikator tersebut tentunya tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menjalankan program yang mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks kualitas tanah diukur dari besarnya tutupan hutan, dimana tutupan hutan di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari sebelumnya dimana pada tahun 2016 sebesar 36,77 dan pada tahun 2020 menjadi 46,19.

Ketersediaan informasi mengenai status lingkungan hidup dapat dilihat dari dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

Salah satu permasalahan lain terkait dengan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Belitung yaitu masalah persampahan. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah,

pendauran ulang sampah, atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berikut tabel kondisi persampahan di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.64 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Timbulan sampah yang ditangani (Ton/Tahun)	25.269,39	28.984,80	26.092,17	26.092,97	24.092,97
Persentase jumlah sampah yang tertangani	98,52%	80,00%	30,84%	34,03%	15,02%
Jumlah TPS 3R yang ada	8	10	11	14	15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2021

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang. Dari jumlah area pelayanan sampah di Tanjungpandan persentase jumlah sampah yang ditangani terus meningkat sebesar 19,01% atau 15,02 di tahun 2020 dan jumlah TPS 3R pada tahun 2020 juga bertambah menjadi 15 lokasi yang di tahun sebelumnya hanya 14 lokasi. Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya dalam menangani permasalahan persampahan salah satu nya dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2019 tentang tata cara penerapan sanksi pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah disediakan dan membentuk satuan tugas (satgas) laskar bersih (lebah). Selain itu Kebijakan strategis yang diambil oleh Kepala daerah pada tahun 2020 antara lain :

1. Gerakan “Sehari ndak makai kemasan plastik sekali pakai”,
2. Himbauan agar tidak menggunakan kantong palstik dengan menyediakan wadah yang dapat digunakan ulang
3. Tatacara pemusnahan limbah infeksius (Limbah B3) yang ditimbulkan dari penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Belitung
4. Tatacara penyimpanan, pengangkutan dan/atau pemusnahan dan pengolahan residu hasil pembakaran atau cacahan hasil outoclave limbah B3 dari hasil penanganan Covid-19 Kabupaten Belitung

5. Himbauan Pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah infeksius (limbah B3) dari ODP pada rumah tangga
6. Larangan Tempat Pemerosesan Akhir Sampah (TPA) sebagai tempat pembuangan limbah medis (limbah infeksius Covid-19)

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum capaian kinerja indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Belitung dalam kurun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, rasio penduduk Kabupaten Belitung yang memiliki KTP per satuan penduduk adalah sebesar 98,21%. Angka ini sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 99,83%, namun kecenderungannya meningkat stabil dalam periode 2016 – 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mengurus KTP. Namun masih ada penduduk yang sering menunda-nunda untuk mengurus KTP, terutama wajib KTP pemula, sehingga pada tahun 2020 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih belum bisa mencapai angka 100%. Berikut adalah tabel indikator kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.65 Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	88	93	96.96	99.83	98.21
2	Rasio bayi berakte kelahiran	98.01	100	100	99.45	99.01
3	Rasio pasangan berakte nikah	58	61	63	68.71	73.02
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	98.01	100	100	100	100
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	79.61	93.27	88.28	-	-
8	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	-	-	-	92,59	92,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2021

Rasio bayi berakta Kelahiran (0-1 th) pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44% dari tahun 2019 yang mencapai 99,45%. Penurunan ini akibat masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus Akta kelahiran putra putrinya untuk berbagai kepentingan, khususnya persyaratan masuk sekolah.

Cakupan penerbitan kartu Tanda Penduduk juga mengalami penurunan sebesar 1,62 % atau 99,21 pada tahun 2020 dari sebelumnya pada tahun 2019 yang sebesar 99,83. Saat ini seluruh wajib KTP-el di Kabupaten Belitung telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Rasio pasangan berakta nikah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2019 hanya sebesar 68,71% meningkat sebesar 4,31% menjadi 73,02% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup sadar akan pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Namun untuk pernikahan-pernikahan yang telah dilangsungkan sudah cukup lama, masih banyak yang belum dilaporkan, baik itu pernikahan muslim di KUA atau pernikahan non muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terhadap pelayanan umum dalam melayani masyarakat Kabupaten Belitung dan Data base kependudukan skala kabupaten sudah terakses dengan baik.

Sementara itu, terkait persentase pelayanan administrasi kependudukan capaiannya sudah mendekati 100% dan memang akan terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kependudukan kepada masyarakat.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Hasil kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016– 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85%	85%	85%	85%	85%
2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	0%	0%	0%	0%	0%
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	98	98	98	98	98
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100	100
2	Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
3	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	76,27%	100%	100%
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80%	80%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2021

Pemberdayaan masyarakat dan Desa selama tahun 2016 hingga tahun 2020 masih berada pada angka 85%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan dana desa yang langsung dipergunakan untuk pembangunan masyarakat di desa dengan mengikutsertakan elemen masyarakat di desa melalui prioritas pembangunan desa. Namun untuk pencapaian desa dengan status swasembada di Kabupaten Belitung, dari 42 Desa yang ada belum mencapai status tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai indikator capaian sasaran pembangunan desa dan status kemandirian desa.

Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan

Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.67 Jumlah Desa dengan Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten BelitungTahun 2016-2020

Status IDM	Tanjungpandan					Membalong					Selat Nasik				
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	3	0	0	0	0
Berkembang	6	6	4	4	3	6	10	7	7	6	1	4	3	3	3
Maju	2	3	5	5	6	0	1	5	5	6	0	0	1	1	1
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Status IDM	Sijuk					Badau				
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tertinggal	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Berkembang	4	5	3	3	2	1	6	5	5	5
Maju	0	5	7	7	8	0	1	2	2	2
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas DPPKBPMD Kabupaten Belitung, 2021

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana selama tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Hasil kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)*	2,10	2,07	2,05	2,28	1,98
2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,08	2,08	2,08	2,3	2,42
3	Ratio Akseptor KB	88,49	89,53	82,03	81,01	82,07
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	88,49	89,53	82,03	81,01	82,07
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	5,69	5,05	5,04	8,25	7,36
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,26	2,26	2,26	2,26	2,42

Sumber data : Dinas DPPKBPMD Kabupaten Belitung, 2021
** Badan Pusat Statistik, 2021*

Di tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung sudah mulai terkendali menjadi 1,98%. Dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 2% selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung masih dikategorikan “cepat”.

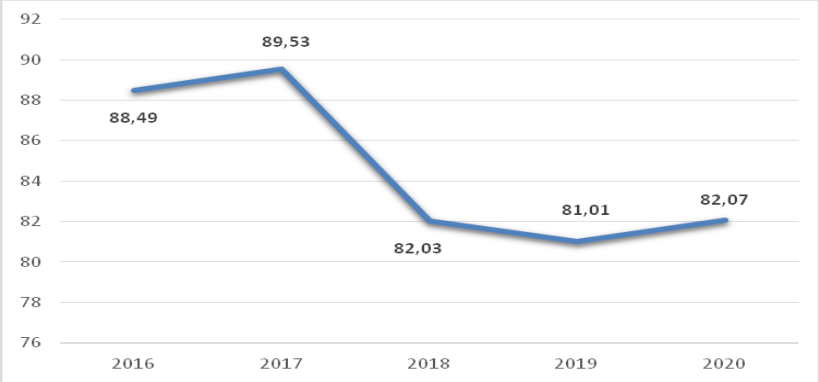
Sejak tahun 1970-an pemerintah sudah berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Sampai saat ini memang peningkatan jumlah penduduk masih terus terjadi setiap tahunnya di tiap daerah termasuk di Kabupaten Belitung. Meskipun begitu, angka fertilitas per perempuan cenderung turun dan stabil dalam kurun lima tahun terakhir.

Total Fertility Rate (TFR) didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Angka Fertilitas Total pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu 2,42%. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata kelahiran anak per perempuan usia subur di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 adalah sebesar 2,42 anak, masih berada di atas target nasional yang sebesar 2,40 anak.

Angka Fertilitas Total atau TFR dipengaruhi oleh ratio akseptor KB. Semakin rendah TFR, maka ratio akseptor KB akan semakin tinggi. Ratio Akseptor KB merupakan persentase dari jumlah akseptor KB terhadap jumlah Pasangan Usia Subur setiap tahunnya. Dari tabel 7.2 terlihat bahwa jumlah akseptor KB di Kabupaten Belitung mengalami perubahan sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2015 jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan dan diikuti oleh turunnya pula jumlah akseptor KB bila dibandingkan

tahun sebelumnya. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah akseptor KB di Kabupaten Belitung cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tetapi pada tahun 2020 Ratio Akseptor KB di Kabupaten Belitung meningkat sebesar 82,07 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 81,01.

Grafik 2.23 Ratio Akseptor KB Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2021 (diolah)

Selama kurun waktu dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 rata-rata Ratio Akseptor KB di Kabupaten Belitung mencapai tidak lebih dari 85%. Pola naik turun yang tidak merata setiap tahunnya berhubungan dengan TFR dan faktor lain, seperti jumlah akseptor KB yang berubah setiap tahun meskipun jumlah Pasangan Usia Subur dalam dua tahun yang sama mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada hakekatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi atau CPR diartikan sebagai persen cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pemakaian alat kontrasepsi terbukti mampu menurunkan angka kelahiran. Angka Pemakaian Kontrasepsi atau CPR di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 82,07 jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 88,49. Hal ini berkaitan erat dengan cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi atau unmet need di Kabupaten Belitung yang menurun pada tahun 2020 sebesar 7,36%. Unmet Need merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dalam program KB, secara sederhana persoalan

unmet need sendiri dapat didefinisikan sebagai adanya kebutuhan masyarakat yang ingin ber-KB tetapi keinginan mereka tidak bisa terpenuhi, sehingga semakin tinggi angka *unmet need* maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam program KB. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah penyuluh KB di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2020 jumlah penyuluh KB yang melayani 42 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Belitung hanya berjumlah 13 orang. Rasio penyuluh KB yang tidak proporsional jika dibandingkan wilayah binaan sehingga mengakibatkan masih rendahnya cakupan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana ke masyarakat yang berdampat pada rendahnya cakupan PUS yang menjadi peserta KB. Berikut data jumlah Penyuluh KB dan wilayah binaan di Kabupaten Belitung per tahun 2020.

Tabel 2.69 Jumlah Penyuluh KB se-Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penyuluh KB
1.	Tanjungpandan	16	4 orang
2.	Membalong	12	3 orang
3.	Selat Nasik	4	1 orang
4.	Sijuk	10	3 orang
5.	Badau	7	2 orang
	Total	49	13 orang

Sumber Data : DPPKBPMD, 2021

h. Perhubungan

Sebagai wilayah kepulauan tentunya urusan perhubungan sangat memegang peranan penting di dalam menjaga keterhubungan antar daerah, hal ini terkait dengan kelancaran arus orang, barang dan jasa dimana menjadi sebab-akibat interaksi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang baik maka distribusi barang dan jasa dari sentra produksi ke daerah konsumen dapat berjalan lancar, selain itu dampak positif lain yang dapat dicapai adalah terbukanya daerah-daerah yang terisolir serta mobilitas penduduk pun ikut meningkat. Berikut ini penjelasan capaian indikator keberhasilan pembangunan urusan perhubungan dalam mendukung aspek pelayanan umum selama tahun 2016–2020 adalah:

Tabel 2.70 Hasil kinerja urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum					
A	Tiba	12.755	9.451	563.080	8.325	6.310
B	Berangkat	16.092	12.487	564.165	10.638	8.725
2	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas penumpang	77%	80%	81%	82%	89.71%
3	Jumlah Uji KIR angkutan umum	350	380	400	305	2.065
4	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	86,63%	89,23%	89,46%	89,86%	56 %
5	Pemasangan Rambu-Rambu	2.140	2.144	2.298	2.354	1.967
6	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	2.655	2.765	3.108	3.500	4.015

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik jumlah penumpang tiba maupun penumpang berangkat penumpang yang menggunakan angkutan umum. Pada tahun 2019 ada sebanyak 8.325 penumpang yang tiba dan mengalami penurunan menjadi sebesar 6.310 penumpang tiba di tahun 2020 sedangkan penumpang berangkat dari terminal Tanjungpandan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2020 adalah dari 10.638 menjadi sebesar 8.725 penumpang berangkat dari Terminal Tanjungpandan. Penurunan jumlah penumpang angkutan darat baik yang tiba maupun yang berangkat, dapat disebabkan karena tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi dan tidak adanya pembatasan penggunaan kendaraan sehingga adanya kecenderungan masyarakat beralih ke penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun. Ditambah lagi adanya pandemi Covid 19 sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berpergian menggunakan angkutan umum.

Kabupaten Belitung mengalami peningkatan kualitas dalam arus lintas jalan raya sejak tahun 2016, terlihat dari tabel di atas, fasilitas keselamatan lalu lintas meningkat dari 77% menjadi 89,71% di tahun 2020. Hal ini pula selaras

dengan presentase kepemilikan KIR angkutan umum yang menjadi 89,86% di tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah banyaknya kendaraan bermotor yang secara teknis layak digunakan di jalan raya khususnya kendaraan dengan membawa penumpang di Kabupaten Belitung. Kualitas arus lintas jalan raya juga dapat diindikasikan dengan banyaknya rambu dan lampu jalan. Banyaknya pemasangan rambu dan lampu jalan cenderung dilakukan konstan sebanyak interval 2000–3000an buah selama tahun 2016–2020.

i. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini. Dalam setiap lini lapisan masyarakat membutuhkan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Penyampaian informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik pemerintah dilakukan dengan berbagai media desiminasi informasi publik. Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.belitungkab.go.id*. Pada tahun 2020 terdapat 24 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sejak terbentuk tahun 2017, persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi sampai dengan 2020 sebesar 90,63 %.

Selain itu, pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menyelesaikan persoalan *blank spot* di salah satu daerah di Kabupaten Belitung. Dinas Komunikasi dan Informatika secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Perusahaan Telekomunikasi Swasta untuk penyediaan menara bersama dan bantuan akses internet desa. Berikut capaian kinerja :

Tabel 2.71 Hasil kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Komunikasi dan Informatika					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2)	4	4	6	6	6
2	Web site milik pemerintah daerah	9	17	19	19	24
3	Persentase Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	Belum ada data	15%	25%	82,75	90,63

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2021

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemberdayaan KUKM terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung, antara lain melalui program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Sampai saat ini koperasi masih menjadi pilar utama sistem perekonomian nasional walaupun pada perkembangannya masih ditemui hambatan dan kendala. Berikut perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.72 Hasil kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	140	128	129	133	135
2	Jumlah Koperasi (Unit)	209	183	183	187	189
3	Persentase koperasi aktif	66.98	69.94	70.49	71.12	71.43
4	Pertumbuhan Koperasi	3.57%	9.38%	9.38%	2.19%	1.07%
	Volume usaha koperasi (juta rupiah)	64.804,29	62.680,97	63.321,49	65.230,64	78.302,23
5	Jumlah Usaha Mikro	16,139	16,559	17,596	18,320	20.503
6	Pertumbuhan Usaha mikro	42.20%	2.53%	5,47%	4.11%	11,92%
7	Jumlah sarana pemasaran usaha mikro	-	-	1	2	0

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2021

Perkembangan koperasi di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2016-2020 mengalami capaian peningkatan yang melambat. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Belitung hanya meningkat sebesar 4,95% dari tahun 2016 yang semula 66,98% menjadi 71,43% di tahun 2020. Meski begitu, peningkatan persentase koperasi aktif setiap tahunnya itu sudah cukup menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi.

Keberadaan koperasi aktif di Kabupaten Belitung setiap tahun selalu meningkat meskipun memang jumlahnya mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2016 yang semula 209 unit menjadi 183 unit di tahun 2017. Adapun koperasi tidak aktif masih menunggu proses pembubaran oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dengan adanya aturan tentang perkoperasian sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 46 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 dinyatakan bahwa pemerintah bisa membubarkan koperasi selain dengan Rapat Anggota, apabila koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Koperasi, kegiatan koperasi itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan, dan koperasi itu dinyatakan pailit.

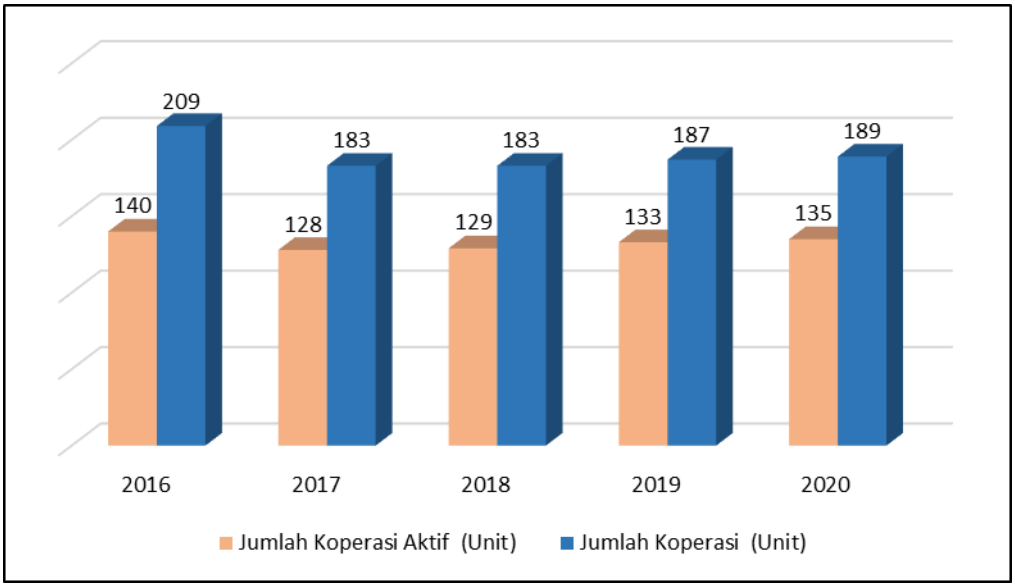
Penambahan jumlah koperasi aktif juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi dan volume usaha koperasi. Pada tahun 2020, jumlah anggota koperasi sebanyak 16.254 orang, atau bertambah sebanyak 1.103 orang dari semula 15.151 di tahun 2017. Hal ini terjadi sebagai akibat penurunan aktivitas dalam mengelola dan melayani anggota/masyarakat pada sektor usaha simpan pinjam, sembako, dan jasa lainnya. Berikut ini perkembangan jumlah anggota koperasi di kabupaten Belitung tahun 2016-2020.

Tabel 2.73 Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	2016	16,754
2.	2017	15,151
3.	2018	15,815
4.	2019	16,108
5.	2020	16,254

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2021

Grafik 2.24 Pertumbuhan Koperasi di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020 (Unit)



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2021

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menggalakkan Reformasi Koperasi yang dapat dicapai melalui tiga upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan usaha. Salah satu tindakan nyata dari rehabilitasi adalah pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan *Online Base Data System* sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi. (Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2017, BPS).

Dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa koperasi adalah salah satu penggerak pembangunan. Maka hendaknya perlu peningkatan kualitas koperasi baik secara kelembagaan maupun partisipasi aktif masyarakat . Selain itu koperasi hendaknya tidak terbatas di bidang simpan pinjam saja, tapi juga lebih bersifat produktif dan merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi *multiplier effect* terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung. Jadi perlu adanya upaya peningkatan produktivitas koperasi.

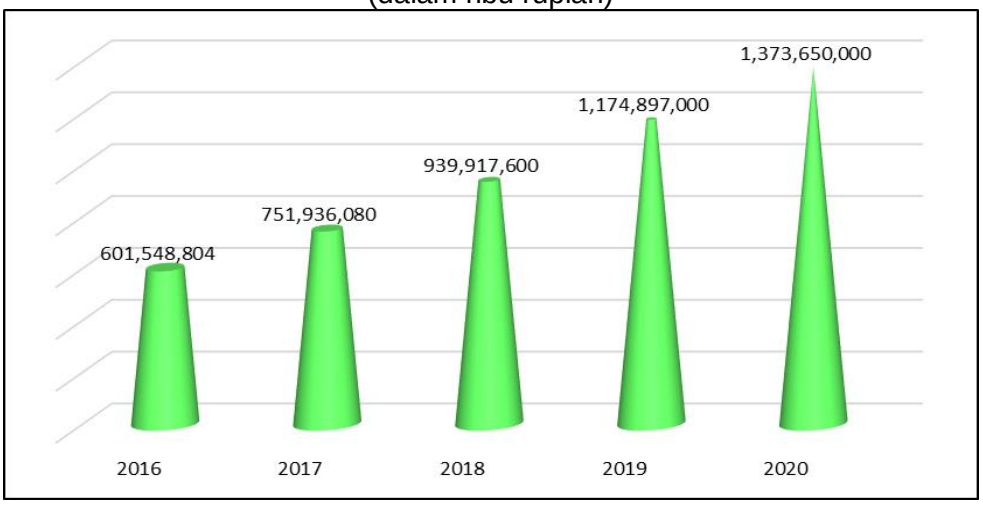
Sebagaimana koperasi, usaha mikro dan usaha kecil juga mempunyai peran besar dalam perekonomian daerah baik dalam produksi maupun distribusi barang dan jasa termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan

sumber pendapatan penduduk. Adapun jumlah usaha mikro di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Jumlah usaha mikro telah mengalami kenaikan sekitar 27,04 % dari semula 16.139 unit di tahun 2016 menjadi 20.503 unit pada tahun 2020. Ini sejalan dengan geliat pariwisata yang mulai berkembang di Kabupaten Belitung termasuk penyelenggaraan event-event rutin. Meskipun sempat tersendat karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Belitung pada sepanjang tahun 2020, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro daerah. Selain itu stimulus dalam bentuk pada usaha mikro kecil juga terus diberikan oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi daerah. Adapun terdapat dua tempat/ pasar yang menjadi sarana pemasaran usaha mikro di Kabupaten Belitung.

Omset usaha mikro mengalami peningkatan selama periode 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dengan rata-rata kenaikan 23,3% per tahun. Dengan omset usaha mikro yang semula Rp 601.548.804.000,- pada tahun 2016 telah meningkat pesat menjadi Rp 1.373.650.000.000,- pada tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya :

1. Pembinaan kewirausahaan usaha kecil menengah melalui:
   - Monitoring terhadap usaha Kecil Menengah yang terdampak terhadap Covid 19.
   - Melaksanakan Belitung Ekspo, Bazar KUKM dan Pameran Virtual untuk promosi produk UKM.
2. Pemberian fasilitasi peningkatan permodalan usaha kecil menengah melalui pola kerjasama subsidi bunga Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Bank Sumsel Babel, Kredit Usaha Rakyat dengan perbankan dan CSR PT. Timah Tbk;
3. Pendampingan usaha mikro kecil melalui CIS PLUT KUMKM.
4. Bantuan kepada usaha mikro kecil untuk pemulihan ekonomi yang terdampak Covid 19 yakni:
   - Bantuan Produktif Usaha Mikro (Bantuan Presiden)
   - Bantuan gerobak
   - Bantuan Sertifikasi Halal
   - Bantuan sarana produktif bagi UKM (Bantuan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Grafik 2.25 Omset Usaha Mikro di Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020 (dalam ribu rupiah)



Sumber : Dinas *Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)*

Pertumbuhan usaha mikro kecil mengalami fluktuasi dalam periode 2016-2020 dengan posisi terakhir 11,92% di tahun 2019 atau naik sebanyak 7,81 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,11%. Kenaikan ini memang belum melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 12 persen. Namun sudah sewajarnya karena dipengaruhi oleh berbagai dampak dari kondisi disaat adanya pandemi COVID-19. Adapun beberapa dampak yang timbul, yaitu : Penurunan permintaan dan turunnya penjualan; Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha, Distribusi terhambat; d. Kesulitan bahan baku; dan e. Kesulitan mendapatkan permodalan usaha. Secara umum pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten cukup baik hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai omset usaha mikro. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dinas KUKMPTK dan PLUT KUKM melalui pembinaan kewirausahaan di setiap kecamatan dan desa sehingga meningkatkan jumlah wirausahawan di Kabupaten Belitung.

k. Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di daerah salah satunya digerakkan oleh investasi. Investasi atau penanaman modal kini berperan penting karena kapasitas fiskal pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota amat terbatas sehingga sulit bila selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Bila pada suatu daerah

terjadi peningkatan investasi maka yang diharapkan adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, terserapnya tenaga kerja yang berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan hidup yang layak.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, pemerintah Kabupaten Belitung masih sangat memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Kedua macama penanaan modal tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk langsung maupun berupa portofolio surat berharga.

Tabel 2.74 Hasil kinerja urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
a	PMDN	11	24	67	94	214
b	PMA	16	19	20	34	168
2	Jumlah Investasi berskala nasional.					
a	PMDN (Juta Rp)	468.573,20	640.675,50	1.047.840,4	318.849,20	343.378,7
b	PMA (US $)	1.820,70	16.834,00	5.676,50	19.457,60	20.652,0
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)					
a	PMDN (Juta Rp)	406.088,10	172.102,30	407.164,90	-729.991,20	25.529,5
b	PMA (US $)	-2.597,30	15.013,30	-11.157,50	13.781,1	1.194,4
4	Persentase kenaikan/ penurunan realisasi investasi					
a	PMDN (Persen)	649,9	36,73	63,55	-69,67	56,40
b	PMA (Persen)	-58,79	824,57	-66,28	104,25	97,80
5	Meningkatnya jumlah investor					
a	PMDN	3	13	43	27	20
b	PMA	-6	3	1	14	134
6	Survey Kepuasan Masyarakat	62,52	62,68	87,21	80,3	3,31*

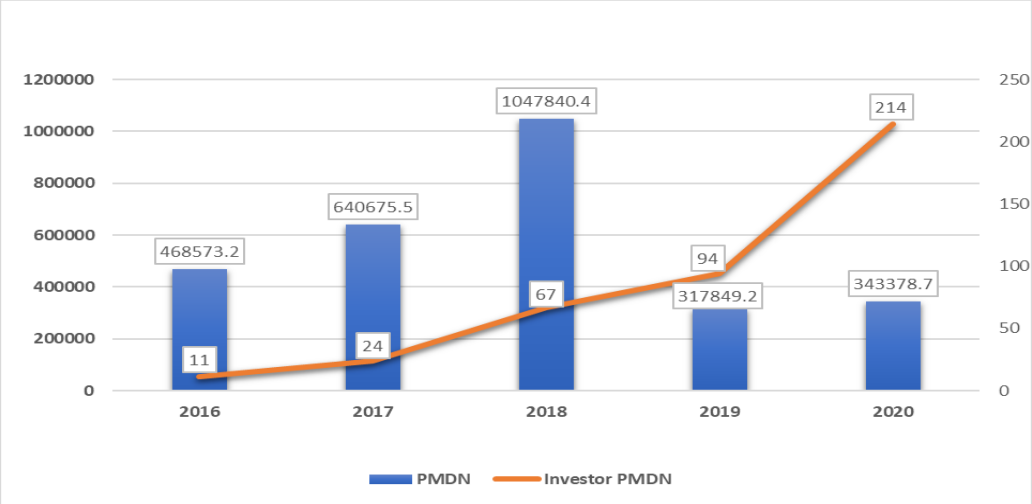
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021

** hasil perhitungan dengan Moteda baru*

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) umumnya dilakukan dalam bentuk langsung maupun berupa portofolio

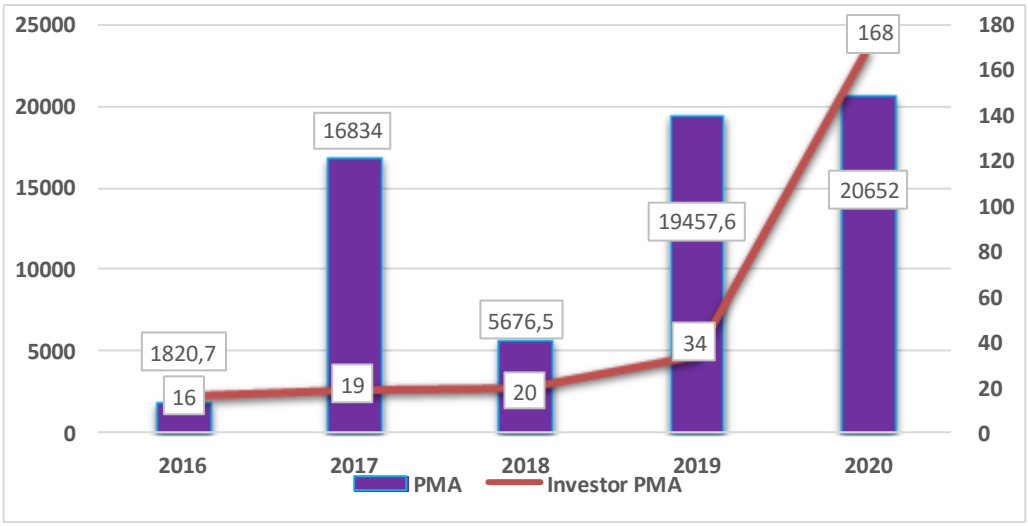
surat berharga. Berikut jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Belitung periode 2016-2020.

Grafik 2.26 Jumlah Investor Dalam Negeri beserta Realisasi Investasi di Kabupaten Belitung



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

Grafik 2.27 Jumlah Investor Dalam Negeri beserta Realisasi Investasi di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021 (diolah)

Perkembangan investasi dalam negeri di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 214 investor di Kabupaten Belitung dengan nilai investasi sebesar Rp 343.378,700.000,- pada tahun 2020. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 8,06 persen bila

dibandingkan dengan capaian realisasi investasi di tahun 2019 yaitu sebesar Rp 317.849.200.000,- dengan jumlah investor yang menanamkan modal sebanyak 94 investor. Sementara itu untuk Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan baik jumlah investor maupun nilai investasinya meskipun lebih tinggi capaian PMDN dibandingkan PMA. Nilai investasi asing yang masuk ke Kabupaten Belitung pada tahun 2020 mencapai US $ 20.652.000 atau atau senilai Rp. 289.231.260.000,- dengan Kurs US Dolar per tanggal tersebut senilai Rp. 14.005,- dengan jumlah investor sebanyak 168 investor.

Kenaikan jumlah investor baik investor asing maupun investor dalam negeri salah satunya merupakan efek positif dari perkembangan pariwisata di Kabupaten Belitung. Namun memang kenaikan tersebut belum diimbangi dengan bertambahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Belitung. Selanjutnya diharapkan akan semakin banyak realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Belitung dengan pembenahan di berbagai bidang terutama pengkondusifan iklim investasi serta mengoptimalkan penguatan sistem informasi investasi di daerah.

I . Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2009 Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Data yang tercatat di Dinas Pemuda dan Olah raga, Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebanyak 24 OKP tidak mengalami perubahan dari tahun 2019. Sedangkan untuk kegiatan kepemudaan bertambah satu dari tahun 2019 menjadi 5 kegiatan. Persentase organisasi pemuda yang aktif tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 87,50% yang sebelumnya sebesar 85% atau mengalami peningkatan sebesar 2,5%. Demikian pula dengan jumlah pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan bertambah sebanyak 50 pemuda dari tahun 2019 menjadi sebanyak 300 pemuda pada tahun 2020.

Jumlah Organisasi Olah Raga keadaan sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 26 organisasi mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Demikian pula dangan cakupan pembinaan olahraga dan cakupan pembinaan atlet muda sudah sangat baik yaitu masing-masing 100%.

Cakupan pelatih yang bersertifiaksi juga meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 52,3% yang sebelumnya selama 4 tahun terakhir statis diangka 48%. Jumlah lapangan olah raga meningkat tajam dari tahun 2019 sebanyak 118 menjadi 451 lapangan olah raga se-Kabupaten Belitung, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75 Hasil kinerja urusan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah organisasi pemuda	34	34	23	23	24
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	7	4	4	5
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82,35	85,29	85	85	87,50
4	Jumlah organisasi olahraga	15	14	20	24	26
5	Cakupan pembinaan olahraga (%)	24	24	24	24	100
6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	48	48	48	48	52,30
7	Cakupan pembinaan atlet muda	80	80	80	80	100
8	Jumlah lapangan olahraga	104	104	104	118	451
9	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelayanan kepemudaan	200	200	200	250	300

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, 2021

m. Statistik

Kewenangan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja. Penyediaan data tersebut dilakukan dengan penyediaan sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dari Kebutuhan data SIPD Kabupaten Belitung, baru terpenuhi sebesar 70%. Selain itu Ketersediaan data statistik Kabupaten Belitung didukung juga dengan tersedianya Buku Belitung Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Belitung yang diterbitkan setiap tahunnya oleh BPS Kabupaten Belitung serta portal Belitung Satu Data.

Tabel 2.76 Hasil kinerja urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	70	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah	-	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2021

Dari tabel di atas, terlihat menunjukkan peningkatan dalam ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dari tahun 2018 yang hanya 70% menjadi 100% pada tahun 2020. Ketersediaan data dan informasi pembangunan antara lain buku Belitung Dalam Angka 2021 yang berisi antara lain data dan informasi hasil pembangunan secara makro serta informasi lainnya. Buku Belitung Dalam Angka ini telah dirilis pada triwulan I tahun 2021, pada tahun-tahun sebelumnya baru rilis pada semester II tahun berjalan. Sedangkan data mengenai pemanfaatan data statistik daerah sudah tersedia pada tahun 2019 dan 2020, yaitu 100%. Pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan penghitungan mengenai persentase pemanfaatan data statistik oleh Perangkat Daerah.

n. Persandian

Kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penerapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah. Dengan demikian untuk mengantisipasi kebebasan dalam mengakses berbagai kebutuhan informasi dengan berbagai macam teknologi yang semakin canggih sehingga memerlukan pengamanan terhadap informasi Pemerintah Daerah. Perkembangan terhadap kinerja persandian semakin meningkat, hal tersebut tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.77 Hasil kinerja urusan Persandian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	6,30	9,70	12,90	16,10	20
2	Rasio Pelayanan Persandian	16	19,97	24,8	-	-
3	Agregat nilai pelaksanaan control pengamanan informasi dengan menggunakan instrument yang ditetapkan BSSN	-	-	32% (Level II)	20% (Level I)	45% (Level II)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Dari data pada tabel di atas terlihat Tidak adanya peningkatan kinerja terhadap layanan persandian. Pada tahun 2020, persentase Perangkat Daerah yang menngunakan sandi sesuai standar keamanan informasi dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 50%, masih sama dengan tahun 2019. Namun untuk Agregat nilai pelaksanaan control pengamanan informasi mengalami peningkatan 25% dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang semula 20% (level I) menjadi 45% dengan menggunakan instrument yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sedangkan capaian pada tahun 2018 menggunakan instrumen penilaian mandiri.

o. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Belitung selama ini telah melaksanakan berbagai event atau kegiatan festival kesenian, perwatan dan pelestarian terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Belitung seperti Festival seni dan Budaya daerah, pertunjukan seni pada Maras taun, Muang jong, pertunjukan seni pada HJKT, HUT RI dan pertunjukan pada Sail Indonesia. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal setempat. Untuk pelestarian terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 38 buah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.78 Hasil kinerja urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	8 kali	8 kali	24 kali	8 kali
2	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah
5	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah
6	Cakupan potensi kebudayaan daerah	91%	91%	91%	91%	91%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2021

Festival seni dan budaya sebelumnya dilaksanakan 24 kali pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 hanya dilaksanakan 8 kali festival. Pada tahun 2020 hanya dilakukan 8 kali festival dikarenakan adanya penyebaran pandemi Covid 19. Festival seni dan budaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan mengenai seni dan budaya daerah sehingga dapat menumbuhkan ketertarikan dan minat para generasi muda terhadap seni dan budaya lokal. Selain itu, dengan semakin banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya diharapkan mampu mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman di Kabupaten Belitung menampilkan karyanya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut juga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni dan budaya di Kabupaten Belitung.

p. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat sumber belajar dan informasi yang menyimpan mengelola dana memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka : a. dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan; b. dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai

lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik; c. dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga masyarakat yang lebih baik; d. dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia; e. dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya; f. dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa; g. dapat menggunakan waku senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Keberadaan perpustakaan mempunyai peran penting dalam peningkatan sumberdaya manusia, menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan, menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat, mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau dengan penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, *sharing* pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya, sebagai motivator, mediator dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta berperan sebagai agen perubah, pembangunan dan kebudayaan manusia. Keberadaan perpustakaan juga diharapkan dapat meningkatkan pembudayaan gemar membaca di masyarakat.

Tabel 2.79 Hasil kinerja urusan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	101.241	305.713	332.661	339.861	332.985
2	Jumlah buku yang dipinjam	34.441	26.536	89.811	93.661	90.600

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, 2021

Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan akses perpustakaan kepada masyarakat dimana jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 berjumlah 332.611 pengunjung meningkat sebanyak 374 pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 yang berjumlah 332.985 pengunjung. Bertambahnya penyediaan

pelayanan perpustakaan di daerah tentunya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.

Pada tahun 2020 tercatat jumlah buku yang dipinjam sebanyak 90.660 buku, meningkat sebanyak 849 buku lebih banyak daripada tahun sebelumnya hanya 89.811 buku. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah dengan peningkatan jumlah buku yang dipinjam setiap tahunnya.

q. Kearsipan

Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atausumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh Lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya pekembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital. Mengingat jumlah arsip yang semakin banyak dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang lebih dikenal dengan sistem kearsipan melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan untuk mengelola arsip yang ada.

Sedangkan pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan Lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip secara umum untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi dan wahana komunikasi. Selain itu arsip memiliki fungsi primer dan sekunder. Fungsi pimer yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pembuat arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Sedangkan fungsi sekunder yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pembuat arsip melainkan bagi kepentingan lembaga, instansi pemerintah, swasta, dan perorangan. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian

dan penginformasian. Arsip juga digunakan sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara.

Tabel 2.80 Hasil kinerja urusan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	n/a	n/a	n/a	19,03	36,59
2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	70%	75%	80%	85%	95%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, 2021

Kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Belitung sangat baik hal ini ditunjukan dari semua perangkat daerah telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya dari pemerintah untuk meningkatkan SDM pengelola kearsipan yang pada tahun 2020 sudah memenuhi 95% kebutuhan pemerintah daerah.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Belitung merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari sekitar 163 (seratus enam puluh tiga) buah pulau besar dan kecil. Letak geografis Kabupaten Belitung yang luas wilayahnya didominasi lautan merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara baik sehingga perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah produksi perikanan tangkap

memberikan sumbangan yang jauh lebih besar dibandingkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung. Perkembangan pembangunan Perikanan di Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun dapat terlihat dari kinerja sebagai berikut.

Perikanan Merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung, letak geografis kabupaten Belitung yang luas wilayahnya didominasi lautan merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara baik. Perkembangan pembangunan Perikanan di Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dapat terlihat dari kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.81 Hasil kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	67.189,18	68.197,01	65.723	56.845,62	52.912,48
2	Produksi perikanan Budidaya (ton)	154,84	142,09	207,2	176,48	152,96
3	Jumlah Produksi pengelolaan hasil perikanan (ton)	7.262	7.925,76	8.452	8.311	8.095
4	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun	47,65	48,15	50,13	59,42	69,84
5	Jumlah Ekspor Hasil Perikanan (ton)	1.582,97	2.011,62	2.783,35	2.065,54	1.960,32
6	Jumlah Benih yang dihasilkan (ekor)	1.737.385	1.823.450	1.999.268	2.282.015	2.250.611
7	Jumlah Kelompok pembudidaya ikan (POKdakan)	82	88	88	103	72
8	Jumlah Kelompok usaha bersama (KUB)	230	241	241	227	241

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2021

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sejumlah 52.912,48 ton/tahun dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang capaiannya sejumlah 56.845,62 ton/tahun. Penurunan produksi perikanan tangkap ini disebabkan zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang jauh lebih besar dan armada tersebut perlu dilakukannya modernisasi. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim pada penghujung tahun yang juga mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap. Adanya penurunan produksi perikanan tangkap ini juga berpengaruh kepada penurunan produksi pengelolaan hasil perikanan dan

jumlah ekspor hasil perikanan yang disebabkan ketersediaan bahan baku ikan tertentu mengalami kesulitan stok selama beberapa bulan.

Walaupun Kabupaten Belitung mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar, akan tetapi pengembangan terhadap perikanan budidaya terutama budi daya ikan laut maupun darat terus didorong perkembangannya. Namun pada tahun 2019 jumlah produksi perikanan budi daya sebesar 176,48 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 152,96 ton atau sebesar 13,33 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adalah jumlah ikan yang dibudidayakan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terganggunya sistem tata niaga untuk budidaya ikan air tawar dan air laut selama masa pandemik Covid-19 yang menyebabkan pembudidaya merasa ragu untuk melakukan budidaya ikan sehingga produktifitas menurun. Untuk Pelaksanaan Budidaya ikan air laut juga mengalami penurunan produksi karena frekuensi ekspor yang lebih sedikit. Pada Tahun 2020 hanya terjadi 5 kali proses ekspor Ikan Kerapu, menurun jika dibandingkan dengan jumlah eksport di Tahun 2019 sebanyak 6 kali dan Tahun 2018 sebanyak 9 Kali.

Untuk Indikator Peningkatan Benih yang Berkualitas pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 9,48% atau 108,97% dari total target sebesar 8,7%. Indikator ini baru terlaksana di Tahun 2020 sehingga belum ada indikator pembandingnya. Benih yang berkualitas disini diperoleh dari pembenihan pembenihan ikan yang sudah memiliki sertifikat CPIB sebanyak 6 unit pembenihan diantaranya BBI Membalong, UPR Dafrul, ibu sukarti, irwan neruse, BBI Tanjung Binga, HSRT Dedi. Besarnya jumlah benih yang berkualitas yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 782.158 ekor. Benih yang berkualitas dimaksud adalah benih yang dihasilkan dengan cara pembenihan dengan standard yang baik. Sedangkan untuk total benih yang dihasilkan oleh seluruh pembenihan yang ada yaitu sebanyak 2.250.166 ekor nilai ini lebih kecil dari produksi benih ikan tahun 2019 sebesar 2.282.015 ekor. Realisasi ketersediaan benih ini didukung oleh ketersediaan benih di BBI Membalong, BBI Tanjung Binga, dan didukung oleh 21 Unit Pembenihan Raknyat (UPR) air tawar dan 2 UPR air laut dengan jenis ikan air yang dihasilkan UPR yang terdiri dari ikan nila, lele dan kerapu.

b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Belitung sangat didukung dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Tanjung Kelayang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Pertumbuhan sektor pariwisata di kabupaten Belitung semakin berkembang hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di nusantara dan dari mancanegara.

Tabel 2.82 Hasil kinerja urusan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pariwisata					
1	Kunjungan wisata	292.885	380.941	467.571	348.153	134.266
2	PAD sektor pariwisata	14.119.713.224	16.292.059.402	20.941.952.474	20.406.758.944	10.358.158.155
3	Jumlah Hotel dan penginapan	50	56	58	69	71
4	Jumlah Kamar	1.654	1.965	2.072	2.472	2.647
5	Jumlah daya tarik wisata layak dikunjungi	61	66	67	67	68
6	Jumlah Desa Wisata	13	13	15	15	20
7	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	1.891	1.986	2.012	2.078

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2021

Dengan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dalam mendukung kepariwisataan memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung. Jumlah hotel dan penginapan pada tahun 2016 tercatat ada 50 akomodasi yang terdiri dari klasifikasi hotel bintang dan non bintang atau penginapan dengan jumlah kamar 1.654 kamar hotel, meningkat pada tahun 2020 menjadi 71 hotel dengan jumlah kamar 2.647 kamar. Meningkatnya pertumbuhan hotel dan penginapan tersebut juga dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan selama tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 292.885 orang wisatawan menjadi 467.571 orang atau meningkat sebesar 59,64%. Kemudian pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat melambungnya harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan kembali menurun tajam hanya sejumlah 134.266 orang. Hal tersebut

merupakan imbas dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* yang melanda dunia sehingga menyebabkan munculnya kebijakan *lockdown* di berbagai negara dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga banyak melumpuhkan aktivitas perekonomian di Indonesia bahkan di dunia.

Peningkatan aksesibilitas dan amenitas kepariwisataan di Kabupaten Belitung semakin berkembang dengan mulainya wisatawan melihat Belitung sebagai destinasi baru yang menarik, bertambahnya jumlah penerbangan ke Tanjungpandan dari beberapa maskapai penerbangan, pertumbuhan operator wisata yang membuat paket-paket wisata Belitung, terbukanya beberapa destinasi wisata sebagai daya tarik wisata baru yang layak dikunjungi. Pada tahun 2016 pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung semakin berkembang dengan ditetapkannya Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sehingga aksesibilitas dan amenitas untuk mendukungnya pun terus ditingkatkan. Atraksi wisata dengan pelaksanaan *event* nasional dan internasional dilaksanakan di Kawasan Wisata Tanjung Kelayang. Promosi wisata Belitung sebagai destinasi wisata unggulan terus dilakukan dengan mengikuti *event expo* berskala nasional di beberapa kota besar di Indonesia dan bekerja sama dalam hal promosi dengan beberapa operator wisata luar negeri. Kabupaten Belitung dengan Tanjung kelayang telah terpilih dan ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional.

Dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk menambah dan memperbaiki Daerah Tujuan Wisata, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta. Pada tahun 2016 jumlah daerah tujuan wisata berjumlah 53 dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 68 daerah tujuan wisata walaupun dari jumlah tersebut terdapat objek wisata yang belum terkelola dengan baik.

Pembentukan desa wisata merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pada tahun 2016 terdapat 13 Desa wisata yang pembentukannya diawali dengan program PNPM mandiri pariwisata, dan terus berkembang sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 20 desa wisata.

Meningkatnya kunjungan pariwisata, juga mempunyai dampak terhadap meningkatnya PAD sektor pariwisata pada tahun 2016 PAD sektor pariwisata

sebesar Rp.14.119.713.224,- meningkat terus, sehingga pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 20.406.758.944,-. PAD sektor pariwisata ini mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2020 menjadi Rp. 10.358.158.155,-. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi akibat adanya kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi di Indonesia bahkan dunia.

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung sejalan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dalam pengembangannya baik dari segi Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan Game Developer, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukan, Seri Rupa.

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 terdata 2.078 orang. Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai Industri Kreatif sehingga mendorong peningkatan permintaan produk kreatif. Walaupun jumlah orang kreatif sudah meningkat, namun ketersediaan dan kualitas orang kreatif masih belum memadai untuk dapat meningkatkan skala produksi Industri Kreatif. Peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu Pendidikan Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kreatif.

c. Pertanian

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan cenderung melambat di mana pada tahun 2016 sebesar 27,59% terus menurun hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 25,01. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 27,83%.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan pruduksi tanaman pangan. Peningkatan produksi pangan tersebut dilakukan dengan memperluas dan melakukan cetak sawah baru dan memperbaiki jaringan irigasi. Luas lahan sawah yang berpotensi ditanami di Kabupaten Belitung adalah 1.151 hektar dan baru memiliki irigasi seluas 1.061 hektar, meskipun demikian produksi padi terus mengalami perlambatan yang disebabkan gagal panen karena faktor gangguan kondisi cuaca/anomali iklim dan cuaca. Pada tahun 2016 luas lahan

padi seluas 823 Ha dengan produksi Gabah Kering Giling sebesar 2.340 ton dan pada tahun 2020 lahan padi seluas 725 Ha dengan Produksi Gabah Giling Kering 2.204,96 Ton.

Perkebunan rakyat yang dikembangkan di Kabupaten Belitung yaitu Lada, Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit. Peningkatan tanaman Hortikultura di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi tanaman sayuran, buah-buahan dan biofarmaka mempunyai kecenderung terus menurun baik luas areal maupun jumlah produksinya pada tahun 2016 produksi tanaman holtikultura sebesar 4.852 ton dengan luas lahan 1.086 Ha dan pada tahun 2020 produksi tanaman hortikultura sebesar 6.700,08 ton dengan luas lahan 6.884,9 ha.

Tabel 2.83 Hasil kinerja urusan Pertanian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	27,59	26,21	25,27	24,84	27,83
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3,17	2,99	3,03	2,40	4,02
3	Cakupan bina kelompok petani	36,84	36,77	26,32	33,07	39,84
4	Persentase (%) peningkatan produksi pertanian					
	- Perkebunan Rakyat	27,47	51	60,58	74,72	73,69
	- Tanaman Pangan	34,94	44	37,47	38,19	37,82
	- Tanaman Hortikultura	0	67	146,71	153,8	151,26
	- Peternakan	3,71	4	8,3	9,73	8,81
5	Persentase (%) penanganan kasus penyakit hewan menular.	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2021

Tabel 2.84 Perkembangan Areal dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020

No	Komoditi	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Padi, terdiri dari : a. Sawah b. Ladang	737 708 29	2.340 2.280 60	823 800 23	2.415 2.371 44	806 786 20	2.458 2.420 38	853 810 43	1.454 1.401 53	725 705 20	2.204,96 2.168,66 36,30
2.	Palawija, terdiri dari : a. Jagung b. Ubi Kayu c. Ubi Jalar d. Kacang Tanah	231 63 130 5 33	2.696 265 2.340 35 56	146 29 90 0 27	1.788 122 1.620 0 46	206 67 93 3 43	2.050 281 1.674 21 73	168 39 66 5 41	2.696 58 242 43 39	193,9 66,1 82,9 8,4 36,5	1.924,66 512,76 1.337,05 19,5 55,35
3.	Hortikultura, terdiri dari : a. Sayur-Sayuran b. Buah-Buahan c. Biofarmaka	1.086 423 662 1	4.852 2.209 2.614 28	587 382 202 3	2.856 1.578 1.277 51	914 442 471 0,4	3.529 1.825 1.698 4,9	921 403 492 0,08	3.885 17.720 3.699 0,72	6.884,9 314,9 6.570 1,04	6.700,08 1.471,99 5.228,09 4,46

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2021

d. Perdagangan

Kabupaten Belitung memiliki posisi strategis dan berpotensi mengembangkan ekonomi wilayah meskipun sebagian besar barang dan jasa yang didatangkan dari luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya ke seluruh wilayah Kabupaten Belitung. Adapun ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Belitung sudah cukup stabil dengan persentase 100% selama lima tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tahun 2021. Jumlah pasar sesuai standar masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu satu unit. Namun revitalisasi pasar dan pembinaannya akan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya melalui program Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Selanjutnya terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada banyaknya alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang sah dari 1.967 buah di tahun 2019 menjadi 2.928 buah pada tahun 2020.

Tabel 2.85 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya	-	-	1.750	1.967	2.928
3	Jumlah pasar sesuai standar	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung menurut Lapangan Usaha, dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan yang mencakup perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2.86 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) (Milyar Rupiah)	871,71	1.001,63	1.080,43	1.127,63	1.017,03
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,89	11,46	10,59	11,43	10,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2021

Pada tahun 2020, sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) merupakan salah satu dari empat lapangan usaha dengan distribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Belitung selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi dan sektor Industri Pengolahan. Total nilai tambah sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) mencapai lebih dari 1,017 triliun rupiah di tahun 2020 bila dibandingkan dengan total PDRB pada tahun 2016 yang hanya berada di kisaran 871,71 miliar rupiah. Sementara itu kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami fluktuasi.

e. Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Industri sebagai sektor pemimpin (*leading sectors*) diharapkan

dapat tumbuh pesat yang kemudian merangsang pertumbuhan sektor lainnya, seperti pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri, dan sektor jasa yang berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut. Pada akhirnya diharapkan menyebabkan perluasan peluang kerja yang ada sehingga berakibat positif dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta secara tidak langsung menunjukkan bahwa perekonomian di suatu daerah itu tumbuh. Adapun tolok ukur peran industri di daerah terhadap perekonomian antara lain dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB, serapan tenaga kerja dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa.

Tabel 2.87 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Industri (Industri Pengolahan) (Milyar Rupiah)	985,94	1.070,60	1.150,50	1.116,26	1.170,0
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,32	12,25	12,35	11,31	11,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2021

Hingga tahun 2020, total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri di Kabupaten Belitung mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam tiga tahun terakhir. Peran sektor ini terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mengalami peningkatan dari semula 11,31% di tahun 2019 menjadi 11,91% di tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,45 %.

Walaupun sempat mengalami penurunan laju pertumbuhan yang tajam pada tahun 2019, angka pertumbuhannya berhasil kembali meningkat. Pada 2020, kategori ini tercatat tumbuh sebesar 0,45 persen dan bahkan berhasil menjadi salah satu dari enam kategori dengan pertumbuhan positif dan tidak mengalami konstraksi pada tahun 2020. Melihat laju pertumbuhan yang sebelumnya menunjukkan tren positif, kategori ini tentu memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang di tahun yang akan datang. Perkembangan di kategori industri pengolahan juga memiliki keterkaitan erat dengan beberapa kategori lainnya, terutama kategori perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

Salah satu komoditas-komoditas utama dari kategori ini yaitu produk-produk olahan dari sawit seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Kernel* (Inti Sawit), begitu juga dengan produk olahan barang galian seperti timah maupun pasir

kuarsa. Komoditi unggulan lainnya adalah makanan yang merupakan olahan lebih lanjut dari ikan seperti kerupuk, otak-otak dan hasil lainnya yang saat ini semakin berkembang semenjak pariwisata Kabupaten Belitung semakin dikenal masyarakat luas. Maka penguatan atau optimalisasi pada kategori-kategori penghasil bahan baku utama secara tidak langsung juga akan mengoptimalkan nilai tambah dari kategori lapangan usaha industri pengolahan.

Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Demikian juga dengan pertumbuhan jumlah pelaku IKM. Pada tahun 2019 pertumbuhan IKM dan pelaku IKM mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,18%. Sementara itu Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Belitung belum mengalami kemajuan yang pesat dengan capaian hanya 15% selama tiga tahun terakhir meskipun sempat mencapai 30% pada tahun 2016. Hal yang sama juga terdapat pada perkembangan industri kreatif yang pada periode 2016-2019 di mana jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 20 unit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah agar dapat secara intens melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi kelompok pengrajin maupun kelompok industri kreatif tersebut sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik.

Tabel 2.88 Hasil kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Jumlah Indutri Kecil Menengah (%)	2,83	1,83	2,08	2,18	1,12
2	Pertumbuhan Jumlah pelaku industri kecil menengah (%)	2,83	1,83	2,08	2,18	1,12
3	Produksi transaksi penjualan IKM (ribu rupiah)	939.266, 26	952.046, 76	956.874. 119	966.122. 329	966.122. 329
4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	30	15	15	15	15
5	Industri Kreatif (KUB)	20	20	20	20	20

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021

Industri kecil tersebar di beberapa jenis usaha yaitu pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, kerajinan dan umum, serta logam dan jasa. Berikut perkembangan industri kecil di Kabupaten Belitung tahun 2016-2020.

Tabel 2.89 Perkembangan Jumlah Industri Kecil Tahun 2016-2020 (Unit)

No	Jenis Usaha Industri Kecil	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pangan	1.258	1.293	1.331	1.367	1.253
2.	Sandang	59	59	59	62	61
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	361	366	366	366	362
4.	Kerajinan dan Umum	147	148	160	162	154
5.	Logam dan Jasa	239	239	239	239	239
	Jumlah	2.064	2.105	2.155	2.196	2.069

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021

Jumlah industri kecil di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir akan tetapi pada tahun 2020 industri kecil mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan penetapan kebijakan penjagaan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas masyarakat (*social distancing*) dan guna menekan angka penularan.

2.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan strategis yang baik dan berkualitas merupakan Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung. Berikut Kinerja Urusan penunjang Perencanaan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.90.

Pada tahun 2019, RPJMD Kabupaten Belitung Periode 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Belitung tersebut merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Sebagai Penjabaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Belitung menuangkannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.90 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	91,43%	73,71%	78%	82,22%	94,30%
5	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2021

Dalam melaksanakan RPJMD ke dalam RKPD tingkat konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD terus meningkat, pada tahun 2016 tingkat konsistensi mencapai 91,43% dan pada tahun 2017 tingkat konsistensi turun menjadi 73,71%. Untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013-2018, pada tahun 2017 RPJMD Kabupaten Belitung dilakukan Perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten nomor 12 tahun 2017. Pada Tahun 2018 tingkat konsitensi RPJMD menjadi 78% dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,22%, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 94,30%. Pada tahun 2021 baru akan dilakukan perubahan RPJMD untuk penyesuaian.

b. Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat, hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.91 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	9.62	18.16	20,46	16,94	10,55
3	Perbandingan antara belanja langsung terhadap Total APBD	55.52	53.3	51,81	51,44	51,44
4	Perbandingan antara belanja tidak langsung terhadap Total APBD	44.48	46.7	48,19	48,56	48,56
5	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	89.5	85.32	81,49	85,48	85,48
6	Peningkatan PAD (%)	8%	42%	0,46 %	-8,45%	-8,45%
7	Persentase belanja pendidikan (20%)	26.2	26.67	26,09	24,20	23,60
8	Persentase belanja kesehatan (10%)	16.49	18.79	20,17	18,64	21,03
9	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan terkait	100	100	100	100	100
10	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen data dan informasi barang milik daerah sesuai dengan aturan terkait	100	100	100	100	100
11	Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya	5.78	5,98	2,32	11,54	-1,6

Sumber : BPKAD dan BPPRD Kabupaten Belitung, 2021

Kinerja pengelolaan keuangan daerah memperoleh hasil yg memuaskan yaitu dengan memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun masih harus ada yang perlu dibenahi.

Selama periode 2018-2020, target pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 935.054.053.699,35 pada tahun 2018 dan menjadi Rp 970.146.286.359,00 pada tahun 2020. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2018-2020, realisasi pendapatan pada tahun 2018 dan 2019 mencapai target yang direncanakan dan bahkan persentase pendapatan cenderung melebihi target, namun pada tahun 2020 realisasi pendapatan belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 98,65%. Rata-rata persentase realisasi pendapatan tahun 2018-2020 sebesar 101,74%.

Berdasarkan data target dan realisasi pendapatan tahun 2019-2020, realisasi pendapatan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar -1,6% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 11,09%. Tidak tercapainya

target tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penerimaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan transfer ke daerah karena adanya *refocusing* dana transfer dari pusat serta adanya kebijakan yang mengharuskan pembatasan aktivitas/ *social distancing* untuk membantu pencegahan jumlah penularan covid-19.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan pelatihan di Kabupaten Belitung memerlukan perhatian yang cukup hal ini terlihat dari kinerja yang terus menurun.

Tabel 2.92 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1,38	0	0	74	52,70
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	18,33	90,05	1,25	255,56	74,11
3	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	62	75,96	72,86
4	Persentase (%) tingkat pelayanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, 2021

Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 52,70% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74%. Untuk persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 181,45% atau turun menjadi 74,11% dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 menjadi sebesar 72,86% atau turun sebesar 3,1% dari tahun sebelumnya. Dari data capaian diatas penurunan terjadi dikarenakan kondisi pandemi covid-19 sehingga banyak kegiatan-kegiatan diklat yang sifatnya harus ke luar daerah banyak yang tidak dilaksanakan.

d. Pengawasan

Pelaksanaan urusan penunjang pengawasan mempunyai kinerja yang semakin baik, peningkatan terus dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifias pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.93 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase tindak lanjut temuan	62%	n/a	n/a	74%	69%
2	Jumlah temuan BPK	27	12	19	12	6
3	Persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan	15%	15%	8,9%	11,2%	-8,6%
4	Persentase nilai evaluasi SAKIP PD minimal BB	Belum tersedia	Belum tersedia	10%	27%	Belum tersedia
5	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	70%	70%	70%	59%	51%
6	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belitung, 2021

Menurunnya temuan BPK di Kabupaten Belitung menunjukan bahwa kinerja pengawasan telah berjalan dengan baik, pada tahun 2016 temuan BPK sebanyak 27 temuan yang semakin menurun sampai di tahun 2020 menjadi sebanyak 6 temuan. Selain itu jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan terus menurun, dilihat dari persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan. Pada tahun 2016 tingkat penurunan 15% dan pada tahun 2020 terus menurun sehingga menjadi -8,6%. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebanyak 70% rekomendasi yang ditindaklanjuti terus menurun menjadi hanya 51% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya SDM yang berkompeten di tengah jadwal pengawasan yang padat. Masih diperlukan penyusunan strategi penjadwalan pengawasan yang optimal serta penyusunan SOP tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat.

Dilihat dari kinerja dan akuntabilitas Perangkat daerah, yang dinilai dari laporan LAKIP Perangkat daerah terus menunjukan perbaikan, hasil evalusi SAKIP Perangkat Daerah yang mempunyai skor diatas 70 dengan nilai minimal BB terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2018, Perangkat Daerah yang mempunyai nilai SAKIP minimal BB sebanyak 10% meningkat menjadi 27% pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 belum diketahui, karena

masih dalam proses penilaian. Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan kategori di atas 70 ini perlu menjadi perhatian, meskipun nilai akuntabilitas Kabupaten Belitung sudah mengalami peningkatan dengan nilai Laporan Kinerja B dengan nilai 60,03. Perlu adanya peningkatan level kapabilitas APIP yang berada di level 2 (dua) dan level maturitas SPIP yang pada saat ini berada di level 3 (tiga) dalam upaya meningkatkan kenerja pemerintah daerah.

e. Penelitian dan pengembangan

Sebagai upaya penguatan fungsi perencanaan pembangunan daerah perlu dukungan perencanaan dan kajian strategis pembangunan daerah. Sampai dengan saat ini kinerja hasil penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan belum dapat dioptimalkan. Kerja sama membangun jejaring/ network dengan pemerintah lain/ swasta/ akademisi masih belum dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan secara optimal.

Rencana program Kelitbangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2020 tertuang pada Program Prioritas RKP Tahun 2020. Tugas fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan termasuk ke dalam fungsi penunjang yaitu Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan berupa Program Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 2.94 Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	0	0	35,29
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	0	43,75
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	0	0	0	40,00
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	0	0	0	71,43

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2021

f. Unsur Penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang lainnya

Fungsi unsur pendukung ditangani oleh beberapa perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kesbangpol.

Tabel 2.95 Hasil kinerja urusan Pemerintahan fungsi penunjang lainnya Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD * Provinsi/Kab/Kota	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*	90	90	90	93,55	96,39
3	RAPERDA yang disetujui DPRD (%)*	100	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP**	C	CC	CC	CC	B
5	Nilai LPPD	3,1628	3,0409	3,1045	2,6761	Belum tersedia
6	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	100	90	100	100	100
7	Produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat**	694	583	457	956	947
8	Persentase (%) tingkat kesesuaian penataan struktur organisasi daerah terhadap hasil analisis penataan kelembagaan berbasis kebutuhan daerah dan aturan hukum yang berlaku**	100	100	100	100	100
9	Persentase (%) terciptanya stabilitas daerah yang kondusif***	100	100	100	100	100
10	Persentase (%) penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial***.	25	88.8	100	88.8	100

* *Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, 2021*
** *Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2021*
*** *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung, 2021*

Dari data di atas dapat dilihat kinerja Sekretariat DPRD sudah baik hal ini ditunjukan dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan untuk aktifitas Anggota DPRD dengan tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang mencapai 100%. Dari indikator Tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya kebutuhan untuk operasional pelaksanaan tugas DPRD.

Dari data di atas, terlihat pada tahun 2017 sampai dengan 2019 nilai SAKIP meningkat menjadi CC dengan range 50-60. Ditahun 2020 ada peningkatan dalam penilaian yaitu dengan nilai B dalam range 60-70. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dari data di atas dapat dilihat kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik sudah baik hal ini ditunjukan dengan terciptanya stabilitas daerah yang kondusif di Kabupaten Belitung yang persentasenya dari tahun ke tahun masih tetap mencapai 100%. Dari indikator persentase penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 100% menjadi 80% di tahun 2019, akan tetapi di tahun 2020 penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial kembali mencapai keberhasilan 100%.

Untuk mewujudkan situasi lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif dengan agenda terwujudnya kerukunan bangsa dan politik yaitu dengan mewujudkan situasi dan kondisi tenteram serta perilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari a) kemampuan ekonomi daerah; b) fasilitas wilayah atau infrastruktur; c) iklim berinvestasi; dan d) sumberdaya manusia.

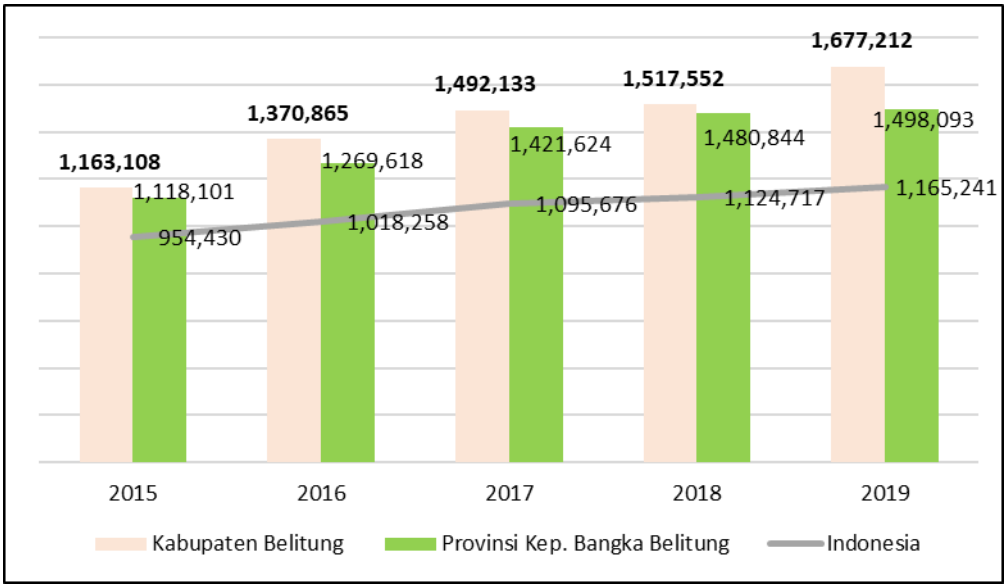
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi baik yang sudah berada di dalam daerah maupun yang akan masuk ke daerah itu yang kemudian dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2019 :

Grafik 2.28 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah) Penduduk Di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir. Dengan capaian sebesar Rp. 1.492.133,- pada tahun 2017, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung berada di atas pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia, yang berturut-turut hanya sebesar Rp 1.421.624,- dan Rp 1.095.676,-. Meskipun begitu, jika dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi persentase kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung cenderung menurun dari semula 15% di tahun 2016 menjadi 8,12% di tahun 2017.

Selanjutnya akan diperlihatkan perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	997,357.48	1,205,227.52	1,366,384.00	1,416,582	1,441,834
2	Belitung	1,163,107.72	1,370,865.03	1,492,133.00	1,517,552	1,677,212
3	Bangka Barat	1,067,338.69	1,118,833.62	1,196,786.00	1,299,129	1,315,113
4	Bangka Tengah	1,073,928.52	1,034,887.34	1,160,921.00	1,213,758	1,425,107
5	Bangka Selatan	1,094,535.91	1,046,885.92	1,155,676.00	1,231,949	1,302,257
6	Belitung Timur	1,091,157.71	1,206,380.05	1,492,306.00	1,408,769	1,678,367
7	Pangkalpinang	1,391,368.89	1,499,317.26	1,707,168.00	1,844,451	1,844,819

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel di atas menyatakan bahwa dalam kurun 2013-2017 terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita pada kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khusus Kabupaten Belitung, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menduduki peringkat dua tertinggi setelah kota Pangkalpinang pada tahun 2015-2016. Namun pada tahun 2017 masuk peringkat ketiga tertinggi setelah kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur. Hal ini tentunya tidak lepas dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa biaya hidup masyarakat di Pulau Belitung cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat Pulau Bangka meskipun kota Pangkalpinang masih menjadi yang tertinggi untuk besaran pengeluaran per kapita tersebut karena posisi strategis sebagai kawasan ibukota provinsi dan pusat aktivitas masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun yang dimaksud dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut BPS adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (non pangan). Kelompok makanan antara lain padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur, sayur-sayuran, makanan dan minuman jadi dan rokok. Sementara kelompok bukan makanan terdiri atas perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Tabel 2.97 Rata-rata Pengeluaran (Rupiah) Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan per Kapita di Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kabupaten Belitung	547,456	615,652	652,098	718,767	779,678	712,455	747,786	769,766	789,688	887,524
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	634,396	483,705	666,549	603,069	742,230	679,394	766,054	714,790	733,471	764,622
3	Indonesia	478,062	476,368	525,523	492,735	554,631	541,045	556,899	567,818	572,551	592,690

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp 1.492.133,- pada tahun 2017, penduduk di Kabupaten Belitung mengeluarkan uang untuk keperluan konsumsi makanan sebesar Rp 779.678,- dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp 712.455,-. Bila dibandingkan dua tahun sebelumnya, terdapat kenaikan pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap pengeluaran konsumsi bukan makanan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Belitung. Dan memang jika dilihat pada Tabel 2.4.1.1 diatas, nampak bahwa Kabupaten Belitung memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi tertinggi melampaui Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya sebesar Rp 1.421.624,- per bulan per orang dan terhadap nasional yang sebesar Rp 1.095.676,- per orang per bulan dengan berturut-turut nilai rata-rata pengeluaran konsumsi makanan sekitar Rp 742.230,- dan Rp 554.631,-..

Rata-rata penduduk di Kabupaten Belitung cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi bukan makanan pada kurun tiga tahun terakhir, terutama untuk belanja perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa dan barang tahan lama sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2.4.1.2.

Khusus pengeluaran konsumsi makanan, ternyata rata-rata masyarakat di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 lebih banyak membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar Rp 308.734,- per bulan per orang untuk kuintil 5 pengeluaran, ketimbang sayur-sayuran dan telur dan susu yang hanya dibelanjakan berturut-turut sebesar Rp 109.160,- dan Rp 68.964,- per bulan per orang di kelompok kuintil 5 pengeluaran. Demikian juga dengan kelompok kuintil 1 yang merupakan kelompok termiskin dengan pengeluaran per kapita terkecil. Kelompok ini juga relatif lebih banyak

membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli makanan dan minuman jadi daripada bahan makanan. Yang menarik, ternyata konsumsi rokok dan tembakau melebihi konsumsi buah-buahan dan kacang-kacangan bahkan untuk level kuintil 1.

Pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup serba instan diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi makanan dan minuman jadi di Kabupaten Belitung. Apalagi sebagian besar bahan makanan masih banyak yang didatangkan dari luar daerah sehingga harganya menjadi mahal dan akhirnya membuat masyarakat lebih memilih mengkonsumsi makanan dan minuman jadi daripada memasak atau mengolah sendiri bahan makanan tersebut.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Belitung. Ketersediaan fasillitas wilayah/ infrastruktur Kabupaten Belitung meliputi ketersediaan aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Belitung dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Perhubungan

Sehubungan dengan kegiatan perekonomian Kabupaten Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka perhubungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memperlancar arus barang dan jasa dari sentra produksi ke tempat konsumen baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Untuk menjangkau wilayah di Kabupaten Belitung, pada tahun 2020 tersedia ruas jalan dengan detail sebagai berikut:

a. Jalan Negara = 103,37 Km;
b. Jalan Provinsi = 132,43 Km;
c. Jalan Kabupaten = 666,02 Km.

Tabel 2.98 Persentase (%) Jalan Berkondisi Baik Tahun 2016–2020

Tahun	Prosentase (%) Jalan Kondisi Baik
(1)	(2)
2016	67,69
2017	73.68
2018	76,45
2019	83,44
2020	88,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Tabel 2.99 Profil Kondisi Jalan di Kabupaten Belitung Tahun 2016–2020

Keadaan	Panjang Jalan (Km)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jenis Permukaan					
a. Aspal	588,54	595,26	631,32	631,92	631,92
b. Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tanah/Puru	40,13	33,41	34,70	34,10	34,10
Jumlah	**628,67**	**628,67**	**666,02**	**666,02**	**666,02**
2. Kondisi Jalan					
a. Baik	425,56	463,178	509,19	555,76	586,70
b. Sedang	104,77	65,30	76,62	70,37	20,51
c. Rusak	98,34	100,193	80,21	39,89	58,80
Jumlah	**628,67**	**628,67**	**666,02**	**666,02**	**666,02**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Sebagai salah satu sarana penghubung dari suatu daerah ke daerah lain yang terpisah, adanya suatu jembatan merupakan pelengkap sarana transportasi jalan untuk kebutuhan masyarakat daerah terpencil. Pada tahun 2020 tersedia 107 (seratus tujuh) buah jembatan dengan panjang 1.042 (seribu empat puluh dua) meter. Jembatan dengan jenis buatan beton menjadi tipe jembatan yang dominan di Kabupaten Belitung dengan jumlah 105 buah dan total panjang 802 meter pada tahun 2020, hal ini dikarenakan struktur beton yang tahan lama dan perawatan yang rendah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya jembatan dengan jenis apapun perlu dilakukan perawatan dikarenakan pada tahun 2020 terekam data adanya jembatan mengalami penurunan kondisi dari baik ke sedang sebanyak 2 buah jembatan pada tahun 2020.

Data jumlah dan panjang jembatan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung tahun 2016–2020 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100 Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Belitung Tahun 2016–2020

Keadaan	Jumlah dan Panjang Jembatan per Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tipe/Jenis Jembatan										
a. Beton	104	777	104	777	104	777	105	802	105	802
b. Baja	2	240	2	240	2	240	2	240	2	240
c. Kayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**106**	**106**	**1017**	**106**	**1017**	**106**	**1017**	**107**	**1042**	**1042**
Kondisi Jembatan										
a. Baik	106	1017	106	1017	106	1017	105	1042	105	1042
b. Sedang	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
c. Rusak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**106**	**106**	**1017**	**106**	**1017**	**106**	**1017**	**107**	**1042**	**1042**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Bandar udara yang melayani angkutan udara di Kabupaten Belitung saat ini adalah Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan yang saat ini telah berstatus Bandara Internasional. Bandara ini sebelumnya dikelola oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun pada tahun 2020, bandara ini telah dikelola oleh PT Angkasa Pura sejak bulan Oktober tahun 2020. Di antara tahun 2016–2020 terjadi jumlah pesawat maupun penumpang yang tiba dan berangkat melalui Bandar Udara H. AS. Hananjoeddin Tanjungpandan terjadi secara fluktuatif. Tahun 2016 pesawat yang tiba maupun berangkat sebanyak 3.912 pesawat dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 4.790-an pesawat, walau pada dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi penurunan sebagai akibat dari adanya pandemi yang mulai terjadi di berbagai negara. Di satu sisi, penumpang yang tiba dan berangkat juga mengalami hal yang sama dari tahun 2016 ke tahun 2020. Penumpang yang datang tahun 2016 sebanyak 434.361 orang meningkat menjadi 527.355 orang pada tahun 2018, dan penurunan sampai tahun 2020 menjadi 160.118. Sedangkan penumpang yang berangkat juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 434.435 orang menjadi 526.828 orang pada tahun 2018 dan 154.898 orang pada tahun 2020. Oleh karena perbedaan arus penumpang yang datang dan berangkat, terdapat asumsi bahwasanya terjadi emigrasi penduduk dari Kabupaten Belitung pada rentang waktu tersebut. Hal ini pula selaras dengan arus bagasi yang dibongkar dan dimuat, dengan adanya peningkatan penumpang dari tahun 2016 ke 2018, seyogianya penumpang akan membawa barang dan bagasi untuk masuk sehingga akan meningkatkan jumlah bagasi dibongkar di Kabupaten Belitung. Namun, kontras

dengan peningkatan bagasi, total barang yang dimuat masih memiliki kecenderungan penurunan dari tahun 2016 ke 2018.

Terjadinya penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia yang berdampak langsung terhadap segala sektor termasuk dengan kondisi jumlah penumpang pesawat sebagai akibat adanya pembatasan pergerakan.

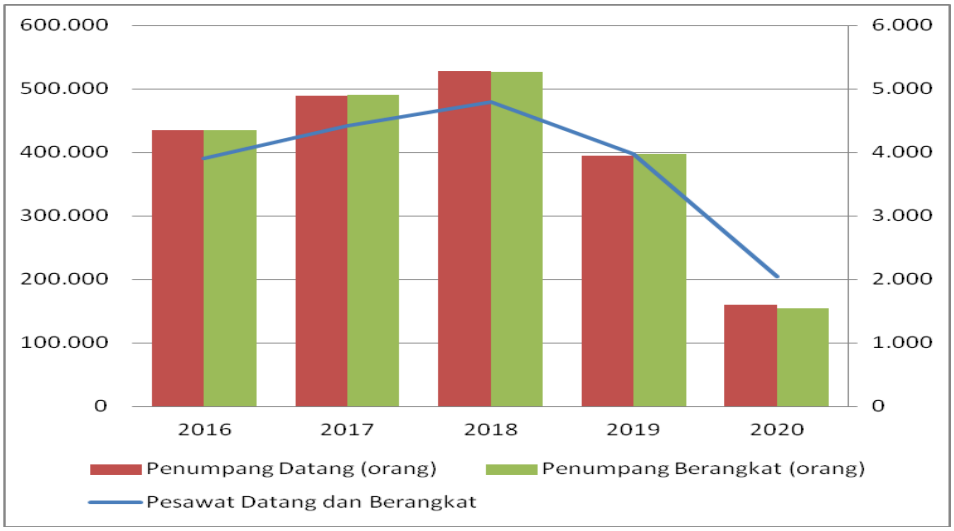
Berikut ini tabel mengenai data perkembangan jumlah pesawat dan jumlah penumpang pesawat tiba di Kabupaten Belitung tahun 2016–2020.

Tabel 2.101 Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Bandara Udara H.AS Hanandjoedin Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pesawat Datang (kali)	3.912	4.418	4.798	3.968	2.040
2	Pesawat Berangkat (kali)	3.912	4.418	4.796	3.968	2.040
3	Penumpang Datang (orang)	434.361	489.121	527.355	395.274	160.118
4	Penumpang Berangkat (orang)	434.435	489.949	526.828	396.998	154.898
5	Bagasi Bongkar (kg)	2.584.321	2.451.250	3.624.925	2.257.253	865.005
6	Bagasi Muat (kg)	2.421.430	2.331.501	3.688.333	2.268.547	856.352
7	Barang Bongkat (kg)	1.612.895	1.843.335	2.195.553	2.125.062	1.960.087
8	Barang Muat (kg)	1.376.724	1.253.660	1.122.207	815.580	980.578

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Grafik 2.29 Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Bandara Udara H.AS Hanandjoedin Tahun 2016-2020



Jumlah pengguna angkutan laut mengalami peningkatan pada periode waktu tahun 2016–2019 akan tetapi mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah kapal penumpang yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Laskar Pelangi Kabupaten Belitung sebanyak 163 kapal dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 203 kapal serta mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 88 kapal. Peningkatan jumlah kapal yang tiba dan berangkat dari pelabuhan tentunya berpengaruh terhadap arus masuk penumpang bahari dari Kabupaten Belitung. Berikut ini tabel data perkembangan jumlah kapal penumpang dan jumlah penumpang tiba di Kabupaten Belitung tahun 2016–2020.

Tabel 2.102 Arus Lalu Lintas Pelabuhan Penumpang Laskar Pelangi Kabupaten BelitungTahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapal Datang	163	147	167	203	88
2	Kapal Berangkat	163	147	167	203	88

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Terminal Tanjungpandan melayani angkutan bus di dalam kota dan antar kota, jumlah penumpang bus Terminal Tanjungpandan cenderung menurun. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi membuat jumlah penumpang terus menurun.

Pada tahun 2016 jumlah penumpang naik bus sebanyak 16.092 orang, hal ini terus menurun, namun sejak saat itu terdapat peningkatan penumpang pada tahun 2017 dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 12.487 orang dan pada tahun 2018 naik sebanyak 12.500 orang. Begitu pula dengan penumpang yang datang ke Terminal Tanjungpandan yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penumpang yang turun sebanyak 12.755 orang dan turun hampir separuh pada tahun 2020 menjadi 6.310 orang.

Tabel 2.103 Arus Lalu Lintas Penumpang dan Bus yang Masuk Terminal Tanjungpandan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Bus	20	21	14	14	14
2	Naik	16.092	12.487	12.500	10.638	8.725
3	Turun	12.755	9.451	10.124	8.325	6.310

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2021

b. Perhotelan dan Restoran

Pertumbuhan sektor Pariwisata yang merupakan sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Belitung memilki daya tarik bagi investor untuk investasi di bidang perhotelan dan rumah makan. Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung yang sangat pesat, memerlukan daya dukung fasilitas hotel, penginapan, yang cukup dan memadai. Pada tahun 2020 jumlah hotel di Kabupaten Belitung yang telah berdiri sebanyak 71 hotel. Peningkatan pariwisata juga berimplikasi pada peningkatan jumlah restoran/rumah makan. Berikut perkembangan jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Belitung tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hotel Bintang 5					
	Jumlah Hotel	-	-	-	-	1
	Jumlah Kamar	-	-	-	-	164
2	Hotel Bintang 4					
	Jumlah Hotel	3	4	5	5	5
	Jumlah Kamar	365	475	552	552	552
3	Hotel Bintang 3					
	Jumlah Hotel	5	6	7	7	7
	Jumlah Kamar	335	478	615	615	615
4	Hotel Bintang 2					
	Jumlah Hotel	6	6	7	7	7
	Jumlah Kamar	296	296	356	356	356
	Jumlah Tempat Tidur	-	-	-		
5	Hotel Bintang 1					
	Jumlah Hotel	4	4	4	4	4
	Jumlah Kamar	107	107	107	107	107
6	Hotel Melati					
	Jumlah Hotel	32	36	37	46	47
	Jumlah Kamar	551	609	652	841	853
	Total Hotel	**50**	**56**	**60**	**69**	**71**
	Total kamar	**1.654**	**1.965**	**2.282**	**2.471**	**2.647**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2021

Selain peningkatan jumlah hotel, perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Belitung juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Belitung. Berikut adalah tabel peningkatan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Belitung pada tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.105 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah makan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Restoran	32	35	37	38	38
2	Rumah Makan	48	52	69	80	87

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2021

c. Air Bersih

Sumber air baku di Kabupaten Belitung didapatkan dari sumur dangkal dan air permukaan, keberadaan kolong- kolong eks tambang menjadi sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih. Kondisi Pengelolaan air baku pada saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Berikut data perkembangan penyediaan air bersih oleh PDAM.

Tabel 2.106 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakai dan Penjualan Air Minum PDAM di Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan	2.435	2.375	2.415	2.470	2.426
2	Pemakaian air (m3)	290.988	291.698	284.009	346.127	353.344
3	Penjualan air (Juta Rp)	886.704.325	1.584.004.195	1.747.928.320	1.744.794.200	1.698.757.465

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Selain penyediaan air bersih oleh PDAM pemerintah telah membangun 12 (okumme) SPAM yang berada di kecamatan-kecamatan dengan jumlah pelanggan tahun 2019 sebanyak 1.987. Berikut data perkembangan SPAM di kabupaten Belitung.

Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian dan Penjualan Air SPAM di Kabupaten Belitung Tahun 2018-2019

SPAM	Jumlah Pelanggan		Jumlah Pemakaian Air		Jumlah Penjualan Air	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SPAM Sijuk	668	682	33.962	38.838	134.111.315	154.830.650
SPAM Membalong	497	499	30.772	22.947	70.728.175	63.615.950
SPAM Teluk Dalam	42	-	-	-	-	-
SPAM Selumar	50	-	-	-	-	-
SPAM Perpat	120	-	-	-	-	-
SPAM Kembiri	150	-	-	-	-	-
SPAM Terong	80	-	-	-	-	-
SPAM Ibul	255	255		8.867		23.980.620
SPAM Bantan	250	250	10.938	31.626	24.855.010	79.027.040
SPAM Juru Seberang	297	301	5.567	6.487	29.549.775	27.169.450
SPAM Tiris	-	-	-	-	-	-
SPAM Selat Nasik	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.409	1.987	81.239	108.765	259.244.275	348.623.710

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2021

d. Energi Listrik

PLN Wilayah Belitung (termasuk Kabupaten Belitung Timur) tahun 2020 mengelola daya terpasang untuk Kabupaten Belitung sebanyak 132.777.800 KW di

mana jumlah pelanggan listrik mencapai 67.483 pelanggan, dengan 58.459 rumah tangga yang dilayani.

Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan (pelanggan)	53.443	94.039	60.915	64.345	67.483
2	Daya Terpasang (KW)	67.150	101.090	120.310.200	128.108.950	132.777.800
3	Rumah tangga pengguna listrik (pelanggan)	47.517	83.215	53.798	56.350	58.459

Sumber : UP3 Belitung Tahun 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang baik dan kondusif merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian, meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja baru yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Situasi yang aman dan kondusif suatu daerah memegang peranan kunci bagi investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas menjadi salah satu parameter kondusif tidaknya suatu daerah. Berikut diuraikan jumlah pidana tahun 2015-2019 di Kabupaten Belitung.

a. Kriminalitas

Kondisi keamanan dan ketertiban kabupaten Belitung relatif kondusif bagi berlangsungya aktifitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Masih terjadi berbagai tindak kriminalitas, unjuk rasa yang merugikan dan mengganggu masyarakat.

Tabel 2.109 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencurian/Perampokan	49	46	48	54	47
2.	Penganiayaan	10	2	16	17	17
3.	Pembunuhan	0	0	1	1	1
4.	Kesusilaan	0	0	6	13	12
5.	Psikotropika	14	14	12	0	0
6.	Perjudian	3	1	3	4	1
7.	Pemerkosaan	10	7	1	0	0
8.	Kelalaian Menyebabkan Kematian/Terluka	0	0	4	1	0
9.	Senjata Tajam	0	0	0	1	1
10.	Kejahatan Lain-Lain	21	15	31	61	56
	Jumlah	**107**	**85**	**122**	152	135

Sumber: Belitung Dalam Angka Tahun 2016 , 2017, 2018, dan Kepolisian Resort Belitung 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa kasus tindak pidana di Kabupaten Belitung cenderung meningkat pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 berjumlah 107 kejadian dan pada tahun 2019 naik menjadi 135 kejadian. Tindak pidana tertinggi dalam kurun waktu 2015-2019 adalah pencurian/perampokan dan kejahatan lainnya, ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas dan berdampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran serta meningkatnya angka kemiskinan. Penurunan jumlah tindak pidana terjadi pada tahun 2019 sebanyak 135 kejadian. Situasi ini didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

b. Perizinan

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah teknis. Sejak tahun 2007 telah dibentuk perangkat daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh pejabat eselon III. Selanjutnya pada tahun 2013 status organisasi perangkat daerah ini ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh pejabat eselon II. Dan akhirnya di tahun 2017 nomenklatur perangkat daerah tersebut diubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Di,samping penguatan organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinan, keseriusan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan fokus iklim berinvestasi dapat dilihat juga dari pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, dari sebelumnya pada tahun 2013 – 2014 hanya melayani 6 jenis perizinan, menjadi 37 jenis perizinan pada tahun 2015 – 2016, dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2017 meningkat menjadi 100 jenis perizinan. Hal ini dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Belitung. Berikut 100 (seratus) perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, yaitu:

a. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
    1. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    2. izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
    3. izin membawa cagar budaya ke luar daerah.
b. Bidang Kesehatan
    1. izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
    2. izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
    3. izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optika;
    4. izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
    5. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

c. Bidang Pekerjaan Umum
    1. izin usaha jasa kontruksi;
    2. izin mendirikan bangunan;
    3. izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
    4. izin pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.
d. Bidang Sosial
    1. izin pengumpulan uang atau barang skala daerah; dan
    2. izin mendirikan taman anak sejahtera.
e. Bidang Tenaga Kerja
    1. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
    2. izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
    3. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
f. Bidang Pertanahan
    1. izin lokasi dalam 1 (satu) daerah; dan
    2. izin membuka tanah.
g. Bidang Lingkungan Hidup
    1. izin lingkungan;
    2. izin pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan limbah B3;
    3. izin pengelolaan limbah B3 kegiatan pengumpulan limbah B3;
    4. izin pengelolaan limbah B3 kegiatan pengangkutan limbah B3 skla kabupaten;
    5. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
    6. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
    7. izin pendaurulangan sampah/peengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
h. Bidang Perhubungan
    1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
    2. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
    3. izin penyelenggaraan taxi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
    4. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;

5. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
6. izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
7. izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan;
8. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
9. izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
10. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal;
11. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
12. izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
13. izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
14. izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
15. izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
16. izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
17. izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR/DLKP) pelabuhan pengumpan lokal;
18. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
19. izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah;
20. izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah;
21. izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah;
22. Izin Usaha Angkutan, meliputi:
    a. izin trayek; dan
    b. izin angkutan barang.

i. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
2. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.

j. Bidang Perikanan
   1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
   2. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP), meliputi:
      a. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap;
      b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Budidaya; dan
      c. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

k. Bidang Pertanian
   1. Izin Usaha Perkebunan, meliputi:
      a. Izin usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); dan
      b. Izin usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
   2. izin usaha peternakan;
   3. izin usaha Hortikultura;
   4. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan;
   5. Surat Tanda Daftar Budidaya Hortikultura;
   6. Surat Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
   7. izin usaha produksi bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong unggas; dan
   8. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah.

m. Bidang Perdagangan
   1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   2. izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
   3. Tanda Daftar Gudang (TDG), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
   4. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   5. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri;
   6. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

7. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

n. Bidang Penanaman Modal dan Industri
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
9. Izin Gangguan (HO);
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
11. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
12. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
13. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah;
14. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
15. Izin Hiburan.

o. Bidang Pariwisata, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/Izin Usaha Pariwisata, meliputi:
1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi pariwisata;
4. jasa perjalanan pariwisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta; dan
13. spa.

Pada pertengahan tahun 2018, pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara *online* yang lebih dikenal dengan OSS (*Online Single Submission*) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diberikan tugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapat kemudahan dalam hal perizinan secara *online*.

Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung dilaksanakan secara terpadu, artinya mulai dari pemasukan berkas permohonan oleh pemohon sampai dengan pengambilan surat izin yang telah selesai dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian melalui satu loket yaitu *Front Office* (FO). Ini berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di bidang pelayanan perizinan sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah perlunya disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur penilaian tingkat kualitas pelayanan secara berkala dan sebagai bahan untuk kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan bagi masyarakat serta sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan di daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 diperoleh hasil Nilai Mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung adalah 3,40 dengan Nilai Konversi mencapai 85,07 persen serta kinerja unit pelayanan menyandang nilai “Baik”. Ini mencerminkan kepuasan sebagian besar pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Tabel 2.110 Perkembangan Jumlah Ijin Di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Izin yang menjadi kewenangan	37	100	100	100	100
2.	Jumlah Pengajuan Izin	1.810	1.679	2.100	1493	985
3.	Jumlah izin yang terbit	1.790	1.642	2.093	1.382	840

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2016 – 2020 berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 jumlah izin yang terbit adalah sebanyak 840 atau turun 53,07 persen dari tahun 2016 yang mencapai 1.790 izin terbit. Penurunan ini disebabkan antara lain bahwa pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sudah menggunakan perizinan secara *online* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission atau OSS*) untuk mengakomodasi berbagai sektor usaha. Penurunan jumlah izin yang terbit pada tahun 2020 juga akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia yang mengakibatkan pembatasan aktivitas dan pola mobilitas masyarakat. Terkait hal tersebut, pelayanan publik terutama yang meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan telah melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pelayanan tanpa tatap muka.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah merupakan komponen dalam pembentukan pendapatan daerah Terdapat 11 objek Pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Kabupaten Belitung.

Tabel 2.111 Perkembangan Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Hotel	7.267.860.473,90	8.545.529.715,77	11.275.358.863,99	9.251.808.783,11	3.877.534.981,54
2	Pajak Restoran	4.540.450.635,76	5.133.797.472,89	6.959.254.135,28	8.371.801.817,68	5.122.995.494,91
3	Pajak Hiburan	456.849.814,40	620.655.713,55	672.847.474,79	578.992.143,01	258.621.978,85
4	Pajak Reklame	1.186.394.261,18	1.395.732.238,46	1.231.383.983,62	893.040.643,81	782.970.552,67
5	Pajak Penerangan Jalan	8.511.981.678,00	1.017.798.410,00	11.518.244.153,00	12.302.757.750,00	12.245.521.984,00
6	Pajak Parkir	70.237.500,00	150.259.500,00	149.340.000,00	177.289.750,00	287.204.250,00
7	Pajak Air Tanah	101.683.920,00	110.396.040,00	115.078.320,00	125.985.840,56	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	87.420.000,00	91.320.000,00	105.420.000,00	87.870.000,00	96.345.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.309.551.474,00	39.091.865.414,01	36.376.972.885,62	37.787.362.648,50	32.320.169.383,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.062.828.513,00	5.588.228.093,00	5.882.869.611,00	7.515.251.609,00	7.026.350.800,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.882.864.946,80	25.819.352.578,80	21.337.992.505,00	22.324.822.412,65	17.190.984.688,26

Sumber : BPPRD Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan pajak daerah dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar minus 20,33 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan imbas dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia sehingga menyebabkan munculnya kebijakan *Lockdown* di berbagai negara dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Dampak yang sangat besar terutama dirasakan pada sektor industri pariwisata yang berakibat pada penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang mengakibatkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mengalami anjlok yang cukup dalam. Jika dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya, pendapatan pajak terbesar yang mengalami penurunan terdapat pada objek Pajak Hotel sebesar minus 58,09 persen, urutan terbesar kedua yaitu Pajak Hiburan sebesar minus 55,33 persen dan ketiga pada objek Pajak Restoran sebesar minus 38,8 persen. Objek pajak yang mengalami peningkatan positif adalah Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Wallet, sedangkan pajak lainnya juga mengalami penurunan.

Pendapatan terbesar pajak daerah pada tahun 2020 diraih oleh objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar Rp. 32.320.169.383 atau sebesar

40,8%. Selanjutnya di urutan terbesar kedua adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 17.190.984.688,26 atau sebesar 21,7 %, dan urutan terbesar ketiga pada objek Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp 12.245.521.984,00 atau sebesar 15,46%.

d. Peraturan Daerah Pendukung Investasi

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan menarik serta menumbuhkan iklim investasi diperlukan sebuah okumment kebijakan daerah yang sifatnya formal yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya. Berikut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Belitung yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah serta menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2016-2020.

Tabel 2.112 Perkembangan jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Perda	-	2	1	1	-	Buah
2	Jumlah Perbub	1	2	-	1	1	Buah

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2021

Berikut penjelasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2016-2020:

1. Pada Tahun 2016 terdapat 1 (satu) buah Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.
2. Pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) buah Peraturan Daerah dan 2 (dua) buah Peraturan Bupati, yaitu:
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menarik minat investor dalam berinvestasi di Kabupaten Belitung;
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan, dalam rangka menyederhanakan proses perizinan dan memenuhi tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business);

c. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu; dan

d. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dalam rangka Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan bagi investor yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

3. Pada Tahun 2018 hanya terdapat satu Peraturan Daerah yang diterbitkan yaitu mengenai Pencabutan Izin Gangguan.

4. Pada Tahun 2019 terdapat satu Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan satu Peraturan Bupati Belitung yang di terbitkan yaitu:

   a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha. Sebagai upaya meningkatkan iklim berinvestasi di daerah dan meningkatkan daya saing serta menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat melakukan deregulasi perizinan dan non perizinan. Deregulasi perizinan terkait izin yang menghambat investasi dapat melalui harmonisasi perizinan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha.

   b. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 tahun 2019 tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Belitung. Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Kemudahan Investasi di luar maupun dalam kawasan KEK yang bertujuan:

      1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
      2) menciptakan lapangan kerja;
      3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
      4) mendorong meningkatnya investasi; dan

      mendorong dan mengembangkan Kawasan.

5. Pada Tahun 2020 terdapat satu Peraturan Bupati Belitung yang diterbitkan yaitu: Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2025. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitung (RUPMK) bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal, mensinergikan semua kepentingan sektoral dan sebagai peta panduan (*road map*) penanaman modal didaerah.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu parameter yang sering dijadikan tolok ukur kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah tingkat pendidikan. Di Kabupaten Belitung mayoritas penduduknya menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah Dasar dan Menengah. Lulusan jenjang pendidikan tinggi tahun 2020 ada sebanyak 4.024 orang untuk lulusan diploma dan sebanyak 5.551 orang untuk lulusan Strata satu (S-1) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.113 Data Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2016 – 2020

No	Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tidak/Belum Sekolah	30.532	28.354	29,685	31,174	31,245
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	23.938	26.124	26,942	28,913	29,241
3.	Tamat SD/Sederajat	41.733	42.752	44,089	44,225	44,199
4.	SLTP/Sederajat	22.858	24.013	24,809	25,250	25,265
5.	SLTA/Sederajat	30.387	32.127	33,485	34,543	34,852
6.	Diploma I/II	1.184	1.139	1,439	1,087	1,071
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.332	2.560	3,424	2,908	2,953
8.	Diploma IV/Strata I	3.820	4.486	5,009	5,433	5,551
9.	Strata II	107	150	169	181	187
10.	Strata III	1	1	2	3	3
Jumlah		**152.257**	**156.892**	**169,053**	**173,717**	**174,567**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2021

Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif(penduduk usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan merupakan indikator yang penting untuk menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk tidak produktif. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk

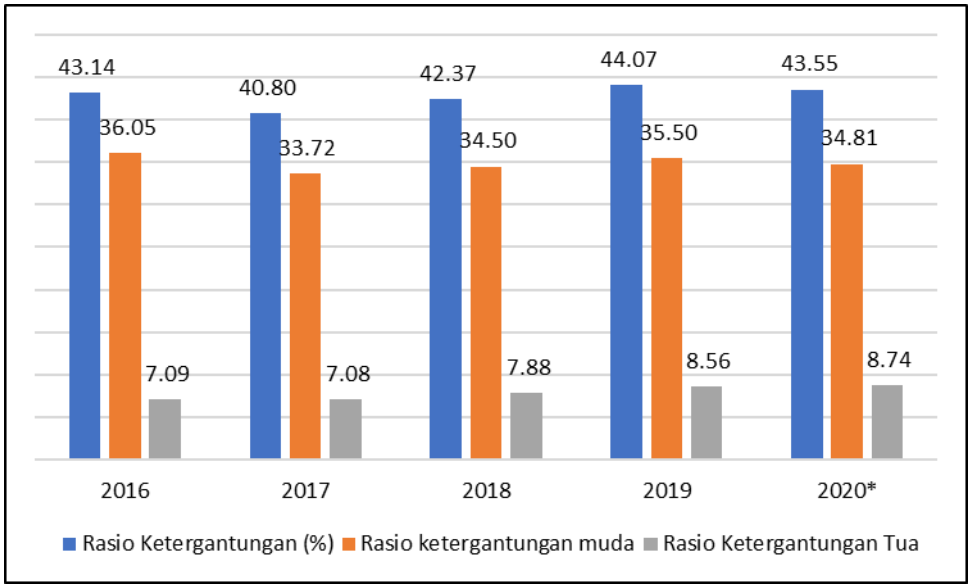
membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Dalam hal ini pembiayaan seperti menanggung biaya sekolah, pensiun, dan bantuan-bantuan lainnya untuk penduduk-penduduk yang berada di usia non produktif. Dengan kata lain, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin berat. Rasio ketergantungan Kabupaten Belitung 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114 Rasio Ketergantungan Kabupaten Belitung 2016-2020

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penduduk Usia < 15 th	39,513	38,725	40,960	42,811	42,327	Jiwa
2.	Penduduk Usia > 15 th & < 65 th	109,611	114,848	118,740	120,579	121,606	Jiwa
3.	Penduduk Usia > 65 th	7,768	8,133	9,353	10,327	10,634	Jiwa
4.	Jumlah Penduduk	156,892	161,706	169,053	173,717	174,567	Jiwa
5.	Rasio Ketergantungan (%)	43.14	40.80	42.37	44.07	43.55	Persen
a	Rasio ketergantungan muda	36.05	33.72	34.50	35.50	34.81	Persen
b	Rasio Ketergantungan Tua	7.09	7.08	7.88	8.56	8.74	Persen

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2021 (diolah)

Grafik 2.30 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas rasio ketergantungan Kabupaten Belitung pada tahun 2020 adalah sebesar 43,55%, dengan rasio ketergantungan muda sebesar 34,81% sedangkan rasio ketergantungan tua sebesar 8,74%, artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Belitung mempunyai tanggungan sekitar 43-44 penduduk usia non produktif, yang mana kisaran 34-35 diantaranya dari kelompok usia muda dan 9-10 orang lainnya berasal dari kelompok usia lanjut/ tua.

Rasio ketergantungan dapat menurun seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas. Karena proporsi jumlah penduduk usia muda menurun, proporsi penduduk usia produktif akan meningkat. Periode ini dikenal sebagai "bonus demografi" karena besarnya proporsi penduduk yang masuk ke usia angkatan kerja dan berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, proporsi penduduk usia produktif akan menurun kembali bersamaan dengan naiknya proporsi penduduk usia tua, sebagai akibatnya rasio ketergantungan akan naik kembali yang menandai berakhirnya periode bonus demografi.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalis capaian dan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab, adil, patut dan bermanfaat .

Kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Belitung perlu dilakukan analisis baik kinerja masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan dimasa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang

perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*).

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan dana perimbangan terdiri dari komponen (1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, (2) Dana alokasi umum dan (3) Dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (4) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya (5) Pendapatan Lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung mengalami *trend* yang fluktuatif tiap tahunnya, dimana terjadi penurunan pada tahun 2018 serta 2020 akan tetapi rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,62 %. Pertumbuhan pada masing-masing pos penerimaan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,73%, Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Belitung mengalami koreksi dengan rata-rata sebesar -1,70%, dan Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-ain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,29%.

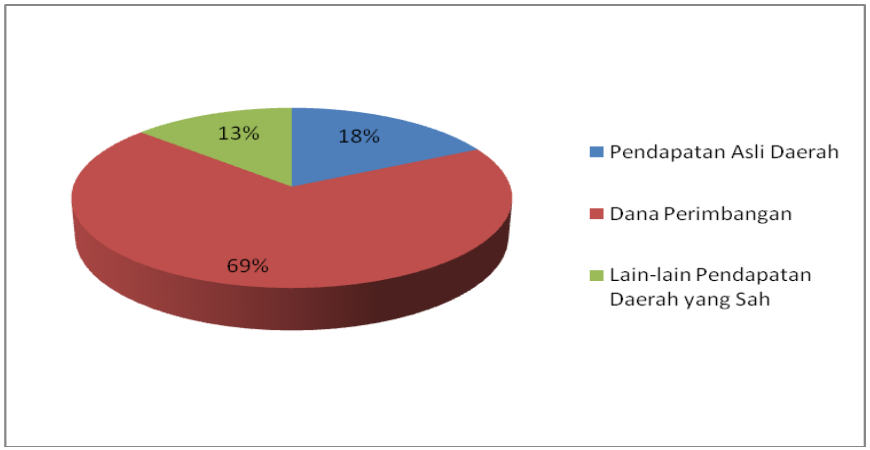
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan DaerahTahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	6	7	7	6	7	8
4	**PENDAPATAN**	**911.305.568.117,31**	**964.030.826.331,19**	**963.227.529.030,79**	**1.082.784.254.354,25**	**957.021.589.492,11**	**1,62**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**138.227.681.151,18**	**193.193.857.376,73**	**191.938.969.495,04**	**177.674.823.550,42**	**162.134.305.440,46**	**5,73**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	67.478.123.217,04	96.725.121.185,48	95.624.761.932,30	99.416.983.398,32	79.316.693.695,41	6,49
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.356.540.035,55	9.728.476.519,85	8.719.218.510,84	9.876.491.944,25	7.399.581.247,00	-7,06
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.534.038.351,59	4.385.139.060,59	4.115.011.274,05	4.269.120.158,11	3.928.156.865,21	-3,42
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	55.858.979.547,00	82.355.120.610,81	83.479.977.777,85	64.112.228.049,74	71.489.873.632,84	9,28
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**675.387.947.846,00**	**637.653.274.085,00**	**689.269.042.160,00**	**735.509.551.933,00**	**617.730.480.634,00**	**-1,70**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65.586.125.818,00	37.348.052.906,00	72.239.193.232,00	89.328.036.522,00	41.443.900.249,00	5,10
4.2.2	Dana Alokasi Umum	479.789.103.000,00	474.909.929.000,00	480.560.681.000,00	510.538.719.000,00	460.955.998.000,00	-0,83
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	130.012.719.028,00	125.395.292.179,00	136.469.167.928,00	135.642.796.411,00	115.330.582.385,00	-2,58
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**97.689.939.120,13**	**133.183.694.869,46**	**82.019.517.375,75**	**169.599.878.870,83**	**177.156.803.417,65**	**27,29**
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.796.808.655,00	-	-	59.037.511.260,00	55.031.148.187,00	-6,79
4.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.332.534.965,13	46.850.069.869,46	34.556.730.748,29	60.632.029.110,03	45.273.388.864,65	35,88

1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.073.495.500,00	4.679.030.000,00	8.588.122.627,46	3.277.200.000,00	3.115.000.000,00	-18,10
4.3.6	Pendapatan Lainnya	29.487.100.000,00	81.654.595.000,00	38.874.664.000,00	46.653.138.500,00	73.737.266.366,00	50,65

Sumber : BPPRD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Grafik 3.1 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan DaerahTahun 2016 – 2020



1) Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan yang kemudian turun pada tahun 2018 dan 2019 sebelum kemudian naik lagi pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 15,16 meningkat menjadi 20,04 % pada tahun 2017 dan turun pada tahun 2018 menjadi 19,93% dan pada tahun 2020 menjadi 16,94%. Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2019 akan tetapi kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan berkriteria “cukup”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio derajat Presentase Desentralisasi Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	911.305.568.117,31	138.227.681.151,18	15,16
2017	964.030.826.331,19	193.193.857.376,73	20,04
2018	963.227.529.030,79	191.938.969.495,04	19,93
2019	1.082.784.254.354,25	177.674.823.550,42	16,41
2020	957.021.589.492,11	162.134.305.440,46	16,94

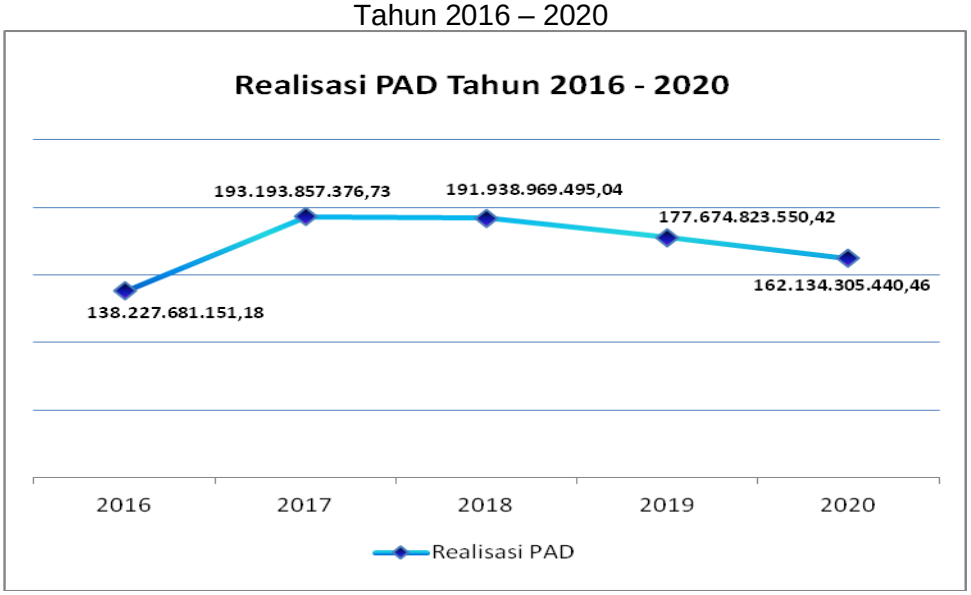
Sumber : BPPRD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Dari komposisi Pendapatan daerah diketahui bahwa penerimaan daerah selama periode 2016 - 2020 terbesar diperoleh dari dana perimbangan yaitu sebesar 74,11% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 64,55% pada tahun 2020, sedangkan komposisi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar 15,17% mengalami peningkatan menjadi 16,94% pada tahun 2020 dan komposisi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 sebesar 10,72% mengalami meningkat 18,51% tahun 2020.

Dari Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung, Angka Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah dari lain-lain Pendapatan Asli daerah sebesar 9,28%, pertumbuhan yang tinggi ini disebabkan adanya penambahan jenis penerimaan pendapatan yaitu penerimaan dari pendapatan Akademi Keperawatan (AKPER), Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono. Sedangkan pendapatan retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -18,81 %, penurunan ini disebabkan oleh adanya penghapusan penerimaan retribusi di Rumah Sakit

Dr. H. Marsidi Judono.

Grafik 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020



Rata-rata pertumbuhan pajak daerah dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5.73 %. Dari Komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan tertinggi berasal dari pajak parkir sebesar 48,51% dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10,82%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah terendah berasal dari pajak reklame dan pajak hotel yang mengalami kontraksi akibat dari pengaruh adanya pandemi *covid-19*. Pajak yang berkontribusi terhadap rasio dan pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah melalui pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak BPHTB ke pemerintah daerah (kab/kota) tahun 2011 dan pelimpahan kewenangan pengelolaaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) ke Pemerintah Daerah (kab/kota) tahun 2013, yang sebelumnya kedua objek pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat melalui skema bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah (kab/kota). Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan 2 (dua) objek pajak tersebut, menyebabkan rasio pajak dan pertumbuhan pajak daerah serta rata-rata pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD meningkat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengindentifikasikan peningkatan desentralisasi fiskal. yang didomimasi oleh pajak daerah.

Tabel 3.3 Angka Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pajak Hotel	7.267.860.473,90	8.545.529.715,77	11.275.358.863,99	9.251.808.783,11	3.877.534.981,54	-6,63
2	Pajak Restoran	4.540.450.635,76	5.133.797.472,89	6.959.254.135,28	8.371.801.817,68	5.122.995.494,91	7,53
3	Pajak Hiburan	456.849.814,40	620.655.713,55	672.847.474,79	578.992.143,01	258.621.978,85	-6,25
4	Pajak Reklame	1.186.394.261,18	1.395.732.238,46	1.231.383.983,62	893.040.643,81	782.970.552,67	-8,48
5	Pajak Penerangan Jalan	8.511.981.678,00	10.017.798.410,00	11.518.244.153,00	12.302.757.750,00	12.245.521.984,00	9,75
6	Pajak Parkir	70.237.500,00	150.259.500,00	149.340.000,00	177.289.750,00	287.204.250,00	48,51
7	Pajak Air Tanah	101.683.920,00	110.396.040,00	115.078.320,00	125.985.840,56	107.994.582,18	2,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	87.420.000,00	91.320.000,00	105.420.000,00	87.870.000,00	96.345.000,00	3,22
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.309.551.474,00	39.091.865.414,01	36.376.972.885,62	37.787.362.648,50	32.320.169.383,00	10,82
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.062.828.513,00	5.588.228.093,00	5.882.869.611,00	7.515.251.609,00	7.026.350.800,00	4,67
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.882.864.946,80	25.819.352.578,80	21.337.992.505,00	22.324.822.412,65	17.190.984.688,26	9,44
		67.478.123.217.04	**96.564.935.176,48**	**95.624.761.932,30**	**99.416.983.398,32**	**79.316.693.695,41**	

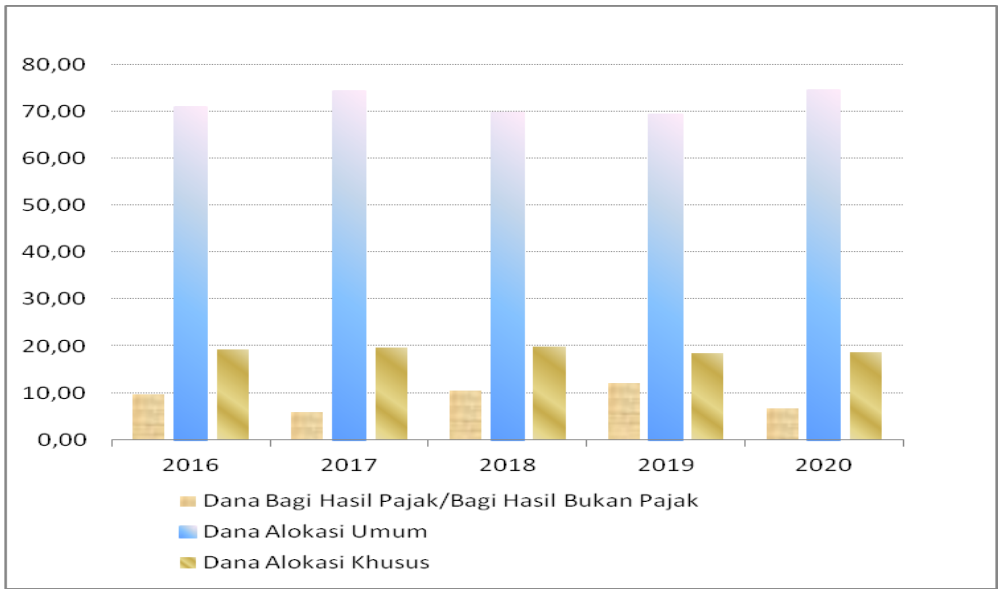
Sumber : BPPRD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

2) Dana Perimbangan

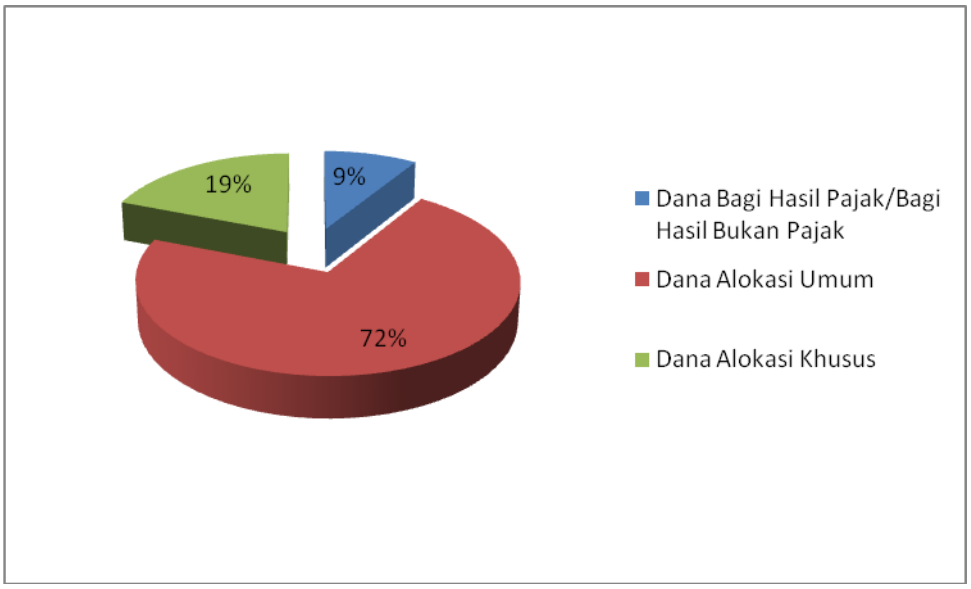
Pendapatan daerah dari dana perimbangan mengalami kontraksi yang cukup besar dengan rata–rata pertumbuhan 1,70%, dimana rata-rata pertumbuhan tertinggi bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, sedangkan pertumbuhan dari dana aloksi umum dan alokasi khusus cenderung menurun -0,83% dan -2,58%, penurunan Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Umum akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia yang berakibat pada pendapatan daerah yang ikut menurun terutama untuk tahun 2020.

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Belitung tahun 2016 - 2020 terbesar bersumber dari dana alokasi umum dengan kecenderungan trend mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 71,04% terjadi penurunan menjadi sebesar 69,41% pada tahun 2020.

Grafik 3.3 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten BelitungTahun 2016 – 2020



Grafik 3.4 Rata-Rata Proporsi Komponen Dana PerimbanganTahun 2016 – 2020



3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari pendapatan hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya, secara keseluruhan

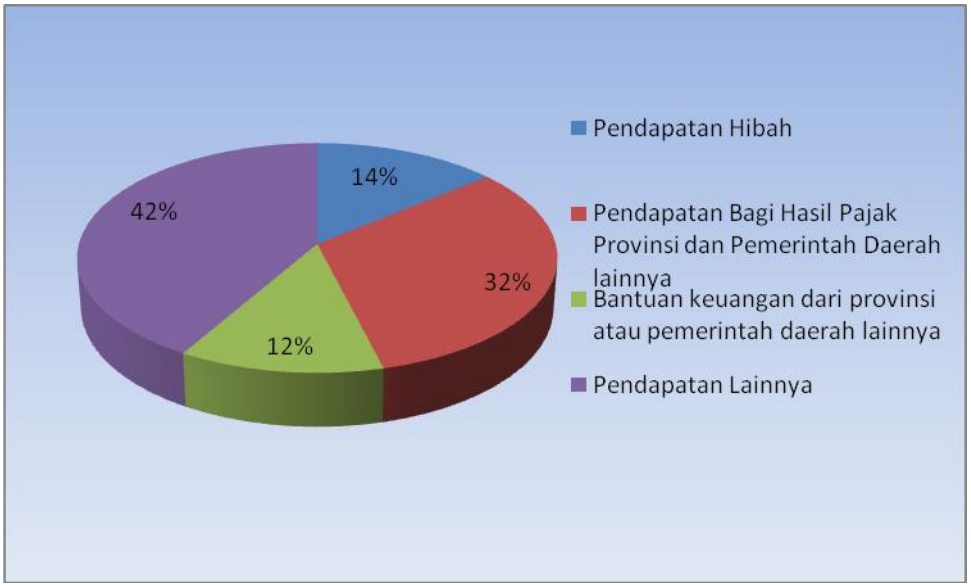
pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain penadapatan yang sah cenderung meningkat, dengan rata – rata pertumbuhan 27,29%. Realisasi Pendapatan lain-lain yang sah pada periode tahun 2016 – 2020 berfluktusi naik dan turun.

Tabel 3.4 Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2016 - 2020

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Hibah	3,89	-	-	34,81	31,06
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21,84	35,18	42,13	35,75	25,56
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	44,09	3,51	10,47	1,93	1,76
Pendapatan Lainnya	30,18	61,31	47,40	27,51	41,62

Sumber : BPPRD Kab. Belitung, Tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

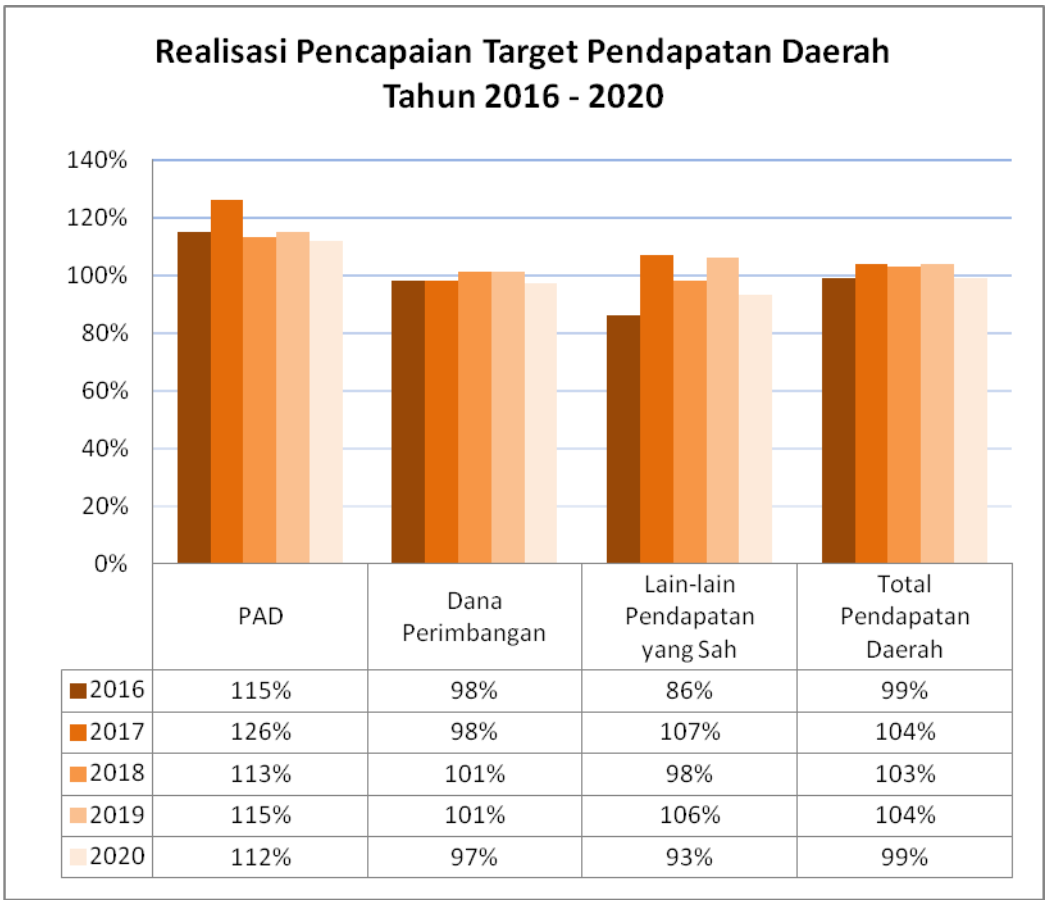
Grafik 3.5 Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 – 2020



Apabila dilihat dari target pendapatan daerah dan realisasi yang dicapai, pendapatan daerah Kabupaten Belitung secara umum cenderung melebihi target rencana kecuali untuk tahun 2020 realisasi tidak sesuai dengan target sebesar 98,65%, hal ini disebabkan akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Target realisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukan hal yang positif dimana setiap tahunnya selalu melampaui target, hal ini menunjukan bahwa potensi penerimaan sangat tinggi. Penerima yang bersumber dari Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah realiasi nya mengalami pluktuasi naik dan turun, hal ini

tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah.

Grafik 3.6 Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020



	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Total Pendapatan Daerah
2016	115%	98%	86%	99%
2017	126%	98%	107%	104%
2018	113%	101%	98%	103%
2019	115%	101%	106%	104%
2020	112%	97%	93%	99%

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	6		7		7		6		7	
4	**PENDAPATAN**	**921.244.820.553,00**	**911.305.568.117,31**	**929.257.632.655,35**	**964.030.826.331,19**	**935.074.053.699,35**	**963.227.529.030,79**	**1.045.686.545.099,00**	**1.082.784.254.354,25**	**970.146.286.359,00**	**957.021.589.492,11**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**119.993.419.553,00**	**138.227.681.151,18**	**153.203.757.655,35**	**193.193.857.376,73**	**170.048.716.699,35**	**191.938.969.495,04**	**154.360.631.099,00**	**177.674.823.550,42**	**145.075.360.800,00**	**162.134.305.440,46**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	47.746.280.000,00	67.478.123.217,04	66.152.000.000,00	96.725.121.185,48	78.669.200.000,00	95.624.761.932,30	81.926.766.250,00	99.416.983.398,32	67.860.000.000,00	79.316.693.695,41
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.011.020.400,00	10.356.540.035,55	9.603.410.167,00	9.728.476.519,85	9.153.199.004,00	8.719.218.510,84	9.328.627.000,00	9.876.491.944,25	7.234.307.500,00	7.399.581.247,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	4.534.038.351,59	4.000.000.000,00	4.385.139.060,59	4.000.000.000,00	4.115.011.274,05	4.000.000.000,00	4.269.120.158,11	4.000.000.000,00	3.928.156.865,21
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	59.136.119.153,00	55.858.979.547,00	73.448.347.488,35	82.355.120.610,81	78.226.317.695,35	83.479.977.777,85	59.105.237.849,00	64.112.228.049,74	65.981.053.300,00	71.489.873.632,84
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**687.809.970.000,00**	**675.387.947.846,00**	**651.799.507.000,00**	**637.653.274.085,00**	**681.691.415.000,00**	**689.269.042.160,00**	**731.323.046.000,00**	**735.509.551.933,00**	**634.413.715.145,00**	**617.730.480.634,00**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.085.482.000,00	65.586.125.818,00	42.702.584.000,00	37.348.052.906,00	52.894.750.000,00	72.239.193.232,00	72.000.122.000,00	89.328.036.522,00	44.713.931.551,00	41.443.900.249,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	479.789.103.000,00	479.789.103.000,00	474.909.929.000,00	474.909.929.000,00	480.560.681.000,00	480.560.681.000,00	510.538.719.000,00	510.538.719.000,00	463.002.382.000,00	460.955.998.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	163.935.385.000,00	130.012.719.028,00	134.186.994.000,00	125.395.292.179,00	148.235.984.000,00	136.469.167.928,00	148.784.205.000,00	135.642.796.411,00	126.697.401.594,00	115.330.582.385,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**113.441.431.000,00**	**97.689.939.120,13**	**124.254.368.000,00**	**133.183.694.869,46**	**83.333.922.000,00**	**82.019.517.375,75**	**160.002.686.000,00**	**169.599.878.870,83**	**190.657.210.414,00**	**177.156.803.417,65**
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.796.810.000,00	3.796.808.655,00	-	-	-	-	61.685.200.000,00	59.037.511.260,00	57.409.794.185,00	55.031.148.187,00
4.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.819.746.000,00	21.332.534.965,13	3.700.000.000,00	46.850.069.869,46	33.281.018.000,00	34.556.730.748,29	38.197.440.000,00	60.632.029.110,03	55.600.000.000,00	45.273.388.864,65
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	48.350.100.000,00	43.073.495.500,00	4.908.000.000,00	4.679.030.000,00	11.207.800.000,00	8.588.122.627,46	13.492.200.000,00	3.277.200.000,00	3.683.200.000,00	3.115.000.000,00
4.3.6	Pendapatan Lainnya	29.474.775.000,00	29.487.100.000,00	81.646.368.000,00	81.654.595.000,00	38.845.104.000,00	38.874.664.000,00	46.628.028.000,00	46.653.138.500,00	73.964.216.229,00	73.737.266.366,00

Sumber :BPPRD Kab. Belitung, Tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

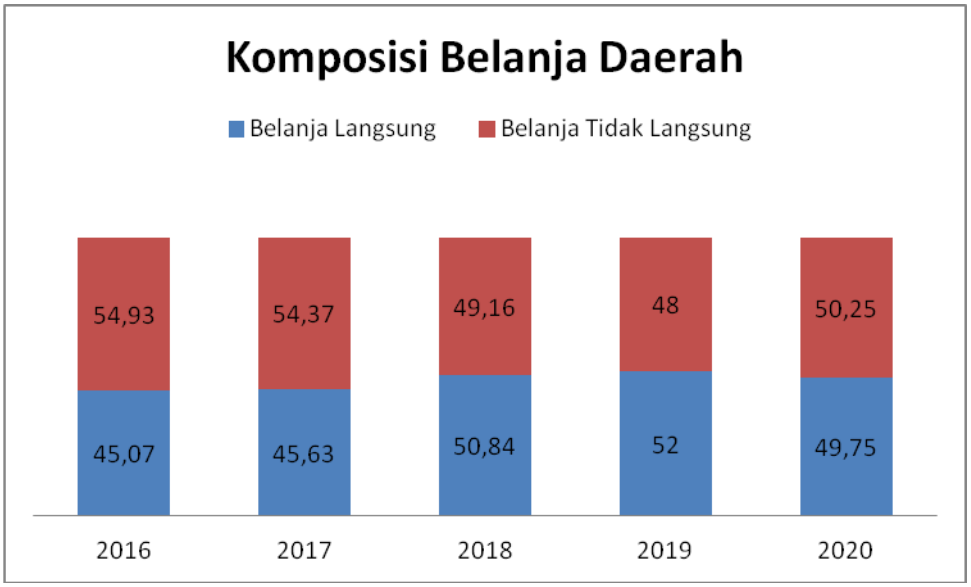
b. Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Belanja Daerah Kabupaten Belitung mengalami tren meningkatkan tiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2017 dan 2020 terjadi penurunan. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 6,42%. Pertumbuhan pada masing-masing pos penerimaan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, Belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,60%, dan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,75%.

Dari komposisi belanja daerah diketahui bahwa selama periode 2016-2020 belanja terbesar terdapat pada belanja tidak langsung yaitu antara 54,93% - 48,00% dan belanja langsung yaitu antara 52,00% - 45,07%.

Grafik 3.7 Komposisi Belanja DaerahTahun 2016 – 2020



1) Belanja Tidak Langsung

Belanja daerah yang bersumber dari belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik dan belanja tidak terduga.

Secara keseluruhan belanja daerah yang bersumber dari belanja tidak langsung cenderung fluktuatif pada kurun waktu 2016 - 2020 dengan rata –rata pertumbuhan 9,60%.

Realisasi belanja pegawai Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92%. Realisasi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2016 - 2020 tertinggi terjadi di tahun 2016 yang tercatat sebesar 76,06% sedangkan realisasi terendah pada tahun 2018 sebesar 67,11% dari komposisi belanja tidak langsung. Belanja pegawai merupakan pengeluaran terbesar dari belanja tidak langsung.

Realisasi belanja subsidi Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 175,69%. Realisasi belanja subsidi terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2016-2020 tertinggi terjadi di tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,044% realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar 0,202% dari komposisi belanja tidak langsung.

Realisasi belanja hibah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,78%. Realisasi belanja hibah terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2016 - 2020 tertinggi terjadi di tahun 2018 yang tercatat sebesar 9.23% sedangkan realisasi terendah pada tahun 2016 sebesar 3,07%.

Sementara Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa baru tersedia pada tahun 2020, di mana sebelumnya dari tahun 2016 – 2019 tidak ada Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Realisasi belanja bantuan keuangan Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,70%. Realisasi belanja bantuan keuangan terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2016 – 2020 tertinggi terjadi di tahun 2017 yang tercatat sebesar 24.03%, sedangkan realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar 19,11%, semakin meningkatnya belanja bantuan keuangan Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang bantuan kepada pemerintah desa. Realisasi belanja tidak terduga Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020 hanya tercatat pada tahun 2016, 2018 dan 2020 dengan realisasi belanja tidak terduga terhadap total belanja tidak langsung sebesar paling besar pada tahun 2020 sebesar 0,81% serta terendah tahun 2016 sebesar 0,02%.

Grafik 3.8 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020



	Belanja Pegawai	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga
2016	76,06	0,04	3,07	0	0	20,82	0,02
2017	72,12	0,04	3,81	0,00	0,00	24,03	0,00
2018	67,11	0,04	9,23	0,00	0,00	23,24	0,39
2019	74,53	0,02	3,40	0,00	0,00	22,05	0,00
2020	74,57	0,20	3,52	0,00	1,79	19,11	0,81

Tabel 3.6 Rata - Rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Belanja**	**934.833.753.909,05**	**878.629.994.299,40**	**1.120.646.506.288,81**	**1.251.914.317.211,01**	**1.157.268.155.866,69**	3,11
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**421.353.131.329,00**	**400.897.549.286,00**	**550.905.676.260,46**	**600.983.943.522,01**	**581.483.368.891,57**	6,14
2.1.1	Belanja Pegawai	320.460.324.251,00	289.128.376.394,00	396.743.294.260,46	463.785.958.272,01	443.997.917.891,57	5,60
2.1.3	Belanja Subsidi	169.255.000,00	177.775.000,00	200.000.000,00	1.177.401.000,00	1.177.401.000,00	122,20
2.1.4	Belanja Hibah	12.938.166.575,00	15.268.378.298,00	44.701.732.000,00	18.168.051.250,00	17.183.601.000,00	37,66
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinta Desa	-	-	-	-	9.313.410.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	87.710.917.594,00	96.323.019.594,00	102.360.650.000,00	114.652.533.000,00	99.411.039.000,00	3,70
2.1.8	Belanja Tak Terduga	74.467.909,00	-	6.700.000.000,00	3.000.000.000,00	10.200.000.000,00	102,03
2.2	**Belanja Langsung**	**513.480.622.580,05**	**477.732.445.013,40**	**569.740.830.028,35**	**650.930.373.689,00**	**575.784.786.975,12**	0,58
2.2.1	Belanja Pegawai	68.583.437.079,00	64.555.579.570,00	91.716.596.874,00	83.507.255.570,00	91.419.635.113,00	6,53
2.2.2	Belanja Barang	202.507.381.565,67	202.023.787.943,00	247.277.844.302,35	313.958.313.559,00	331.991.896.290,12	8,25
2.2.3	Belanja Modal	242.389.803.935,38	211.153.077.500,40	230.746.388.852,00	253.464.804.560,00	152.373.255.572,00	-9,68

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

2) Belanja Langsung

Belanja langsung daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal cenderung berfluktuasi pada kurun waktu 2016 – 2020 dengan rata–rata pertumbuhan 0,58%. Rata-rata belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami fluktuatif, tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16,48% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 13,01 % . Rata – rata belanja barang dan jasa dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 57,34% dan terendah 39,44% pada tahun 2016 dan Belanja Modal cenderung menurun, dengan besaran tertinggi 47,21% dan terendah 26,49%.

Grafik 3.9 Persentase Realisasi Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten BelitungTahun 2016 – 2020



Kinerja Belanja Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 dilihat dari target realisasi anggaran belanja, menunjukan bahwa serapan anggaran belanja yang belum optimal tetapi secara umum telah memadai. Target dan realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 89,50% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 82,52%.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Belanja**	**1.044.491.380.153,83**	**934.833.753.909,05**	**1.029.778.731.213,00**	**878.629.994.299,40**	**1.120.646.506.288,81**	**924.720.923.553,24**	**1.251.914.317.211,01**	**1.097.846.810.135,57**	**1.157.268.155.866,69**	1.032.037.986.516,43
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**464.602.289.515,83**	**421.353.131.329,00**	**480.872.358.303,65**	**400.897.549.286,00**	**550.905.676.260,46**	**440.048.222.033,00**	**600.983.943.522,01**	**519.694.315.937,00**	**581.483.368.891,57**	520.200.756.357,00
2.1.1	Belanja Pegawai	361.401.115.015,83	320.460.324.251,00	364.971.561.869,65	289.128.376.394,00	396.743.294.260,46	295.319.327.092,00	463.785.958.272,01	387.337.615.067,00	443.997.917.891,57	387.918.506.335,00
2.1.3	Belanja Subsidi	200.000.000,00	169.255.000,00	200.000.000,00	177.775.000,00	200.000.000,00	165.850.000,00	1.177.401.000,00	126.800.000,00	1.177.401.000,00	1.049.886.038,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.590.256.500,00	12.938.166.575,00	16.177.776.434,00	15.268.378.298,00	44.701.732.000,00	40.602.380.210,00	18.168.051.250,00	17.657.716.051,00	17.183.601.000,00	18.307.203.359,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinta Desa		-	-	-	-	-	-	-	9.313.410.000,00	9.313.410.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	87.710.918.000,00	87.710.917.594,00	96.323.020.000,00	96.323.019.594,00	102.360.650.000,00	102.255.500.905,00	114.652.533.000,00	114.572.184.819,00	99.411.039.000,00	99.411.039.000,00
2.1.8	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	74.467.909,00	3.000.000.000,00	-	6.700.000.000,00	1.705.163.826,00	3.000.000.000,00	-	10.200.000.000,00	4.200.711.625,00
2.2	**Belanja Langsung**	**579.889.090.638,00**	**513.480.622.580,05**	**548.906.372.909,35**	**477.732.445.013,40**	**569.740.830.028,35**	**484.672.701.520,24**	**650.930.373.689,00**	**578.152.494.198,57**	**575.784.786.975,12**	511.837.230.159,43
2.2.1	Belanja Pegawai	75.650.147.485,00	68.583.437.079,00	72.316.705.693,00	64.555.579.570,00	91.716.596.874,00	79.893.314.920,00	83.507.255.570,00	75.229.973.539,00	91.419.635.113,00	86.577.707.844,00
2.2.2	Belanja Barang	248.958.430.213,00	202.507.381.565,67	250.350.971.956,35	202.023.787.943,00	247.277.844.302,35	197.814.766.820,38	313.958.313.559,00	267.024.915.617,01	331.991.896.290,12	285.572.170.155,31
2.2.3	Belanja Modal	255.280.512.940,00	242.389.803.935,38	226.238.695.260,00	211.153.077.500,40	230.746.388.852,00	206.964.619.779,86	253.464.804.560,00	235.897.605.042,56	152.373.255.572,00	139.687.352.160,12

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, Tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang dibayar kembali dan/ ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran dari kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) serta pengeluaran daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan dari data SilPA Kabupaten Belitung dari tahun 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhannya positif yaitu sebesar 17,24%. Masih tingginya SiLPA merupakan akibat dari adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, sisa lelang ataupun lelang yang tidak bisa dilaksanakan. Namun secara keseluruhan realisasi fisik dapat dipenuhi 100%.

Grafik 3.10 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 – 2020



Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan daerah, selama tahun 2016 – 2020, realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dipergunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah dimana angka pertumbuhannya cenderung negatif hal ini dikarenakan pada tahun 2017, 2019 serta 2020 tidak dilakukannya penyertaan modal pemerintah daerah, tetapi dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 peningkatan penyertaan modal mengalami penurunan dan penyertaan modal tertingi terjadi pada tahun 2016.

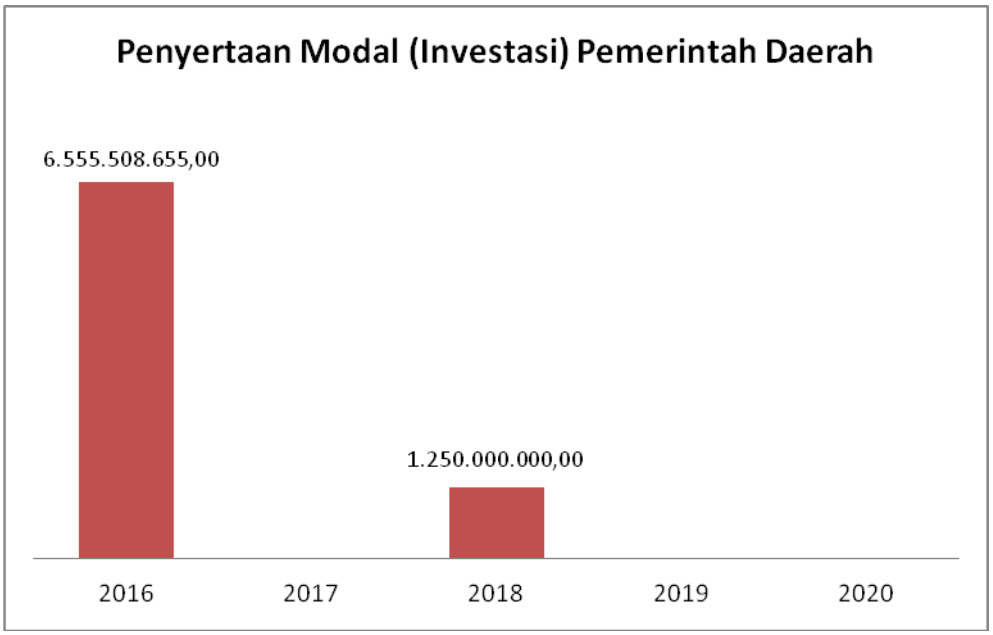
Selama kurun waktu lima tahun terakhir penyertaan modal dilakukan pada

perusahaan daerah yaitu

1. PDAM
2. PT. Belitung Mandiri

Perusahaan daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Grafik 3.11 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020



Tabel 3.8 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan DaerahTahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Daerah**	**130.604.793.003,83**	**101.562.337.458,00**	**186.842.452.589,46**	**212.157.900.112,01**	**197.095.344.330,69**	17,24
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00	186.842.452.589,46	212.157.900.112,01	197.095.344.330,69	
3.2	**Pengeluaran Daerah**	**6.555.508.655,00**	**-**	**1.250.000.000,00**	**-**	**-**	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.555.508.655,00	-	1.250.000.000,00	-	-	
	Pembiayaan Neto	**124.049.284.348,83**	**101.562.337.458,00**	**185.592.452.589,46**	**212.157.900.112,01**	**197.095.344.330,69**	17,96

Sumber : BPKAD Kabupaten Belitung, Tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Analisis Neraca daerah disusun bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Belitung tahun 2016 – 2020 dan rata-rata pertumbuhannya terlihat di tabel 3.26. Aset Kabupaten Belitung dari kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu rata-rata -2.32 % Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Belitung yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Belitung memiliki total aset sebesar Rp 1.684.792.135.074,57 ,- atau turun sebesar 11.07 % dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 1.894.649.421.110,39,- jumlah aset terbesar berupa aset tetap yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 1.264.607.130.698,77 atau sebesar 75,06 % dari jumlah aset Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2017. Penurunan jumlah aset di Kabupaten Belitung terjadi karena adanya hibah ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa tanah jalan dan jembatan, penyerahan Personil ,sarana dan prasarana serta dokumen P2D akibat adanya perubahan dan penyerahan kewenanganke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adanya lelang umum atas kendaraan dinas operasional, penghaspusan akibat banjir, pemusnahan obat-obatan karena rusak dan kadulwarsa.

Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang pemerintah daeah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2016 – 2019 tidak memiliki kewjiban jangka panjang. Tahun 2019, Kabupaten Belitung memiliki jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp 15.582.325.736,66. Angka ini meningkat 107,77% dibanding kewajiban tahun 2016 sebesar Rp 7.499.909.947,67. Ekuitas dana adalah selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Di tahun 2019, nilai ekuitas dana Kabupaten Belitung mencapai Rp 2.265.888.361.693,60 dan meningkat 42,24% dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 1.593.047.883.632,06.

Tabel 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2019

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aset Lancar					
Kas di Kas Daerah	46.108.469.584,19	80.391.689.498,79	83.785.093.018,34	57.106.190.392,97	15,58
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	8.467.000,00	13.641.000,00	20,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	18.330,00	0
Kas di BLUD	6.704.161.180,13	4.448.804.818,32	4.226.185.860,32	1.227.26.335,37	-45,25
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.787.237.788,00	2.051.462.613,00	2.289.539.475,00	2.547.948.119,00	12,56
Kas di Bendahara JKN	2.332.180.893,00	1.905.813.403,00	1.056.758.844,00	869.370.805,00	-26,86
Kas di Bendahara BOS	1.233.100.854,68	4.839.794.562,35	2.827.170.898,35	3.910.872.306,35	96,41
Setara Kas	45.000.000.000,00	95.000.000.000,00	120.000.000.000,00	135.000.000.000,00	49,98
Kas lainya			1.912.886,00	8.414.077,00	113,29
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Piutang Pajak	8.425.639.109,00	*9.871.714.621,50*	12,134.956.345,00	*13.589.028.476,00*	*17,38*
Penyisihan Piutang Pajak	*-4.098.968.538,00*	*-5.389.725.127,50*	(1.499.602.358,75)	*(7.884.4030327,00)*	*128,36*
Piutang Pajak Netto	*4.326.670.571,00*	*4.481.989.494,00*	*5.074.142.477,75*	*5.704.625.149,00*	*9,74*
Piutang Retribusi	1.725.703.970,00	*2.119.522.080,00*	2.561.295.925,00	*2.918.22.935,00*	*-14,98*
Penyisihan Piutang Retribusi	-585.753.305,50	*-1.091.917.336,75*	(1.499.602.358,25)	*(1.927.260.061,25)*	*50,76*
Piutang Retribusi Netto	*1.139.950.664,50*	*1.027.604.743,25*	*1.061.693.566,25*	*991.662.873,75*	*-4,38*
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	19.990.000,00	*19.990.000,00*	19.990.000,00	*19.990.000,00*	*0*
Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	-19.990.000,00	*-19.990.000,00*	(19.990.000,00)	*(19.990.000,00)*	*0*
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bagian lancar tuntutan ganti rugi	89.350.000,00	*89.350.000,00*	89.350.000,00	*89.350.000,00*	*0,00*
Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti rugi	-89.350.000,00	*-89.350.000,00*	(89.350.000,00)	*(89.350.000,00)*	*0,00*
Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Piutang Transfer	18.702.933.234,31	30.444.271.708,15	62.165.574.871,12	*19.848.111.374,19*	*32,97*
Penyelisihan Piutang Transfer			(478.279.650,80)	*0,00*	*-33,33*
Piutang Transfer Netto			57.910.894.275,62	19.848.11.374,19	-32,19
Piutang Lainnya	6.448.682.145,80	*11.096.533.141,80*	11.257.262.467,80	*17.205.277.79,80*	*-3,73*
Penyisihan Piutang Lainnya	-414.868.147,80	*-427.924.215,55*	(478.279.650,80)	*(540.609.085,30)*	*9,32*
Piutang Lainnya Netto	*6.033.813.998,00*	*10.668.608.926,25*	10.778.982.817,00	*16.664.668.494,50*	*44,15*
Beban Dibayar Dimuka	4.521.666,67	1.388.888,92	224.910.000,21	14.320.134,62	
Persediaan	62.524.965.816,73	75.152.283.841,29	64.737.652.477,88	97.755.254.044,88	19,11
JUMLAH ASET LANCAR	**195.898.006.251,21**	**310.413.712.497,32**	**353.974.404.596,72**	**341.662.723.436,63**	**23,00**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	65.540.301.866,97	65.605.721.810,08	62.745.969.165,42	59.643.573.497,61	-3,07
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	***65.540.301.866,97***	***65.605.721.810,08***	***62.745.969.165,42***	***59.643.573.497,61***	***-3,07***
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**65.540.301.866,97**	**65.605.721.810,08**	**62.745.969.165,42**	**59.643.573.497,61**	**-3,07**
ASET TETAP					
Tanah	98.818.352.205,30	98.095.498.284,30	265.310.068.184,30	234.912.537.629.00	52,76
Peralatan dan Mesin	324.516.052.110,39	355.143.196.068,04	422.885.558.541,66	488.430.200.680,62	14,67
Gedung dan Bangunan	492.171.995.955,66	481.275.043.778,08	528.064.516.192,13	569.596.826.836,78	5,12
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.295.969.572.679,85	1.331.950.066.399,26	1.450.169.813.978,27	1.680.424.495.618,18	9,18
Aset Tetap Lainnya	51.178.606.871,85	53.657.748.285,85	6.165.729.390,96	67.474.110.111,66	303,56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.646.738.200,51	7.835.192.598,51	12.803.522.023,51	19.549.514.123,51	26,02
Akumulasi Penyusutan	-982.940.768.009,57	-1.063.349.614.715,27	(1.124.427.043.781,98)	(1.229.122.745.056,30)	7,75
JUMLAH ASET TETAP	***1.292.360.550.013,99***	***1.264.607.130.698,77***	***1.614.972.093.528,85***	***1.831.264.549.943,45***	***12,98***
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.075.469.049,00	9.075.469.049,00	9.075.469.029,00	9.075.469.029,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.190.987.350,00	*3.356.934.566,00*	3.518.245.028,00	*4.440.489.508,00*	*12,07*
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-2.379.717.275,00	*-2.787.069.916,50*	(3.074.914.673,50)	*(3.525.951.613,00)*	*14,04*
Aset Tidak Berwujud Netto	*811.270.075,00*	569.864.649,50	*443.330.354,50*	914.537.895,00	18,11
Aset Lain-lain	36.862.196.323,56	34.650.891.330,57	34.632.460.230,57	38.909.833.608,57	2,10
JUMLAH ASET LAINNYA	***46.748.935.447,56***	***44.296.225.029,07***	***44.151.259.634,07***	***48.899.840.552,57***	***1,73***
JUMLAH	***46.748.935.447,56***	**1.684.922.790.035,24**	**2.075.843.726.925,06**	**2.281.470.687.430,26**	**1179,10**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.524.546.297,00	1.823.203.039,15	2.028.761.870,00	2.293.670.705,00	14,64
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	733.184.166,67	762.983.000,00	662.783.000,00	995.366.666,66	13,70
Utang Beban	4.979.487.993,00	5.013.705.618,00	6.878.823.809,00	11.906.065.674,00	36,99
Utang Jangka Pendek Lainnya	262.691.491,00	262.691.491,00	262.691.491,00	387.222.691,00	15,80
Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**7.499.909.947,67**	**7.862.583.148,15**	**9.833.060.170,00**	**15.582.325.736.66**	**29,46**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**7.499.909.947,67**	**7.862.583.148,15**	**9.833.060.170,00**	**15.582.325.736,66**	**29,46**
EKUITAS					
EKUITAS	1.593.047.883.632,06	1.677.060.206.887,09	2.066.010.666.755,06	2.265.888.361.693,60	12,71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.600.547.793.579,73**	**1.684.922.790.035,24**	**2.075.843.726.925,06**	**2.281.470.687.487.430,26**	

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, Tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Gambaran kondisi neraca daerah tersebut lebih lanjut dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut:

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pandek. Data rasio likuiditas tahun terakhir 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Belitung Tahun 2019

Rasio	Rumus		2019
Ratio Lancar	Aset Lancar / Kewajiban Jangka Panjang	341.662.723.436,63 / 0	0,00
Rasio Quick (*Quick Ratio*)	Aset Lancar - Persediaan / Kewajiban Jangka Pendek	341.662.723.436,63 (97.755.254.044,88) / 15.582.325.736,66	15,65
Rasio total hutang terhadap total asset	Total Hutang / Total Aset	15.582.325.736,66 / 2.281.470.687.430,29	0,0068

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Hasil analisis di atas menunjukan bahwa Kabupaten Belitung memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (*likuid*) dilihat dari hasil analisis ratio lancar, *quick ratio* dan rasio total hutang terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Kabupaten Belitung cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

b) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas tahun 2019 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 3.11 Rasio Solvabilitas Kabupaten Belitung Tahun 2019

Rasio	Rumus		2019
Rasio Kewajiban terhadap Aset	Kewajiban / Aset	15.582.325.736,66 / 2.281.470.687.430,29	0,0068
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban / Ekuitas	15.582.325.736,66 / 2.265.888.361.693,60	0,0069

Rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 sangat rendah, hanya sebesar 0,0068%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Kabupaten Belitung masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap *ekuitas* (modal) juga sangat rendah, hanya sebesar 0,0069%. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Belitung.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan masa lalu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi dalam penggunaan anggaran maupun analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan

anggaran terutama dalam pembagian porsi belanja langsung dan tidak langsung akan berdampak pada percepatan pembangunan yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam hal ini periode Tahun 2016 – 2020 perlu dianalisis sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan keuangan untuk periode yang akan datang.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja Kabupaten Belitung selama tahun 2016 – 2020 untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mempunyai proporsi yang seimbang. Bila dibandingkan dengan pemenuhan untuk belanja langsung yang dalam hal ini diperuntukkan bagi pembangunan, maka alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci analisis proporsi penggunaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Proporsi rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**45,07**	**45,63**	**47,59**	**47,34**	**50,41**	**47,21**
Belanja Pegawai	34,28	32,91	31,94	35,28	37,59	34,40
Belanja Subsidi	0,02	0,02	0,02	0,01	0,10	0,03
Belanja Hibah	1,38	1,74	4,39	1,61	1,77	2,17
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	0,90	0,18
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	9,38	10,96	11,06	10,44	9,63	10,30
Belanja Tak Terduga	0,06	-	0,18	-	0,41	0,12
BELANJA LANGSUNG	**54,93**	**54,37**	**52,41**	**52,66**	**49,59**	**52,79**
Belanja Pegawai	7,34	7,35	8,64	6,85	8,39	7,71
Belanja Barang	21,66	22,99	21,39	24,32	27,67	23,61
Belanja Modal	25,93	24,03	22,38	21,49	13,54	21,47

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, tahun 2021 (Data diolah Tim RPJMD)

Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Belitung tahun 2016 – 2020 menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir proporsi belanja langsung terhadap anggaran belanja memiliki proporsi lebih besar dibanding tidak belanja langsung. Proporsi penggunaan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 47,21% sedangkan belanja langsung rata-rata 52,79%, ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung konsisten dalam mengusung program-program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja barang dan jasa.

Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Belitung. Kebutuhan belanja aparatur Kabupaten Belitung selama periode tahun 2013-2017 yang berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH), Belanja pemungutan pajak dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi *fluktuatif* di mana proporsi tertinggi di tahun 2014 sebesar 44,55%.

Tabel 3.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016	426.125.631.070,00	1.058.883.038.257,88	40,24
2.	2017	390.813.981.744,46	980.192.331.757,40	39,87
3.	2018	424.336.984.040,00	1.110.313.376.142,70	38,22
4.	2019	532.607.345.836,89	1.310.004.710.247,58	40,66
5.	2020	589.076.301.306,10	1.229.133.310.847,12	47,93

Sumber : BPKAD tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Adapun rincian mengenai total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur Kabupaten belitung sebagaimana tabel Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tahun 2015-2017.

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
A	Belanja tidak Langsung			
1	Belanja gaji dan tunjangan	245.314.214.687,00	257.205.693.837,00	253.445.296.690,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	42.482.335.000,00	122.214.010.445,00	127.162.937.626,00
3	Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	3.485.330.000,00	3.749.620.000,00	3.729.000.000,00
4	Belanja pemungutan pajak daerah	3.719.437.771,00	4.096.338.812,00	3.517.249.075,00
B	Belanja Langsung			
1	Belanja honorarium PNS	23.371.526.108,00	7.048.176.556,00	10.124.209.637,00
2	Belanja uang lembur	420.325.000,00	503.200.000,00	51.155.229.818,00
3	Belanja beasiswa pendidikan PNS	391.525.701,00	270.867.601,00	462.095.363,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	1.267.695.572,00	1.587.434.425,00	590.642.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	82.004.820,00	6.045.306.780,00	25.390.984.924,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	9.787.155.600,00	14.196.635.740,00	10.233.456.290,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.163.713.600,00	1.577.260.650,00	1.081.770.000,00
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.445.959.500,00	2.305.708.650,00	1.300.520.050,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	32.504.100.675,48	40.722.943.646,24	26.518.223.172,98
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0	0	0
11	Belanja pemulangan pegawai	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	58.901.660.005,52	71.084.148.694,65	74.364.686.660,12
	Total	**424.336.984.040,00**	**532.607.345.836,89**	**589.076.301.306,10**

Sumber : BPKAD tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. berikut menyajikan gambaran realisasi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Belitung tahun 2016 – 2020.

Berdasarkan tabel 3.15, terjadinya defisit riil dikarenakan realisasi belanja yang melebihi realisasi pendapatan daerah. Untuk menutupi kondisi tersebut, maka dimanfaatkan pembiayaan penerimaan daerah yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.15 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Daerah	911.305.568.117,31	964.030.826.331,19	963.227.629.030,79	1.082.784.254.354,25	957.021.589.492,11
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	934.833.753.909,05	878.629.994.299,40	924.720.923.553,24	1.097.846.810.135,57	1.032.037.986.516,43
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.555.508.655,00	-	1.250.000.000,00	-	-
A	Defisit Riil	(30.083.694.446,74)	85.400.832.031,79	37.256.705.477,55	(15.062.555.781,32)	(75.016.397.024,32)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00	186.842.452.589,46	212.257.549.112,01	197.095.344.330,69
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00	186.842.452.589,46	212.257.549.112,01	197.095.344.330,69
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	100.521.098.557,09	186.963.169.489,79	224.099.158.067,01	197.194.993.330,69	122.078.947.306,37

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Tabel 3.16 Komposisi Penutup Difisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Difisit Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00	186.842.452.589,46	212.257.549.112,01	197.095.344.330,69
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan					
4	Penerimaan pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan piutang daerah					
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	100.521.098.557,09	186.963.169.489,79	224.099.158.067,01	197.194.993.330,69	122.078.947.306,37

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, bermanfaat dalam menutupi kondisi defisit riil keuangan daerah. Selama tahun 2016 – 2020, kondisi SILPA Kabupaten Belitung mengalami nilai yang *fluktuatif* tergantung pada penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Berikut diuraikan kondisi target dan realisasi SILPA Kabupaten Belitung selama tahun 2016 - 2020.

Tabel 3.17 Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2020

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
(1)	(2)	(3)	(40	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah SILPA	186.842.452.589,46		212.257.549.112,01		197.095.344.330,69	
1	Pelampauan PAD	28.153.475.331,44	15,07%	37.097.709.255,25	17,48%	(13.124.696.866,89)	-6,66%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	7.577.627.160,00	4,06%	4.186.505.933,00	1,97%	(16.683.234.511,00)	-8,46%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(1.314.404.624,25)	-0,70%	9.597.010.870,83	4,52%	(13.500.406.996,35)	-6,85%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	195.925.582.735,57	104,86%	159.997.635.075,44	75,38%	125.230.169.350,26	63,54
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

Tabel 3.18 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Tahun Berkenaan Kabupaten Belitung Tahun 2017 – 2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo kas neraca daerah	175.391.689.498,79	203.785.093.018,34	192.106.190.392,97
	dikurangi :			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	5.013.705.618,00	6.878.823.809,00	11.906.065.674,00
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-
	Sisa lebih (riil) Pembiayaan Anggaran	**170.377.983.880,79**	**196.906.269.209,34**	**180.200.124.718,97**

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, Tahun 2021 (data diolah Tim RPJMD)

3.3 Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain :

1) Indikator ekonomi makro, mencakup:

- Rata-Rata Inflasi Kabupaten Belitung tahun 2013 – 2017 sebesar 5.7% pertahun
- Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung tahun 2016 – 2020 sebesar -49,52% per tahun

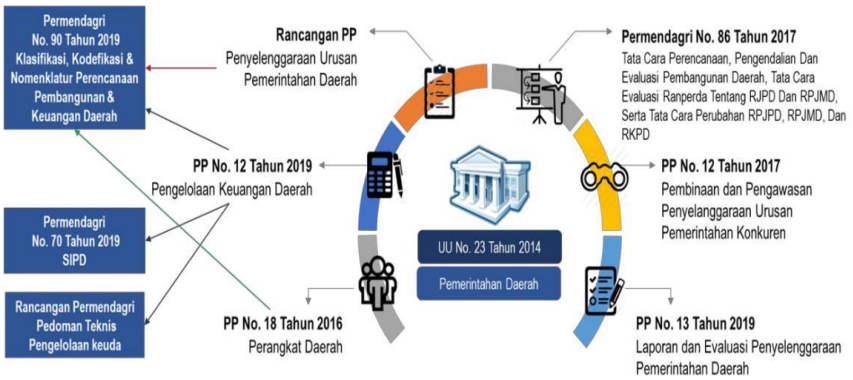
2) Kebijakan di bidang keuangan negara

Proyeksi penerimaan pendapatan Kabupaten Belitung tahun 2019 - 2023 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 – 2017, serta mempertimbangan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

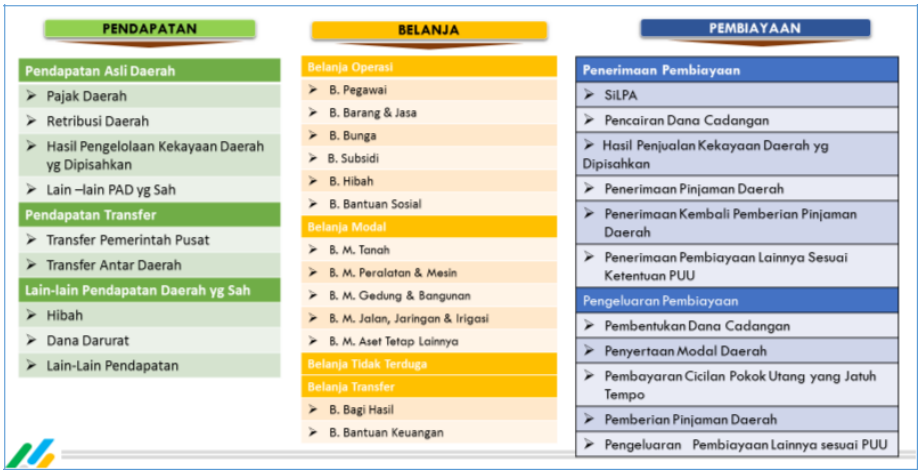
Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Gambar 3.1 Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 3.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019



Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *Adaptasi kebiasan baru (AKB)*, *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan

masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020.

Dengan pendapatan daerah yang menurun, maka Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

a. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,62%, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,73%, Pos Dana Perimbangan terkoreksi dengan rata-rata sebesar 1,70% dan Pos Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar 27,29%. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan 2020, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan 2020.

Untuk Dana Alokasi Khusus serta pendapatan hibah belum dimasukkan ke dalam proyeksi pendapatan untuk Tahun 2022 - 2023, hal ini dikarenakan besaran pendapatannya untuk kedua mata anggaran pendapatan dimaksud belum pasti.

Tabel 3.19 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2023

Kode	Uraian	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5
4	**Pendapatan**	**964.938.538.517,00**	**1.036.410.940.174,00**	**1.184.135.083.194,57**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**149.628.679.180,00**	**141.996.673.943,00**	**162.360.113.139,00**
4.1.01	Pajak Daerah	71.310.000.000,00	73.382.029.752,00	80.125.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.185.120.880,00	8.012.232.000,00	8.594.376.924,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	66.133.558.300,00	56.602.412.191,00	69.440.236.215,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**749.820.889.337,00**	**868.580.166.231,00**	**964.293.995.931,57**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707.149.728.000,00	815.116.448.303,00	932.431.176.527,15
	Dana Transfer Umum – Dana Bahi Hasil (DBH)	48.448.100.000,00	59.443.148.658,00	50.870.505.000,00
	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	468.342.798.000,00	463.265.836.390,00	486.429.128.209,00
	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.492.058.000,00	157.254.764.115,00	248.367.745.804,57
	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	58.739.035.000,00	56.179.826.140,00	59.239.040.862,75
	Dana Insentif Daerah	-	27.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Dana Desa	50.127.737.000,00	51.972.873.000,00	54.571.516.650,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.671.161.337,00	53.463.717.928,00	44.816.059.403,85
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**65.488.970.000,00**	**25.834.000.000,00**	**57.480.974.124,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	39.585.620.000,00	-	30.355.274.124,00
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25.903.350.000,00	25.834.000.000,00	27.125.700.000,00

Sumber : BPPRD Kab. Belitung, Tahun 2021 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu

5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016 – 2020, prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja daerah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,99% per tahun, dengan pos belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 2,87% sedangan untuk belanja langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -2,49%.

Analisis Proyeksi belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat. Pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah :

1. Memenuhi pelaksanaan Program Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode Tahun 2018-2023;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkan Indeks Pembangunan Manusia;
6. Melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's), pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji, pelaksanaan

prioritas pembangunan nasional dan pemenuhan belanja lainnya yang sudah diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

7. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
9. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Tabel 3.20 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No	Uraian	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	4	5	6
5.1	**BELANJA OPERASI**	**877.800.030.246,00**	**867.930.076.182,00**	**956.443.446.650,24**
5.1.01	Belanja Pegawai	446.990.173.308,00	479.128.596.765,00	491.958.576.010,65
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	400.559.302.238,00	363.857.030.419,00	432.459.366.320,41
5.1.04	Belanja Subsidi	1.177.401.000,00	1.393.162.498,00	1.246.484.938,03
5.1.05	Belanja Hibah	28.796.249.200,00	23.285.664.000,00	30.485.867.524,52
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	276.904.500,00	265.622.500,00	293.151.856,63
5.2	**BELANJA MODAL**	**110.244.953.492,00**	**177.603.618.992,00**	**236.084.498.142,92**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.558.226.000,00	5.500.000.000,00	8.534.861.557,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.789.598.294,00	40.050.721.552,00	50.657.718.504,12
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.998.188.088,00	43.215.834.000,00	66.614.578.075,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi	40.315.788.610,00	84.587.905.440,00	99.823.397.255,98
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	5.583.152.500,00	4.249.158.000,00	10.453.942.749,66
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.050.123.000.00**	**108.550.145.000,00**	**110.721.147.900,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.949.513.000,00	7.949.513.000,00	8.108.503.260,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.100.610.000,00	100.600.632.000,00	102.612.644.640,00
	Jumlah Belanja	**1.101.095.106.738,00**	**1.157.083.840.174,00**	**1.293.295.852.693,73**

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, Tahun 2021 (diolah)

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Belitung Tahun 2022 dalam pembangunan daerah, maka untuk memenuhi pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD

Kabupaten Belitung, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Belitung sebagaimana tabel 3.15. Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Belitung menunjukkan angka yang semakin meningkat menandakan adanya upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.

Tabel 3.21 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	**1.126.584.479.450**	**1.293.679.263.950**	**1.354.766.569.303**	**1.422.974.834.117**	**1.499.490.259**
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	99.900.351.000	179.017.014.991	146.588.873.021	110.309.909.357	91.530.637.424
	Total Penerimaan	1.226.484.830.450	1.472.714.278.941	1.501.355.442.324	1.533.284.743.473	1.591.020.897.296
	Dikurangi					
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	380.946.026.038	390.469.676.689	404.993.160.524	413.242.818.550	421.904.959.477
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH					
3	Belanja Bunga					
4	Belanja bagi hasil					
B	Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000,00	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembayaran pokok utang					
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	380.946.026.038	390.469.676.689	404.993.160.524	413.242.818.550	421.904.959.477
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**845.538.804.412**	**1.082.244.602.251**	**1.096.362.281.800**	**1.120.041.924.924**	**1.169.115.937.819**

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Tabel 3.22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	APBD	Alokasi Anggaran (Rupiah)	
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	**964.938.538.517**	**1.036.410.840.174**	**1.184.135.083.194,57**
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)			
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	136.156.568.221	120.673.000.000	109.160.769.499,16
	Total Penerimaan	1.101.095.106.738	1.157.083.840.174	1.293.295.852.693,73
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**1.101.095.106.738**	**1.157.083.840.174**	**1.293.295.852.693,73**

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan kinerja “gap expectation” pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kabupaten Belitung selama beberapa tahun terakhir, permasalahan pembangunan daerah yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pada periode sebelumnya, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, dengan melihat *trend*, perbandingan antar waktu, atau menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan objek tertentu perbandingan dengan standar yang berlaku dan perbandingan antar daerah/wilayah/kawasan lainnya. Selain itu juga dengan memperhatikan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, yang mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), serta memperhatikan Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 5 (lima) pokok masalah utama yaitu :

- Kesejahteraan Masyarakat
- Kualitas Sumber daya manusia
- Tata kelola pemerintahan
- Daya saing potensi ekonomi
- Lingkungan

Identifikasi Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan dari data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung didapat dari gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilihat dari berbagai aspek – aspek pembangunan.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berkontraksi akibat pandemi COVID-19

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,31 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 5,36 persen, namun pada tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung mengalami penurunan yang sangat besar bahkan sampe terkoreksi minus. Terkoreksinya ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang AS-China yang menahan kinerja ekspor dan industri pengolahan akibat perlambatan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Pada Tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung menempati peringkat ke-4 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukan penurunan dibandingkan pada tahun 2019 (peringkat ke-2) dan Tahun 2018 (peringkat ke-1). Selain menurunnya peringkat LPE Belitung, masih ada 4 (tiga) kabupaten/kota dengan LPE yang lebih rendah dari LPE Belitung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: (1) Kabupaten Bangka Tengah, (2) Kota Pangkalpinang, dan (3) Kabupaten Bangka Barat. Terkoreksinya ekonomi tidak hanya dialami oleh Kabupaten belitung saja akan tetapi hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia laju pertumbuhan ekonominya terkoreksi, hal ini disebabkan akibat adanya pandemi *Covid-19* yang mulai melanda dunia pada awal Tahun 2020. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan sampai saat ini masih terus menyebar. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan dan yang lainnya. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan rakyat, perlu adanya kebijakan yang terpadu. Kinerja perekonomian Jawa Barat selama periode Tahun 2019-2020 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Belitung Tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 168,75 persen (y-on-y), sedangkan jika dibandingkan per triwulan, capaian Triwulan III-2020 tumbuh 3,37 persen dibanding capaian Triwulan II-2020 (q-to-q). Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 ini (yon-y) menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada sebagian besar lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19. Secara umum dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian, baik pada lapangan usaha maupun pengeluaran. Perekonomian Belitung berdasarkan

besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai Rp9.838,60 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp6.352,00 milyar. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 terhadap Tahun 2019 (y-o-y) berdasarkan harga berlaku mengalami penurunan Rp18,20 milyar. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2020 sebesar Rp2.737.936 juta. Kontribusi terbesar kedua disumbang oleh sektor konstruksi sebesar Rp1.272.593 juta pada tahun 2020, diikuti sektor industri pengolahan sebesar Rp1.171.822 juta pada tahun 2020.

2. Pengendalian Inflasi Belum Optimal

Inflasi di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terahir, pada tahun 2016 berada pada angka 4,92 dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 2,72 kemudian kembali meningkat pada angka 3,19 di tahun 2019 dan 2,11 di tahun 2020. Walau inflasi dapat dikendalikan sampai 2,11, namun bila dibandingkan dengan inflasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,08 persen, maka berada posisi lebih tinggi. Inflasi nasional di titik 1,68 persen merupakan inflasi terendah selama 10 tahun terakhir. Komponen penyebab inflasi Belitung tak bisa dilepaskan dari komponen bahan makanan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta umum.

3. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Cenderung Meningkat

Pada periode Tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Belitung berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,85 persen menjadi 6,27 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung tahun 2020 mencapai 12.070 juta jiwa (6,27 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 190 jiwa dibandingkan keadaan tahun 2019. Dibandingkan dengan kabupaten lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan dnegan Kabupaten lain di provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Penanganan Pengangguran Belum Optimal dan Cenderung Meningkat

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung menunjukkan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2017 TPT Kabupaten Belitung sebesar 2,57% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 2,93%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,89% sebelum naik drastis pada tahun 2020 menjadi 4,82%. Kondisi ini berubah pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Kabupaten Belitung merupakan Kabupaten dengan pengangguran terkecil ketiga diantara 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahkan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulaun Bangka Belitung sebesar 5,25%. Tekanan yang berat amat dirasakan di semua sektor usaha, baik yang berskala besar dan formal maupun di sektor informal yang berimbas pada pengurangan penghasilan dan bahkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja informal.

4.1.2 Permasalahan Kualitas Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah dengan kualitas yang baik agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan pembangunan daerah disektor-sektor lainya dan hal tersebut secara positif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari beberapa variabel yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 72,51 melebihi capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 71,47 dan IPM Nasional sebesar 71,94, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian IPM Kabupaten Belitung tahun 2020 berada dibawah capaian IPM Kota Pangkalpinang sebesar 78,22.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dimensi Kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang bermakna bahwa Harapan Lama Sekolah adalah Lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang (dalam tahun), sedangkan Rata-

rata Lama Sekolah adalah Rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dimensi Ekonomi diukur dengan standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 jika dilihat dari tiga dimensi dasar yaitu (1) Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,05; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 11,85 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,46 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 13.554.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh 1) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, 2) Rendahnya Derajat Kesehatan, dan 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat. Kualitas sumber daya manusia Dari ketiga dimensi tersebut kualitas manusia saling berpengaruh saling berkaitan erat Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia, tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi kualitas SDM adalah masih rendahnya derajat kesehatan, peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya, sedangkan rendahnya pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Belitung walaupun tidak secara sigifikan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia :

1. Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat

Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum terpenuhinya pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan Kesehatan, masih kurangnya kualitas layanan rumah sakit, belum optimalnya kualitas tenaga medis dan non medis.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikaan dan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pengetahuan

masyarakat yang rendah tentang PHBS dapat membentuk keyakinan seseorang untuk tidak menerapkan berperilaku PHBS sesuai dengan keyakinan yang dipahaminya. Pendidikan formal yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencerna informasi-informasi yang diterima sekaligus mempertimbangkan apakah informasi tersebut bisa dijadikan dasar bagi perilaku mereka selanjutnya. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunkan jamban yang sehat. Dari 49 desa/kelurahan di Kabupaten Belitung baru terdapat 11 desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa ODF (*Open Defecation Free*) dan belum ada satupun desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2017 penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Belitung. ISPA dan Diare adalah penyakit berbasis lingkungan yang selalu berada di diurutan teratas 10 penyakit yang paling umum di semua pusat pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Belitung. Selain itu, kejadian demam berdarah terus meningkat pada tahun 2017 terjadi 22,5 kasus DBD per 100.000 penduduk. Berbagai penyakit menular yang terjadi pada masyarakat ini dapat dicegah dengan pelaksanaan berbagai indikator yang terdapat dalam Program PHBS pada tatanan rumah tangga. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta rendahnya praktik hidup bersih dan sehat telah berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Belitung. Perilaku hidup bersih dan sehat juga berpengaruh terhadap kejadian penyakit tidak menular. Pada tahun 2017 penyakit hipertensi dan diabetes melitus berada di urutan 10 penyakit terbanyak berdasarkan kunjungan di Puskesmas Kabupaten Belitung. Penyakit tidak menular disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan indikator PHBS pada tatanan rumah tangga, yaitu makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Upaya PHBS jika tidak dilakukan oleh masing-masing keluarga dan anggota keluarganya akan menjadi faktor risiko untuk timbulnya penyakit, baik infeksi atau penyakit tidak menular.

3. Kurangnya akses pendidikan

Akses pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Belitung. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduudk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan

tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung.

4. Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja

Belum seimbangnya antara ketersediaan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja disebabkan oleh tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta masih rendahnya kemampuan atau keterampilan tenaga kerja.

5. Beban pengeluaran masyarakat miskin tinggi

Kemiskinan terjadi tidak hanya kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh belum terpenuhinya hak-hak yang diperlukan bagi seseorang atau kelompok. Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah proporsi penerima jaminan kesehatan yang belum merata dan sesuai peruntukan yang berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan yang layak, belum optimalnya pelayanan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya perlindungan sosial yang belum tepat sasaran, serta kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum optimal.

6. Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan masih kurang

Kurangnya Peran pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan dipengaruhi oleh peranan kelembagaan di desa yang belum optimal, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender yang belum optimal, serta masih rendahnya pastisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

4.1.3 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib

Penyelenggaraan Negara, 3) Azas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas dan 7) Asas Akuntabilitas.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin melalui Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belitung masih berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori "C".

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

1. **Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal**

   Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaanya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, dan belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

2. **Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah**

   Belum selarasnya perencanaan pembangunan dikarenakan sistem perencanaan berbasis elektornik yang belum diterapkan, dan belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran.

3. **Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah**

   Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

4. **Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah**

   Rendahnya kualitas dan profesional aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

5. Belum optimalnya Pelayanan publik

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang.

4.1.4 Permasalahan daya saing potensi ekonomi

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya.

Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, walaupun belum menggangu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global.

Masalah Pokok pembangunan pereknomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan

Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme penggangu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan.

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perinanan budidaya, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

2. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

3. Kurangnya daya saing pariwisata

Kurangnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenitas, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

4. Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

Tata kelola penanaman modal dan prizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

4.1.5 Permasalahan Lingkungan

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, pembangunan tidak lepas dari penggunaaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Dampak negatif dari pembangunan adalah menurunya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran air, tanah dan udara. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah terjadinya pencemaran terhadap air dan kerusakan lingkungan hidup, rendahnya area pelayanan penanganan sampah, rendahnya pengelolaan sampah 3R, rendahnya pastisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, belum optimalnya rencana pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan 4 (empat) permasalahan utama sebagaimana telah dijabarkan di atas, pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembanguan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect,* yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai

input untuk konsumsi. Selain itu, pertambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Dukungan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah

Aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Belitung masih kurang, hal ini dipengaruhi oleh rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan konektivitas infrastruktur kewilayahan.

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku

Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku, dipengaruhi oleh legalitas dan pengelolaan sumber air baku yang belum optimal.

4.1.6 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan adalah :

a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
b. Sebaran pendidikan menengah pertama yang belum merata
c. Tingkat akses PAUD masih rendah
d. Kurikulum muatan lokal belum memuat materi budaya lokal daerah

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan adalah :

a. Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum terpenuhinya pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan Kesehatan, masih

kurangnya kualitas layanan rumah sakit, belum optimalnya kualitas tenaga medis dan non medis

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikaan dan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
c. Belum meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
d. Belum maksimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan
e. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
f. Masih ditemukannya kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu melahirkan serta Masih ditemukan balita dengan status stunting

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b. Dana yang dialokasikan tiap tahun untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung cukup konsisten namun belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diajukan oleh masyarakat maupun untuk pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengairan dan bangunan gedung yang sesuai dengan umur konstruksi
c. Belum optimalnya pedoman penyelenggaraan tata ruang
d. Belum optimalnya peruntukan penggunaan lahan
e. Kurang tertibnya penyelenggaraan tata ruang
f. Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
g. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase
h. Kurangnya penataan bangunan gedung
i. Rendahnya kualitas perumahan dan permukiman
j. Belum terpenuhinya standar konstruksi

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Permasalahan urusan perumahan rakyat dan permukiman adalah :

a. Kondisi lingkungan perumahan pada beberapa kawasan tidak didukung infrastruktur dan sistem sanitasi permukiman yang memadai sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perumahan

b. Masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar
c. Masih rendahnya ketersediaan jalan lingkungan yang memadai dikarenakan Belum maksimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan
d. Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin
e. Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penegakan perda dan perkada
b. Belum optimalnya Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
c. Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana daerah
d. Terbatasnya kewenangan koordinasi dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung saat ini memiliki struktur organisasi klasifikasi/tipe B atau setara eselon III.a
e. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
f. Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

6. Urusan Sosial

Permasalahan urusan sosial sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya secara proporsional kuantitas, kualitas dan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
b. Lemahnya kualitas dan kurangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial
c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan akibat bencana non alam pandemi Covid-19.

7. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja adalah Kurangnya pengetahuan pelaku hubungan kerja tentang undang-undang ketenagakerjaan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

a. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
b. Kurangnya SDM baik di aparatur maupun relawan terlatih dalam penanganan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
c. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
d. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
e. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan akibat bencana non alam pandemi Covid-19.

9. Urusan Pangan

Permasalahan urusan pangan :

a. Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat Belitung belum optimal
b. Tingkat ketergantungan komoditas pertanian (pangan) tinggi

10. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup, sebagai berikut:

a. Lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan
b. Terbatasnya jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai
c. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan fungsi lingkungan hidup
d. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
e. Kurangnya integrasi dan ketersediaan data dan akses informasi bidang lingkungan hidup
f. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung

g. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
h. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral terkaitpengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan hidup
i. Belum lengkapnya peralatan labouratorium untuk pengujian kualitas air, udara dan tanah
j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
k. Belum optimalnya ketersediaan dan tingkat kompetensi sumber daya aparatur
l. Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung terkait pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
m. Masih terbatasnya jumlah produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
n. Masih rendahnya aspek penaatan peraturan lingkungan oleh pelaku usaha, serta meningkatnya konflik antara pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak

11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berhadapan dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Pelayanan pencatatan sipil yang belum optimal dikarenakan jumlah SDM bagian pelayanan tahun 2020 sebanyak 6 orang di bagian penerimaan berkas, 2 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer. Di bagian pengambilan dokumen kependudukan sebanyak 2 orang, dengan jumlah pengunjung pada tahun 2020 sebanyak 14.400 orang atau rata-rata pengunjung setiap harinya sebanyak 75 orang
b. Belum tersedia ruang konsultasi untuk pengunjung yang memiliki permasalahan kependudukan
c. Masih adanya data dalam Kartu Keluarga yang belum valid. Jumlah Kepala Keluarga tahun 2020 sebanyak 59.607 KK, sedangkan Kartu Keluarga yang tercetak sebanyak 55.723. sisa sebanyak 3.884 belum tercetak dikarenakan masih banyak penduduk yang anggota keluarganya meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan, masih adanya penduduk dengan data ganda, dan masih adanya penduduk non permanen yang bertahun-tahun tinggal di Kabupaten Belitung tetapi tidak mengurus berkas kepindahannya sebagai penduduk setempat

d. Masih adanya penduduk di Kabupaten Belitung yang belum melakukan perekaman KTP-el dikarenakan terkendala usia manula yang tidak mungkin lagi untuk dibawa ke tempat perekaman, cacat fisik/mental, sakit atau jauhnya dari tempat perekaman KTP-e. Jumlah manula yang ada di Kabupaten Belitung tahun 2020 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebanyak 9.057 orang dan telah melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan data manula di luar DKB (data pelayanan) banyak yang di non aktifkan dikarenakan belum melakukan perekaman sehingga tidak terdata dalam Data Konsolidasi Bersih (DKB)
e. Adanya peraturan-peraturan yang berganti terkait Adminduk yang didalamnya mengenai perubahan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga banyak penduduk yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan tetapi berkas tidak lengkap. Sedangkan kegiatan sosialisasi pada tahun 2020 ditiadakan dikarenakan pandemi Covid-19

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan kepada penurunan kesenjangan gender dan perlindungan hak anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini terdiri dari:

a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani oleh lembaga layanan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada peningkatan kinerja lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya untuk meminimalisir Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terusdilakunkan dengan meningkatkan pelayanan dengan memperkuat kelembagaan dan koordinasi antar lembaga layanan terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya lainnya yang bersifat preventif atau pencegahan.
b. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Seperti yang diketahui, keterlibatan masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan koordinasi antar stake holder merupakan hal yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, upaya untuk terus melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat agar terbentuk pemahaman bahwa issue pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Permalasahan diatas disebabkan antara lain :

a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sumber Daya Manusia (SDM) perlindungan perempuan dan anak (ada 3 lembaga, terdiri dari: Satgas PPA, P2TP2A, PKDRT) untuk saat ini SDM P2TP2A ada 6 orang, SDM PKDRT ada 3 orang dan SDM pada satgas PPA ada 10 orang idealnya untuk setiap lembaga adalah 10 orang

b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih untuk Konvensi Hak Anak. Pelatihan Konvensi Hak Anak belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sumber Daya Manusia terlatih untuk Konvensi Hak Anak (KHA) minimal 2 orang pada setiap indikator yang ada di Kluster yang ada di KLA + Kelembagaan + Kelana dan Dekelana = (2 x 24) + 2 = 50 orang, untuk saat ini sumber daya manusia yang terlatih untuk Konvensi Hak Anak ada 10 orang.

1. Belum semua masyarakat memaknai dan punya pandangan yang sama dalam memandang kesetaraan gender.

   Kesetaraan masih merupakan hal yang sangat sensitive di kalangan masyarakat, dikarena perempuan masih memiliki peran/kesempatan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki, diantarannya:

   a) Sosial Kemasyarakatan

      Dalam aktivitas rapat/ musyawarah sebagai langkah awal penentuan kebijakan baik di tingkat desa & kelurahan peserta yang hadir masih didominasi laki-laki.

   b) Ekonomi

      Jumlah buruh/ karyawan /pegawai masih didominasi laki-laki dengan jumlah perempuan 17.395, laki-laki sejumlah 34.392 dengan total penduduk yang bekerja sebesar 51.787 atau keterlibatan perempuan 33 %

   c) Partisipasi di lembaga exsekutif

      Yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III perempuan sebanyak 30 orang, laki-laki sejumlah 127 orang dari total yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III keterlibatan perempuan 19 %

   d) Camat di Kabupaten Belitung

      Camat se Kabupaten Belitung semuanya laki-laki artinya keterlibatan perempuan 0%

e) Kepala Desa di Kabupaten Belitung

Desa di Kabupaten Belitung ada 42 Desa dengan Kepala Desa semuanya laki-laki artinya keterlibatan perempuan 0%

f) Partisipasi di lembaga Legeslatif keanggotaan DPRD

Dari total anggota DPRD kabupaten Belitung sebanyak 25 Orang, perempuan ada 2 orang selebihnya 23 orang laki-laki artinya keterlibatan perempuan 8 %

2. Belum optimalnya pembinaan organisasi perempuan anak

Jumlah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Belitung sebanyak 21 (dua puluh satu) organisasi yang tergabung di dalam GOW (Gabungan Organisasi Wanita). Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan anak yang direncanakan di tahun 2020 belum dapat dilakukan secara optimal karena pandemi Covid-19.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan pembangunan urusan ini antara lain:

1. Masih adanya kesenjangan pembinaan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

a) Hal ini dari hasil pendataan keluarga Tahun 2020 masih terdapat 336 PUS yang dibawah usia 20 tahun, yang berarti masih terdapat PUS pada usia Remaja. Selain itu masih terdapat WUS usia 15-19 tahun sebanyak 6467 dengan angka kelahiran pada remaja sebanyak 250 kelahiran. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur tentang masih rendahnya pemahaman tentang kespro remaja.

b) Frekuensi pembinaan PIK remaja tidak dapat optimal, dikarenakan keterbatasan SDM dan Kemampuan tenaga lini lapangan, sehingga masih terdapat pembina PIK Remaja yang belum memahami jalannya pelaksanaan kelompok PIK remaja. Ini juga ditunjukkan dengan pada saat evaluasi PIK Remaja dan pemilihan Duta Genre, masih belum mempunyai program kerja.

2. Belum optimalnya kompetensi petugas lapangan dan kader KB.

a) Masih terdapat desa yang belum lengkap data poktannya, dari 49 desa masih terdapat 16 desa yang kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PPKS

dan PIKR) yang belum lengkap, hal ini tergantung kreatifitas dan inovatif PLKB/PKB dan kader KB dilapangan.

b) Karena masa pandemi sekarang ini, BKKBN tidak ada mengadakan diklat teknis masalah program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana), yang biasa diikuti leh kader dan PLKB/PKB.

c) Untuk tenaga PLKB Non ASN sebanya 7 orang belum di ikutikan pada pelatihan Dasar Umum, yang biasa diikuti leh Petugas Lapangan KB.

14.Urusan Perhubungan

Kelancaran mobilisasi orang dan barang sebagai akibat interaksi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat dengan implikasi akhir kepada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peningkatan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai mutlak harus dilaksanakan melalui pembangunan urusan wajib perhubungan, adapun permasalahan terkait dengan urusan ini meliputi:

a. Belum meratanya penerangan jalan umum di Kabupaten Belitung;
b. Belum meratanya fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut di Kabupaten Belitung;
c. Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang di Kabupaten Belitung
d. Belum optimalnya tingkat ketersediaan dan kompetensi sumberdaya aparatur bidang perhubungan
e. Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
f. Belum optimalnya pengelolaan perparkiran
g. Tingkat pelanggaran pengguna lalulintas masih tinggi
h. Sarana dan prasarana transportasi masih harus ditingkatkan

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan urusan komunikasi dan informatikan adalah belum optimalnya pemanfaatan jaringan infrastruktur TIK dan aplikasi layanan publik.

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Kurangnya kreatifitas UKM dalam mengembangkan usahanya
b. Belum Optimalnya Manajemen UKM
c. Masih rendahnya keanggotaan koperasi yang berasal dari UKM

d. Masih rendahnya SDM koperasi dalam penyusunan laporan keuangan
e. Tarif pajak bagi Koperasi Plasma sering berubah-ubah dari KPP Pratama

17. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya promosi investasi daerah
b. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku usaha dengan dunia usaha.
c. Belum optimalnya perencanaan penanaman modal.
d. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya manusia
e. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal
f. Belum optimalnya kelembagaan penanaman modal
g. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penanaman modal

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan kepada peningkatan kompetensi dan kemandirian pemuda serta peningkatan prestasi olah raga daerah. Adapun permasalahan pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga meliputi:

a. Belum ada regulasi atau kebijakan daerah yang mengatur tentang kepemudaan dan keolahragaan.
b. Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga belum memadai.
    - Belum adanya asrama atlet di Kabupaten Belitung
    - Gedung Olahraga kabupaten yang hanya bertipe C, yaitu yang peruntukannya hanya melayani wilayah kecamatan dengan standar kapasitas penonton maksimal sebanyak 1000 orang dan fasilitas cabang olahraga yang tersedia hanya satu lapangan bola voli dan satu lapangan bulu tangkis.
    - Stadion sepak bola kabupaten yang hanya bertipe C, yaitu yang peruntukannya hanya melayani wilayah kecamatan dengan kapasitas penonton 5.000 – 10.000 orang dan dilengkapi 6 lintasan lari atletik.
    - Belum tersedianya lapangan tembak, lapangan panahan, lapangan balap sepeda (velodrome), arena senam, arena tinju, arean dayung, arena olahraga permainan tradisional (gasing), arena bowling, arena biliard, dan hall fitness.
c. Belum tersedianya dokumen Profil Potensi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, yang mana dengan adanya profil potensi pemuda dan

olahraga kabupaten dapat memberikan gambaran nyata kondisi pembangunan sektor pemuda dan olahraga di Kabupaten Belitung, selain itu juga profil potensi pemuda dan olahraga kabupaten dapat menyajikan potensi pembangunan sektor pemuda dan olahraga yang dapat dikembangkan melalui intervensi program pembangunan.

19. Urusan Statistik

Permasalahan urusan Statistik sebagai berikut :

a. Kurang optimalnya Kompetensi SDM Statistik dan pengelolaan Data.
b. Data secara Umum belum mencakup dan menjawab kebutuhan Data Statistik Sektoral
c. Sinkronisasi data belum Optimal
d. Kurangnya Infrastruktur dalam menunjang penyelenggaraan statistik sektoral

20. Urusan Persandian

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, kadangkala masih menggunakan pola yang konservatif. Meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, praktik demokrasi deliberatif belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan serimonial.

Keterbatasan dari implementasi kebijakan pemda, menyebabkan pelaksanaan urusan persandian sebagai basis memperkuat integrasi bangsa masih berada ditataran prioritas antarrelasi elite dibandingkan segmen relasi anta elite-massa atau antarkelompok massa. Kalaupun segmen relasi elite-massa dan antarmassa yang muncul dalam urusan persandian, maka substansinya lebih menjadi ikutan atas prioritas relasi antarelite.

Persandian belum secara maksimal ditempatkan menjadi landasan pembentukan akuntabilitas pemerintahan bagi integrasi bangsa, karena bukan mustahil digunakan demi kepentingan partisan elite. Persandian dalam perspektif komunikasi organisasi di pemerintah daerah pada hakikatnya bicara tentang bagaimana kegiatan persandian yang dimulai dari aspek penerimaan pesan, pengolahan, penyerahan pesan, dan penyimpanan pesan, berlangsung sesuai dengan kaidah-kaidah persandian yang berlaku. Mekanismepersandian yang

dilakukan pemda, memang masih bervariasi bergantung kepada keseriusan kepala daerah dan tuntutan kegiatan persandian di daerah. Ketidakmerataan kegiatan persandian di daerah juga disebabkan oleh tidak seragamannya pemahaman pemda terhadap kriteria informasi yang masuk dalam kategori disandikan. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata. Pola pengamanan persandian juga masih bervariasi perlakuannya. Penggunaan teknologi telekomunikasi menjadi andalan untuk mempermudah praktik kerja persandian dan pengamanannya. Namun penggunakan TIK dalam kegiatan persandian pasti juga berhadapan dengan ancaman teknologi berupa virus, pembongkaran kata kunci atau perusakan informasi yang telah disandikan. Inti dari permasalahan persandian adalah:

a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang keamanan dan informasi, hal ini akan segera diatas dengan peningkatan sarana dan prasarana dibidang keamanan dan informasi
b. Kurangnya pemahaman keamanan informasi aparatur pemerintah daerah dan publik, hal ini akan segera diatas dengan meningkatkan pemahaman keamanan informasi melalui sosialiasi untuk aparatur pemerintah daerah dan publik
c. Belum optimalnya kompetensi SDM di bidang kemanan informasi, hal ini akan segera diatasi dengan peningkatan kompetensi SDM dibidang kemanan informasi melalui pelatihan kemanan informasi
d. Belum adanya regulasi di bidang keamanan informasi hal ini akan segera diatasi dengan pemenuhan regulasi dibidang keamanan informasi melalui penyediaan peraturan/kebijakan terkait keamanan informasi

21. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melalui program pengembangan nilai budaya dengan memperhatikan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai acuan perhitungan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfatan dan pembinaan, sehingga permasalahan urusan kebudayaan adalah belum optimalnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan daerah.

22. Urusan Perpustakaan

Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan urusan perpustakaan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sebagai berikut:

a. Belum meratanya akses yang tersedia guna mendapatkan koleksi bahan pustaka dan kurangnya tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki

kompetensi di bidangnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung

b. Belum optimalnya tata kelola perpustakaan terutama untuk perpustakaan khusus dan desa Kabupaten Belitung
c. Belum optimalnya tenaga pustakawan dalam memberikan sosialisasi terhadap pengembangan dan layanan perpustakaan terhadap perpustakaan khusus dan desa
d. Kurangnya operasional Perpustakan Keliling untuk dapat menjangkau kelapisan masyarakat yang terjauh di Kabupaten Belitung
e. Diversifikasi layanan perpustakaan masih perlu ditambah lagi dengan inovasi di bidang perpustakaan

23. Urusan Kearsipan

Permasalahan urusan Kearsipan yang diselenggarakan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, yaitu:

a. Kondisi yang terjadi terhadap Bidang Kearsipan masih minimnya kompetensi arsiparis di tiap-tiap perangkat daerah, untuk mengelola arsip di PDnya masing-masing sesuai dengan NSPK Kearsipan, ini disebabkan tugas pokok dan fungsi mereka terbagi dengan pengelolaan kearsipan. Sehingga dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bidang Kearsipan untuk pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah Belum optimal.
b. Penerapan NSPK Kearsipan masih belum optimal baik di Lembaga Kearsipan Daerah maupun pada tingkat pencipta arsip.

24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan yang dimiliki daerah menjadikan perikanan sebagai potensi andalan daerah, namun tanpa didukung oleh pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka potensi ini tidak akan memberikan pengaruh yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan pembangunan urusan ini meliputi:

a. Dengan diterbitkannya izin mengenai zona penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga mengakibatkan nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan luar yang armada penangkapan ikannya lebih besar yang salah satunya menyebabkan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 jauh dibawah target dengan realisasi sebanyak 52.912,5 ton dari target 67.044 ton.

b. Terganggunya sistem tata niaga untuk budidaya iklan air tawar dan air laut selama pandemi Covid-19 salah satunya frekuensi ekspor ikan kerapu yang berkurang pada tahun 2020 yang hanya 5 kali, sehingga membuat realisasi capaian pengembangan perikanan budidaya hanya sebesar 152,96 ton dari 215 ton yang ditargetkan.

25. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Belitung sangat didukung dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Tanjung Kelayang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dengan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pembangunan sarana prasarana infrastruktur dalam mendukung kepariwisataan memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung. Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Pariwisata:

a. SDM pariwisata yang kompeten dan berpengalaman dibidang kepariwisataan masih kurang.
    - Tenaga kerja sub sektor hotel dan restoran berjumlah 2.144 orang dengan jumlah 996 yang bersertifikasi atau 46,46% dari total jumlah tenaga kerja sub sektor hotel dan restoran
    - Tenaga kerja sub sektor bar dan jasa boga yang berjumlah 30 orang belum ada yang bersertifikasi
    - Pemandu wisata alam berjumlah 58 orang belum ada yang bersertifikasi
    - Pemandu ekowisata berjumlah 40 orang belum ada yang bersertifikasi
    - Tenaga kerja bidang jasa boga berjumlah 50 orang belum ada yang berserifikasi
    - Tenaga kerja bidang MICE berjumlah 5 orang belum bersertifikasi
b. hanya ada 2 (dua) jalur penerbangan domestik ke Kabupaten Belitung yaitu Tanjungpandan-Jakarta dan Tanjungpandan-Pangkalpinang
c. Penutupan jalur penerbangan internasional per Maret 2020 dikarenakan pandemi covid-19 menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis pada tahun 2020. Sebelumnya jumlah wisatawan tahun 2019 berjumlah 352.048 orang turun sebesar 61,86% menjadi 134.266 orang pada tahun 2020.

d. Masih terdapat destinasi pariwisata yang tidak dilengkapi dengan fasilitas pariwisata sehingga pelayanan/pemenuhan kebutuhan wisatawan menjadi tidak maksimal, seperti fasilitas pusat informasi wisata, galeri cinderamata, dan sarana permainan anak di destinasi wisata.

26. Urusan Pertanian

Permasalahan untuk urusan pertanian sebagai berikut:

a. Tingkat pengetahuan dan minat petani masih rendah
b. Sistem pengairan belum optimal
c. Tingginya serangan hama penyakit
d. Dampak Perubahan Iklim merupakan salah satu faktor penyebab kurang berhasilnya produksi sektor pertanian

27. Urusan Perdagangan

Permasalahan urusan perdagangan adalah Pendistribusian gas elpiji tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi berdasarkan SKK Bupati Belitung Nomor 188.45/235/KEP/V/2019 tentang Penetapan HET LPG 3 Kg pada tingkat pangkalan di Kabupaten Belitung.

28. Urusan Perindustrian

Permasalahan urusan Perindustrian sebagai berikut:

a. Belum adanya Peraturan Daerah Rencana Pengembangan Industri Kecil Menengah.
b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha IKM
c. Kurangnya akses pasar untuk mendukung penjualan produk IKM
d. Kurangnya kualitas kemasan produk IKM
e. Belum optimalnya promosi IKM.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dianalisis berdasarkan kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK) dan dokumen perencanaan lainnya, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis dari perangkat daerah. Isu Strategis harus menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik sekala regional nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka waktu menengah mapun jangka panjang.

Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Perumusan isu strategis merupakan salah satu dasar dalam melakukan perumusan kebijakan pembangunan daerah . Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
7. Untuk segera dilaksanakan

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi secara global. Kondisi global terakhir ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup, maka dunia internasional berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelastarian lingkungan hidup dengan program SDG's (*Sustainable Development Goals)*

SDGs adalah sebuah kesepakatan baru pengganti MDGs. Masa berlaku SDGs dimulai berlaku tahun 2015 – 2030 yang telah disepakati oleh 190 negara yang berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat

menjawab ketertinggalan pembangunan negara-segara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang dimana tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan

membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Program SDGs mempunyai keterkaitan dengan Agenda prioritas Nasional NAWACITA didalam hal membangun manusia dan upaya menurunkan ketimpangan, walaupun harus terdapat penyesuaian-penyesuaian. Beberapa agenda di dalam NAWACITA sesuai dengan SDGs yaitu :

1. Agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi.
2. Kesejahteraan dan pendidikan merupakan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan,kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu focus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses energi yang terjangkau, merupakan fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
5. Perubahan iklim, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Gambar 4.1 Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020 – 2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi dalam pencapaian visi 2045.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Presiden RI

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah

Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	**Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:** Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	• Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0%	**245,8** • APBN: 13,0 • BUMN 125,9 • Swasta: 106,9	a.l Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	**10 Destinasi Pariwisata Prioritas:** Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	• Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	**161** (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	**5 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 *smelter***	• Industrialisasi di luar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	**317,3** • APBN: 15,7 • Swasta: 176,0 • KPBU: 14,3 • BUMN: 111,4	a.l Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	**Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**	• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) • Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.	**226,4** • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	**Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit**	• Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%	**32,0** • APBN: 1,1 • BUMN: 11,9 • Swasta: 19,0	a.l Kementan KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	**Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	**25** • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM,

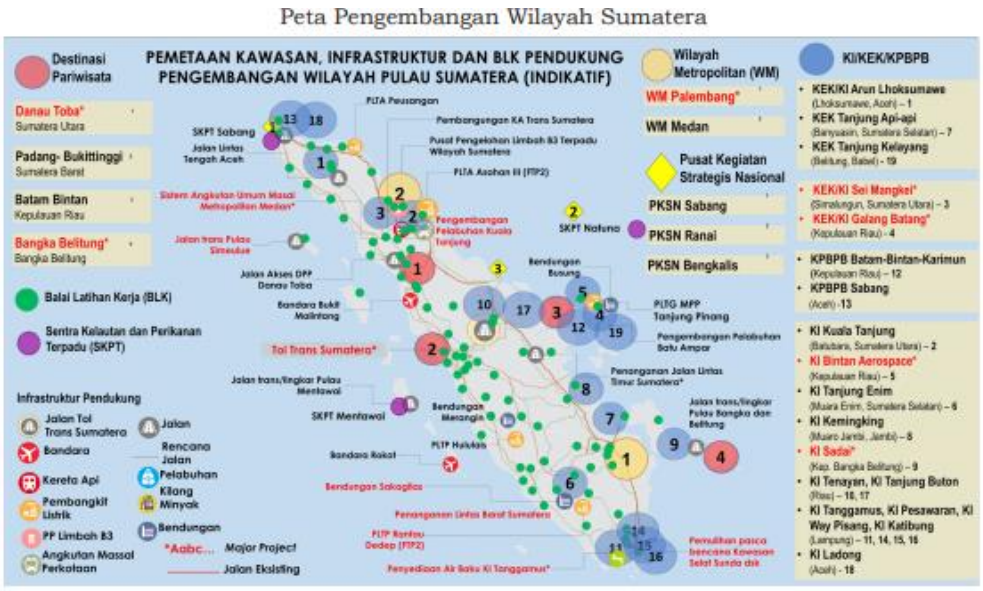
Gambar 4.3 Daftar Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020 – 2024

Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia– Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Dalam lima tahun mendatang, transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain

itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi pembangunan Wilayah Sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*) (1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; (f) pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong transformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan Aceh; dan (g) pelaksanaan pembangunan afirmatif. (2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan industri (KI), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); (e) revitalisasi kawasan transmigrasi; (f) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (g) pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah; (h) pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal pada Destinasi Pariwisata.

Prioritas (DPP); (i) pengembangan industri kedirgantaraan; (j) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. (3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah; dan (d) pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat terus ditingkatkan. (4) Penguatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan (c) memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera; (5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Pulau Sumatera dan pemantapan pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Gambar 4.4 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera



Gambar 4.5 Persebaran Destinasi Pariwisata Sumatera – Jawa – Bali

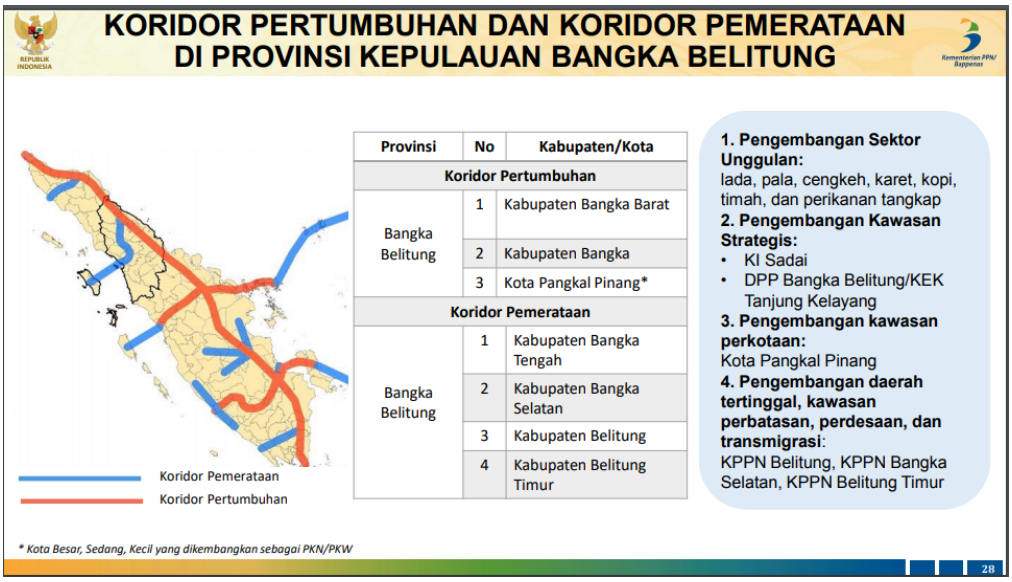
2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

Latar Belakang	Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritaslainnya						
Manfaat	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024) 2. Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) 3. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024)						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**						**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
	• Perpres ITMP untuk Borobudur dskt, Danau Toba dskt, dan Lombok (100%) • Penyusunan ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok (100%)	• Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Morotai, Bangka Belitung (100%) • Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%)	• Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (40%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%)	• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%)	• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%)	• 10 Kawasan Prioritas Selesai 100%	**Rp 161 T** (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)
Pelaksana	Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUKM, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan						
***Highlight* Proyek**	1.Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM) 2.Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda) 3.Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN)		4.Pembanguan Desa Wisata dan Fasilitasi BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM) 5.Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda) 6.Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kementan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag)				

Gambar 4.6 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera dilakukan akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.



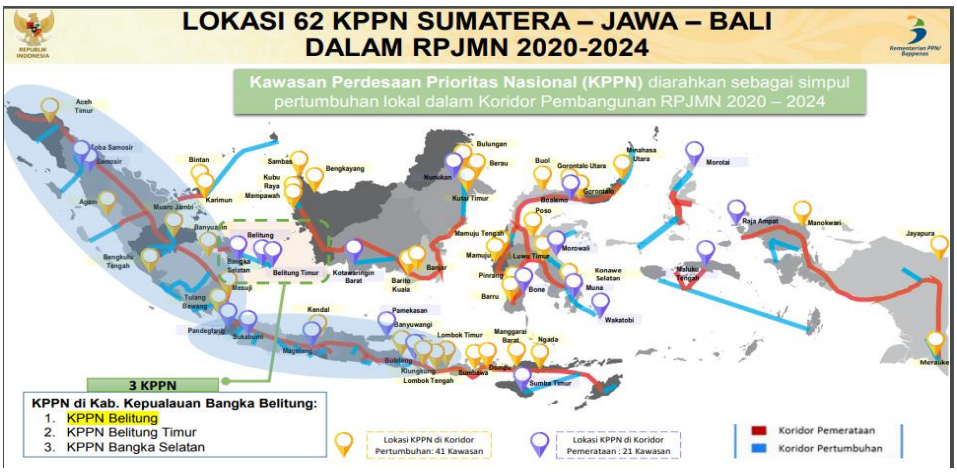
Gambar 4.7 Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengembangan Kawasan Strategis Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 1) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB BatamBintan-Karimun, dan KPBPB Sabang; 2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi, DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang; 3) Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan; 4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA Pariaman – Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang, Bandara Rokot; 5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan 6) Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera; 7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; a. pengembangan SMK 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan. - 9 - b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di Aceh,

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, makanan dan minuman di Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian. c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki. d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.



Gambar 4.8 Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera



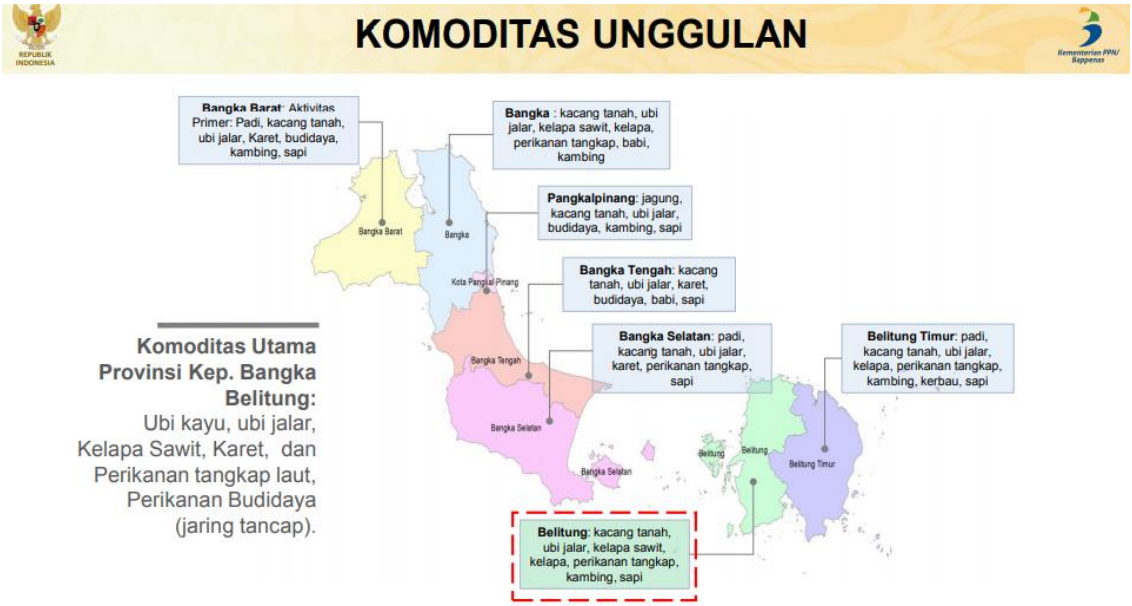
Gambar 4.9 Lokasi 62 KPPN Sumatera – Jawa – Bali

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, - 6 - kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, yang difokuskan pada: a. Provinsi Aceh: kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap dan budidaya, dan minyak dan gas bumi; b. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya; c. Provinsi Sumatera Barat: kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya; d. Provinsi Riau: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi; e. Provinsi Jambi: tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, dan batubara; f. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi; g. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan emas; h. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, tebu, dan perikanan

tangkap dan budidaya; i. Provinsi Bangka Belitung: lada, pala, cengkeh, karet, kopi, timah, dan perikanan tangkap; dan j. Provinsi Kepulauan Riau: lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap. 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Mentawai, WPP 571 (di Selat Malaka dan Laut Andaman) dan WPP 572 (di Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda; 4) Pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues.



Gambar 4.10 Komoditas Unggulan di Wilayah Sumatera

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



VISI

Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

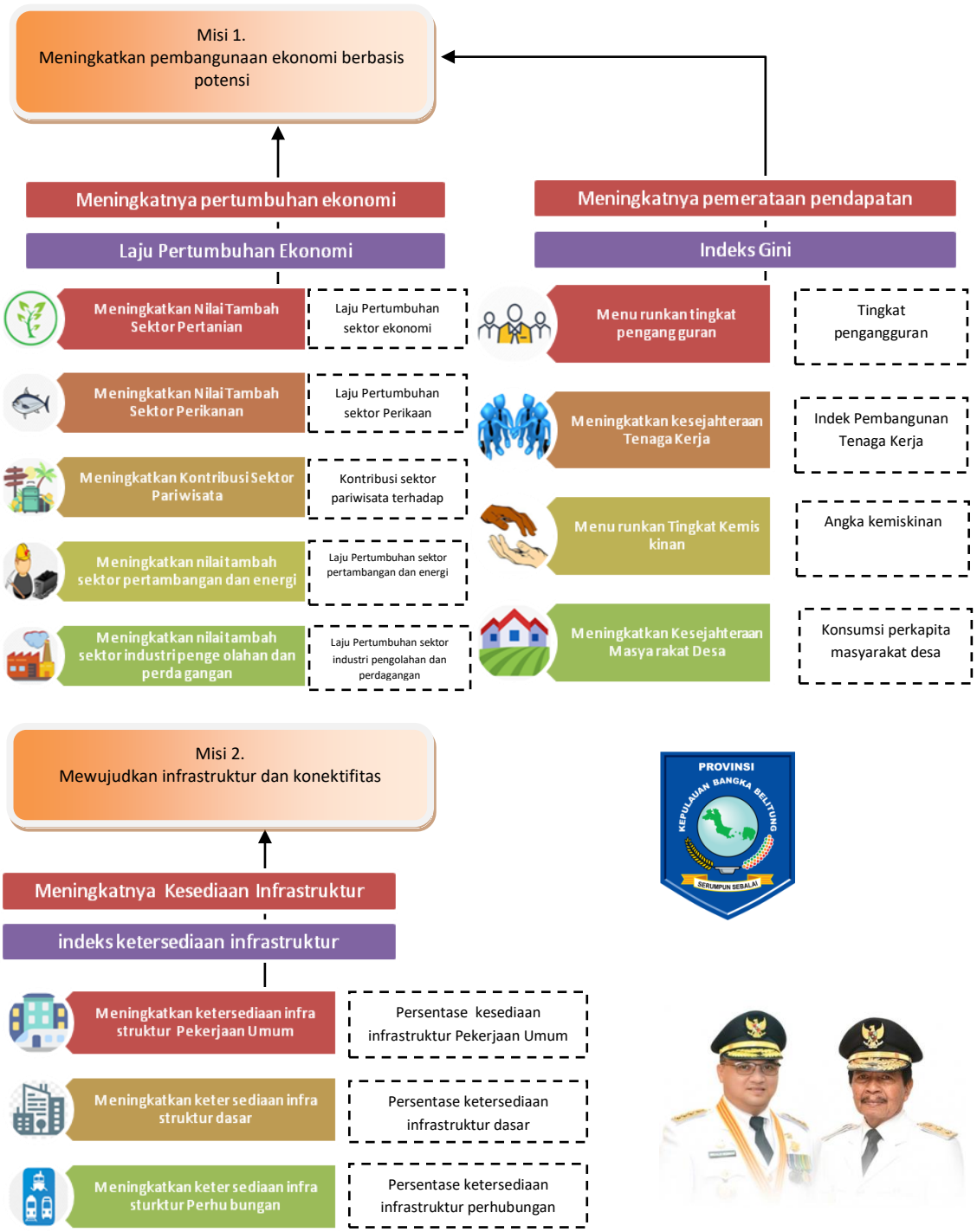
MISI

- Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah
- Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas
- Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
- Meningkatkan kesehatan masyarakat
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
- Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup



2. Tujuan dan Sasaran

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"



"Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

Misi 3
Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal

Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

Rata-rata lama sekolah

- Meningkatkan kesempatan pendidikan — Angka harapan lama sekolah
- Meningkatkan kualitas pendidikan — Persentase sekolah terakreditasi

Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat

Indek Pembangunan Sosial

- Meningkatkan kesejahteraan anak — Indeks komposit kesejahteraan rakyat sektor
- Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk — Laju Pertumbuhan penduduk
- Meningkatkan pembangunan responsif gender — Indeks pembangunan gender
- Meningkatkan kualitas pemuda — Indek pembangunan pemuda
- Meningkatkan pembangunan olah raga — Indek pembangunan olah raga
- Meningkatkan kesejahteraan sosial — Persentase PMKS sejahtera

Misi 4
Meningkatkan kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka usia harapan hidup

- Meningkatkan Kesehatan Masyarakat — Angka kesehatan masyarakat



"Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

Misi 5.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokratis

Terwujudnya reformasi birokrasi		Meningkatnya demokrasi	
Indeks reformasi birokrasi		Indeks Demokrasi Indonesia	
Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	Meningkat kan Kebebasan sipil	Nilai kebebasan sipil
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Nilai delapan area perubahan RB	Meningkat kan hak-hak politik	Nilai hak-hal politik
Meningkatkan kualitas ASN	Indeks profesional ASN	Meningkat kan peran lembaga politik	Nilai lembaga demokratis

Misi 6.
Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan

Menurunya Resiko Bencana		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Indeks Resiko Bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penaggulangan bencana	Indkes Kapasitas bencana daerah	Meningkatkan Kualitas air sungai	Indeks kualitas air sungai
		Meningkatkan kualitas udara	Indeks kualitas udara
		Meningkatkan tutupan lahan	Indeks tutupan lahan
		Mengendalikan efek gas rumah kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)



3. Prioritas Pembangunan Daerah



1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

   Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan Bahari

   Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayannelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

   Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik

seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

   Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroprasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

   Fokus kegiatan Mengembangakn bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

6. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan

   Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembanguan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus VI-55 menguatkan brand babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung)

sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasiskan untuk membangun kemandiriaan Energi;

7. Pembangunan Pendidikan

   Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkataan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Univesitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

8. Pembangunan Kesehatan

   Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan moderenisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentid khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

9. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik

   Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanaan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanaan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas;

Mempermudah pelayanaan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

10. Pembangunaan Berdemokrasi

    Fokus kegiatan mengoptimlakan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

11. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

    Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

12. Pengendalian Lingkungan Hidup

    Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahah; pegendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

Strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian
1. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan 2. Peningkatan Produkasi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan 3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 4. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
Meningkatnya nilai tambah sektor perikanan
5. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 6. Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 7. Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya 8. Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap

dan perikanan budidaya
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
9. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif 10. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata 11. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata 12. Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata 13. Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung 14. Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka *15. Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang* 16. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata pulau punai 17. Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera *18. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata*
Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan dan energi
19. Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan 20. Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat
Meningkatnya nilai tambah industri pengolahan dan perdagangan
21. Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular 22. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai 23. Peningkatan tata kelola industri 24. Peningkatan tata kelola perdagangan
Menurunkan tingkat pengangguran
25. Peningkatan kesempatan kerja 26. Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja 27. Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja
28. Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
Menurunkan tingkat kemiskinan
29. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 30. Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

31. Peningkatan pendapatan masyarakat desa
Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum
32. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
33. Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang
34. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
Meningkatkan ketersedian infrastruktur dasar
35. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan
36. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
Meningkatkan kesempatan pendidikan
37. Peningkatan akses pelayanan pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidikan
38. Peningkatan mutu layanan pendidikan
Meningkatnya kesejahteraan anak
39. Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
40. Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
Meningkatkan pembangunan resposif gender
41. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
42. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
Meningkatkan kualitas pemuda
43. Peningkatan Insan pemuda yang berprestasi
Meningkatkan pembanguna olah raga
44. Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
Meningkatkan kesejahteraan sosial
45. Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
Meningkatnya kesehatan masyarakat
46. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
47. Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat
Meningkatkan tata kelola keuangan daerah

48. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
49. Meningkatkan Tata kelola pengawasan
50. Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
51. Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daera
52. Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)
53. Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
54. Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa
55. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
56. Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kualitas ASN
57. Peningkatan kompetensi dan profesional ASN
Meningkatnya Kebebasan sipil
58. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
59. Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat
60. Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat
61. Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi
Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana
62. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
63. Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
64. Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur
Meningkatnya Kualitas air
65. Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
Meningkatnya Kualitas udara
66. Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
Meningkatnya kualitas tutupan lahan
67. Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
68. Peningkatan tata kelola kehutanan
69. Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
Menurunnya efek emisi gas rumah kaca

70. Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

4.2.4 Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Belitung

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, pemerintah juga wajib melaksanakan KLHS RPJMD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan KLHS ini merupakan tahap awal dari proses penyusunan RPJMD, sehingga kedepannya dapat diperikirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila arah kebijakan dan program pembangunan daerah dilaksanakan. Hasil kajian di KLHS terebut bersifat strategik, sehingga mampu memberikan rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Implementasi dari KLHS tersebut diharapkan mampu meminimalisasi permasalahan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung sebagaimana yang diamanatlan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil telaah terhadap dokumen KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari total 319 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditapis menjadi 156 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung. Indikator tersebut kemudian dikategorisasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
   a. Kategori 1 (indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional) sebesar 45% atau 70 indikator.
   b. Kategori 2 (indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional) sebesar 29% atau 46 indikator.
   c. Kategori 3 (indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional) sebesar 7% atau 11 indikator.
   d. Kategori 4 (indikator belum memiliki data) sebesar 19% atay 29 indikator.
2. Dua puluh sembilan indikator yang belum memiliki data tersebut menjadi tanggung jawab OPD terkait, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peindustrian,

Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Padahal, ketersediaan data merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap OPD, supaya pengambilan kebijakan pembangunan Kabupaten Belitung sesuai dengan kondisi yang relevan.

3. Isu strategis prioritas yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 46 (empat puluh enam) isu strategis, yang dirumuskan dan diperingkat dari *gap* terbesar hingga terkecil. Perhitungan *gap* tersebut diidentifikasi dari selisih capaian target nasional dan capaian indikator kabupaten, keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), serta keterkaitan dengan wajib pelayanan dasar.
4. Selain identifikasi capaian indikator terhadap target nasional, juga dilakukan identifikasi indikator terhadap pengaruh daya dukung dan dya tampung lingkungan hidup. Terdapat 86 indikator yang belum mencapai target nasional, terdiri atas 46 indikator sudah dilaksanakan, dan 29 indikator belum terdata. Delapan puluh enam indikator tersebut kemudian ditapis dengan pasal 3 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016 menghasilkan 14 indikator yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR, Dinas KUKMPTK, Dinas Pariwisata, Dinas PMPTSPP dan Dinas Lingkungan Hidup.
5. Perangkat Daerah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Indikator yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup tersebut antara lain:
    a. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan beresiko tinggi.
    b. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
    c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
    d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
    e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
    f. Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
    g. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
    h. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
    i. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
    j. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah inndustri.

k. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
l. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
m. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
n. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

4.2.5 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung

Penalaahan dokumen rencana pembangunan merupakan salah satu bentuk penyelarasan perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan yang perlu dilakukan antara lain adalah penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung.

RTRW Kabupaten Belitung sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, yang bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sector unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan dan pariwisata serta sector penunjang lainnya”.

Kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Belitung, antara lain :

a. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
b. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah;
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
d. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
e. Pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
f. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Strategi untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh Kabupaten yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Memperlakukan sistem perdesaan sebagai rangkaian dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten;
b. Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan lainnya, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi non- pertanianperdesaan (rural non-farm sector), yang bersifat padat karya;
d. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di pedesaan untuk pemerataan pemerataan pertumbuhan wilayah; dan
e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi untuk pengembangan system pusat wilayah yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Mengembangkan pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan;
b. Menghubungkan antar pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan
c. Menumbuhkan dan mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Mengembangkan kualitas dan keterpaduan jaringan pelayanan sistem prasarana transportasi;
b. Mengembangkan sistem energi baru dan terbarukan serta tak terbarukan secara optimal;
c. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas antar wilayah;
d. Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air; dan
e. Mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air minum, persampahan, drainase dan limbah.

Strategi untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
c. Mengembangkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; dan
d. Membatasi kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.

Strategi pengoptimalan pemanfaatan kegiatan budidaya agar tidak terlampauai daya dukung dan daya tamping lingkungan yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
b. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen)dari luas kawasan perkotaan; dan
c. Mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkankegiatan nonpertanian pada kawasan tanah nonproduktif.

Strategi untuk penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten;
b. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan tersebut; dan
c. Merehabilitasi fungsi kawasan strategis yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis tersebut.

Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 yang telah disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangwa waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun, dengan pentahapan yang dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama 5 (lima) tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola

ruang dan kawasan strategis. Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program :

a. perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan; dan
b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan budidaya, Indikasi program perwujudan kawasan strategis mencakup program pembangunan kawasan strategis.

4.2.6 Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, tepatnya pada fase ketiga yaitu Tahun 2015-2020. Visi RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah "*Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat"* dengan Misi sebagai berikut :

a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah;
c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

Pada fase ketiga RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, Fokus pembangunan yang menjadi perhatian adalah Ekonomi dan Pengembangan Kualitas SDM. Guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, pada periode waktu ini perhatian daerah ditujukan kepada peningkatan nilai tambah terhadap potensi-potensi ekonomi daerah melalui pengembangan industri pengolahan dasar ke tingkatan yang lebih tinggi. Disamping itu kualitas pembangunan dan pengembangan daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Bertolak dari hal ini maka perhatian lebih diberikan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan penciptaan kepemerintahan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dengan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi tinggi tentunya memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan dan pengembangan daerah.

Mengacu pada fokus fase ketiga RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 yang menekankan pada Ekonomi dan Pengembangan Kualitas SDM, maka Visi RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Hasil telaahan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2018 diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Hasil Telaahan Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2020

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Ketiga (2015-2020)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2020	Hasil Telaahan
1	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (*persen*)	6,37	-2,31	Realiasi pertumbuhan ekonomi masih dibawah target RPJPD disebabkan adanya kejadian bencana yang luar biasa yaitu adanya Pandemi Covid-19
			Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) (*juta rupiah*)	1.694.644	6.352.000	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata Produk Domestik	8.087.782	9.838.600	PDRB sudah melampaui target

			Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) (*juta rupiah*)			RPJPD
			Rata-rata pendapatan per kapita (*rupiah*)	6.071.141	9.356.136 (pengeluaran per kapita)	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (*persen*)	12,78	20,06	PDRB sudah melampaui target RPJPD
		Meningkatnya Kepariwisataan daerah	Rata-rata peningkatan jumlah wisatawan (*orang*)	12.500	127.978	Jumlah wisatawan sudah melampaui target RPJPD
			Jumlah destinasi wisata (*unit*)	39		
		Meningkatnya pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rata-rata peningkatan jumlah produksi budidaya laut (*ton*)	20,85	6,8	Masih dibawah target RPJPD
			Rata-rata peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap (*ton*)	850	5.812	Sudah melampaui target RPJPD
		Meningkatnya pengembangan perhubungan laut	Persentase pembangunan dan penataan kawasan pelabuhan laut Tanjung Batu (*persen*)	90,00		
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas hidup	indeks pembangunan manusia (IPM)	81,40	72,51	Masih dibawah target RPJPD, mengingat ada penyesuaian angka IPM dari BPS
			Rata-rata angka partisipasi kasar			APK sudah mendekati

			(APK) (*persen*) - SD - SMP	 130,00 110,00	 106,91 98,99	angka 100 dalam upaya pengaturan usia sekolah
			Rata-rata angka partisipasi murni (APM) (*persen*) - SD - SMP	 99,50 89,00	 99,52 76,56	APM SMP mengalami penurunan sehingga belum melampaui target
			Rata-rata angka kelulusan (*persen*) - SD - SMP	 100,00 90,00	 100 100	Angka kelulusan sudah melampaui target
			Rata-rata lama sekolah (*tahun*)	10,45	11,85	Sudah mencapai target
			Rata-rata usia harapan hidup (*tahun*)	73,20	71,05	Belum mencapai target
3	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase penanganan sampah Kabupaten Belitung (*persen*)	70,00	15,02	Penanganan sampah masih dibawah target

Sumber : Hasil Analisa, 2021

4.2.7 Kebijakan pembangunan daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota. Dalam hal ini identifikasi kebijakan yang ditinjau adalah RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.

Kabupaten Belitung Timur merupakan Kabupaten pemekaran dari Belitung. Kabupaten Belitung Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung yang berada pada satu pulau yang sama yaitu pulau Belitong. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021, maka dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten Belitung Timur adalah Belitung

Timur yang Maju dan Unggul Berbasiskan Sumberdaya Lokal. Adapun misi yang disusun antara lain :

1. Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan.
2. Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
3. Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu dasar kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan suatu daerah adalah isu strategis. Beberapa isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Ketergantungan pada sektor primer masih besar;
2. Pertumbuhan ekonomi didorong konsumsi dan investasi;
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
5. Kualitas belanja pemerintah daerah kurang mendukung pertumbuhan;
6. Daya dukung lingkungan berkurang;
7. Belum optimalnya penerapan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menciptakan sinergisitas dan keharmonisan dalam pembangunan.

Memperhatikan Visi, Misi dan Isu strategis Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021, maka pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan dan konsep perencanaan antara Belitung dan Belitung Timur yang ingin mengedepankan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian utama guna meningkatkan dan menunjang perkembangan sektor perekonomian daerah. Penanggulangan kemiskinan juga menjadi perhatian daerah guna mendukung kebijakan nasional untuk mengurangi angka kemiskinan.

Untuk mempercepat perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Belitung Timur, fokus prioritas pembangunan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam RPJMD. Dalam menjalankan sasaran lima tahunan, maka prioritas pembangunan yang dirumuskan adalah :

1. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;

2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata, industri dan pelabuhan;
3. Penguatan kapasitas aparatur, tata kelola pemerintahan, dan kerjasama daerah;
4. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan permukiman;
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah dibidang pertanian dan perikanan;
6. Pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan investasi daerah, penguatan kapasitas UKM dan koperasi;
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
9. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Memperhatikan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur, maka sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung baik darat maupun laut, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung mempunyai kesamaan pemahaman terhadap prioritas pengembangan wilayah. Hal ini terlihat dari pengembangan pariwisata strategis yang menjadi salah satu prioritas pembangunan lima tahunan Kabupaten Belitung Timur. Hal ini tentunya bersinergi dengan prioritas pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung yang menjadikan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

4.2.8 Isu Strategis Daerah Kabupaten Belitung

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perbandingan dengan kabupaten sekitar, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Belitung, serta analisis kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, Isu strategis Kabupaten Belitung pada pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 sebagai berikut:

a. Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Transparan dan Bertanggung Jawab

Isu tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan bertangung jawab diangkat dari analisis masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hal ini disebabkan masih kurangnya cakupan pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan berbasis Teknologi Informasi, Masih lemahnya peran kelembagaan membangun jejaring lintas sektor baik secara horisontal dan vertikal, maupun dengan swasta dan masyarakat, Masih lemahnya peran kelembagaan dalam melakukan pengelolaan potensi sumber daya untuk

pembangunan berkelanjutan, kurang terkelolanya basis data dan informasi pembangunan daerah secara berkualitas. Kurangnya komitmen pemerintah terhadap konsensus yang ada untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. hal ini disebabkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang masih rendah dan belum berkualitas, masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan regulasi sesuai dengan prioritas pembangunan yang disepakati. Manajemen sumber daya manusia yang tidak terkelola dengan baik sesuai dengan kapabilitasnya yang disebabkan rendahnya kualitas tata kelola aparatur untuk peningkatan kapabilitas dan karir, rendahnya kualitas tata kelola sumber daya manusia untuk pengembangan endogenous development, Masih kurangnya transfer pengetahuan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada.

Isu tata kelola pemerintah yang bersih efektif, transparan dan bertanggung jawab berangkat juga dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, demokratis, dan terpercaya dalam upaya meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.

b. Infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian

Isu Strategis Infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian diangkat dari berbagai berbagai analisis yaitu kualitas fasilitas publik, infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian dalam menghadapi restrukturisasi global.

Kualitas untilitas pelayanan publik yang belum mumpuni yang disebababkan kondisi belum meratanya utilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, TPS 3R dan utilitas lainnya dan belum terintegrasinya utilitas sanitasi lingkungan secara terpadu dan efisien, serta belum meratanya tingkat kondisi jalan dan jembatan yang berkualitas.

Kurangnya lahan-milik pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana pemerintah dan sarana publik merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam membangunan infrastruktur dan utilitas daerah. Masih sulitnya konektifitas antar wilayah/pulau yang disebabkan belum meratanya jaringan telekomonikasi/Internet , listrik yang berkualitas. Dan masih kurangnya prasarana transportasi antar wilayah baik itu darat, laut maupun udara.

Isu strategis infrastruktur dan konektifitas untuk mendukung perekonomian berangkat merupakan upaya pemerintah untuk membangunan Indonesia dari pinggiran guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakan sektor-sektor ekonomi domestik. Isu infrastruktur dan konektifitas berangkat juga dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, dan menjamin seluruh penduduk untuk mendapat akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, tersedianya infrastruktur yang tangguh, dan upaya penyediaan permukiman kota dan permukiman manusia yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastrutur dan konektifitas akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial di masyarakat.

c. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah

Isu Strategis Peningkatan Ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan dari upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak. Peningkatan Ekonomi kerakyatan dengan menggerakan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dalam upaya peningkatan produktifitas masyarakat yang mempunyai daya saing di pasar internasional.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif

Isu Strategis Sumber daya Manusia yang kreatif, inovatif dan produktif diangkat dari analisis rendahnya kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif serta memiliki kearifan lokal baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Masih rendahnya produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah yang disebabkan masih rendahnya penguasaan keterampilan dan iptek oleh masyarakat dan pelaku pembangunan, tenaga kerja kurang berdaya saing/kompetitif sehingga menjadi tidak termanfaatkan (*under utilization*). Masih rendahnya kompetensi fungsional para pelaku pembangunan tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga ahli lainnya, kurangnya integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan urusan pelayanan publik. Masih rendahnya tingkat responsif masyarakat dalam menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan hal ini disebabkan belum terbukanya pola pikir masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang, masyarakat belum sepenuhnya terbuka dalam menerima hasil pembangunan daerah dan partisipasi aktif masyarakat dan kaum perempuan dalam pembangunan masih rendah.

Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia bidang pemerintahan dan pelayanan publik pendukung pembangunan daerah hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah aparatur sebagai pelaku pembangunan (bidang pariwisata, layanan publik dan tenaga ahli lainnya), masih rendahnya jumlah kelompok masyarakat sebagai penggerak sekaligus objek pendukung, masih terbatasnya jumlah kelompok masyarakat sebagai penggerak sekaligus objek pendukung pembangunan

Isu Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif juga berangkat dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat meningkatkan produktifitas rakyat untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat, menjamin pendidikan yang adil dan inklusif, meningkatkan kesempatan belajar, mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, menghapus segala bentuk kemiskinan dan mencapai kesejahtaeraan masyarakat, serta upaya untuk melakukan revolusi karakter bangsa.

e. Kabupaten Belitung sebagai kawasan strategis

Isu Kabupaten Belitung sebagai kawasan Strategis diangkat suatu peluang yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah. Tema Pembangunan wilayah sumatera yang ditetapkan didalam RPJMN yaitu Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan, merupakan suatu peluang yang harus diambil dalam upaya percepatan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Belitung.

f. Lingkungan hidup berkesinambungan

Isu strategis lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

4.3. Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Belitung, wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023. Kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2018-2023.

Kemudian rekomendasi integrasi KLHS dengan RPJMD ini terbagi menjadi rekomendasi berdasarkan pada daya tampung dan daya dukung daerah yangterdiri dari rekomendasi dengan upaya tambahan maupun tanpa upaya tambahan. Berikut rekomendasi dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan.

A. Rekomedasi daya tampung dan daya dukung daerah dengan upaya tambahan

1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dengan rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir tahun 2021 adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban pelaku usaha untuk mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, meningkatkan kepersertaan BPJS mandiri bagi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan melalui sosialisasi dan pendampingan serta meningkatkan jumlah penerima KIS bagi kelompok masyarakat miskin sedangkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga tahun 2023 maka rekomendasinya adalah membuat program subsidi iuran BPJS bagi masyarakat miskin dengan biaya dari APBD Kabupaten Belitung.

2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukanPLN dengan rekomendasi program dilaksanakan.
3. Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah dengan rekomendasi program dilaksanakan.
4. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir tahun 2021adalah melengkapi dan memutakhirkan peta wilayah rawan bencana setiap tahun serta menyusun dokumen strategi pengurangan resiko bencana tingkat kabupaten dan kecamatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sedangkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga 2023 adalah menyusun strategi pengurangan resiko bencana sosial pandemi covid-19 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemrintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan dengan rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir di tahun 2021 adalah Program pemberantasan kemiskinan diarahkan kepada usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan penerima program, sehingga mandiri dan tidak tergantung lagi pada program bantuan.dan Meningkatkan peran pihak lain (filantropi, ormas, pelaku usaha) dalam pengentasan kemiskinan sedagkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga tahun 2023 rekomendasinya adalah Meningkatkan anggaran untuk program bantuan sosial masyarakat miskin terdampak covid-19 serta Fokus pembangunan pada peningkatan ekonomi di sektor yang relatif tidak terpengaruh pandemic covid-19 yaitu sektor pertanian/perkebunan dan kelautan serta perikanan untuk mengurangi petani dan nelayan miskin.
6. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalnece of Undernourishment*) dengan rekomendasi program dilaksanakan.
7. Prevalensi kekurangan gizi (*undeweight*) pada anak balita dengan rekomendasi program dilaksanakan.
8. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan dengan rekomendasi program dilaksanakan.
9. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan rekomendasi program dilaksanakan.

10. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan dengan rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir di tahun 2021 adalah Menyusun dan melaksanakan program-program yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragaman, Menjaga ketersediaan pangan terutama sumber protein dan lemak dengan harga yang stabil dan terjangkau serta Menjaga ketersediaan dan kestabilan ikan laut dan air tawar sedangkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga tahun 2023 rekomendasinya adalah Menyusun strategi untuk menjamin kelancaran pasokan pangan seperti beras, telur, daging, syauran dan buah dan menjaga harga agar tetap stabil di masa panedmi.
11. Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) dengan rekomendasi program dilaksanakan.
12. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir tahun 2021 adalah Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan (praktik bidan, rpuskesmas, dan rumah sakit), Menyusun dan melaksanakan program layanan ibu melahirkan berbasis masyarakat (penyediaan transportasi, akses ke faskes, dan bantuan biaya) pada tingkat desa/kelurahan, Program pengadaan bidan desa secara merata di seluruh desa di Kabupaten Belitung serta Mempermudah akses dan layanan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin yang menggunakan KIS dan BPJS kesehatan sedangkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga tahun 2023 rekomendasinya adalah Meningkatkan porsi penerima KIS bagi rumah tangga miskin.
13. Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup dengan rekomendasi mempertahankan kinerja
14. Angka kematian nasional (AKN) per 1000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Menggiatkan kembali pelayanan Posyandu untuk layanan ibu ante natal dan pemantauaun bayi neonatal serta Peningkatan layanan terhadap ibu dan balita dari kelompok masyarakat tidak mampu dan berisiko saat melahirkan di layanan kesehatan primer melalui KIS dan BPJS Kesehatan.

15. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Penguatan Puskesmas dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
16. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan rekomendasi Melaksanakan program imunisasi dasar lengkap pada bayi sebagai bagian dari layanan Posyandu di setiap kelurahan/desa dan Melaksanakan program sosialisasi manfaat imunisasi ke ibu ibu hamil diPuskesmas dan rumah sakit.
17. Insiden tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk dengan rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir tahun 2021 adalah Mengintensifkan pelacakan penderita TB paru melalui psukesmas serta Program edukasi/kampanye terhadap masyarakat untuk menghindari prilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular TB paru melalui media social dan penyuluhan langsung sedangkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga tahun 2023 rekomendasinya adalah Mengedukasi penderita TB paru yang sedang dalam masa penyembuhan untuk disiplin menerapkan protocol COvid-19.
18. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun dengan rekomendasi program dilaksanakan.
19. Prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan rekomendasi melaksanakan program.
20. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan rekomendasi Mengintensifikan dan membuat inovasi program penyuluhan kepada pasangan muda dan Program pemberian penghargaan kepada pasangan yang ber-KB dalam jangka waktu tertentu.
21. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern dengan rekomendasi Mengintensifikan dan menginovasi program penyuluhan kepada pasangan muda untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran dan Program pemberian penghargaan kepada pasangan yang ber-KB dalam jangka waktu tertentu.
22. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*age specific /ASFR)* dengan rekomendasi melakukan sosialisasi tentang bahaya menikah muda.

23. *Total fertility rate* (TFR) dengan rekomendasi melaksanakan program.
24. *Unmet need* pelayanan kesehatan dengan rekomendasi melaksanakan program.
25. Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan rekomendasi membina dan memfasilitasi perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam JKN, program subsidi iuran BPJS Kesehatan kepada masyarakat pra sejahtera serta program penyuluhan untuk menignkatkan peserta BPJS Kesehatan mandiri bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi
26. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun dengan rekomendasi melaksanakan program.
27. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dengan rkomendasi Dinas Kesehatan meningkatkan anggaran pengadaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan, memperbaiki manajemen pengadaan dan distribusi obat dan vaksin ke fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten agar merata dan tersedia secara kontinyu.
28. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat dengan rekomendasi perlu upaya lebih intensif untuk menignkatkan kesadaran orangtua pentingnya bersekolah bagi masa depan anak serta melalui Dinas Pendidikan dan pemerintah desa/kelurahan mendata jumlah anak putus sekolah SD/MI dan membantu biaya sekolah bagi masyarakat kelompok pra sejahtera.
29. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan rekomendasi mendirikan dan membantu anggaran PAUD minimal 1 desa 1 PAUD serta program edukasi pada orang tua terkait pentingnya pendidikan usia dini bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
30. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan rekomendasi menjalankan program.
31. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun dengan rekomendasi menggalakkan program wajib belajar 9 tahun serta menggalakkan pendidikan informal (Paket A, B dan C).
32. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik dengan rekomendasi peningkatan alokasi anggaran untuk tunjangan sertifikasi guru TK, pelatihan dan bimbinga bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi pendidik serta menambah formasi peserta sertifikasi pendidik guru TK.
33. Jumalh kebijakan yang legal gender mendukung pemberdayaan perempuan dengan rekomendasi melaksanakan program.

34. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 14-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dengan rekomendasi melaksanakan program.
35. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 14-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dengan rekomendasi melaksanakan program.
36. Proporsi perempuan umur 20-24tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun dengan rekomendasi melaksanakan program.
37. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun dengan rekomendasi melaksanakan program.
38. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR)* dengan rekomendasi melaksanakan program.
39. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah dengan rekomendasi melaksanakan program.
40. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial dengan rekomendasi menjalankan program untuk setiap OPD wajib memiliki persentase perempuan yang menduduki posisi managerial sebesar 30%.
41. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuta keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi dengan rekomendasi Mengintensifikan dan menginovasi program penyuluhan kepada pasangan untuk melakukan KB mandiri serta Program pemberian penghargaan kepada pasangan yang ber-KB dalam jangka waktu tertentu.
42. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dengan rekomendasi melaksanakan program.
43. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dengan rekomendasi Meingkatkan alokasi anggaran dan target capaian program sanitasi masyarakat serta Bekerjasama dengan pihak terkait (LSM, ormas, perguruan tinggi, perusahaan) untuk membangun sanitasi layak.
44. Jumlah desa/kelurahan yang *open defecation free* (ODF)/stop buang air besar sembarangan (SBS) dengan rekomendasi Melaksanakan sosialisasi di posyandu, puskemas dan di desa tentang bahaya buang air besar, Pendirian

WC Umum, Pendirian WC pribadi dengan sistem sokongan/arisan serta Insentif bagi yang buang air tidak sembarangan, dan disinsentif bagi yang buang air sembarangan.

45. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat dengan rekomendasi Membuat inovasi sanitasi masyarakat secara terpusat berdasarkan zona/blok permukiman serta Meningkatkan alokasi dana untuk program sanitasi masyarakat.
46. Laju pertumbuhan PDB per kapita dengan rekomendasi melaksanakan program.
47. PDB per kapita dengan rekomendasi melaksanakan program.
48. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun dengan rekomendasi Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pembayaran upah pekerja, Penegakan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan pengupahan pekerja serta Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan ekonomi daerah.
49. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dengan rekomendasi melaksanakan program.
50. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan dengan rekomendasi melaksanakan program.
51. Upah rata-rata per jam pekerja dengan rekomendasi Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pembayaran upah pekerja, Penegakan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan pengupahan pekerja serta Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan ekonomi daerah.
52. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dengan rekomendasi Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan sektor pariwisata terutama pelaku suaha wisata seperti biro perjalanan, transportasi, kuliner, dan hotel, sehingga akan menambah peluang bekerja bagi anggota masyarakat pencari kerja, Membuat kebijakan yang mendorong invstasi di sector selain pariwisata dan tambang, seperti perikanan, pertanian, dan industry kreatif , Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan sektor pariwisata, dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran covid-19 serta Membuat kebijakan yang mendorong sector-sektor usaha yang tidak terlalu berdampak oleh pandemic covid-19, seperti perikanan, pertanian/perkebunan, dan jasa.

53. Tingkat setengah pengangguran dengan rekomendasi Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan sektor pariwisata terutama pelaku suaha wisata seperti biro perjalanan, transportasi, kuliner, dan hotel, sehingga akan menambah peluang bekerja bagi anggota masyarakat yang setengah pengangguran serta Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan sektor pariwisata, dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran covid-19.
54. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB dengan rekomendasi Mengadakan event tahunan untuk menarik minat kunjungan wisatawan, Memperbaiki faslilitas dan layanan di destinasi wisata dan pendukungnya, Mengintesnifkan layanan pajak dan retribusi sector pariwisata seperti tempat hiburan, hotel, dan restoran, Bekerjasama dengan biro perjalanan untuk mempromosikan destinasi wisata Belitung serta Membuat kebijakan yang menrangsang pemulihan sektotr pariwisata, dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran covid-19.
55. Jumlah wisatawan mancanegara dengan rekomendasi Mengadakan event tahunan untuk menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara, Memperbaiki faslilitas dan layanan di destinasi wisata dan pendukungnya, Bekerjasama dengan biro perjalanan untuk mempromosikan destinasi wisata Belitung serta Meningkatkan promosi wisata dengan penerapan prokol kesehatan yang ketat.
56. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan rekomendasi Mengadakan event tahunan untuk menarik minat kunjungan wisatawan nusantara, Memperbaiki faslilitas dan layanan di destinasi wisata dan pendukungnya, serta Meningkatkan promosi wisata dengan penerapan prokol kesehatan yang ketat.
57. Jumlah devisa sektor pariwisata dengan rekomendasi menjalankan program.
58. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit dengan rekomendasi menjalankan program.
59. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita dengan rekomendasi menjalankan program.
60. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri dengan rekomendasi melaksanakan program.
61. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit dengan rekomendasi melaksanakan program.
62. Koefisien Gini dengan rekomendasi menjalankan program.

63. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan dengan rekomendasi Memasang sistem peringatan dini bencana di wilayah yang rawan bencana.
64. Persentase sampah perkotaan yang tertangani dengan rekomendasi menjalankan program.
65. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan rekomendasi Menyusun dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
66. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dengan rekomendasi menjalankan program.
67. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
68. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dengan rekomendasi melaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan anak serta melakukan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan.
69. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dengan rekomendasi melaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, penegakan aturan tentang kekerasan seksual serta pendampingan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan seksual.
70. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah dengan rekomendasi Program layanan pembuatan akte kelahiran online gratis bekerjasama dengan rumah sakit, puskesmas dan klinik bersalin.
71. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan rekomendasi mengalokasikan anggaran untuk pelatihan sertifikasi PPID.
72. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dengan rekomendasi menjalankan program.
73. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan rekomendasi Mengintensifkan edukasi kesadran membayar pajak ke masyarakat serta Pemberian insentif bagi pelaku usaha untuk memulihkan usaha yang terdampak pandemi.

74. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik dengan rekomendasi Mengintensifkan edukasi kesadran membayar pajak ke masyarakat serta Pemberian insentif bagi pelaku usaha untuk memulihkan usaha yang terdampak pandemi.
75. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband dengan rekomendasi Mengintensifkan kerjasama dengan penyedia provider mobile broadband agar seluruh wilayah tercover jaringan serta Memasang jaringan wifi di perkantoran dan faslitas umum, terutama di desa-desa.
76. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan rekomendasi melaksanakan program.

B. Rekomendasi tanpa upaya tambahan serta untuk indikator yang sudah dilaksanakan

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan rekomendasi apabila pandemi covid-19 berakhir tahun 2021 adalah Mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan, dan pertanian/perkebunan untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui bantuan sarana dan prasarana produksi dan menjaga stabilitas harga produk di tingkat petani dan nelayan, Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada seluruh layanan wisatawan, Meningkatkan bantuan permodalan kepada UMKM untuk memulai kembali usaha yang terkena dampak pandemic covid-19, Memprioritaskan anggaran pembangunan yang bersifat fisik yang melibatkan banyak tenaga kerja serta Meningkatkan efektivitas pemberian bantuan sosial mayarakat terdampak covid-19 terutama kelompok masyarakat miskin sedangkan apabila pandemi covid-19 berlanjut hingga tahun 2021 amaka rekomendasinya adalah . Meningkatkan anggaran untuk program bantuan sosial masyarakat miskin terdampak covid-19, Fokus pembangunan pada peningkatan ekonomi di sektor yang relatif tidak terpengaruh pandemic covid-19 yaitu sektor pertanian/perkebunan dan kelautan serta perikanan dan Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penularan covid-19 melalui pendekatan sosial dan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protocol kesehatan.

2. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
3. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
4. Pendampingan psikososial korban bencana sosial dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
5. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
6. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
7. Prevalensi anemia pada ibu hamil dengan rekomendasi Menggiatkan kembali pelayanan Posyandu untuk pemeriksaan ruitn ibu hamil sebelum melahirkan ante natal care/ANC) serta Pemberian vitamin dan zat besi di posyandu dan puskesmas.
8. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan rekomendasi Menggiatkan kembali pelayanan Posyandu untuk pelyanan ibu hamil sebelum melahirkan (*ante natal care*/ANC), Peningkatan layanan terhadap ibu melahirkan dari kelompok masyarakat tidak mampu di layanan kesehatan primer melalui KIS dan BPJS Kesehatan serta Tetap mempertahankan program dan anggaran untuk mengurangi AKI.
9. Prevalensi HIV pada populasi dewasa dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
10. Kejadian Malaria per 1000 orang dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
11. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
12. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
13. Persentase merokok pada penduduk umur 10-18 tahun dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
14. Prevalensi tekanan darah tinggi dengan rekomendasi mempertahankan kinerja dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
15. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.

16. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
17. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
18. Proporsi kematian akibat keracunan dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
19. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
20. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
21. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
22. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
23. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) 320llegal320 untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, € air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
24. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
25. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
26. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
27. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
28. Persentase tenaga kerja formal dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
29. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.

30. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
31. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
32. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
33. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
34. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
35. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
36. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
37. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
38. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui dengan rekomendasi melengkapi data dan menentukan target serta mengadopsi indikator.
39. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
40. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
41. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
42. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
43. Proporsi individu yang menggunakan internet dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.
44. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*) dengan rekomendasi mempertahankan kinerja.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2023, yaitu :

"Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023"

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

a. **Ekonomi Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
b. **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulann dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
c. **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

Penetapan visi kabupaten di atas telah mempertimbangkan, memperhatikan dan mengacu kepada substansi yang terdapat didalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumberdaya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat". Dari visi tersebut terdapat enam 6 (enam) nilai penting (*value of vision*) yang diharapkan dapat menjadi ruh atau jiwa dari visi yang akan disusun. Keenam nilai penting visi tersebut adalah mandiri, produktif, optimal, terpadu, berkelanjutan dan sejahtera.

Nilai visi "mandiri" berasal dari adanya harapan masyarakat agar sumber daya yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Belitung di masa mendatang, khususnya perikanan dan pariwisata yang ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Selanjutnya visi "produktif" terungkap dari hasil musrenbang RPJPD yang sangat berharap agar keberadaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Belitung dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Kemudian visi "optimal" berasal dari adanya keinginan masyarakat agar sumber daya alam dan jasa lingkungan Kabupaten Belitung dapat memberikan keuntungan maksimal bagi mereka.

Untuk visi "terpadu" berasal dari adanya keinginan masyarakat agar pembangunan daerah Kabupaten Belitung adalah menjadi tanggung jawab bersama dan dapat dilakukan secara bersama. Visi "berkelanjutan" diartikan sebagai sebuah sifat yang menandakan bahwa sesuatu itu dapat dimanfaatkan pada masa kini dengan tidak mempengaruhi secara signifikan manfaat di masa mendatang. Terakhir, nilai visi "sejahtera" mengandung makna bahwa masyarakat dapat hidup secara layak di wilayah Kabupaten Belitung.

Dari penjelasan visi RPJPD diatas terlihat ada keselarasan dengan visi RPJMD dimana 'ekonomi berkeadilan' dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat sehingga dapat memenuhi akses seluruh sumber daya dan menjadi produktif, optimal

dan terpadu yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.

5.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:



Penjelasan Misi:

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang

kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompettitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 memiliki 3 (tiga) bangunan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Belitung, yaitu sebagai berikut :

a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah.
c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

Ketiga misi RPJPD diatas terlihat saling berkesinambungan dengan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana sudah dijabarkan sebelumnya. Pada misi kesatu RPJMD yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dapat diartikan seperti dalam misi kedua RPJPD, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah. Demikian juga dengan misi kedua RPJMD yang mengedepankan pada pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Sementara itu, misi ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mencakup misi satu dan misi tiga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah jelas mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan,

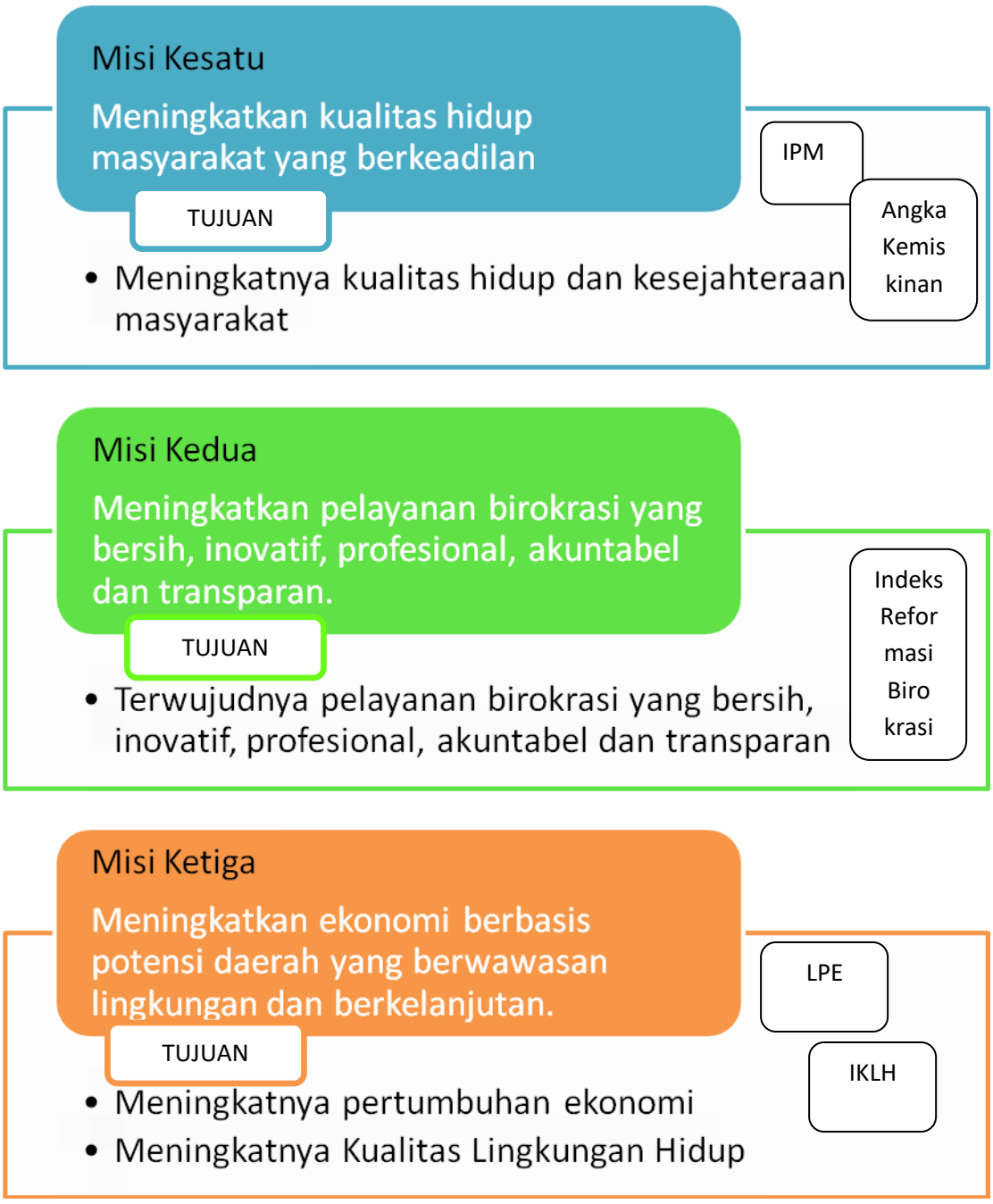
penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi sampai dengan tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia, juga terjadi di Kabupaten Belitung. Kondisi perekonomian Indonesia yang diindikasikan oleh beberapa indikator makro mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini menyebabkan Pemerintah melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021, yang berbeda angkanya dengan target indikator makro yang telah ditetapkan di RPJMN Tahun 2020-2024. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan (minus) sebesar 2,07 persen (y-on-y).

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2018- 2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah.

Indikator makro Kabupaten Belitung ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional, target indikator makro provinsi dan kemampuan Kabupaten Belitung dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Kabupaten Belitung berdasarkan publikasi BPS.

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sapai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut :



Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Untuk pencapaian :



Tujuan Pertama
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

Kesatu	• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
Kedua	• Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
Ketiga	• Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita
Keempat	• Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam • Pembangunan	Status desa "Maju"



Tujuan Kedua
Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan

SASARAN

Kesatu	• Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Nilai SAKIP
Kedua	• Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN
Ketiga	• Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat • yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat



Tujuan Ketiga
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

SASARAN

Kesatu	• Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan
Kedua	• Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB
Ketiga	• Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Usaha Mikro Nilai Omset Koperasi
Keempat	• Meningkatnya investasi	Nilai investasi
Kelima	• Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan



Tujuan Keempat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

SASARAN

Kesatu	• Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan • tutupan lahan	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
Kedua	• Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah ini selain merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati juga telah disempurnakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, meliputi

1. Akses pendidikan untuk semua

   Prioritas pembangunan pendidikan difocuskan kepada pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan sehingga mampu memenuhi atau mencapai standar pendidikan (SNP) yang meliputi komponen standarisi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Memberikan memberikan layanan pendidikan datam upaya mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional.

2. Pelayanan kesehatan terintegrasi

   Prioritas pembangunan kesehatan terintegrasi difokuskan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh Segenap anggota masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan ketersediaan dan pernanfaatan sarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi kesehatan dan memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak ketiga lintas sektoral, dan meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat

   Peningkatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, meningkatkan sumberdaya kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga non medis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

   Perwujudan dari pelayanan kesehatan terintegrasi ini dalam bentuk inovasi yaitu SEHATI (sistem Kesehatan Terintegrasi) serta Pelanduk (Pelayanan Medik untuk Kampung) Dengan adanya program SEHATI ini sistem pelayanan sudah terintegrasi dengan instansi terkait dan dalam pelaksanaannya program ini memberikan pendampingan kepada pasien rujukan keluar daerah lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti mobil penjemputan di Bandara Soekarno Hatta sampai pemberian uang saku. Program Pelanduk ini mengadopsi

kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkannya pelayanan kesehatan secara prima gratis 24 jam dan terintegrasi dengan Call Center 119 dan kartu SEHATI.

3. Infrasturktur dan konektifitas daerah

   Prioritas pembangunan Infrastruktur dan konektifitas difocukskan untuk meningkatkan aksessibilitas wilayah di Kabupaten Belitung, meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana tranportasi guna menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal di Kabupaten Belitung, Peningkatan management pemeliharaan Jaringan jalan, lnventarisasi, evaluasi dan perencanaan sistim iaringan transportasi, peningkatan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, industri dan kawasan pariwisata

   Peningkatan infrastuktur Pertanian berupa jaringan irigasi sistem jaringan irigasi dalam upaya menunjang ketahanan pangan daerah

   Peningkatan penataan ruang dengan menjadikan tata ruang menjadi salah satu pedoman pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi rnasyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelenggarakan pengendal ian pemanfaatan ruang yang efektif. Membentuk kelambagaan penataan ruang.

   Keselarasan perencanaan tataruang Provinsi dan tata ruang kabupaten dan pemanfaatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Raperda **RZWP3K**) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Inovasi pelayanan publik dan birokrasi

   Prioritas Pembangunan inovasi pelayanan publik dan birokrasi bertujuan untuk mewuiudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Mengefektifkan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif

   Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha,dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemeliharaan sarana dan prasaran publik, pengembangan sistem dan prosedur pelayanan publik serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.

Salah satu bentuk dari inovasi pelayanan publik dan birokrasi adalah inovasi Besadu (Belitung Saluran Aspirasidan Pengaduan). Layanan BESADU ini merupakan media pengaduan yang menjadi wadah untuk menampung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai pelayanan publik yang prima dan efektif melalui aplikasi berbasis teknologi.

5. Pengembangan ekonomi lokal

   Prioritas pengembangan KUMKM dan Koperasi bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing KUMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan para pengusaha/calon pengusaha, peningkatan produktifitas, peningkatan ragam produk-produksi unggulan dan meningkatnya unit koperasi yang mandiri dan maju. Memberikan kemudahan bagi KUMKM yang beorientasi Export; mendorong KUKM menciptakan produk substitusi impor, memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas KUMKM memberikan fasilitas akses permodalan dan tehnologi bagi KUMKM dan - Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia KUMKM.

   Meningkatkan kualitas dan keberagaman investasi di berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi daerah dan menjadikan investasi sebagai pemicu perkembangan sektor hulu dan sektor hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas investasi dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif

6. Pengembangan sektor perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

   Prioritas pengembangan sektor perikanan adalah Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melakukan pemulihan dan perlindungan potensi sumberdaya kelautan dan paikanan beserta ekosistemnya. Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatnya Pelayanan lnformasi Perikanan dan Kelautan kepada masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Meningkatkan keterkaitan sektor perikanan kelautan dengan lapangan usaha di sektor lain. Pengembangan usaha ekonomi perikanan produktif, Pengembangan riset dan teknologi perikanan dan kelautan; Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, mengembangkan dan menerapkan teknologi serta sistem informasi perikanan dan kelautan.

7. Pengembangan budaya dan kearifan lokal

   Prioritas pembangunan pengembangan budaya dan kearifan lokal difokuskan kepada meningkatkan apresiasi masyarakat, termasuk aparat pemerintah terhadap aset budaya serta meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya, sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalarn pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya dengan melakukan Penguatan Lembaga Adat dalam meningkatkan pengetahuan dan kearifan lokal. Melakukan Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nila tradisionil, pengembangan peran serta masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan aset budaya - Peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya, meningkatkan promosi Budaya, melestarikan Cagar Budaya sebagai asset bernilai tinggi dan objek pariwisata yang potensial.

8. Pengembangan Pariwisata

   Prioritas pembangunan Pariwisata difokuskan pada pengembangan 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangan potensi desa menjadi potensi wisata (PROGRAM TUSENA), pengembangan Geopark Belitong untuk mendukung perkembangan KSPN dan KEK Tanjungkelayang, pengembangan lokasi utama perhutanan sosial. Sektor pariwisata ini merupakan unggulan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan wilayah sebagai transformasi dari sektor pertambangan.

9. Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19

   Prioritas pembangunan daerah akan mendorong kepada proses inovasi dan transpormasi membangun Kabupaten Belitung, seperti yang diharapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam kampanye pemilihan Bupati Belitung.

   Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil

persandingan prioritas nasional (PN) dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN dan RPJMD Provinsi Kepulaluan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung, sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam pembangunan yang akan dibagi kedalam beberapa cluster, diantaranya adalah :

a. Cluster I

Cluster I ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023.

Pariwisata merupakan core bisinis dari kabupaten belitung yang memberikan stimulus bagi seluruh sektor pembangunan. Pariwisata memberikan efek domino dan timbal balik terhadap sektor- sektor lainnya. Sejak terjadinya transisi pembangunan kabupaten belitung dari pertambangan ke pariwisata , sektor ini menjadi sektor yang paling diharapkan untuk mendorong seluruh sektor pembanguan daerah.

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Belitung, Pariwisata merupakan sektor unggulan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata akan mendorong produksi sektor pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuan lokal daerah, di mana mengurangi ketergantungan pasokan produksi pertanian dari luar daerah khususnya pangan yang dapat diproduksi lokal. Potensi pertanian agrikultur dan pertanian lainnya juga menjadi atraksi wisata yang dapat dikembangkan berupa agriwisata. Begitu juga dengan perikanan, menjadi sektor yang akan turut bertumbuh dengan berkembangnya kuliner dan kebutuhan bahan baku untuk pengrajin makan ringan yang terus bertambah akibat makin banyaknya pelancong pariwisata. Sektor ini pun menjadi suatu atraksi wisata yang juga sangat menarik untuk dikembangkan.

Sejalan dengan itu pengembangan usaha mikro menjadi lebih terpacu dengan adanya peningkatan kunjungan wisata, tumbuhnya usaha-usaha mikro di daerah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik bagi penduduk lokal maupun bagi wisatawan. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk turut membangun pariwisata melalui usaha mikro dan selanjutnya akan memacu pertumbuhan koperasi-koperasi di daerah.

Pembangunan pariwisata menjadi titik pokok pelaksanaan investasi daerah, dengan ditetapkannya KSPN dan KEK, merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Belitung baik sekali kecil maupun skala besar, baik di sektor jasa pariwisata maupun di sektor sektor lainnya selain pariwisata.

Pembangunan Infratruktur yang baik dan memenuhi standar menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan mobilitas dan aksebilitas pariwisata dan meningkatkan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa jalan dan jebatan saja tetapi semua infrasturtur ekonomi masyarakat, yang meningkatkan aksebilitas dan kemudahan berusaha. Pembangunan infrastruktur diarahkan sinergi dengan pembangunan pariwisata dengan membuat bangunan iconik pariwisata yang menjadi atraksi bagi pariwisata.

Pengembangan pariwisata berupa peningkatan aktraksi dan dan amenitas pariwisata di seluruh sektor, saling berterkaitan dan saling mendukung kenyamana wisatwan dalam melakukan aktivitasnya, pembangunan sumber daya manuasi pariwisata , masyarakat sadar wisata, dan komunitas-komunitas masyarakat berbasis pariwisata di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Pembangunan objek wisata baik yang dikembangkan oleh masyarakat atau pun pihak-pihak pengembang pariwisata terus dibina dan diarahkan untuk memenuhi kepada pelayanan yang baik dan memenuhi standar pelayanan pariwisata.

b. Cluster II

Cluster I ini masuk dalam misi ke-1 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023.

Pembangunan pariwisata tidak hanya pada pengembangan pada cluster pertama atau cluster ekonomi, tetapi harus didukung juga dengan cluster kedua yaitu sebagai berikut

Sektor kesehatan, merupakan sektor penunjang tidak langsung dari pembangunan pariwisata karena daera tujuan yang sehat tentunya akan membuat wisatawan menjadi lebih tertarik, apalagi perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat menjadi faktor pendukung pariwisata apalagi di masa pandemi saat ini.

Kesehatan mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor pariwisata, karena infrastruktur kesehatan menjadi faktor utama ketertarikan wisatwan khususnya mancanegara untuk menjamin keselamatan dan kenayaman dalam berwisata.

Pendidikan menjadi sektor yang sanagat menentukan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan memliki moral dan prilaku yang baik, pendididkan karakter bangsa, sebagai identitas bangsa, dan identitas daerah menjadi faktor pendukung pembangunan pariwisata. Manusia yang cerdas dan kreatif dibentuk dari pendidkan yang baik.

Peningkatan daya beli masyarakat, dengan pembangunan pariwisata akan meningkatkan daya beli masyarakat, karena semakin banyaknya peluang kerja dan peluang berusaha di masyarakat. Pembangunan Pariwisata akan mengurangi penganguran.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembanguna pariwisata meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat baik di desa untuk menjadikan desa – desa yang maju dan mandiri.

c. Cluster III

Cluster III ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023.

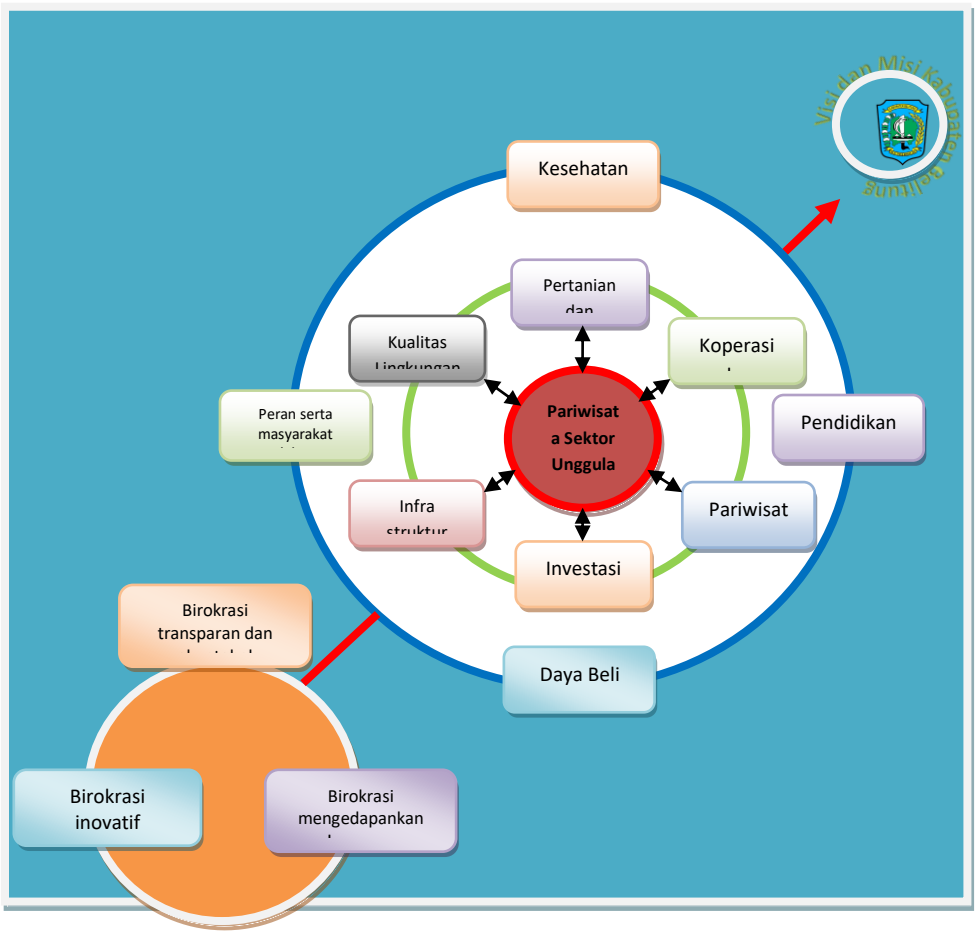
Birokrasi yang bersih inovatif dan profesional, akuntabel dan trasnparant. Menjadi pendorong bagi pengambangan cluster I dan cluster II, pemerintah yang baik, mejadi pemicu dari cluster I dan cluster II.

Aparatur negara menjadi birokrasi yang bersih dan transparat serta akuntabel dalam melaksanakan pembangunan daerah akan mendorong seluruh sektor dengan komitmen yang baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pembanguna daerah.

Apratur daerah yang profesional dalam melaksanakna tugas-tugasnya dan selalu berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan pembanguna daerah untuk mencai visi dan misi daerah.

Apatur yang selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh *stake holder* masyarakat.

Pada suatu saat *cluster* ketiga ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ring pembangunan pariwisata, di mana aparatur Kabupaten Belitung dengan inoovasi-inovasinya akan menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk selalu mencari tahu dan datang ke Belitung untuk melakukan study tentang pelayanan publik yang baik.



Gambar 5.1 Pola Keterkaitan Rencana Pembangunan di Kabupaten Belitung

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini akan dirumuskan mengenai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Visi dari Kabupaten Belitung adalah **Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023**. Berikut akan dijabarkan mengenai strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berupa rumusan perencanaan komprehensif berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta target kinerja RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah, dipisah menjadi 2 (dua), yaitu 1) Perencanaan Strategis, merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; 2) Perencanaan Operasional, merupakan perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan secara lebih rinci pada tiap urusan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Dalam penentuan alternatif strategi untuk pencapaian setiap indikator sasaran dirumuskan dan diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal. Analisis yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT, dijabarkan dalam tabel berikut ini:

INTERNAL	***Strength (Kekuatan)***	***Weakness (Kelemahan)***
	1. Potensi wisata alam yang indah dan berkualitas 2. *Resources Endowments* (alam, budaya, masyarakat) 3. Akses perhubungan udara dan laut yang baik dan mudah (bandara dan pelabuhan berstatus internasional) 4. Letak geografis yang strategis 5. Kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan politik yang aman dan kondusif	1. Degradasi nilai budaya dan moral masyarakat 2. Kreatifitas dan partisipasi masyarakat masih rendah 3. Tingkat pendidikan dan disiplin masih rendah 4. Tata kelola aparatur dan kinerja masih belum optimal 5. Kurangnya fasilitas umum dan hiburan, juga untuk difabel, anak, wanita dan lansia 6. Kurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau 7. Kurangnya fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas keamanan wisatawan 8. Kurangnya atraksi wisata (kuliner, oleh-oleh dan atraksi lainnya) 9. Kurangnya sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan pulau 10. Masih lemahnya jaringan komunikasi untuk penyebaran data dan informasi publik 11. Layanan kesehatan belum berkualitas 12. Terbatasnya sumber air baku 13. Kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang tumpang tindih 14. Ketergantungan bahan pangan dari daerah luar 15. Maraknya penyakit sosial
EKSTERNAL	***Opportunity (Peluang)***	***Threat (Ancaman)***
	1. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat 2. Berkembangnya wisata MICE dan wisata halal 3. Belitung merupakan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KPPN, KI, UGG, Perhutanan sosial) 4. Bukan merupakan daerah rawan gempa dan gunung berapi 5. Banyaknya dana desa 6. Pangsa pasar dalam dan luar negeri (MEA), serta pemasaran online 7. Regulasi investasi yang mendukung	1. Meningkatnya permasalahan sosial (penyakit mental, sosial, narkoba, LGBT, kriminalitas, konflik, pengangguran) 2. Banyaknya migrasi penduduk 3. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor 4. Rusaknya kondisi alam, lingkungan dan ekositem (emisi gas rumah kaca, tambang, alih fungsi lahan) 5. Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam (abrasi, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, petir) 6. Maraknya perdagangan online dan *cyber crime* 7. Diberlakukannya perdagangan bebas 8. Adanya Pandemi Covid-19

Gambar 6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan identifikasi dan analisis SWOT sebagaimana dijabarkan di atas, maka strategi yang dapat dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal wilayah Kabupaten Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi kepala daerah dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

VISI : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung 2023

Misi / Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan		
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
		2. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
		3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
		4. Meningkatkan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat
	2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	5. Meningkatkan akses pendidikan
	3. Meningkatnya daya beli masyarakat	6. Perluasan kesempatan kerja
		7. Mengurangi beban pengeluaran
	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	8. Meningkatkan partisipasi masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan		
Tujuan 1 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	5. Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	9. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		11. Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
	6. Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	12. Meningkatkan kapabiliitas dan integritas aparatur
	7. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	13. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		
Tujuan 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	8. Meningkatnya pengembangan pariwisata	14. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
	9. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	15. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
		16. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
	10. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	17. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro
	11. Meningkatnya investasi	18. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri
	12. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	19. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		20. Pemenuhan kebutuhan air baku
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	21. Meningkatkan pengelolaan kuallits lingkungan hidup
	14. Meningkatnya pengelolaan sampah	22. Meningkatkan pengelolaan persampahan

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, rumusan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

STRATEGI 1 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat ini, yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang saling terintegrasi, sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Program Sehati (Sistem Pelayanan Terintegrasi) dan Program Pelandok (Pencet Telepon dan Dokter Langsung Bergerak). Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat ternasuk didalamnya pelayanan kesehatan ibu diharapkan akan berdampak terhadap penurunan Angka

Kematian Ibu salah satunya melalui Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung).

STRATEGI 2 : Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga, dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri serta berperan aktif mewujudkan kesehatan masyarakat. Pola perilaku hidup bersih dan sehat ini diarahkan pada pengurangan kawasan kumuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman. Selain itu juga peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat berdampak pada penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan *stunting* sebagai pengimplementasian Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung). Strategi ini juga diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat daam berolahraga sehingga dapat tercapai peningkatan prestasi olahraga dengan semakin intensifnya pembinaan sesuai program kepala daerah SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga).

STRATEGI 3 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif dalam laju pertumbuhan penduduk, ketika laju pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya penekanan jumlah penduduk. Adanya peningkatan kuantitas penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk. Pemerintah sebagai *policy maker* harus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana.

STRATEGI 4 : Meningkatkan akses pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam suatu Negara. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung suatu Negara untuk maju. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususunya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia. Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan menigkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah. Selain itu juga meningkatkan akreditasi sekiolah dan kualitas SDM pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada penguatan karakter dan akhlak. Dengan mutu pendidikan pendidikan yang baik, diharapkan dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing.

STRATEGI 5 : Perluasan kesempatan kerja

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Belitung, karena mampu menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Perluasan kesempatan kerja diarahkan melalui peningkatan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata, serta pemberdayaan sosial masyarakat miskin.

STRATEGI 6 : Mengurangi beban pengeluaran

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Masih tingginya kemiskinan di Kabupaten merupakan fenomena yang harus segera diatasi supaya kesejahteraan masyarakat terwujud. Kemiskinan terjadi disebabkan karena masih rendahnya tingkat keterampilan msayarakat, sulitnya mendapatkan akses pelayanan publik yang layak serta masih tingginya pengeluaran masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pengeluaran beban masyarakat miskin ini diarahkan untuk memenuhi jaminan

kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu. Hal ini mengakomodir salah satu dari 16 (enam belas) program inovatif kepala daerah, yaitu program SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga). Serta meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan untuk meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.

STRATEGI 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasi masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam pembangunan daerah. Tingginya peran serta masyarakat dapat mewujudkan tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, serta meningkatkan peran kelembagaan di desa untuk mengakomodir program kepala daerah, yaitu Program KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan).

STRATEGI 8 : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

STRATEGI 9 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud jika telah ada keselarasan dalam perencanaan pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan tersebut, yaitu dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan pada mulai diterapkannya *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam satu teknologi informasi.

STRATEGI 10 : Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

STRATEGI 11 : Meningkatkan kapabilitas dan integritas aparatur

Masih kurangnya integritas dan kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

STRATEGI 12 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah) meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Selain itu perlu meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan (Belitung Satu Data), meningkatkan pelayanan

kemetrologian dan perlindungan konsumen, serta menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik ini, juga perlu meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang saling terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi sebagai bentuk implementasi Program TERINDAK (Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel). Selain itu juga adanya pembinaan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

STRATEGI 13 : Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Kabupaten Belitung. Keragaman budaya dan potensi wisata yang ada perlu didukung dengan pengelolaan dan fasilitas penunjang yang optimal. Ditetapkannya Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan bahkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan pariwisata supaya dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing pariwisata ini diarahkan pada pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Potensi Geopark yang dimiliki Kabupaten Belitung yang masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG) serta masuk dalam salah satu lokasi utama Perhutanan Sosial juga perlu untuk lebih dioptimalkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati, pengembangan pariwisata di Belitung juga diarahkan pada pengembangan Desa Wisata sesuai dengan pontensi desanya masing-masing (TUSENA). Selain itu juga dengan meningkatkan ekonomi kreatif guna mendukung pariwisata dan peningkatan kompetensi SDM pariwisata. Pengelolaan museum maritime juga perlu ditingkatkan.

STRATEGI 14 : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan

Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perlu mendapat perhatian dari pemerintah diarahkan pada usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, adanya perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu perlu adanya penguatan kelembagaan

pertanian dalam hal produksi, distribusi dan pemasaran. Mutu produksi pertanian juga harus diperhatikan, serta perlu adanya pengelolaan pasca panen sebagi bentuk implementasi Program GANGAN (Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan). Strategi ini juga diarahkan pada pengembangan produksi pertanian di kawasan prioritas nasional Selat Nasik. Selain itu strategi ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan pertanian sehingga mampu memberi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

STRATEGI 15 : Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, berdampak pada belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ini diarahkan pada pembibitan budidaya laut selain produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta juga memperhatikan pengembangan usaha dan daya saing produk hasil perikanan dan produksi perikanan di kawasan prioritas nasional Selat Nasik.

STRATEGI 16 : Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro

Koperasi dan usaha mikro telah terbukti sebagai dasar ekonomi yang kuat ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi. Melihat beberapa permasalahan di Kabupaten Belitung mengenai belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha mikro, maka strategi ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta pada usaha mikro. Selain itu upaya untuk menumbuhkembangkan produktivitas Indutri Kecil Menengah (IKM) dan sentra-sentra industri kecil yang mendukung kepariwisataan. Sehingga koperasi-koperasi yang telah ada tersebut menjadi mandiri.

STRATEGI 17 : Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri

Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan berdampak pada belum optimalnya nilai investasi di Kabupaten Belitung. Tata kelola perdagangan, industri dan pasar yang belum optimal juga berdampak pada pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan industri. Strategi peningkatan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri ini diarahkan pada menyiapkan potensi,

promosi, kerjasama dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan program kepala daerah, yaitu Program ILAK (Insentif Langsung untuk Kemajuan) dan Program KETARAP (Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha). Selain itu meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi dan informasi. Serta pengembangan kawasan industri sesuai penetapannya, sehingga dapat menjadi peluang usaha baru yang cukup menguntungkan. Pelaksanaan investasi daerah itu juga perlu ditingkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauannya.

STRATEGI 18 : Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah

Kabupaten Belitung merupakan kabupaten kepulauan, masih kurangnya kualitas sarana prasarana konektivitas antar pulau dan antar wilayah yang memadai masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintah. Strategi ini diarahkan pada peningkatan konektivitas pulau, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata dan infrastruktur marina, penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan, pengelolaan jalan baik hibah jalan daerah, jalan non status maupun standar jalan. Selain itu percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang dan pemenuhan penerangan jalan umum sesuai program Bupati dan Wakil Bupati , yaitu program BETARE (Belitung Terang Benderang). Pembangunan infrastruktur tersebut tetap harus memperhatikan aturan tata ruang ruang. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana prasarana bangunan layanan publik, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik lainnya, terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, antara lain sarana transportasi publi yang terintegrasi dan terjamin keselamatannya.

STRATEGI 19 : Pemenuhan kebutuhan air baku

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berimplikasi pada penggunaan air yang juga semaki tinggi. Selain kuantitas, kebutuhan akan kualitas air juga ikut meningkat. Oleh karena itu perlu menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan air baku ini diarahkan pada peningkatan legalitas dan pengelolaan sumber air baku sebagai implementasi dari Program PUKAT (Program Air Bersih untuk Masyarakat).

STRATEGI 20 : Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu strategis tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia. Di Kabupaten Belitung khususnya, pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Terlebih lagi Kabupaten Belitung merupakan destinasi pariwisata. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup ini diarahkan pada tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

STRATEGI 22 : Meningkatkan pengelolaan persampahan

Meningkatnya volume timbulan sampah, terutama di daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan.

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini. Selain itu dapat juga dilihat pada 6.3 keselarasan program unggulan pembangunan antara RPJMD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan RPJMD Kabupaten Belitung.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan tersebut kemudian disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahunnya untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Sehingga akan lebih jelas dalam menuangkan RPJMD ke dalam RKPD dengan penekanan pada fokus atau tema setiap tahunnya. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Belitung berdasarkan pentahapan setiap tahun dapat dilihat pada gambar 6.4 di bawah.

Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi

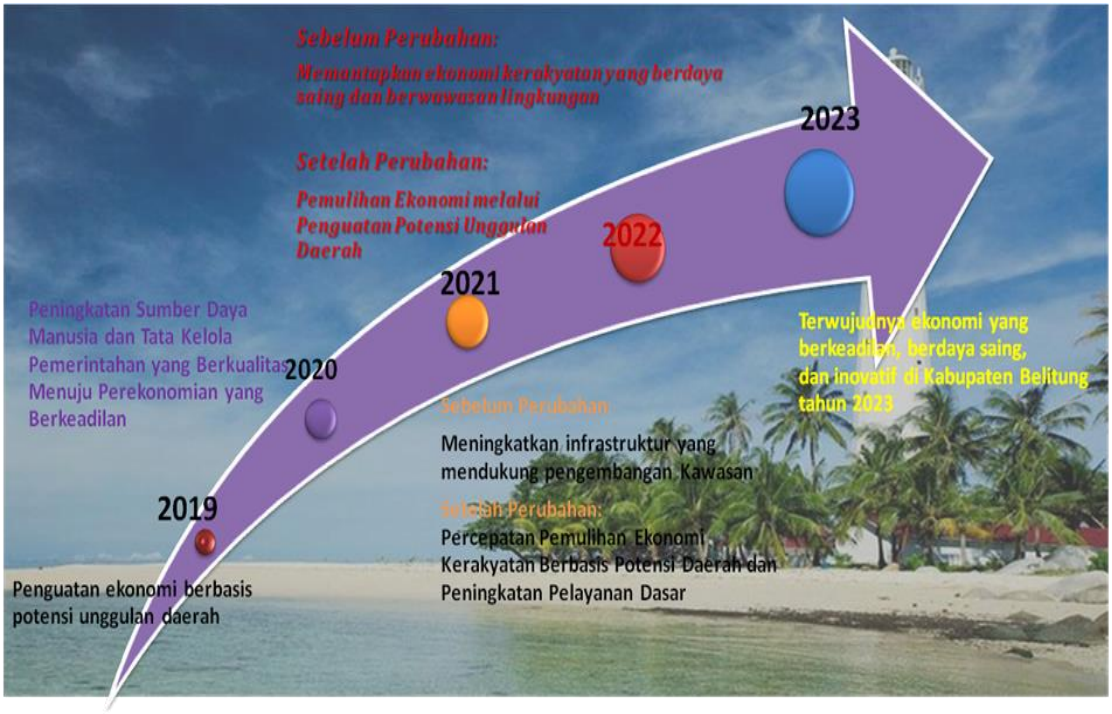
Visi : **Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023**

Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
			Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
			Penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
Misi II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
		Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Misi III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya daya beli masyarakat	Perluasan kesempatan kerja
			Mengurangi beban pengeluaran

Tujuan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
		Meningkatnya pengembangan pariwisata	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro
	Penguatan Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
			Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
	Peningkatan Infrastruktur Strategis	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah
			Pemenuhan kebutuhan air baku
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan persampahan

Tabel 6.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan antara RPJMD Provinsi Kepualuan Bangka Belitung 2017-2022 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No.	RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2022	Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023
1.	Pengembangan Pembangunan Agropolitan	Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Pembangunan Bahari	
3.	Pengembangan Pariwisata	
4.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	
5.	Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah	
6.	Pengembangan Konektivitas Dan infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur Strategis
7.	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan
8.	Pembangunan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan
9.	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
10.	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengurangan Risiko Bencana
11.	Pengendalian Lingkungan Hidup	



Gambar 6.2 Tema Pembangunan Kabupaten Belitung 2019 – 2023

Supaya lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Arah kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

VISI : MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
T.1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyaraka	1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu
		1.2 Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan Desa *Open Defecation Free (ODF)* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) 2. Pengurangan kawasan kumuh 3. Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi 5. Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular 6. Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting* 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga 8. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga 9. Menumbuhkan budaya berolahraga dan bergerak di masyarakat
		1.3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Menurunkan jumlah perkawinan usia muda 2. Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB)
		1.4 Meningkatkan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	S2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2.1 Meningkatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah 2. Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP) 3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal 4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak 5. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan 6. Meningkatkan pemerataan sebaran guru *7. Meningkatkan minat baca masyarakat*
	S3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin *3. Meningkatkan serapan tenaga kerja lokal* *4. Meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif*
		3.2 Mengurangi beban pengeluaran	1. Pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin 2. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi 3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial 5. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakayt miskin dan atau terdampak covid-19 6. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan atau terdampak covid -19

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	S4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	4.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender 2. Meningkatkan peran kelembagaan di desa 3. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda 4. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan 5. Memperkuat pemerintahan desa 6. Memperkuat infrsatruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
T1. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	S1. Terciptanya birokrasi yang bersih, akutabel dan transparan	1.1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi 2. Meningkatkan tata kelola asset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi 3. Menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah
		1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Menerapkan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi
		1.3 Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatkan pembinaan, peringatan dini dan maajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	S2.Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur	1. Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi 2. Penataan manajemen sumber daya aparatur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	S3. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan publik 5. Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa 6. Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 7. Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik 8. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat 9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan 10. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 11. Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan 12. Meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen 13. Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting 14. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
T1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	S1. Meningkatnya pengembangan pariwisata	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pengembangan destinasi Pariwisata 2. Meningkatkan Pemasaran Promosi pariwisata berbasis digital 3. Meningkatkan pengelolaan dan Pengembangan Geopark Belitung, Perhutanan Sosial dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat 4. Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desa 5. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata 6. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata 7. Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya 8. Meningkatkan pengelolaan museum maritim
	S2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	2.1 Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian 2. Mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik 3. Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi 4. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 5. Penguatan kelembagaan pertanian
		2.2 Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan 3. Pengembangan pembibitan budidaya laut 4. Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik 5. Pengembangan Ekonomi Biru

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	S3. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri 2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro
	S4. Meningkatnya investasi	Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri	1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi 3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah 4. Penataan peruntukan kawasan industri 5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan 6. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan
	S5. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	5.1 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan konektivitas antar pulau 2. Mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata 3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur marina 4. Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan 5. Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah 6. Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang 7. Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten 8. Membangun akses jalan yang menghubungkan

			wilayah potensial 9. Meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional 10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya 11. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang 12. Meningkatkan keselamatan transportasi 13. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi 14. Pembangunan Jembatan Pilang
		5.2 Pemenuhan kebutuhan air baku	1. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku 2. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air 3. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi
T2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S1. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas tutupan lahan
	S2. Meningkatnya pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3. Meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan 5. Meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R 6. Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat

Setiap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu, sehingga pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan. Serta dapat ditentukan juga kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Tahapan pelaksanaan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Pentahapan Pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sistem pelayanan terintegrasi					
	2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu					
Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan Desa *Open Defecation Free (ODF)* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS)					
	2. Pengurangan kawasan kumuh					
	3. Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman					
	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi					
	5. Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular					
	6. Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting*					
	7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga					
	8. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga					
	9. Menumbuhkan budaya berolahraga dan bergerak di masyarakat					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Menurunkan jumlah perkawinan usia muda					
	2. Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB)					
Meningkatkan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam					
Meningkatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah					
	2. Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP)					
	3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal					
	4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak					
	5. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan					
	6. Meningkatkan pemerataan sebaran guru					
	7. Meningkatkan minat baca masyarakat					
Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata					
	2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin					
	3. *Meningkatkan serapan tenaga kerja lokal*					
	4. Meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif					
Mengurangi beban	1. Pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
pengeluaran	miskin					
	2. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi					
	3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS					
	4. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial					
	5. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakayt miskin dan atau terdampak covid-19					
	6. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan atau terdampak covid -19					
Meningkatkan partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender					
	2. Meningkatkan peran kelembagaan di desa					
	3. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda					
	4. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan					
	5. Memperkuat pemerintahan desa					
	6. Memperkuat infrsatruktur dasar desa dan kawasan perdesaan					
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi					
	2. Meningkatkan tata kelola aset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	3. Menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah					
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Menerapkan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah					
	2. Mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi					
Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatkan pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)					
	3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah					
Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur	1. Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi					
	2. Penataan manajemen sumber daya aparatur					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik					
	2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik					
	3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	4. Meningkatkan pelayanan publik					
	5. Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa					
	6. Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi					
	7. Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik					
	8. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat					
	9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan					
	10. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan					
	11. Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan					
	12. Meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen					
	13. Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting					
	14. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	bencana					
Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata					
	2. Meningkatkan Pemasaran Promosi pariwisata berbasis digital					
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Geopark Belitung, Perhutanan Sosial dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat					
	4. Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desa					
	5. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata					
	6. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata					
	7. Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya					
	8. Meningkatkan pengelolaan museum maritim					
Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian					
	2. Mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik					
	3. Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi					
	4. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan					

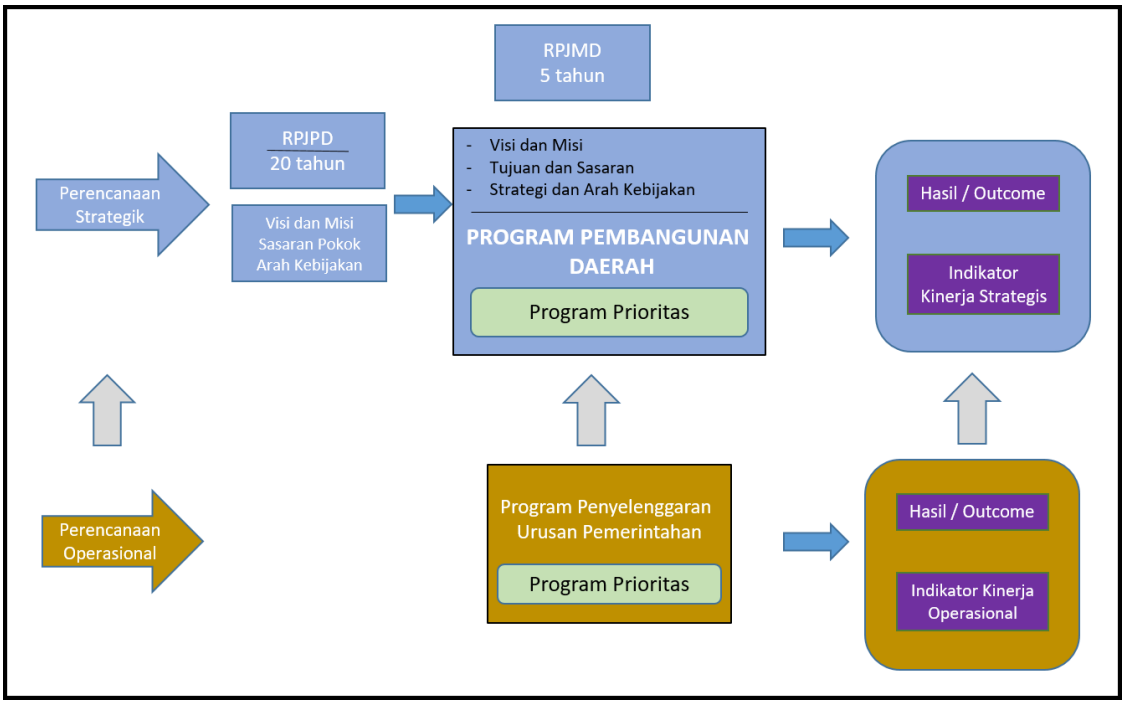
Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	5. Penguatan kelembagaan pertanian					
Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya					
	2. Peningkatan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan					
	3. Pengembangan pembibitan budidaya laut					
	4. Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik					
	5. Pengembangan Ekonomi Biru					
Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri					
	2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro					
Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri	1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif					
	2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi dan informasi					
	3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah					
	4. Penataan peruntukan kawasan industri					
	5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	6. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan					
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan konektivitas antar pulau					
	2. Mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata					
	3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur marina					
	4. Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan					
	5. Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)					
	6. Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang					
	7. Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten					
	8. Membangun akses jalan yang menghubungkan wilayah potensial					
	9. Meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional					
	10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya					
	11. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	12. Meningkatkan keselamatan transportasi					
	13. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi					
Pemenuhan kebutuhan air baku	1. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku					
	2. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya air					
	3. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi					
Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					
	2. Meningkatkan kualitas tutupan lahan					
Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara					
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan					
	3. Meningkatkan perencanaan pengeloaan persampahan					
	4. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan					
	5. Meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R					
	6. Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat					

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dengan pendekatan *holistik-tematik, integratif* dan *spasial,* merupakan program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan erat kaitannya dengan visi dan misi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang dielaborasi dalam visi, misi dan 16 (enam belas) program inovatif kepala daerah. Program prioritas pembangunan daerah mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:



Gambar 3.1 Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam implementasinya program pembangunan daerah ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu	Target	Rp (dalam ribu	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	**Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan**															
T1	**Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**70,93**	**71,69**		**71,87**		**71,97**		**71,99**		**72,01**		**72,01**		
		Angka Kemiskinan	**7,56**	**7,1**		**6,85**		**6,6**		**6,35**		**6,0**		**6,0**		
S1	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Angka Harapan Hidup**	**70,44**	**70,54**		**70,60**		**70,65**		**70,71**		**70,77**		**70,77**		
P1	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terintegrasinya layanan kesehatan	belum tersedia	20%	483.900	40%	716.105	60%	823.521	80%	848.226	100%	856.709	100%	3.728.461	Dinas Kesehatan
P2	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi Madya	33,33%	33,33%	28.376.661	66,67%	75.627.015	100%	64.439.367	100%	66.372.548	100%	66.820.500	100%	301.636.090	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	98%	100%	21.893.859	100%	25.560.900	100%	29.395.035	100%	30.276.886	100%	30.579.655	100%	137.706.335	Dinas Kesehatan
P3	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Terakreditasi paripurna	27%			100%	122.384.491	100%	140.742.165	100%	143.557.008	100%	144.274.793	100%	550.958.457	Dinas Kesehatan
P4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	76,08%			78%	13.698.890	79%	13.497.029	80%	13.901.940	81%	14.040.959	81%	55.138.818	Dinas PUPR
P5	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	belum tersedia			29,85%	15.181.660	44,78%	16.011.225	59,70%	15.491.562	74,63%	15.569.020	74,63%	62.253.467	Dinas PUPR
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	60,14%			61,30%	1.664.900	61,87%	1.748.145	62,45%	1.775.569	63,02%	1.780.325	63,02%	6.968.939	Dinas PUPR
		Persentase pengolahan air limbah permukiman	52,80%			54%	1.237.500	55%	1.361.250	56%	1.402.088	57%	1.411.250	57%	5.412.088	Dinas PUPR
P6	Program Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Persentase Luasan kawasan kumuh	51,28%			15,39%	3.510.000	7,95%	4.250.000	4,44%	4.377.500	0	4.421.275	0	16.558.775	Dinas PUPR
P7	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	22%	18%	107.238	36%	45.498	55%	50.000	73%	52.500	91%	53.025	91%	308.260	Dinas Ketahanan Pangan dan
		Persentase (%)Tingkat Keamanan Pangan	100%	100%		100%	29.770	100%	35.000	100%	36.700	100%	37.067	100%	138.537	Dinas Ketahanan
P8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penanganan Penyakit Menular	100%			100%	2.373.840	100%	1.355.977	100%	1.396.657	100%	1.410.623	100%	6.537.098	Dinas Kesehatan
		Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%			100%	764.063	100%	799.684	100%	823.674	100%	831.911	100%	3.219.333	Dinas Kesehatan

P9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,72%			100%	493.044	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%	4.493.462	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,87%			100%	455.000	100%	460.000	100%	473.800	100%	478.538	100%	1.867.338	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18%			100%	305.000	100%	350.750	100%	361.273	100%	364.885	100%	1.381.908	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Balita	75,76%	100%	3.188.324	100%	230.000	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%	1.042.094	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%			100%	245.000	100%	281.750	100%	290.203	100%	293.105	100%	1.110.057	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75,29%			100%	150.000	100%	172.500	100%	177.675	100%	179.452	100%	679.627	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Siaga Aktif	62,15%			100%	834.883	100%	920.740	100%	948.363	100%	957.846	100%	3.661.832	Dinas Kesehatan
P10	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,99%			8,19%	1.606.980	7,79%	1.750.980	6,99%	1.803.509	6,50%	1.821.544	6,50%	6.983.014	DPPKBPMD
		Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	22%			21,20%	1.558.890	20,80%	1.770.900	20,40%	1.824.027	20%	1.842.267	20%	6.996.084	DPPKBPMD
		Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	20%			19%	227.205	18,50%	325.000	18%	334.750	17,50%	338.098	17,50%	1.225.053	DPPKBPMD
S2	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**	**Rata-rata Lama Sekolah**	**8,11**	**8,14**		**8,15**		**8,16**		**8,18**		**8,19**		**8,19**		
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	61,43%	62,93%	4.585.585	64,43%	8.622.778	65,93%	9.310.755	67,43%	9.590.078	68,93%	9.685.979	68,93%	41.795.174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	119,17%	100%	93.132.775	100%	8.255.619	100%	8.255.619	100%	8.503.288	100%	8.562.300	100%	126.709.601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,64%	97,64%		97,44%	28.538.467	97,84%	28.822.625	98,24%	29.687.304	98,64%	29.781.225	98,64%	116.829.620	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,10%	100%		100%	15.522.932	100%	15.522.932	100%	15.988.619	100%	16.075.621	100%	63.110.103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81,69%	82,09%		82,49%	11.202.509	82,89%	12.120.717	83,29%	12.484.339	83,69%	12.576.200	83,69%	48.383.765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P3	Program Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16,67%	33,33%	4.222.480	50%	6.589.811	66,67%	7.118.988	83,33%	7.332.557	100%	7.356.892	100%	32.620.728	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

P4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	60,63%	65,03%	6.336.470	70,03%	812.850	75,03%	1.094.135	80,03%	1.126.959	85,03%	1.138.229	85,03%	4.172.173	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pesentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75,05%	78,05%		81,03%	120.400	84,05%	132.440	87,02%	136.413	89,03%	137.777	89,03%	527.031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	52.860	90%	275.000	93%	390.000	96%	401.700	97,50%	405.717	97,50%	1.525.277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S3	**Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**	**Pengeluaran per kapita (dalam ribu)**	**12.910**	**13.298**		**13.496**		**13.671**		**13.862**		**14.049**		**14.049**		
P1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	30,30%			32%	82.248	35%	95.000	37%	100.200	40%	101.202	40%	378.650	Dinas KUKMPTK
		Persentase Peluang Kerja Mandiri/berwirausaha	15%			17%	429.226	20%	500.000	22%	520.000	25%	525.200	25%	1.974.426	Dinas KUKMPTK
P2	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	belum tersedia			100%	2.495.300	100%	3.495.300	100%	3.600.159	100%	3.636.161	100%	13.226.920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	95%	100%	750.580	100%	1.033.747	100%	764.866	100%	787.812	100%	795.690	100%	4.132.694	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	tidak terjadi bencana	100%		100%	836.466	100%	744.028	100%	766.348	100%	774.012	100%	3.120.854	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P4	Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	20%			40%	206.275	60%	157.500	80%	162.225	100%	163.847	100%	689.847	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	88,28%			87,38%	924.653	86,93%	980.132	86,48%	1.009.536	86,03%	1.019.631	86,03%	3.933.952	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif	75%			85%	1.565.678	90%	1.659.618	95%	1.759.195	100%	1.776.787	100%	6.761.278	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P6	Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana	Jumlah w arga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%			100%	100000	100%	150.000	100%	154.500	100%	154.500	100%	559.000	Dinas PUPR
P7	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase w arga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%			100%	712.802	100%	784.082	100%	807.605	100%	815.681	100%	3.120.170	BPBD
S4	**Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan**	**Status desa"Maju"**	**10**	**15**		**20**		**25**		**30**		**35**		**35**		
P1	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Belum Tersedia			Memuaskan	931.739	Memuaskan	459.600	Memuaskan	473.388	Memuaskan	478.122	Memuaskan	2.342.849	DPPKBPMD
		Persentase ketersediaan data dan informasi desa (Profil Desa) yang mutakhir	46,94%			71,43%	81.600	100%	81.600	100%	84.048	100%	84.888	100%	332.136	DPPKBPMD
		Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	97,62%			100%	151.520	100%	151.520	100%	156.066	100%	157.626	100%	616.732	DPPKBPMD
P2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase kelembagaan desa aktif	98,93%	99,07%	930.620	99,20%	1.365.063	99,53%	1.517.463	99,87%	1.562.986	100%	1.578.616	100%	6.954.748	DPPKBPMD
		Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	27,27%	28,57%		29,73%	223.370	30,77%	223.370	32,50%	230.071	37,50%	232.372	37,50%	909.183	DPPKBPMD
		Persentase BUMDesa aktif tiap desa	69,05%	76,19%		83,33%	102.160	90,48%	102.160	97,62%	105.225	100%	106.277	100%	415.822	DPPKBPMD

II	**Misi II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**															
T2	**Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B**	**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
S5	**Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**	**Opini BPK**	**WDP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	**CC**	**CC**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
P1	Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	Ketepatan w aktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan berlaku	100%	100%	1.465.567	100%	866.967	100%	918.985	100%	946.555	100%	964.728	100%	5.162.802	BPKAD
P2	Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan w aktu penyusunan dokumen	100%	100%	237.410	100%	237.410	100%	251.655	100%	259.204	100%	263.980	100%	1.249.659	BPKAD
P3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	160.541	100%	177.245	100%	187.880	100%	193.516	100%	196.228	100%	915.410	BPKAD
P4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	92,31%	92,31%	1.397.395	92,31%	1.361.675	100%	1.443.376	100%	1.486.677	100%	1.511.729	100%	7.200.851	BPKAD
P5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,46%			16,22%	1.704.938	16,36%	1.772.550	16,49%	1.825.727	16,62%	1.860.425	16,62%	7.163.640	BPPRD
P6	Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99,65%			100%	170.000	100%	215.000	100%	221.450	100%	225.471	100%	831.921	BPPRD
P7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	78%	100%	789.940	100%	666.515	100%	730.167	100%	752.071	100%	774.634	100%	3.713.327	BAPPEDA
P8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan program perencanaan daerah	78%	100%	139.990	100%	165.800	100%	186.302	100%	191.891	100%	197.648	100%	881.630	BAPPEDA

P9	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	78%	100%	405.050	100%	414.700	100%	429.700	100%	442.591	100%	455.869	100%	2.147.910	BAPPEDA
P10	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan	78%	100%	301.735	100%	262.225	100%	280.460	100%	288.874	100%	297.540	100%	1.430.834	BAPPEDA
P11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten	20,28%	70%	1.408.437	75%	1.410.752	80%	1.551.827	90%	1.624.557	90%	1.640.803	90%	7.636.376	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB	10%			100%	109.705	100%	120.676	100%	126.721	100%	130.523	100%	487.625	Inspektorat
		Persentase pelanggaran pegawai	0%			0%	403.400	0%	443.740	0%	453.290	0%	466.889	0%	1.767.319	Inspektorat
P12	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang menyusun pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	57.200	100%	60.632	100%	62.451	100%	64.324	100%	244.607	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat daerah yang menyusun LPPD sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	52.610	100%	55.767	100%	57.440	100%	59.163	100%	224.979	Sekretariat Daerah
S6	**Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**62%**	**76%**		**77%**		**78%**		**79%**		**81%**		**81%**		
P1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan	50%	59,82%	4.303.481	61,57%	1.256.600	63,32%	1.331.996	65,07%	1.371.956	66,82%	1.413.115	66,82%	9.677.147	BKPSDM
		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial	67,58%	69,18%		72%	3.374.663	75%	3.577.143	78%	3.684.457	80%	3.794.991	80%	14.431.254	BKPSDM
		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil	78,15%	80%		83%	2.209.865	85%	2.342.457	87%	2.412.731	90%	2.485.113	90%	9.450.165	BKPSDM
P2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penilaian prestasi Kerja ASN	95%	100%	2.933.779	100%	12.350	100%	12.700	100%	13.081	100%	13.473	100%	2.985.383	BKPSDM
		Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapat layanan, perlndungan dan penghargaan	100%	100%		100%	1.382.594	100%	1.465.549	100%	1.509.516	100%	1.554.801	100%	5.912.459	BKPSDM

P3	Program Penataan Manajemen SDM Aparatur	Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	90,65%			100%	630.000	100%	65.500	100%	67.465	100%	69.489	100%	832.454	BKPSDM
		Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya	100%			100%	1.037.480	100%	1.099.729	100%	1.132.721	100%	1.155.375	100%	4.425.305	BKPSDM
P4	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	225.000	100%	225.000	100%	228.000	100%	232.000	100%	910.000	Semua Perangkat Daerah
S7	**Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	76,81	80		83		85		87		88		88		
P1	Program Penataan Kelembagaan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya	100%	100%	22.800	100%	273.385	100%	277.450	100%	285.774	100%	288.631	100%	1.148.040	Sekretariat Daerah
P2	Program Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%			100%	3.199.510	100%	3.519.461	100%	3.617.890	100%	3.654.069	100%	13.990.930	Sekretariat Daerah
P3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	479.730	100%	328.135	100%	332.140	100%	342.170	100%	345.592	100%	1.827.767	Sekretariat Daerah
P4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Kependudukan	88%	80%	1.913.540										1.913.540	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%			81%	908.772	83%	957.873	84%	986.609	86%	996.475	86%	3.849.729	Dinas Kependudukan
		Persentase capaian pencatatan sipil	92%			94%	144.305	94%	170.680	95%	175.800	95%	177.558	95%	668.344	Dinas Kependudukan
		Persentase pemanfaatan data	100%			100%	365.445	100%	415.545	100%	428.011	100%	432.291	100%	1.641.293	Dinas Kependudukan
P5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	25%	50%	1.297.175	65%	9.451.650	80%	9.864.242	90%	10.211.093	90%	10.231.700	90%	41.055.860	Dinas Komunikasi dan Informatika
P6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	Belum tersedia			90%	54.000	90%	56.000	90%	57.680	90%	58.257	90%	225.937	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	40%	40%	296.520	60%	1.228.796	80%	1.235.796	90%	1.272.870	90%	1.285.599	90%	5.319.580	Dinas Komunikasi dan Informatika
P7	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Belum tersedia			70%	344.940	80%	375.880	90%	387.156	90%	398.771	90%	1.506.747	Dinas Komunikasi dan Informatika
P8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	belum tersedia			100%	984.563	100%	1.083.019	100%	1.115.510	100%	1.126.664,98	100%	4.309.757	BPBD

		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	belum tersedia			100%	398.135	100%	437.949	100%	451.087	100%	455.598	100%	1.742.768	BPBD
P9	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	421.500	100%	4.932.130	100%	5.425.343	100%	5.588.103	100%	5.643.984	100%	22.011.061	SATPOL PP (Tahun 2019), BPBD (Tahun 2020-2023)
P10	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%			100%	3.181.001	100%	3.499.101	100%	3.604.074	100%	3.640.115	100%	13.924.291	Satpol PP
		Persentase Penegakan PERDA	100%			100%	782.116	100%	860.328	100%	886.137	100%	894.999	100%	3.423.580	Satpol PP
P11	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	79,84%			87,50%	542.173	90%	608.279	92,50%	626.527	95%	645.323	95%	2.422.302	Kecamatan
P12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	62%	78%	247.238	88%	1.336.000	92%	1.985.000	96%	2.005.100	100%	2.025.151	100%	7.598.489	Dinas KUKMPTK
		Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	100%	100%		100%	134.350	100%	145.000	100%	147.100	100%	148.571	100%	575.021	Dinas KUKMPTK
P13	Program Peningkatan Ketesediaan dan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan	5,59%	14,69%	141.009	35,66%	225.301	56,64%	330.000	77,62%	346.800	100%	350.268	100%	1.393.377	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,56%	93,00%		94,00%	106.587	95,00%	144.000	96,00%	150.800	97,00%	152.308	97,00%	553.695	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

III	**Misi III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**															
T3	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,29**	**5,50**		**5,63**		**5,71**		**5,83**		**5,90**		**5,90**		
S8	**Meningkatnya pengembangan pariwisata**	**Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)**	467.571	500.000		600.000		700.000		800.000		1.000.000		1.000.000		
P1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan kualitas daya tarik wisata	67%	73%	10.948.021	79%	14.902.519	86%	16.877.676	93%	17.384.006	100%	17.557.846	100%	77.670.069	Dinas Pariwisata
P2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%			100%	6.143.576	100%	7.152.174	100%	7.366.739	100%	7.440.406	100%	28.102.895	Dinas Pariwisata
P3	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	belum tersedia			80%	859.960	80%	945.956	80%	974.335	80%	984.078	80%	3.764.329	Dinas Pariwisata
P4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	50%	50%	1.896.778	56,25%	2.231.830	63,50%	2.811.194	68,75%	2.895.529	75%	2.924.485	100%	12.759.815	Dinas Pariwisata
P5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai budaya yang berkembang	80%	82%	1.139.360	84%	13.793.171	86%	4.148.850	88%	4.273.316	90%	4.316.049	90%	27.670.745	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S9	**Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan**	**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)**	**26,19%**	**27,21%**		**27,31%**		**27,41%**		**27,52%**		**27,62%**		**27,62%**		
P1	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan Strategis (Ton Gabah Kering Giling) (Padi)	2.386	2.436	410.891	2.605	319.656	2.723	410.000	2.841	422.300	2.960	434.969	2.960	1.997.816	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi Tanaman Pangan Lokal (Ton)	1.520	1.596	76.840	1.672	127.000	1.748	134.620	1.824	138.659	1.900	142.818	1.900	619.937	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi tanaman Hortikultura (Ton)	1.193	1.236	356.000	1.279	621.007	1.322	658.267	1.365	678.015	1.408	698.355	1.408	3.011.644	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Mutu Produk Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (jumlah	4			8	209.000	10	210.000	12	216.300	14	222.789	14	858.089	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P2	Program Pengembangan Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton)	8,1			8,9	383.665	9,3	430.000	9,8	442.900	10,3	456.187	10,3	1.712.752	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

		Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan (Jenis)	2			4	143.750	5	152.375	6	156.946	7	161.655	7	614.726	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P3	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hew an	Persentase penanganan kasus penyakit hew an menular	100%	100%	256.155										256.155	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase pelayanan penyakit hew an	100%	100%	150.180										150.180	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah	2 Kelompok	1 Kelompok	78.655										78.655	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Populasi ternak besar sapi	1.751	1.773	49.650	1.800	42.400	1.827	50.000	1.854	51.500	1.882	53.045	1.882	246.595	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Populasi ternak ayam	2.958.901	3.106.846	325.130	3.262.188	558.293	3.425.298	591.791	3.596.563	609.545	3.776.391	627.831	3.776.391	2.712.590	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan	Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	5.000	6.200	389.635	8.000	1.011.225	10.250	1.120.000	12.000	1.153.600	13.250	1.171.623	13.250	4.846.083	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas	3.000	3.000	138.575											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	43	49	170.921	55	313.405	60	350.000	65	360.500	65	371.315	65	1.566.141	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P5	Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani "Madya"	0	0		2	355.900	3	377.254	4	388.572	5	392.457	15	1.514.183	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"	0	0		2	45.950	3	60.000	4	61.800	5	62.418	14	230.168	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Luas Areal Tanam Padi (Ha)	425	0		465	955.675	485	976.500	505	1.005.795	525	1.015.853	525	3.953.823	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

P6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase saw ah yang terairi irigasi	53,79%	54,26%	8.527.500	54,72%	8.430.051	55,19%	7.847.030	55,65%	7.982.441	56,58%	8.008.792	56,58%	40.795.814	Dinas PUPR
P7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	65.723	66.381	3.310.504	67.044	5.387.112	67.715	5.710.339	68.392	5.881.649	69.076	5.940.465	69.076	26.230.069	Dinas Perikanan
		Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam	10,71%			10,92%	1.225.000	11,03%	1.135.000	11,14%	1.169.050	11,26%	1.180.741	11,26%	4.709.791	Dinas Perikanan
P8	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya (Ton /tahun)	207,2	211	1.062.064	215	1.201.200	219	1.270.000	223	1.308.100	227	1.321.181	227	6.162.545	Dinas Perikanan
		Peningkatan produksi benih yang berkualitas	3,78%			8,70%	1.080.000	13,60%	1.144.800	16,20%	1.179.144	21,21%	1.190.935	21,21%	4.594.879	Dinas Perikanan
S10	**Meningkatnya pengembangan koperasi**	**Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)**	55.550.754	72.215.980		93.880.774		122.045.006		156.658.507		206.256.609		206.256.609		
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	973.000.000	1.118.950.000		1.286.792.500		1.479.811.375		1.701.783.081		1.957.050.000		1.957.050.000		
P1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Penumbuhan usaha mikro	17.596			17.898	99.960	18.048	120.500	18.198	127.730	18.348	131.562	18.348	479.752	Dinas KUKMPTK
		Persentase (%) usaha mikro yang omsetnya meningkat	42%			52%	399.350	57%	575.311	62%	609.830	67%	628.125	67%	2.212.615	Dinas KUKMPTK
P2	Program Pengembangan Koperasi	Persentase (%) Koperasi aktif	70%			80%	594.705	85%	640.000	90%	668.400	95%	688.452	95%	2.591.557	Dinas KUKMPTK
P3	Program Peningkatan Akses Permodalan	Persentase (%) pertumbuhan produk Usaha Mikro	18%	20%	751.070										751.070	Dinas KUKMPTK
P4	Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun	14%	42%	10.544.500	56%	1.629.235	70%	1.850.000	84%	1.905.500	100%	1.924.555	100%	17.853.790	Dinas KUKMPTK
P5	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Pasar Representatif (Persentase pasar memenuhi standar)	20%			60%	6.350.000	75%	6.635.000	85%	6.825.000	100%	6.893.250	100%	26.703.250	Dinas KUKMPTK
S11	**Meningkatnya investasi**	**Nilai investasi (juta rupiah)**	981.694	1.225.191		1.780.878		2.519.187		3.507.975		5.023.529		5.023.529		
P1	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	Peningkatan jumlah investor	87	100	877.915	120	1.222.950	144	1.285.200	174	1.323.756	214	1.363.469	214	6.073.290	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P2	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	87,21%	88%	38.305	88%	443.784	88%	497.660	90%	527.520	90%	543.345	90%	2.050.613	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

P3	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal	80%			100%	30.000	100%	32.000	100%	33.920	100%	34.938	100%	130.858	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P4	Program Penataan Struktur Industri	Persentase (%) penataan struktur industri	0%	20%	459.975	40%	164.025	60%	300.000	80%	302.000	100%	305.020	100%	1.531.020	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.155	2.195	255.130	2.235	543.663	2.275	865.000	2.315	890.950	2.355	899.860	2.355	3.454.602	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
		Tingkat kepatuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah	22,59%	23%	19.000	23,1%	30.000	24%	60.000	25%	61.800	26%	62.418	26%	233.218	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	12,50%	25%	329.350	50%	14.600	75%	44.000	100%	45.320	0	0	100%	433.270	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
		Jumlah sentra IKM	0	0	0	1	3.613.410	0	0	0	0	1	4.100.000	2	7.713.410	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
S12	**Meningkatnya infrastruktur kewilayahan**	**Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan**	35,18%	41,89%		46,25%		51,45%		58,39%		64,90%		64,90%		
P1	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%			76%	108.389.250	76%	144.338.136	76%	145.214.179	76%	145.311.279	76%	543.252.844	Dinas PUPR

P2	Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani	5,23%	6,52%	1.683.935	26,50%	1.000.000	46,50%	1.122.320	66,60%	1.155.990	86,60%	1.167.549	86,60%	6.129.794	Dinas PUPR
P3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	Persentase drainase dalam kondisi baik	34,33%	46,85%	4.354.094	59,35%	7.050.000	71,85%	10.200.000	84,35%	10.306.000	96,85%	10.337.290	96,85%	42.247.384	Dinas PUPR
P4	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen tata ruang	1	2	648.620	3	2.000.000	3	1.200.000	2	1.272.000	3	1.275.100	13	6.395.720	Dinas PUPR
		Dokumen tata ruang yang telah di Perdakan	1	0		1	80.000	1	95.000	1	100.700	0	-	4	275.700	Dinas PUPR
P5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang	80%	80%	330.664										330.664	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	belum tersedia			100%	75.000	100%	80.000	100%	82.400	100%	83.224	100%	320.624	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	belum tersedia			100%	350.000	100%	453.000	100%	466.590	100%	471.256	100%	1.740.846	Dinas PUPR
P6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	32,12%	39,03%	23.228.607	54,26%	11.903.860	67,83%	12.618.092	82,00%	12.975.817	98,35%	13.005.575	98,35%	73.731.950	Dinas Perhubungan
		Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar	17,98%	20,29%		22,60%	9.500.000	24,91%	10.070.000	27,23%	10.324.200	29,54%	10.427.442	29,54%	40.321.642	Dinas Perhubungan
P7	Program Pengendalian, Pengaw asan dan Evaluasi Transportasi	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas	50%	42%	1.320.173	34%	1.535.445	26%	1.612.217	18%	1.773.095	10%	1.790.826	10%	8.031.756	Dinas Perhubungan
P8	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten	12,50%			100%	30.422.360	100%	32.247.702	100%	33.182.564	100%	33.475.890	100%	129.328.516	Dinas Perhubungan
P9	Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	13,81%	100%	600.000	100%	40.514.558	100%	42.945.431	100%	43.233.750	100%	43.785.600	100%	171.079.339	Dinas Perhubungan
P10	Program Pengelolaan Sumber Air Baku	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	Belum tersedia			12%	728.000	17%	810.800	23%	835.124	28%	843.475	28%	3.217.399	Dinas PUPR

T4	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**58,18**	**60,78**		**62,73**		**64,19**		**65,28**		**66,10**		**66,10**		
S13	**Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan**	**Indeks Kualitas Air**	**57,34**	**60,13**		**62,22**		**63,79**		**64,97**		**65,85**		**65,85**		
		Indeks Kualitas Udara	**89,40**	**90,80**		**91,85**		**92,64**		**93,23**		**93,67**		**93,67**		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**35,40**	**38,75**		**41,26**		**43,15**		**44,56**		**45,62**		**45,62**		
P1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	34,10%	39%	1.598.736	44%	2.178.105	49%	2.423.589	54%	2.496.297	59%	2.521.260	59%	11.217.987	Dinas Lingkungan Hidup
		Sekolah yang berw aw asan lingkungan tingkat kabupaten	23	26		29	119.190	32	131.109	35	135.042	38	136.393	38	521.734	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%	25.158	100%	27.674	100%	28.504	100%	28.789	100%	110.125	Dinas Lingkungan Hidup
P2	Program Pengembangan dan Penataan Taman	Persentase taman terkelola	90%	100%	2.392.740	100%	2.250.000	100%	7.200.000	100%	5.416.000	100%	4.806.478	100%	22.065.218	Dinas PUPR
S14	**Meningkatnya pengelolaan sampah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan**	**0,79%**	**3,10%**		**4,20%**		**4,50%**		**5,50%**		**6,50%**		**6,50%**		
P1	Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	30,84%			40%	6.710.894	45%	7.381.983	50%	7.603.443	55%	7.679.477	55%	29.375.798	Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	4			14	1.000.800	17	1.100.880	20	1.133.906	23	1.145.245	23	4.380.832	Dinas Lingkungan Hidup
					261.143.860		**708.503.475**		**769.722.770**		**783.799.246**		**792.357.387**		**3.309.051.691**	

Tabel 6.7

Perubahan Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD 2020	RKPD P		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	**Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan**											
T1	**Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**72,51**	**72,88**		**73,37**		**74,21**		**74,21**		
		Angka Kemiskinan	**6,27**	**5,97**		**5,69**		**5,41**		**5,41**		
S1	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Angka Harapan Hidup**	**71,05**	**71,22**		**71,34**		**71,47**		**71,47**		
P1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Puskesmas terakreditasi Madya	-	100%	137.632.316.858	100%	126.676.476.112	100%	117.734.069.446	100%	**382.042.862.416**	Dinas Kesehatan
		Terwujudnya Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional	-			100%		100%		100%		
P2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	-	100%	5.956.409.782	100%	3.042.500.000	100%	122.382.593	100%	**9.121.292.375**	Dinas Kesehatan
P3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan amakanan minuman	-	100%	207.573.000			100%	98.743.838	100%	**306.316.838**	Dinas Kesehatan
P4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	100%	102.573.000	100%	17.528.150	100%	14.227.500	100%	**134.328.650**	Dinas Kesehatan
P5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	-	95,70%	615.400.720	95,70%	462.127.910	95,70%	851.592.000	95,70%	**1.929.120.630**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	-	89,29%	34.293.600	89,29%	80.868.100	89,29%	85.875.000	89,29%	**201.036.700**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang layak	-			81,55%	6.316.566.683	82,09%	6.109.870.000	82,09%	**14.130.136.683**	Dinas PUPR
		Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	80,48%	81,00%	1.703.700.000							
P8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pengolahan air limbah pemukiman	53,88%	53,98%	1.703.700.000	54,14%	4.315.000.000	54,30%	4.620.000.000	54,30%	**10.638.700.000**	Dinas PUPR
P9	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	-			80,77%	303.547.700	0,00%	784.000.000	0,00%	**3.268.785.020**	Dinas PUPR
		Persentase Luasan kawasan kumuh	15,39%	85,77%	2.181.237.320							
P7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	-			99,51%	1.563.401.600	99,80%	1.686.980.000	99,80%	**3.250.381.600**	Dinas PUPR
P10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	-		1.619.860.455	14%	933.218.550	15%	1.221.457.900	15%	**3.774.536.905**	DPPKBPMD
P11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	75,00%	76,00%	1.166.601.600	77%	1.700.935.800	78%	1.496.635.000	78,00%	**4.364.172.400**	DPPKBPMD

S2	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**	**Rata-rata Lama Sekolah**	**8,46**	**8,46**		**8,51**		**8,56**		**8,56**		
P1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100,00%	100,00%	76.009.602.255	100,00%	54.062.172.735	100%	96.370.329.528	100,00%	**226.442.104.518**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	94,99%	97,84%		98,24%		98,64%		98,64%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,00%	100,00%		100,00%		100%		100,00%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81,18%	82,89%		83,29%		83,69%		83,69%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	59,88%	65,93%		67,43%		68,93%		68,93%		
		Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	55,78%	66,67%		83,33%		100%		100,00%		
P2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menggunakan Kurikulum Muatan Lokal Daerah	-				-	1 Dok	105.000.000	1 Dok	**105.000.000**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P3	Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	Persentase Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV					-	89,03%	402.465.000	89,03%	**402.465.000**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-					85,03%		85,03%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S3	**Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**	**Pengeluaran per kapita (dalam ribu)**	**13.554**	**13.671**		**13.862**		**14.049**		**14.049**		
P1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	-					85%	400.000.000	85%	**400.000.000**	Dinas KUKMPTK
P2	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	644.553.400	100%	641.561.990	100%	959.078.659	100%	**2.245.194.049**	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P3	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	-			100,00%	490.077.975	100,00%	725.406.882	100,00%	1.703.197.242	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	100,00%	100,00%	487.712.385							
		Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	80,00%	90,00%								
P4	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	100,00%	100,00%	589.319.860	100,00%	481.946.100	100,00%	548.814.214	100,00%	1.620.080.174	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P5	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan bahan penting	100%			100%	59.577.600	100%	66.000.000	100%	**125.577.600**	Dinas KUKMPTK
P6	Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan harmonisasi hubungan industrial	100%			100%	50.826.400	100%	210.000.000	100%	**260.826.400**	Dinas KUKMPTK

P7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	-			67%	254.500.000	100%	154.500.000	100%	**539.000.000**	DPUPR
		Jumlah w arga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%	100%	130.000.000							
S4	**Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan**	**Status desa"Maju"**	**23**	**25**		**28**		**31**		**31**		
P1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDesa aktif	100,00%	100%	1.041.554.931	100%	1.939.712.731	100%	926.723.281	100%	**3.907.990.943**	DPPKBPMD
		Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang sesuai	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
P2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa Aktif	93,00%	93,85%	483.588.510	95,00%	499.902.450	100%	724.403.400	100%	**1.707.894.360**	DPPKBPMD
P3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	100,00%	100%	1.372.725.130	100%	1.592.593.730	100%	1.698.477.087	100%	**4.663.795.947**	Dispora
II	**Misi II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**											
T2	**Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**CC**	**B**		**BB**		**BB**		**BB**		
S5	**Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
P1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	115.008.463.122	100%	114.861.263.518	100%	118.891.714.344	100%	**348.761.440.984**	BPKAD
P2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	92,31%	100%	1.614.475.505	100%	1.798.577.155	100%	1.861.564.615	100%	**5.274.617.275**	BPKAD
P3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	11,29%	1.320.092.925	25,58%	1.673.841.050	33%	1.554.320.000	33,00%	**4.548.253.975**	BPPRD
P4	ProgramPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen	100%	100,00%	590.193.870	100,00%	604.387.920	100,00%	1.027.638.043	100,00%	**2.222.219.833**	Bappeda

P5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%	100,00%	154.587.590	100,00%	117.942.580	100,00%	193.498.940	100,00%	**466.029.110**	Bappeda
		Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%									
		Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan w ilayah dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%									
P6	Program Penyelenggaraan Pengaw asan	Level Kapabilitas APIP	-	Level 2	826.883.310	Level 3	897.167.520	Level 3	844.204.600	Level 3	**2.568.255.430**	Inspektorat
		Persentase Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Area Pengaw asan (Evaluasi Internal)	-	60%		65%		75%		75%		
P7	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel	100%	100%	14.839.551.019	100%	15.903.216.635	100%	16.667.492.564	100%	**47.410.260.218**	Sekretariat Daerah
S6	**Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**72,86%**	**75%**		**75%**		**76%**		**76%**		
P1	Program Kepegaw aian Daerah	Terkelolanya Manajemen Kepegaw aian Daerah	100%	100%	1.572.041.325	100%	3.325.612.205	100%	3.478.170.000	100%	**8.375.823.530**	BKPSDM
P2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	80%	85%	977.736.520	87%	1.448.569.760	90%	1.498.722.000	90%	**3.925.028.280**	BKPSDM
S7	**Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	84,80	85		87		88		88		
P1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%	83%	925.129.130	84%	400.050.900	85%	1.125.009.970	85%	**2.450.190.000**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
P2	Program Pencatatan Sipil	Persentase capaian pendaftaran penduduk	92%	93%	25.750.960	94%	37.730.100	95%	464.603.000	95%	**528.084.060**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
P3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	80%	85%	6.790.000	100%	8.448.800	100%	110.875.000	100%	**126.113.800**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
P4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	74%	80%	673.594.970	100%	464.843.685	100%	415.600.000	100%	**1.554.038.655**	Dinas Komunikasi dan Informatika
P5	Program Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem infomasi pelayanan publik dan birokrasi	97%	100%	2.383.594.240	100%	2.177.576.240	100%	2.090.996.420	100%	**6.652.166.900**	Dinas Komunikasi dan Informatika
P6	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase pemanfaatan data statistik daerah	73%	80%	227.263.770	90%	287.486.940	90%	362.486.940	90%	**877.237.650**	Dinas Komunikasi dan Informatika

P6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	569.407.300	100%	599.164.600	100%	1.730.000.000	100%	**2.898.571.900**	BPBD
P7	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2.025.872.600	100%	1.831.210.910	100%	3.351.560.000	100%	**7.208.643.510**	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	100%		100%		100%		100%		
P8	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100%	100%	6.644.902.700	100%	5.441.719.400	100%	8.960.565.700	100%	**21.047.187.800**	Satpol PP
P9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera atau tera ulang sesuai standar	78,00%	90,00%	173.166.500	92,00%	185.205.000	95%	333.000.000	95%	**691.371.500**	Dinas KUKMPTK
P10	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan bahan penting	100%			100%	59.577.600	100%	66.000.000	100%	**125.577.600**	Dinas KUKMPTK
P11	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	88%	88%	77.200.980	89%	111.865.570	90%	121.625.865	90%	**310.692.415**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publi	100,00%	100%	1.318.161.000	100%	1.317.961.000	100%	2.287.765.000	100%	**4.923.887.000**	Kecamatan Tanjungpandan
P13	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	87,50%	90%	248.064.450	90%	225.535.010	95%	292.785.560	95%	**766.385.020**	Kecamatan
P14	Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat	50%	55%	3.715.908.312	60%	2.661.776.294	70%	2.838.727.620	70%	**9.216.412.226**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan.	-	12%	14.489.450	12%	14.579.450	10%	15.308.000	10%	**44.376.900**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
III	**Misi III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**											
T3	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**-2,3**	**3,2-3,6**		**4,0-4,4**		**4,4-5,1**		**4,4-5,1**		
S8	**Meningkatnya pengembangan pariwisata**	**Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)**	134.266	150.000		250.000		400.000		934.266		
P1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	73%	80%	9.502.817.968	83,82%	15.553.600.020	83,82%	16.331.280.021	83,82%	**41.387.698.009**	Dinas Pariwisata
P2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%	100%	3.053.556.625	100%	2.652.905.600	100%	2.785.550.880	100%	**8.492.013.105**	Dinas Pariwisata
P3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	56%	63,50%	1.866.459.376	84,58%	1.151.403.990	90%	1.208.974.190	90%	**4.226.837.556**	Dinas Pariwisata

P5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	-		-	30%	220.000.000	30%	231.000.000	30%	**451.000.000**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S9	**Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan**	**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)**	**27,83%**	**27,83%**		**27,83%**		**27,83%**		**27,83%**		
P1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kebutuhan sarana pertanian	-	12%	1.304.954.600	26%	1.528.971.375	35%	1.405.301.000	35%	**4.239.226.975**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	-	34,47%	2.389.305.000	42,07%	6.634.036.500	49,07%	9.551.244.000	49,07%	**18.574.585.500**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	-	66%		70%		70%		70%		
P3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	140.186.200	100%	201.761.450	100%	210.566.000	100%	**552.513.650**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P4	Program Penyuluh Pertanian	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	100%	6%	80.250.000	43 Kelembagaan Petani	2.325.200.400	43 Kelembagaan Petani	459.181.000	43 Kelembagaan Petani	**2.864.631.400**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	52912	48.000	3.786.968.100	49.000	5.105.938.825	50.000	5.344.667.688	147.000	**14.237.574.613**	Dinas Perikanan
P6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	152	219	846.009.200	223	1.408.231.320	227	1.479.072.105	669	**3.733.312.625**	Dinas Perikanan
P7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	8,62%	7,82%	343.891.360	7,89%	421.654.975	8,15%	442.906.170	8,15%	**1.208.452.505**	Dinas Perikanan
P8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	8.400,00	8.400	300.369.600	8.500	1.680.199.200	8.600	1.764.217.770	25.500	**3.744.786.570**	Dinas Perikanan
S10	**Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro**	**Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)**	78.302.227	80.651.293		83.070.832		85.562.956		85.562.956		
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	1.372.650.000	1.479.811.375		1.701.783.081		1.957.050.000		1.957.050.000		
P1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang melaksanakan dan	-	85%	327.902.040	40%	375.960.340	45%	400.960.340	45%	**1.104.822.720**	Dinas KUKMPTK
P2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	40,00%	45%	566.164.560	50%	407.780.530	50%	503.060.990	50%	**1.477.006.080**	Dinas KUKMPTK
P3	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	-	45%	186.637.680	50%	380.287.900	52%	720.000.000	52%	**1.286.925.580**	Dinas KUKMPTK
S11	**Meningkatnya investasi**	**Nilai investasi (juta rupiah)**	2.171.376	2.519.187		3.507.975		5.023.529		5.023.529		
P1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang di Berikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	87	144	20.283.205	50 Investor	189.993.775	50 Investor	290.000.000	50 Investor	**500.276.980**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P2	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	280.589.300	60%	119.429.310	60%	435.000.000	60%	**835.018.610**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	-	40	273.992.600	40	274.007.650	40	660.000.000	80	**1.208.000.250**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

P4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100%	100%	173.322.030	100%	45.598.270	100%	47.194.209	100%	**266.114.509**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
S12	**Meningkatnya infrastruktur kewilayahan**	**Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan**	52,47%	54,35%		57,96%		59,94%		59,94%		
P1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air yang dikelola	34,52%	36,61%	5.981.132.000	41,54%	4.999.741.100	45,10%	13.446.220.000	45,10%	**24.427.093.100**	Dinas PUPR
P2	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	13,06%	14,46%	5.837.295.750	15,86%	2.835.000.000	17,26%	2.931.750.000	17,26%	**11.604.045.750**	Dinas PUPR
P3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	70,01%	72,32%	75.188.788.315	72,55%	100.670.841.700	72,78%	99.140.681.260	72,78%	**275.000.311.275**	Dinas PUPR
P4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100%	1.655.143.920	100%	2.037.045.390	100%	1.970.750.000	100%	**5.662.939.310**	Dinas PUPR
P5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	persentase PSU yang dikelola	-		-	53,60%	7.455.511.825	66,29%	8.920.000.000	66,29%	**16.375.511.825**	Dinas PUPR
		Persentase taman terkelola	100%	100,00%	1.768.182.450							
P6	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	-			80,77%	303.547.700	0,00%	784.000.000	0,00%	**1.087.547.700**	Dinas PUPR
		Persentase Luasan kawasan kumuh	15,39%	85,77%	2.181.237.320							
P7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	12,73%	16%	799.320.000	19%	1.600.000.000	22%	2.200.000.000	22%	**4.599.320.000**	Dinas PUPR
P8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	54,26%	68%	9.107.612.039	100%	12.296.814.060	100%	14.289.382.800	100%	**35.693.808.899**	Dinas Perhubungan
P9	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan	-	100,00%	13.162.188.000	100%	5.718.443.500	100%	2.297.533.000	100%	**21.178.164.500**	Dinas Perhubungan
T4	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67,62**	**67,86**		**68,37**		**68,88**		**68,88**		
S13	**Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan**	**Indeks Kualitas Air**	**53,16**	**53,26**		**53,36**		**53,46**		**53,46**		
		Indeks Kualitas Udara	**92,63**	**93,63**		**93,73**		**93,83**		**93,83**		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**46,19**	**46,41**		**48,38**		**50,35**		**50,35**		
P1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100,00%	100,00%	116.445.000	100,00%	208.962.500	100,00%	500.000.000	100,00%	**825.407.500**	Dinas Lingkungan Hidup
P2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	-	15,00%	1.393.365.239	20,00%	926.169.908	22,00%	1.409.766.508	22,00%	**3.729.301.655**	Dinas Lingkungan Hidup
P3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayat	-	47,79%	57.860.700	47,79%	50.809.500	47,79%	110.000.000	47,79%	**218.670.200**	Dinas Lingkungan Hidup

P4	ProgramPengendalian Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3	-	45,00%	15.587.200	50,00%	40.051.400	55,00%	88.052.300	55,00%	**143.690.900**	Dinas Lingkungan Hidup
P5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	-	25,00%	48.544.260	28,00%	46.396.450	35,00%	295.000.000	35,00%	**389.940.710**	Dinas Lingkungan Hidup
P6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	-	32 Klmpk	55.059.450	36 Klmpk	63.300.500	38 klmpk	335.000.000	38 klmpk	**453.359.950**	Dinas Lingkungan Hidup
P7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	17.890.400	100,00%	25.471.140	100,00%	25.471.140	100,00%	**68.832.680**	Dinas Lingkungan Hidup
S14	**Meningkatnya pengelolaan sampah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan**	**15,02%**	**15,50%**		**15,75%**		**16,00%**		**16,00%**		
P1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	40,00%	45,00%	6.907.902.930	50,00%	7.347.387.900	55,00%	7.505.388.000	55,00%	**21.760.678.830**	Dinas Lingkungan Hidup
					539.895.642.391		**549.650.534.311**		**609.388.568.128**		**1.694.985.325.060**	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Belitung

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
2	**Belanja**					
2.1	**Belanja Tidak Langsung**					
2.1.1	Belanja Pegawai	402.209.279.538.94	412.264.511.527	422.571.124.316	433.135.402.423	443.963.787.484
2.1.3	Belanja Subsidi	1.177.401.000	1.189.175.010	1.201.066.760	1.213.077.428	1.225.208.202
2.1.4	Belanja Hibah	15.667.692.000	16.626.554.750	17.644.099.901	18.723.918.815	49.869.822.647
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	113.237.655.000	135.885.186.000	163.062.223.200	195.674.667.840	234.809.601.408
2.1.8	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**535.492.027.538,94**	**569.175.427.287,81**	**607.699.014.176,82**	**651.978.591.506,26**	**733.111.520.990,60**
2.2	**Belanja Langsung**					
2.2.1	Belanja Pegawai	76.014.330.335	77.663.841.303	79.349.146.660	81.071.023.142	82.830.264.344
2.2.2	Belanja Barang	345.348.191.798,05	381.420.049.722	421.257.696.765	460.172.714.700	478.398.866.576
2.2.3	Belanja Modal	342.996.418.778	349.856.347.154	356.853.474.097	368.990.543.579	376.370.354.450
	Jumlah Belanja Langsung	**764.358.940.911,06**	**808.940.238.179,17**	**857.460.317.521,66**	**910.234.281.420,27**	**937.599.487.370.07**
	Jumlah Belanja	**1.299.850.968.450,00**	**1.378.115.665.466,98**	**1.465.159.331.698,48**	**1.562.212.872.926,53**	**1.670.711.006.360,67**

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, 2018

Tabel 7.2 Kerangka Perubahan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Belitung

No	Uraian	APBD (Rupiah)	Alokasi Anggaran (Rupiah)	
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
5	**Belanja**	**1.101.095.106.738,00**	**1.157.083.840.174,00**	**1.306.249.092.693,16**
5.1	**Belanja Operasi**	**877.800.030.246,00**	**867.930.076.182,00**	**956.443.446.650,24**
5.1.01	Belanja Pegawai	446.990.173.308,00	479.128.596.765,00	491.958.576.010,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.559.302.238,00	363.857.030.419,00	432.459.366.320,41
5.1.04	Belanja Subsidi	1.177.401.000,00	1.393.162.498,00	1.246.484.938,03
5.1.05	Belanja Hibah	28.796.249.200,00	23.285.664.000,00	30.485.867.524,52
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	276.904.500,00	265.622.500,00	293.151.856,63
5.2	**Belanja Modal**	**110.244.953.492,00**	**177.603.618.992,00**	**236.084.498.142,92**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.558.226.000,00	5.500.000.000,00	8.534.861.557,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.789.598.294,00	40.050.721.552,00	50.657.718.504,12
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.998.188.088,00	43.215.834.000,00	66.614.578.075,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.315.788.610,00	84.587.905.440,00	99.823.397.255,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.583.152.500,00	4.249.158.000,00	10.453.942.749,66
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**110.050.123.000,00**	**108.550.145.000,00**	**110.721.147.900,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.949.513.000,00	7.949.513.000,00	8.108.503.260,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.100.610.000,000	100.600.632.000,00	102.612.644.640,00

Sumber : BPKAD Kab. Belitung, 2021 (diolah)

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Belitung

(1)				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1				**Urusan Wajib**															
1	01			**Terkait Pelayanan Dasar**															
1	01	01		**Pendidikan**				**109.061.229**		**85.893.646**		**90.111.649**		**92.750.999**		**93.294.679**			
1	01	01	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	61,43%	62,93%	4.585.585	64,43%	8.622.778	65,93%	9.310.755	67,43%	9.590.078	68,93%	9.685.979	68,93%	41.795.174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				93.132.775		63.519.526		64.721.892		66.663.549		66.995.346		355.033.089	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	119,17%	100%	93.132.775	100%	8.255.619	100%	8.255.619	100%	8.503.288	100%	8.562.300	100%		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,64%	97,64%		97,44%	28.538.467	97,84%	28.822.625	98,24%	29.687.304	98,64%	29.781.225	98,64%		
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,10%	100%		100%	15.522.932	100%	15.522.932	100%	15.988.619	100%	16.075.621	100%		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81,69%	82,09%		82,49%	11.202.509	82,89%	12.120.717	83,29%	12.484.339	83,69%	12.576.200	83,69%		
1	01	01	03	Program Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16,67%	33,33%	4.222.480	50%	6.589.811	66,67%	7.118.988	83,33%	7.332.557	100%	7.356.892	100%	32.620.728	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	04	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.336.470		933.250		1.226.575		1.263.372		1.276.006		11.035.673	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	60,63%	65,03%	6.336.470	70,03%	812.850	75,03%	1.094.135	80,03%	1.126.959	85,03%	1.138.229	85,03%		
					Pesentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75,05%	78,05%		81,03%	120.400	84,05%	132.440	87,02%	136.413	89,03%	137.777	89,03%		
1	01	01	05	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	52.860	90%	275.000	93%	390.000	96%	401.700	97,50%	405.717	97,50%	1.525.277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	06	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	belum tersedia	100%	58.500	100%	2.495.300	100%	3.495.300	100%	3.600.159	100%	3.636.161	100%	13.285.420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	31.448	100%	1.558.931	100%	1.814.824	100%	1.830.269	100%	1.848.572	100%	7.084.044	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	560.610	100%	967.150	100%	1.090.415	100%	1.109.127	100%	1.120.218	100%	4.847.520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%			100%	649.400	100%	649.900	100%	659.397	100%	665.991	100%	2.624.688	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.000									100%	40.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	175.000	100%	182.500	100%	187.975	100%	189.855	100%	735.330	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	107.500	100%	110.500	100%	112.815	100%	113.943	100%	444.758	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	30.500									100%	30.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**		**Kesehatan**				**171.718.872**		**239.932.473**		**250.716.310**		**256.830.378**		**258.465.124**			
1	**01**	**02**	**01**	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terintegrasinya layanan kesehatan	belum tersedia	20%	483.900	40%	716.105	60%	823.521	80%	848.226	100%	856.709	100%	3.728.461	Dinas Kesehatan
1	**01**	**02**	**02**	Program Upaya Pelayanan Kesehatan				50.270.520		101.187.915		93.834.402		96.649.434		97.400.155		439.342.425	Dinas Kesehatan
					Puskesmas terakreditasi Madya	33,33%	33,33%	28.376.661	66,67%	75.627.015	100%	64.439.367	100%	66.372.548	100%	66.820.500	100%		
					Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	98%	100%	21.893.859	100%	25.560.900	100%	29.395.035	100%	30.276.886	100%	30.579.655	100%		
1	**01**	**02**	**03**	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD	27%	70%	44.716.355									70%	44.716.355	Dinas Kesehatan
1	**01**	**02**	**04**	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	27%	70%	33.747.911									70%	33.747.911	Dinas Kesehatan

1	01	02	05		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Terakreditasi paripurna	27%			100%	122.384.491	100%	140.742.165	100%	143.557.008	100%	144.274.793	100%	550.958.457	Dinas Kesehatan
1	01	02	06		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat dan Perbekalan kesehatan yang cukup	100%	100%	3.187.139									100%	3.187.139	Dinas Kesehatan
1	01	02	07		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33%	100%	2.803.753									100%	2.803.753	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	20%													
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiw a Berat	100%													
						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	91%													
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV	60,96%													
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	33,51%													
						Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	68,2%													
						Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Filariasis	100%													
1	01	02	08		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						3.137.904		2.155.661		2.220.331		2.242.534		9.756.430	Dinas Kesehatan
						Persentase Penanganan Penyakit Menular	100%			100%	2.373.840	100%	1.355.977	100%	1.396.657	100%	1.410.623	100%		
						Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%			100%	764.063	100%	799.684	100%	823.674	100%	831.911	100%		
1	01	02	09		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				3.188.324		2.712.927		2.714.740		2.796.183		2.824.144		14.236.318	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,72%	100%	3.188.324	100%	493.044	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%		
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,87%			100%	455.000	100%	460.000	100%	473.800	100%	478.538	100%		
						Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18%			100%	305.000	100%	350.750	100%	361.273	100%	364.885	100%		
						Pelayanan Kesehatan Balita	75,76%			100%	230.000	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%		
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%			100%	245.000	100%	281.750	100%	290.203	100%	293.105	100%		
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75,29%			100%	150.000	100%	172.500	100%	177.675	100%	179.452	100%		
						Persentase Desa Siaga Aktif	62,15%			100%	834.883	100%	920.740	100%	948.363	100%	957.846	100%		

1	01	02	10		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	100%	100%	5.681.285									100%	5.681.285	Dinas Kesehatan
1	01	02	11		Program Pengaw asan Makanan dan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan yang laik higienis sanitasi	36,3%	100%	171.255									100%	171.255	Dinas Kesehatan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	6.698.289	100%	5.021.095	100%	5.474.259	100%	5.638.487	100%	5.694.872	100%	28.527.002	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	14.787.079	100%	2.525.183	100%	2.703.961	100%	2.785.080	100%	2.812.931	100%	25.614.234	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	30.000	100%	53.253	100%	55.241	100%	56.898	100%	57.467	100%	252.860	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	5.943.063									100%	5.943.063	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	2.068.530	100%	2.068.530	100%	2.130.586	100%	2.151.892	100%	8.419.538	Dinas Kesehatan
3	01	05	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	125.070	100%	143.831	100%	148.145	100%	149.627	100%	566.673	Dinas Kesehatan
1	**01**	**03**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**161.835.938**		**169.758.331**		**212.567.545**		**212.203.660**		**211.957.477**			
1	01	03	01		Program Pembinaan dan Pengembangan Air Minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan air minum	76,08%	77%	19.910.472									77%	19.910.472	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	02		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	76,08%			78%	13.698.890	79%	13.497.029	80%	13.901.940	81%	14.040.959	81%	55.138.818	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	03		Program Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Persentase Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	52.8%	53%	2.130.000									53%	2.130.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	04		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman						18.084.060		19.120.620		18.669.219		18.760.595		74.634.494	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

						Persentase jalan lingkungan yang tertangani	belum tersedia			29,85%	15.181.660	44,78%	16.011.225	59,70%	15.491.562	74,63%	15.569.020	74,63%		
						Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	60,14%			61,30%	1.664.900	61,87%	1.748.145	62,45%	1.775.569	63,02%	1.780.325	63,02%		
						Persentase pengolahan air limbah permukiman	52,80%			54%	1.237.500	55%	1.361.250	56%	1.402.088	57%	1.411.250	57%		
1	01	03	05		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase saw ah yang terairi irigasi	53,79%	54,26%	8.527.500	54,72%	8.430.051	55,19%	7.847.030	55,65%	7.982.441	56,58%	8.008.792	56,58%	40.795.814	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	06		Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang memenuhi standar	76%	76%	69.414.181									76%	69.414.181	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	07		Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%			76%	108.389.250	76%	144.338.136	76%	145.214.179	76%	145.311.279	76%	543.252.844	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	08		Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan	480 km	480 km	42.145.262									480 km	42.145.262	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan	100 m	100 m										100 m		
1	01	03	09		Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani	5,23%	6,52%	1.683.935	26,50%	1.000.000	46,50%	1.122.320	66,60%	1.155.990	86,60%	1.167.549	86,60%	6.129.794	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	10		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	Persentase drainase dalam kondisi baik	34,33%	46,85%	4.354.094	59,35%	7.050.000	71,85%	10.200.000	84,35%	10.306.000	96,85%	10.337.290	96,85%	42.247.384	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	11		Program Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/Gedung Negara	100%	100%	5.886.030									100%	5.886.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	12		Program Pengembangan dan Penataan Bangunan						5.175.000		3.790.000		3.903.060		3.924.481		16.792.541	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	10,56%			17,40%	825.000	20,60%	1.190.000	23,80%	1.225.060	27,00%	1.230.281	27,00%		
						Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	10%			15%	500.000	20%	600.000	25%	618.000	30%	622.100	30%		
						Terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara	100%			100%	3.850.000	100%	2.000.000	100%	2.060.000	100%	2.072.100	100%		
1	01	03	13		Program Perencanaan Tata Ruang				648.620		2.080.000		1.295.000		1.372.700		1.275.100		6.671.420	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
						Dokumen tata ruang	1	2	648.620	3	2.000.000	3	1.200.000	2	1.272.000	3	1.275.100	13		

					Dokumen tata ruang yang telah di Perdakan	1	0		1	80.000	1	95.000	1	100.700	0	0	4		
1	01	03	14	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang				330.664		425.000		533.000		548.990		554.480		2.392.134	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
					Terkendalinya pemanfaatan ruang	80%	80%	330.664									80%		
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	belum tersedia	100%		100%	75.000	100%	80.000	100%	82.400	100%	83.224	100%		
					Ketaatan terhadap RTRW	belum tersedia	100%		100%	350.000	100%	453.000	100%	466.590	100%	471.256	100%		
1	01	03	15	Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi				235.997		260.000		269.500		277.585		280.361		1.323.443	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).	100%	100%	235.997									100%		
					Persentase Tenaga Terampil bersertifikat Konstruksi	21,17%			53%	260.000	68%	269.500	84%	277.585	100%	280.361	100%		
1	01	03	16	Program Pengelolaan Sumber Air Baku	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	Belum tersedia			12%	728.000	17%	810.800	23%	835.124	28%	843.475	28%	3.217.399	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	17	Program Pengembangan dan Penataan Taman	Persentase taman terkelola	90%	100%	2.392.740	100%	2.250.000	100%	7.200.000	100%	5.416.000	100%	4.806.478	100%	22.065.218	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	100%	100%	1.295.200									100%	1.295.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.427.700	100%	1.132.100	100%	1.254.200	100%	1.291.826	100%	1.304.744	100%	6.410.570	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.266.542	100%	863.580	100%	1.088.510	100%	1.121.165	100%	1.132.377	100%	5.472.174	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	28.000	100%	53.000	100%	55.000	100%	56.650	100%	57.217	100%	249.867	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	149.000									100%	149.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	95.000	100%	100.000	100%	103.000	100%	104.030	100%	402.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	44.400	100%	46.400	100%	47.792	100%	48.270	100%	186.862	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**04**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**19.483.497**		**3.610.000**		**4.400.000**		**4.532.000**		**4.575.775**			
1	**01**	**04**	**01**	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman	100%	100%	19.483.497									100%	19.483.497	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**04**	**02**	Program Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Persentase Luasan kawasan kumuh	51,28%			15,39%	3.510.000	7,95%	4.250.000	4,44%	4.377.500	0	4.421.275	0	16.558.775	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**04**	**03**	Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%			100%	100.000	100%	150.000	100%	154.500	100%	154.500	100%	559.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**05**		**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				**11.404.575**		**19.630.973**		**21.449.080**		**22.092.553**		**22.313.478**			
1	**01**	**05**	**01**	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100%	712.802	100%	784.082	100%	807.605	100%	815.681	100%	3.120.170	BPBD
1	**01**	**05**	**02**	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	2.498.863									100%	2.498.863	SATPOLPP
1	**01**	**05**	**03**	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase tingkat pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	290.509									100%	290.509	SATPOLPP
1	**01**	**05**	**04**	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana						1.382.698		1.520.968		1.566.597		1.582.263		6.052.525	BPBD
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	belum tersedia			100%	984.563	100%	1.083.019	100%	1.115.510	100%	1.126.665	100%		
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	belum tersedia			100%	398.135	100%	437.949	100%	451.087	100%	455.598	100%		
1	**01**	**05**	**05**	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	421.500	100%	4.932.130	100%	5.425.343	100%	5.588.103	100%	5.643.984	100%	22.011.061	SATPOL PP (Tahun 2019), BPBD (Tahun 2020-2023)

					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%			100%	2.170.147	100%	2.387.162	100%	2.458.777	100%	2.483.364	100%	9.499.450	BPBD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%			100%	340.265	100%	464.292	100%	478.220	100%	483.002	100%	1.765.779	BPBD
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%			100%	297.250	100%	297.250	100%	306.168	100%	309.229	100%	1.209.897	BPBD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%											100%	-	BPBD
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	125.250	100%	125.250	100%	129.008	100%	130.298	100%	509.805	BPBD
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	21.000	100%	21.000	100%	21.630	100%	21.846	100%	85.476	BPBD
1	**01**	**05**	**06**		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	94,79%	100%	432.551									100%	432.551	SATPOLPP
1	**01**	**05**	**07**		Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						3.963.117		4.359.429		4.490.212		4.535.114		17.347.871	SATPOLPP
						Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%			100%	3.181.001	100%	3.499.101	100%	3.604.074	100%	3.640.115	100%		
						Persentase Penegakan PERDA	100%			100%	782.116	100%	860.328	100%	886.137	100%	894.999	100%		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	5.680.581	100%	4.062.504	100%	4.368.754	100%	4.499.817	100%	4.544.815	100%	23.156.472	SATPOLPP
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	882.321	100%	696.410	100%	766.051	100%	789.033	100%	796.923	100%	3.930.737	SATPOLPP
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	689.450	100%	688.150	100%	688.150	100%	708.795	100%	715.882	100%	3.490.427	SATPOLPP
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	498.800									100%	498.800	SATPOLPP

				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	218.250	100%	218.250	100%	224.798	100%	227.045	100%	888.343	SATPOLPP
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	SATPOLPP
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	21.000	100%	23.100	100%	23.793	100%	24.031	100%	91.924	SATPOLPP
1	**01**	**06**		**Sosial**				**4.118.591**		**8.457.650**		**5.790.833**		**6.014.347**		**6.074.490**			
1	**01**	**06**	**01**	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				750.580		1.870.212		1.508.893		1.554.160		1.569.702		7.253.548	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	95%	100%	750.580	100%	1.033.747	100%	764.866	100%	787.812	100%	795.690	100%		
					Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	tidak terjadi bencana	100%		100%	836.466	100%	744.028	100%	766.348	100%	774.012	100%		
1	**01**	**06**	**02**	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	70,66%	100%	890.840									100%	890.840	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**01**	**06**	**03**	Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin						1.130.928		1.137.632		1.171.761		1.183.479		4.623.799	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	20%			40%	206.275	60%	157.500	80%	162.225	100%	163.847	100%		
					Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	88,28%			87,38%	924.653	86,93%	980.132	86,48%	1.009.536	86,03%	1.019.631	86,03%		
1	**01**	**06**	**04**	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif	75%			85%	1.565.678	90%	1.659.618	95%	1.759.195	100%	1.776.787	100%	6.761.278	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	01	06	05		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan	80%	100%	1.274.350									100%	1.274.350	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	643.369	100%	566.848	100%	618.890	100%	637.457	100%	643.831	100%	3.110.395	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	462.952	100%	3.108.184	100%	650.000	100%	669.500	100%	676.195	100%	5.566.831	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	16.500	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.720	100%	24.967	100%	114.187	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	70.000									100%	70.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	125.000	100%	125.000	100%	128.750	100%	130.038	100%	508.788	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	01	05	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	66.800	100%	66.800	100%	68.804	100%	69.492	100%	271.896	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	02			**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**																
1	02	01		**Tenaga Kerja**					**572.754**		**664.474**		**813.000**		**845.200**		**853.652**			
1	02	01	01		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	20%	66.280	100%	153.000	100%	218.000	100%	225.000	100%	227.250	100%	889.530	Dinas KUKMPTK
1	02	01	02		Program Peningkatan Kesempatan Kerja						511.474		595.000		620.200		626.402		2.353.076	Dinas KUKMPTK
						Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	30,30%			32%	82.248	35%	95.000	37%	100.200	40%	101.202	40%		
						Persentase Peluang Kerja Mandiri/berwirausaha	15%			17%	429.226	20%	500.000	22%	520.000	25%	525.200	25%		
1	02	01	03		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan kesempatan kerja	100%	100%	506.474									100%	506.474	Dinas KUKMPTK

1	**02**	**02**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**856.063**		**1.032.279**		**1.094.497**		**1.135.344**		**1.146.698**			
1	**02**	**02**	**01**	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status KLA (Kabupaten Layak Anak) Pratama	Deklarasi	Pratama		Pratama	314.835	Pratama	333.725	Pratama	351.749	Pratama	355.266	Pratama	1.355.576	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**02**	**02**	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pelayanan perempuan dan anak	100%	100%	206.559									100%	206.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**02**	**03**	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan	100%	100%	355.075									100%	355.075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**02**	**04**	Program Perlindungan Perempuan dan Anak						349.498		370.749		381.872		385.690		1.487.809	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,9%			5,7%	201.700	5,5%	200.200	5,3%	206.206	5,2%	208.268	5,2%		
					Persentase penanganan anak korban kekerasan	100%			100%	147.798	100%	170.549	100%	175.666	100%	177.422	100%		
1	**02**	**02**	**05**	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	51%	70%	294.430									70%	294.430	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundan Anak
1	**02**	**02**	**06**	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan						367.946		390.023		401.723		405.741		1.565.433	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
					Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50%			52%	227.241	53%	240.875	54%	248.102	55%	250.583	55%		
					Partisipasi angkatan kerja perempuan	20%			25%	140.705	27%	149.147	29%	153.622	30%	155.158	30%		
1	**02**	**03**		**Pangan**				**314.847**		**407.155**		**559.000**		**586.800**		**592.668**			
1	**02**	**03**	**01**	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan				107.238		75.268		85.000		89.200		90.092		446.797	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	22,22%	18,18%	107.238	36,36%	45.498	54,55%	50.000	72,73%	52.500	90,91%	53.025	90,91%		
					Persentase (%)Tingkat Keamanan Pangan	100%	100%		100%	29.770	100%	35.000	100%	36.700	100%	37.067	100%		
1	**02**	**03**	**02**	Program Peningkatan Ketesediaan dan Distribusi Pangan				207.610		331.887		474.000		497.600		502.576		2.013.673	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase ketersediaan cadangan pangan	5,59%	14,69%	207.610	35,66%	225.301	56,64%	330.000	77,62%	346.800	100%	350.268	100%		

						Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,56%	93,00%		94,00%	106.587	95,00%	144.000	96,00%	150.800	97,00%	152.308	97,00%		
1	**02**	**04**		**Pertanahan**					**3.700.000**		**83.290**		**83.290**		**86.656**		**87.523**			
1	**02**	**04**	**01**		Program Penataan Wilayah dan Batas	Persentase penegasan batas w ilayah dalam kabupaten (kecamatan)	belum tersedia			25%	46.575	50%	46.575	75%	48.730	100%	49.217	100%	191.097	Bagian Pemerintahan
1	**02**	**04**	**02**		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%	3.700.000									100%	3.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**02**	**04**	**03**		Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pemenuhan kebutuhan lahan pelayanan publik	belum tersedia			20%	36.715	20%	36.715	20%	37.926	20%	38.305	80%	149.661	Bagian Pemerintahan
1	**02**	**05**		**Lingkungan Hidup**					**11.744.137**		**11.924.034**		**13.234.801**		**13.631.845**		**13.768.163**			
1	**02**	**05**	**01**		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				1.598.736		2.322.453		2.582.372		2.659.843		2.686.442		11.849.846	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	34,10%	39%	1.598.736	44%	2.178.105	49%	2.423.589	54%	2.496.297	59%	2.521.260	59%		
						Sekolah yang berw aw asan lingkungan tingkat kabupaten	23	26		29	119.190	32	131.109	35	135.042	38	136.393	38		
						Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%	25.158	100%	27.674	100%	28.504	100%	28.789	100%		
1	**02**	**05**	**02**		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ketersediaan Informasi mengenai status lingkungan hidup daerah	0	2 Dokumen	225.020									2 Dokumen	225.020	Dinas Lingkungan Hidup
1	**02**	**05**	**03**		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase (%) penanganan sampah per hari	30,84%	35%	6.987.515									35%	6.987.515	Dinas Lingkungan Hidup
1	**02**	**05**	**04**		Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan						7.711.694		8.482.863		8.737.349		8.824.723		33.756.629	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase jumlah sampah yang ditangani	30,84%			40%	6.710.894	45%	7.381.983	50%	7.603.443	55%	7.679.477	55%		

						Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	4			14	1.000.800	17	1.100.880	20	1.133.906	23	1.145.245	23		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	841.900	100%	800.875	100%	940.963	100%	969.191	100%	978.883	100%	4.531.812	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.862.466	100%	595.912	100%	735.503	100%	757.568	100%	765.143	100%	4.716.591	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	18.500	100%	89.600	100%	89.600	100%	92.288	100%	93.211	100%	383.199	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	200.000									100%	200.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	200.000	100%	200.000	100%	206.000	100%	208.060	100%	814.060	Dinas Lingkungan Hidup
3	**01**	**05**	**01**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	203.500	100%	203.500	100%	209.605	100%	211.701	100%	828.306	Dinas Lingkungan Hidup
1	**02**	**06**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**3.387.810**		**3.030.943**		**3.426.556**		**3.529.353**		**3.564.646**			
1	**02**	**06**	**01**		Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.913.540		1.418.522		1.544.098		1.590.421		1.606.325		8.072.906	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase (%) Pelayanan Administrasi Kependudukan	88%	80%	1.913.540									80%		
						Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%			81%	908.772	83%	957.873	84%	986.609	86%	996.475	86%		
						Persentase capaian pencatatan sipil	92%			94%	144.305	94%	170.680	95%	175.800	95%	177.558	95%		
						Persentase pemanfaatan data	100%			100%	365.445	100%	415.545	100%	428.011	100%	432.291	100%		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	853.643	100%	769.750	100%	923.500	100%	951.205	100%	960.717	100%	4.458.815	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	484.128	100%	622.671	100%	738.958	100%	761.127	100%	768.738	100%	3.375.621	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	16.500	100%	43.000	100%	43.000	100%	44.290	100%	44.733	100%	191.523	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	110.000									100%	110.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	102.000	100%	102.000	100%	105.060	100%	106.111	100%	415.171	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	75.000	100%	75.000	100%	77.250	100%	78.023	100%	305.273	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**1.389.100**		**2.855.452**		**2.535.713**		**2.611.784**		**2.637.902**			
1	**02**	**07**	**01**	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						1.164.859		692.720		713.502		720.637		3.291.717	DPPKBPMD
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Belum Tersedia			Memuaskan	931.739	Memuaskan	459.600	Memuaskan	473.388	Memuaskan	478.122	Memuaskan		
					Persentase ketersediaan data dan informasi desa (Profil Desa) yang mutakhir	46,94%			71,43%	81.600	100%	81.600	100%	84.048	100%	84.888	100%		
					Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	97,62%			100%	151.520	100%	151.520	100%	156.066	100%	157.626	100%		
1	**02**	**07**	**02**	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya fungsi dan peran serta masyarakat	100%	100%	309.060									100%	309.060	DPPKBPMD
1	**02**	**07**	**03**	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase (%) pembinaan pengelolaan keuangan desa	85,60%	100%	149.420									100%	149.420	DPPKBPMD
1	**02**	**07**	**04**	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				930.620		1.690.593		1.842.993		1.898.282		1.917.265		8.279.752	DPPKBPMD
					Persentase kelembagaan desa aktif	98,93%	99,07%	930.620	99,20%	1.365.063	99,53%	1.517.463	99,87%	1.562.986	100%	1.578.616	100%		

					Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	27,27%	28,57%		29,73%	223.370	30,77%	223.370	32,50%	230.071	37,50%	232.372	37,50%		
					Persentase BUMDesa aktif tiap desa	69,05%	76,19%		83,33%	102.160	90,48%	102.160	97,62%	105.225	100%	106.277	100%		
1	**02**	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**4.362.565**		**4.808.651**		**5.438.081**		**5.601.223**		**5.657.236**			
1	**02**	**08**	**01**	Program Keluarga Berencana	Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	82,04%	80%	1.287.250									80%	1.287.250	DPPKBPMD
1	**02**	**08**	**02**	Program Peningkatan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi implant dan pelayanan KB medis operatif	75,46%	82%	1.377.329									82%	1.377.329	
1	**02**	**08**	**03**	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Mempunyai Tenaga Pendamping	81 Kelompok	81 Kelompok	30.000									81 Kelompok	30.000	
1	**02**	**08**	**04**	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD	49 orang 206 orang	49 orang 206 orang	402.325									49 orang 206 orang	402.325	
1	**02**	**08**	**05**	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	28 Kel	33 Kel	43.155									33 Kel	43.155	
1	**02**	**08**	**06**	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						3.393.075		3.846.880		3.962.286		4.001.909		15.204.151	DPPKBPMD
					Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,99%			8,19%	1.606.980	7,79%	1.750.980	6,99%	1.803.509	6,50%	1.821.544	6,50%		
					Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	22%			21,20%	1.558.890	20,80%	1.770.900	20,40%	1.824.027	20%	1.842.267	20%		
					Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	20%			19%	227.205	18,50%	325.000	18%	334.750	17,50%	338.098	17,50%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	697.226	100%	661.996	100%	800.280	100%	824.288	100%	832.531	100%	3.816.321	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	392.580	100%	603.580	100%	640.921	100%	660.149	100%	666.750	100%	2.963.980	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	18.000	100%	22.500	100%	22.500	100%	23.175	100%	23.407	100%	109.582	DPPKBPMD

					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	80.000									100%	80.000	DPPKBPMD
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	90.000	100%	90.000	100%	92.700	100%	93.627	100%	366.327	DPPKBPMD
3	01	05	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DPPKBPMD
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	37.500	100%	37.500	100%	38.625	100%	39.011	100%	152.636	DPPKBPMD
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	24.700									100%	24.700	DPPKBPMD
1	02	09		**Perhubungan**					**33.307.081**		**96.917.085**		**102.682.483**		**104.860.003**		**105.889.616**			
1	02	09	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi				23.228.607		21.403.860		22.688.092		23.300.017		23.433.017		114.053.592	Dinas Perhubungan
						Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	32,12%	39,03%	23.228.607	54,26%	11.903.860	67,83%	12.618.092	82,00%	12.975.817	98,35%	13.005.575	98,35%		
						Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar	17,98%	20,29%		22,60%	9.500.000	24,91%	10.070.000	27,23%	10.324.200	29,54%	10.427.442	29,54%		
1	02	09	02		Program Pengendalian, Pengaw asan dan Evaluasi Transportasi	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas	50%	42%	1.320.173	34%	1.535.445	26%	1.612.217	18%	1.773.095	10%	1.790.826	10%	8.031.756	Dinas Perhubungan
1	02	09	03		Program Peningkatan Kelayakan Alat Transportasi	Persentase (%) Kendaraan Motor Wajib Uji	72,50%	100%	479.421									100%	479.421	Dinas Perhubungan
1	02	09	04		Program Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi	Jumlah Pelayanan Moda Transportasi	12,50%	100%	2.894.550									100%	2.894.550	Dinas Perhubungan
1	02	09	05		Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten	12,50%			100%	30.422.360	100%	32.247.702	100%	33.182.564	100%	33.475.890	100%	129.328.516	Dinas Perhubungan
1	02	09	06		Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	13,81%	100%	600.000	100%	40.514.558	100%	42.945.431	100%	43.233.750	100%	43.785.600	100%	171.079.339	Dinas Perhubungan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.686.675	100%	1.587.385	100%	1.716.754	100%	1.819.759	100%	1.837.957	100%	8.648.530	Dinas Perhubungan

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.795.856	100%	1.056.702	100%	1.075.512	100%	1.140.043	100%	1.151.443	100%	7.219.556	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	91.800	100%	153.500	100%	153.500	100%	155.500	100%	157.055	100%	711.355	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	200.000									100%	200.000	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	200.000	100%	200.000	100%	211.000	100%	213.110	100%	824.110	Dinas Perhubungan
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	43.275	100%	43.275	100%	44.275	100%	44.718	100%	175.543	Dinas Perhubungan
1	**02**	**10**		**Komunikasi dan Informatika**				**4.712.372**		**11.922.516**		**12.560.018**		**12.986.227**		**13.034.586**			
1	**02**	**10**	**01**	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kelancaran diseminasi, informasi dan pendistribusian informasi daerah	80%	100%	1.857.687									100%	1.857.687	DISKOMINFO
1	**02**	**10**	**02**	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	25%	50%	1.297.175	65%	9.451.650	80%	9.864.242	90%	10.211.093	90%	10.231.700	90%	41.055.860	DISKOMINFO
1	**02**	**10**	**03**	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				296.520		1.282.796		1.291.796		1.330.550		1.343.855		5.545.517	DISKOMINFO
					Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	Belum tersedia			90%	54.000	90%	56.000	90%	57.680	90%	58.257	90%		
					Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	40%	40%	296.520	60%	1.228.796	80%	1.235.796	90%	1.272.870	90%	1.285.599	90%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	646.815	100%	626.300	100%	755.730	100%	778.402	100%	786.186	100%	3.593.433	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	421.675	100%	314.020	100%	400.500	100%	412.515	100%	416.640	100%	1.965.350	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	12.500	100%	52.250	100%	52.250	100%	53.818	100%	54.356	100%	225.173	DISKOMINFO

					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	170.000									100%	170.000	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	125.000	100%	125.000	100%	127.500	100%	128.775	100%	506.275	DISKOMINFO
3	**01**	**05**	**01**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	70.500	100%	70.500	100%	72.350	100%	73.074	100%	286.424	DISKOMINFO
1	**02**	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**					**13.836.640**		**4.208.293**		**4.877.595**		**5.053.997**		**5.167.507**			
1	**02**	**11**	**01**		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	Persentase (%)pertumbuhan usaha mikro	6,26%	1,00%	549.510									1,00%	549.510	Dinas KUKMPTK
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Koperasi dan UKM Mandiri	16%	16%	358.000									16%	358.000	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**11**	**02**		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro						499.310		695.811		737.560		759.686		2.692.367	Dinas KUKMPTK
						Penumbuhan usaha mikro	17.596			17.898	99.960	18.048	120.500	18.198	127.730	18.348	131.562	18.348		
						Persentase (%) usaha mikro yang omsetnya meningkat	42%			52%	399.350	57%	575.311	62%	609.830	67%	628.125	67%		
1	**02**	**11**	**03**		Program Pembinaan Koperasi	Persentase (%) koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40%	50%	434.255									50%	434.255	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**11**	**04**		Program Pengembangan Koperasi	Persentase (%) Koperasi aktif	70%			80%	594.705	85%	640.000	90%	668.400	95%	688.452	95%	2.591.557	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**11**	**05**		Program Peningkatan Akses Permodalan	Persentase (%) pertumbuhan produk Usaha Mikro	18%	20%	751.070									20%	751.070	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**11**	**06**		Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun	14%	42%	10.544.500	56%	1.629.235	70%	1.850.000	84%	1.905.500	100%	1.924.555	100%	17.853.790	Dinas KUKMPTK

					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	810.218	100%	957.413	100%	1.090.780	100%	1.123.503	100%	1.157.209	100%	5.139.123	Dinas KUKMPTK
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	278.087	100%	427.130	100%	500.504	100%	515.519	100%	530.985	100%	2.252.225	Dinas KUKMPTK
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	19.000	100%	26.000	100%	26.000	100%	26.780	100%	27.583	100%	125.363	Dinas KUKMPTK
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	52.000									100%	52.000	Dinas KUKMPTK
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	40.000	100%	40.000	100%	41.200	100%	42.436	100%	163.636	Dinas KUKMPTK
3	01	05	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas KUKMPTK
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	34.500	100%	34.500	100%	35.535	100%	36.601	100%	141.136	Dinas KUKMPTK
3	01	05	33		Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	30.000									100%	30.000	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**12**		**Penanaman Modal**					**10.183.143**		**3.035.955**		**3.307.680**		**3.447.490**		**3.550.914**			
1	**02**	**12**	**01**		Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	Peningkatan jumlah investor	87	100	877.915	120	1.222.950	144	1.285.200	174	1.323.756	214	1.363.469	214	6.073.290	DPMPTSPP
1	**02**	**12**	**02**		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	87,21%	88%	38.305	88%	443.784	88%	497.660	90%	527.520	90%	543.345	90%	2.050.613	DPMPTSPP
1	**02**	**12**	**03**		Program Pengendalian dan Pengaw asan Investasi	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal	80%			100%	30.000	100%	32.000	100%	33.920	100%	34.938	100%	130.858	DPMPTSPP
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	616.950	100%	593.550	100%	720.600	100%	743.836	100%	766.151	100%	3.441.087	DPMPTSPP
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	8.529.973	100%	560.671	100%	585.720	100%	620.863	100%	639.489	100%	10.936.716	DPMPTSPP
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	18.000	100%	23.000	100%	23.000	100%	24.380	100%	25.111	100%	113.491	DPMPTSPP

					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	379.629	100%	1.342.429	100%	476.692	100%	490.993	100%	505.723	100%	3.195.465	DISPORA
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	13.500	100%	37.500	100%	37.250	100%	38.368	100%	39.519	100%	166.136	DISPORA
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	75.000									100%	75.000	DISPORA
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	185.000	100%	185.000	100%	190.550	100%	196.267	100%	756.817	DISPORA
3	**01**	**05**	**01**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DISPORA
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	755.708	100%	150.000	100%	154.500	100%	159.135	100%	1.219.343	DISPORA
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	162.645									100%	162.645	DISPORA
1	**02**	**14**		**Statistik**					**107.000**		**344.940**		**375.880**		**387.156**		**398.771**			
1	**02**	**14**	**01**		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	70%	75%	107.000									75%	107.000	DISKOMINFO
1	**02**	**14**	**02**		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Belum tersedia			70%	344.940	80%	375.880	90%	387.156	90%	398.771	90%	1.506.747	DISKOMINFO
1	**02**	**15**		**Persandian**					**138.480**		**126.500**		**128.000**		**131.840**		**135.795**			
1	**02**	**15**	**01**		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	20%	30%	111.740									30%	111.740	DISKOMINFO
1	**02**	**15**	**02**		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				26.740		126.500		128.000		131.840		135.795		548.875	DISKOMINFO
						Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi	60%	60%		70%	75.500	80%	76.000	90%	78.280	90%	80.628	90%		
						Tingkat kematangan keamanan informasi	Level II	Level II	26.740	Level III	51.000	Level III+	52.000	Level IV	53.560	Level IV	55.167	Level IV		

1	**02**	**16**		**Kebudayaan**				**2.599.960**		**13.793.171**		**4.148.850**		**4.273.316**		**4.316.049**			
1	**02**	**16**	**01**	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai budaya yang berkembang	80%	82%	1.139.360	84%	13.793.171	86%	4.148.850	88%	4.273.316	90%	4.316.049	90%	27.670.745	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
1	**02**	**16**	**02**	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya	80%	100%	1.237.085									100%	1.237.085	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
1	**02**	**16**	**03**	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	80%	90%	223.515									90%	223.515	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
1	**02**	**17**		**Perpustakaan**				**1.614.569**		**3.433.984**		**3.749.890**		**3.862.387**		**3.901.011**			
1	**02**	**17**	**01**	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				418.860		2.119.182		2.273.498		2.341.703		2.365.120		9.518.363	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah pemustaka per tahun	332.661	333.611	418.860	339.861	1.440.053	343.501	1.526.456	347.101	1.572.249	350.701	1.587.972	350.701		
					Jumlah koleksi buku yang dipinjam	89.811	91.711		93.611	679.130	95.511	747.042	97.411	769.454	99.311	777.148	99.311		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Persentase meningkatnya SDM perpustakaan	100%	100%	90.790									100%	90.790	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengolah, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengolahan bahan perpustakaan	100%	100%	244.493									100%	244.493	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	535.580	100%	573.100	100%	710.400	100%	731.712	100%	739.029	100%	3.289.821	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	206.846	100%	587.902	100%	610.692	100%	629.013	100%	635.303	100%	2.669.756	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	13.000	100%	40.800	100%	40.800	100%	42.024	100%	42.444	100%	179.068	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	95.000									100%	95.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	110.000	100%	110.000	100%	113.300	100%	114.433	100%	447.733	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.500	100%	4.635	100%	4.681	100%	16.816	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	**02**	**18**		**Kearsipan**					**344.293**		**295.388**		**324.927**		**344.422**		**354.755**			
1	**02**	**18**	**01**		Program Pembinaan, Penataan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Daerah	Persentase tercapainya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	30%	40%	344.293									40%	344.293	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	**02**	**18**	**02**		Program Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	30%			50%	295.388	65%	324.927	75%	344.422	85%	354.755	85%	1.319.492	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2				**Urusan Pilihan**																
2	**01**	**01**		**Kelautan dan Perikanan**					**8.782.230**		**10.198.812**		**10.718.639**		**11.040.198**		**11.180.645**			
2	**01**	**01**	**01**		Program Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10,71%	10,82%	1.025.636									10,82%	1.025.636	Dinas Perikanan
2	**01**	**01**	**02**		Program Pengembangan Perikanan Tangkap				3.310.504		6.612.112		6.845.339		7.050.699		7.121.206		30.939.859	Dinas Perikanan
						Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	65.723	66.381	3.310.504	67.044	5.387.112	67.715	5.710.339	68.392	5.881.649	69.076	5.940.465	69.076		
						Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10,71%			10,92%	1.225.000	11,03%	1.135.000	11,14%	1.169.050	11,26%	1.180.741	11,26%		
2	**01**	**01**	**03**		Program Pengembangan Perikanan Budidaya				1.062.064		2.281.200		2.414.800		2.487.244		2.512.116		10.757.424	Dinas Perikanan
						Produksi Perikanan budidaya (Ton /tahun)	207,2	211	1.062.064	215	1.201.200	219	1.270.000	223	1.308.100	227	1.321.181	227		
						Peningkatan produksi benih yang berkualitas	3,78%			8,70%	1.080.000	13,60%	1.144.800	16,20%	1.179.144	21,21%	1.190.935	21,21%		
2	**01**	**01**	**04**		Program Peningkatan Kualitas Pembenihan Ikan	Ketersediaan benih ikan yang berkualitas (ekor/tahun)	1.999.268	2.000.000	1.218.363									########	1.218.363	Dinas Perikanan
2	**01**	**01**	**05**		Program Pengembangan Usaha dan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan (Ton/tahun)	8.452	8.500	783.050									8.500	783.050	Dinas Perikanan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	851.911	100%	788.200	100%	910.000	100%	937.300	100%	965.419	100%	4.452.830	Dinas Perikanan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	394.203	100%	349.000	100%	380.000	100%	391.400	100%	403.142	100%	1.917.745	Dinas Perikanan
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	22.500	100%	38.000	100%	38.000	100%	39.140	100%	40.314	100%	177.954	Dinas Perikanan

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	104.000									100%	104.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	65.000	100%	65.000	100%	66.950	100%	68.959	100%	265.909	Dinas Perikanan
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	65.300	100%	65.500	100%	67.465	100%	69.489	100%	267.754	Dinas Perikanan
2	**01**	**02**		**Pariwisata**				**23.510.604**		**27.031.426**		**29.956.053**		**30.854.735**		**31.161.288**			
2	01	02	01	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan kualitas daya tarik wisata	67%	73%	10.948.021	79%	14.902.519	86%	16.877.676	93%	17.384.006	100%	17.557.846	100%	77.670.069	Dinas Pariwisata
2	01	02	02	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Komponen Pemasaran Pariwisata.	100%	100%	5.847.005									100%	5.847.005	Dinas Pariwisata
2	01	02	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%			100%	6.143.576	100%	7.152.174	100%	7.366.739	100%	7.440.406	100%	28.102.895	Dinas Pariwisata
2	01	02	04	Program Pengembangan SDM Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM Pariwisata	belum tersedia	80%	1.231.863									80%	1.231.863	Dinas Pariwisata
2	01	02	05	Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	Frekuensi Koordinasi Kemitraan Usaha Pariwisata	belum tersedia	2 kali	204.600									2 kali	204.600	Dinas Pariwisata
2	01	02	06	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	belum tersedia			80%	859.960	80%	945.956	80%	974.335	80%	984.078	80%	3.764.329	Dinas Pariwisata
2	01	02	07	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan	persentase SDM/ kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	belum tersedia	100%	308.510									100%	308.510	Dinas Pariwisata
2	01	02	08	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	50%	50%	1.896.778	56,25%	2.231.830	63,50%	2.811.194	68,75%	2.895.529	75%	2.924.485	100%	12.759.815	Dinas Pariwisata
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.416.885	100%	1.168.252	100%	1.307.274	100%	1.346.492	100%	1.355.762	100%	6.594.666	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.518.743	100%	1.514.290	100%	650.780	100%	670.303	100%	675.183	100%	5.029.299	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	53.200	100%	34.000	100%	34.000	100%	35.020	100%	36.071	100%	192.291	Dinas Pariwisata

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	75.000									100%	75.000	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	161.000	100%	161.000	100%	165.830	100%	170.805	100%	658.635	Dinas Pariwisata
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	16.000	100%	16.000	100%	16.480	100%	16.652	100%	65.132	Dinas Pariwisata
2	**01**	**03**		**Pertanian**				**6.547.264**		**7.331.674**		**8.071.782**		**8.313.935**		**8.475.807**			
2	**01**	**03**	**01**	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura				843.731		1.276.663		1.412.887		1.455.273		1.498.932		6.487.485	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi Tanaman Pangan Strategis (Ton Gabah Kering Giling) (Padi)	2.386	2.436	410.891	2.605	319.656	2.723	410.000	2.841	422.300	2.960	434.969	2.960		
					Produksi Tanaman Pangan Lokal (Ton)	1.520	1.596	76.840	1.672	127.000	1.748	134.620	1.824	138.659	1.900	142.818	1.900		
					Produksi tanaman Hortikultura (Ton)	1.193	1.236	356.000	1.279	621.007	1.322	658.267	1.365	678.015	1.408	698.355	1.408		
					Peningkatan Mutu Produk Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (jumlah produk)	4			8	209.000	10	210.000	12	216.300	14	222.789	14		
2	**01**	**03**	**02**	Program Pengembangan Perkebunan	Produksi Lada	4793,40 ton	2.112 ton	330.925									2.112 ton	330.925	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi Karet	1416,16 ton	6 ton										6 ton		
					Produksi Tanaman Kopi	1200 ton	67 ton										67 ton		
					Kelengkapan persyaratan teknis dan non teknis perusahaan besar sawit	100%	100%										100%		
2	**01**	**03**	**03**	Program Pengembangan Tanaman Perkebunan						527.415		582.375		599.846		617.842		2.327.478	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton)	8,1			8,9	383.665	9,3	430.000	9,8	442.900	10,3	456.187	10,3		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan (Jenis)	2			4	143.750	5	152.375	6	156.946	7	161.655	7		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**01**	**03**	**04**	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan				859.770		600.693		641.791		661.045		680.876		3.444.175	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

					Persentase penanganan kasus penyakit hew an menular	100%	100%	256.155									256.155		
					Persentase pelayanan penyakit hew an	100%	100%	150.180									150.180		
					Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	2 Kelompok	1 Kelompok	78.655									78.655		
					Jumlah Populasi ternak besar sapi	1.751	1.773	49.650	1.800	42.400	1.827	50.000	1.854	51.500	1.882	53.045	1.882		
					Jumlah Populasi ternak ayam	2.958.901	3.106.846	325.130	3.262.188	558.293	3.425.298	591.791	3.596.563	609.545	3.776.391	627.831	3.776.391		
2	**01**	**03**	**05**	Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penemuan kasus penyakit hew an menular	100%	100%		100%	454.495	100%	520.000	100%	535.600	100%	551.668	100%	2.061.763	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**01**	**03**	**06**	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan				699.131		1.324.630		1.470.000		1.514.100		1.542.938		6.550.799	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	5.000	6.200	389.635	8.000	1.011.225	10.250	1.120.000	12.000	1.153.600	13.250	1.171.623	13.250		
					Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas	3.000	3.000	138.575									3.000		
					Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	43	49	170.921	55	313.405	60	350.000	65	360.500	65	371.315	65		
2	**01**	**03**	**07**	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	Kelancaran peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan ketersediaan data base mendukung pengembangan prasarana sarana pertanian Jumlah kelembagaan petani	100%, 1 dok, 323 poktan	100% 1 dok 334 poktan	1.845.380									100% 1 dok 334 poktan	1.845.380	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**01**	**03**	**08**	Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian						1.357.525		1.413.754		1.456.167		1.470.728		5.698.174	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani "Madya"	0			2	355.900	3	377.254	4	388.572	5	392.457	15		
					Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"	0			2	45.950	3	60.000	4	61.800	5	62.418	14		
					Peningkatan Luas Areal Tanam Padi (Ha)	425			465	955.675	485	976.500	505	1.005.795	525	1.015.853	525		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	995.110	100%	955.089	100%	1.119.000	100%	1.152.570	100%	1.164.096	100%	5.385.865	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	811.717	100%	538.189	100%	615.000	100%	633.450	100%	639.785	100%	3.238.141	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	61.500	100%	34.250	100%	34.250	100%	35.278	100%	35.630	100%	200.908	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	90.000									100%	90.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	90.000	100%	90.000	100%	92.700	100%	93.627	100%	366.327	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	172.725	100%	172.725	100%	177.907	100%	179.686	100%	703.043	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**01**	**04**		**Perdagangan**				**1.220.372**		**7.820.350**		**8.765.000**		**8.977.200**		**9.066.972**			
2	01	04	01	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				247.238		1.470.350		2.130.000		2.152.200		2.173.722		8.173.510	Dinas KUKMPTK
					Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	62%	78%	247.238	88%	1.336.000	92%	1.985.000	96%	2.005.100	100%	2.025.151	100%		
					Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	100%	100%		100%	134.350	100%	145.000	100%	147.100	100%	148.571	100%		
2	01	04	02	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah pasar Representatif	1	2	973.134									2	973.134	Dinas KUKMPTK
2	01	04	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Pasar Representatif (Persentase pasar memenuhi standar)	20%			60%	6.350.000	75%	6.635.000	85%	6.825.000	100%	6.893.250	100%	26.703.250	Dinas KUKMPTK
2	**01**	**05**		**Perindustrian**				**1.249.650**		**4.365.698**		**1.269.000**		**1.300.070**		**5.367.298**			
2	01	05	01	Program Penataan Struktur Industri	Persentase (%) penataan struktur industri	0%	20%	459.975	40%	164.025	60%	300.000	80%	302.000	100%	305.020	100%	1.531.020	DPMPTSPP
2	01	05	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				274.130		573.663		925.000		952.750		962.278		3.687.820	DPMPTSPP

					Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.155	2.195	255.130	2.235	543.663	2.275	865.000	2.315	890.950	2.355	899.860	2.355		
					Tingkat kepatuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah	22,59%	23%	19.000	23,1%	30.000	24%	60.000	25%	61.800	26%	62.418	26%		
2	**01**	**05**	**03**	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial				329.350		3.628.010		44.000		45.320		4.100.000		8.146.680	DPMPTSPP
					Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	12,50%	25%	329.350	50%	14.600	75%	44.000	100%	45.320	0	0	100%		
					Jumlah sentra IKM	0	0	0	1	3.613.410	0	0	0	0	1	4.100.000	2		
2	**01**	**05**	**04**	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase (%) tingkat pengapdosian teknologi industri	20%	25%	186.195									25%	186.195	DPMPTSPP
2	**01**	**06**		**Transmigrasi**															
3				**Fungsi Penunjang Urusan**															
3	**01**	**01**		**Perencanaan**				**3.588.976**		**5.015.411**		**4.901.969**		**5.049.028**		**5.159.124**			
3	**01**	**01**	**01**	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	78%	100%	789.940	100%	666.515	100%	730.167	100%	752.071	100%	774.634	100%	3.713.327	BAPPEDA
3	**01**	**01**	**02**	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan program perencanaan daerah	78%	100%	139.990	100%	165.800	100%	186.302	100%	191.891	100%	197.648	100%	881.630	BAPPEDA
3	**01**	**01**	**03**	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	78%	100%	405.050	100%	414.700	100%	429.700	100%	442.591	100%	455.869	100%	2.147.910	BAPPEDA
3	**01**	**01**	**04**	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan program perencanaan daerah	78%	100%	301.735	100%	262.225	100%	280.460	100%	288.874	100%	297.540	100%	1.430.834	BAPPEDA
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.047.571	100%	1.063.365	100%	1.200.702	100%	1.236.723	100%	1.273.824	100%	5.822.184	BAPPEDA
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	710.350	100%	1.965.915	100%	1.597.747	100%	1.645.680	100%	1.655.728	100%	7.575.420	BAPPEDA
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	20.350	100%	113.000	100%	113.000	100%	116.390	100%	117.829	100%	480.569	BAPPEDA

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	163.990									100%	163.990	BAPPEDA
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	315.330	100%	315.330	100%	324.790	100%	334.534	100%	1.289.983	BAPPEDA
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	BAPPEDA
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	48.562	100%	48.562	100%	50.019	100%	51.519	100%	198.662	BAPPEDA
3	**01**	**02**		**Keuangan**				**10.851.188**		**9.601.927**		**10.253.851**		**10.561.467**		**10.789.544**			
3	01	02	01	Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan berlaku	100%	100%	1.465.567	100%	866.967	100%	918.985	100%	946.555	100%	964.728	100%	5.162.802	BPKAD
3	01	02	02	Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait	100%	100%	237.410	100%	237.410	100%	251.655	100%	259.204	100%	263.980	100%	1.249.659	BPKAD
3	01	02	03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	160.541	100%	177.245	100%	187.880	100%	193.516	100%	196.228	100%	915.410	BPKAD
3	01	02	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	92,31%	92,31%	1.397.395	92,31%	1.361.675	100%	1.443.376	100%	1.486.677	100%	1.511.729	100%	7.200.851	BPKAD
3	01	02	05	Program Tertib Administrasi Barang Tidak Bergerak	Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang bersertifikat	44,18%	50,06%	582.250									50,06%	582.250	BPKAD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.848.000	100%	1.735.602	100%	1.757.300	100%	1.810.019	100%	1.864.320	100%	9.015.241	BPKAD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	677.076	100%	1.171.676	100%	1.185.920	100%	1.221.498	100%	1.258.143	100%	5.514.312	BPKAD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	24.500	100%	24.500	100%	25.000	100%	25.750	100%	26.523	100%	126.273	BPKAD

					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	85.000									100%	85.000	BPKAD
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	85.000	100%	85.000	100%	87.550	100%	90.177	100%	347.727	BPKAD
3	**01**	**05**	**01**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	85.722									100%	85.722	BPKAD
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.000	100%	4.120	100%	4.244	100%	15.364	BPKAD
3	**01**	**02**	**06**		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku	100%	100%	1.182.157									100%	1.182.157	BPPRD
3	**01**	**02**	**07**		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,46%			16,22%	1.704.938	16,36%	1.772.550	16,49%	1.825.727	16,62%	1.860.425	16,62%	7.163.640	BPPRD
3	**01**	**02**	**08**		Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99,65%			100%	170.000	100%	215.000	100%	221.450	100%	225.471	100%	831.921	BPPRD
3	**01**	**02**	**09**		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase (%) pembinaan pengelolaan pendapatan daerah	40,79%	97%	124.925									97%	124.925	BPPRD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.743.835	100%	1.385.344	100%	1.555.196	100%	1.601.852	100%	1.629.908	100%	7.916.135	BPPRD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.127.410	100%	607.670	100%	780.090	100%	803.493	100%	817.392	100%	4.136.055	BPPRD
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	10.000	100%	9.500	100%	9.500	100%	9.785	100%	10.079	100%	48.864	BPPRD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	89.400									100%	89.400	BPPRD
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	58.400	100%	58.400	100%	60.152	100%	61.957	100%	238.909	BPPRD

3	**01**	**05**	**01**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	BPPRD
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.000	100%	4.120	100%	4.244	100%	15.364	BPPRD
3	**01**	**03**		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					**8.677.827**		**11.930.261**		**12.021.783**		**12.378.686**		**12.735.695**			
3	**01**	**03**	**01**		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.303.481		6.841.128		7.251.596		7.469.144		7.693.218		33.558.566	BKPSDM
						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	50%	59,82%	4.303.481	61,57%	1.256.600	63,32%	1.331.996	65,07%	1.371.956	66,82%	1.413.115	66,82%		BKPSDM
						Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial	67,58%	69,18%		72%	3.374.663	75%	3.577.143	78%	3.684.457	80%	3.794.991	80%		
						Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional	78,15%	80%		83%	2.209.865	85%	2.342.457	87%	2.412.731	90%	2.485.113	90%		
3	**01**	**03**	**02**		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				2.933.779		1.394.944		1.478.249		1.522.597		1.568.274		8.897.843	BKPSDM
						Persentase penilaian prestasi Kerja ASN tepat Waktu	95%	100%	2.933.779	100%	12.350	100%	12.700	100%	13.081	100%	13.473	100%		
						Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapat layanan, perlndungan dan penghargaan	100%	100%		100%	1.382.594	100%	1.465.549	100%	1.509.516	100%	1.554.801	100%		
3	**01**	**03**	**03**		Program Penataan Manajemen SDM Aparatur						1.667.480		1.165.229		1.200.186		1.224.864		5.257.758	BKPSDM
						Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	90,65%			100%	630.000	100%	65.500	100%	67.465	100%	69.489	100%		
						Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya	100,00%			100%	1.037.480	100%	1.099.729	100%	1.132.721	100%	1.155.375	100%		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	943.180	100%	844.800	100%	944.800	100%	973.144	100%	1.002.338	100%	4.708.262	BKPSDM
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	466.387	100%	886.684	100%	886.684	100%	913.285	100%	940.683	100%	4.093.722	BKPSDM

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	21.000	100%	59.400	100%	59.400	100%	61.182	100%	63.017	100%	263.999	BKPSDM
3	01	03	05	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	225.000	100%	225.000	100%	228.000	100%	232.000	100%	910.000	BKPSDM
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	BKPSDM
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	10.825	100%	10.825	100%	11.150	100%	11.300	100%	44.100	BKPSDM
3	**01**	**04**		**Penelitian dan Pengembangan**				**467.277**		**469.470**		**494.335**		**509.165**		**518.251**			
3	01	04	01	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	467.277									100%	467.277	BAPPEDA
					Persentase (%) ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	100%	100%										100%		BAPPEDA
3	01	04	02	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase (%) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	100%			100%	469.470	100%	494.335	100%	509.165	100%	518.251	100%	1.991.221	BAPPEDA
3	**01**	**05**		**Fungsi lainnya**				**68.795.679**		**100.834.709**		**80.255.108**		**82.612.871**		**83.841.620**			
3	01	05	02	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						109.810		116.399		119.891		123.487		469.586	Sekretariat Daerah
					Persentase Perangkat daerah yang menyusun pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	57.200	100%	60.632	100%	62.451	100%	64.324	100%		
					Persentase Perangkat daerah yang menyusun LPPD sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	52.610	100%	55.767	100%	57.440	100%	59.163	100%		
3	01	05	03	Program Penataan Kelembagaan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya	100%	100%	22.800	100%	273.385	100%	277.450	100%	285.774	100%	288.631	100%	1.148.040	Sekretariat Daerah

3	**01**	**05**	**04**		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya peningkatan pelayanan kepala daerah/w akil kepala daerah	100%	100%	707.800									100%	707.800	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**05**		Program Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial						4.989.400		5.007.550		5.108.333		5.159.416		20.264.699	Sekretariat Daerah
						Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah dan w akil kepala daerah	100%			100%	4.989.400	100%	5.007.550	100%	5.108.333	100%	5.159.416	100%		
3	**01**	**05**	**06**		Program Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan informasi pemerintah kabupaten melalui media informasi	100%			100%	1.928.825	100%	2.080.325	100%	2.105.275	100%	2.126.328	100%	8.240.753	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**07**		Program Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai	100%			100%	3.199.510	100%	3.519.461	100%	3.617.890	100%	3.654.069	100%	13.990.930	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**08**		Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan Perangkat Daerah yang realisasi fisik 100% dan keuangannya diatas 80%	85%			95%	22.300	95%	35.000	95%	36.000	95%	36.360	95%	129.660	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**09**		Program Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah	data belum tersedia			100%	80.200	100%	269.200	100%	272.100	100%	274.821	100%	896.321	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**10**		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	479.730	100%	328.135	100%	332.140	100%	342.170	100%	345.592	100%	1.827.767	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**11**		Program Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah	90%	100%	214.100									100%	214.100	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**12**		Program Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah	Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah	90%			100%	318.080	100%	483.080	100%	499.875	100%	504.874	100%	1.805.909	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**13**		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	persentase pembinaaan kehidupan sosial keagamaan	100%	100%	725.650									100%	725.650	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**14**		Program Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah	data belum tersedia			100%	1.162.110	100%	1.253.375	100%	1.318.740	100%	1.331.927	100%	5.066.152	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**15**		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik	50%	75%	5.656.043	80%	16.757.900	90%	1.797.000	100%	1.802.350	100%	1.820.374	100%	27.833.666	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**16**		Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama						87.585		89.105		91.979		92.899		361.568	Sekretariat Daerah

						Persentase rumusan kebijakan pemerintahan umum, otonomi daerah dan pertanahan daerah	data belum tersedia			67%	60.605	67%	61.205	67%	63.100	100%	63.731	100%		
						Jumlah rumusan kerjasama pemerintah daerah	19			25	26.980	30	27.900	35	28.879	40	29.168	40		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	7.420.502	100%	5.689.266	100%	5.742.500	100%	5.914.775	100%	5.973.923	100%	30.740.965	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	6.282.675	100%	9.578.665	100%	7.297.776	100%	7.516.710	100%	7.591.877	100%	38.267.703	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	67.250	100%	125.000	100%	125.000	100%	128.750	100%	130.038	100%	576.038	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	303.400									100%	303.400	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	303.400	100%	303.400	100%	312.502	100%	315.627	100%	1.234.929	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**01**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	62.335									100%	62.335	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	149.250	100%	149.250	100%	153.728	100%	155.265	100%	607.492	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	302.450									100%	302.450	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**17**		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perw akilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	100%	100%	21.188.025	100%	19.535.825	100%	20.707.975	100%	21.350.721	100%	21.564.228	100%	104.346.774	Sekretariat DPRD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.729.220	100%	1.727.720	100%	1.880.760	100%	1.954.231	100%	1.973.773	100%	9.265.704	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.422.364	100%	1.059.344	100%	1.120.500	100%	1.154.300	100%	1.165.843	100%	5.922.351	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	402.800	100%	99.900	100%	99.900	100%	102.395	100%	103.419	100%	808.414	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	150.000									100%	150.000	Sekretariat DPRD

					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	300.000	100%	300.000	100%	305.000	100%	314.150	100%	1.219.150	Sekretariat DPRD
3	01	05	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	14.500									100%	14.500	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	10.000	100%	10.000	100%	10.500	100%	10.815	100%	41.315	Sekretariat DPRD
3	01	05	18		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase jumlah aparatur pengawasan yang lulus diklat dan bersertifikasi	100%	100%	149.500									100%	149.500	Inspektorat
3	01	05	19		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.408.437		1.923.857		2.116.243		2.204.568		2.238.214		9.891.319	Inspektorat
						Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten	20,28%	70%	1.408.437	75%	1.410.752	80%	1.551.827	90%	1.624.557	90%	1.640.803	90%		
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB	10%			100%	109.705	100%	120.676	100%	126.721	100%	130.523	100%		
						Persentase pelanggaran pegawai	0%			0%	403.400	0%	443.740	0%	453.290	0%	466.889	0%		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	632.633	100%	650.763	100%	815.839	100%	848.659	100%	874.119	100%	3.822.013	Inspektorat
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	311.870	100%	811.987	100%	817.250	100%	841.768	100%	850.185	100%	3.633.060	Inspektorat
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	19.500	100%	50.195	100%	50.195	100%	51.701	100%	53.252	100%	224.843	Inspektorat
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	238.975									100%	238.975	Inspektorat
					Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	414.255	100%	414.255	100%	426.683	100%	439.483	100%	1.694.676	Inspektorat
3	01	05	01		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Inspektorat

				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	12.810	100%	12.810	100%	13.194	100%	13.590	100%	52.404	Inspektorat
3	**01**	**05**	**20**	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100%	100%	136.485									100%	136.485	KECAMATAN
						100%	100%	85.735									100%	85.735	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	10.100									100%	10.100	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	7.400									100%	7.400	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	17.200									100%	17.200	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	16.050									100%	16.050	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**21**	Program Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	3.988.684									100%	3.988.684	KECAMATAN
						100%	100%	1.484.301									100%	1.484.301	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	495.318									100%	495.318	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	571.483									100%	571.483	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	592.535									100%	592.535	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	845.048									100%	845.048	KECAMATAN SELAT NASIK

3	**01**	**05**	**22**		Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	Desa/kelurahan taat administrasi	79,84%	80,84%	607.835									80,84%	607.835	KECAMATAN
							79,84%	80,84%	418.960									80,84%	418.960	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
							79,84%	80,84%	43.653									80,84%	43.653	KECAMATAN BADAU
							79,84%	80,84%	41.735									80,84%	41.735	KECAMATAN SIJUK
							79,84%	80,84%	49.488									80,84%	49.488	KECAMATAN MEMBALONG
							79,84%	80,84%	54.000									80,84%	54.000	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**23**		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan				2.543.852		6.905.325		7.401.381		7.623.422		7.759.193		32.233.173	KECAMATAN
						Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	145.418	87,50%	168.559	91,50%	173.616	92,50%	175.352	92,50%		KECAMATAN
						Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	91.155	87,50%	96.624	91,50%	99.523	92,50%	100.518	92,50%		KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	10.750	87,50%	12.000	91,50%	12.360	92,50%	12.484	92,50%		KECAMATAN BADAU
						Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	10.000	87,50%	10.600	91,50%	10.918	92,50%	11.027	92,50%		KECAMATAN SIJUK
						Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	13.513	87,50%	28.135	91,50%	28.979	92,50%	29.269	92,50%		KECAMATAN MEMBALONG
						Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	20.000	87,50%	21.200	91,50%	21.836	92,50%	22.054	92,50%		KECAMATAN SELAT NASIK
						Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Tanjungpandan)	40	45		50	1.779.683	55	1.886.463	60	1.943.057	65	1.962.488	65		KECAMATAN TANJUNGPANDAN

						Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Badau)	60	65		70	503.658	70	571.900	75	589.057	80	594.948	80		KECAMATAN BADAU
						Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Sijuk)	70	75		80	485.000	85	514.100	90	529.523	90	534.818	90		KECAMATAN SIJUK
						Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Membalong)	23	22		36	608.878	22	721.500	36	743.145	22	750.576	22		KECAMATAN MEMBALONG
						Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Selat Nasik)	28	28		28	612.000	28	648.720	28	668.182	28	674.863	28		KECAMATAN SELAT NASIK
						Persentase Sarana dan Prasarana lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (Kecamatan Tanjungpandan)	Belum ada data	15%	2.543.852	20%	2.770.690	25%	2.890.138	30%	2.976.842	45%	3.066.147	45%		KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3	**01**	**05**	**24**	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan		Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	79,84%			87,50%	542.173	90%	608.279	92,50%	626.527	95%	645.323	95%	2.422.302	KECAMATAN
							79,84%			87,50%	327.770	90%	332.429	92,50%	342.402	95%	352.674	95%		KECAMATAN TANJUNGPANDAN
							79,84%			87,50%	37.003	90%	58.300	92,50%	60.049	95%	61.850	95%		KECAMATAN BADAU
							79,84%			87,50%	76.000	90%	77.100	92,50%	79.413	95%	81.795	95%		KECAMATAN SIJUK
							79,84%			87,50%	56.900	90%	98.150	92,50%	101.095	95%	104.127	95%		KECAMATAN MEMBALONG
							79,84%			87,50%	44.500	90%	42.300	92,50%	43.569	95%	44.876	95%		KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	3.555.467	100%	3.461.082	100%	3.234.442	100%	3.331.475	100%	3.431.420	100%	17.013.885	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
							100%	100%	362.348	100%	320.988	100%	422.850	100%	435.536	100%	448.602	100%	1.990.323	KECAMATAN BADAU
							100%	100%	386.550	100%	351.250	100%	453.500	100%	467.105	100%	481.118	100%	2.139.523	KECAMATAN SIJUK

						100%	100%	363.309	100%	328.399	100%	463.499	100%	477.404	100%	491.726	100%	2.124.337	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	321.832	100%	310.000	100%	414.000	100%	426.420	100%	439.213	100%	1.911.465	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.416.388	100%	11.027.383	100%	3.749.993	100%	3.862.493	100%	3.978.368	100%	24.034.624	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	195.555	100%	269.555	100%	270.500	100%	278.615	100%	286.973	100%	1.301.198	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	245.340	100%	302.850	100%	303.100	100%	312.193	100%	321.559	100%	1.485.042	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	279.860	100%	254.160	100%	275.030	100%	283.281	100%	291.779	100%	1.384.110	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	756.500	100%	518.000	100%	429.500	100%	442.385	100%	455.657	100%	2.602.042	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	90.230	100%	166.400	100%	166.400	100%	171.392	100%	176.534	100%	770.956	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	10.500	100%	15.500	100%	16.500	100%	16.995	100%	17.505	100%	77.000	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	12.500	100%	20.000	100%	21.000	100%	21.630	100%	22.279	100%	97.409	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	11.000	100%	27.000	100%	28.000	100%	28.840	100%	29.705	100%	124.545	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	10.000	100%	35.000	100%	36.000	100%	37.080	100%	38.192	100%	156.272	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	80.000									100%	80.000	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	112.000									100%	112.000	KECAMATAN BADAU

						100%	100%	30.000										100%	30.000	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	20.000										100%	20.000	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	50.000										100%	50.000	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	237.500	100%	251.100	100%	258.633	100%	266.392	100%	1.013.625	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%			100%	30.000	100%	55.000	100%	56.650	100%	58.350	100%	200.000	KECAMATAN BADAU
						100%			100%	50.000	100%	52.000	100%	53.560	100%	55.167	100%	210.727	KECAMATAN SIJUK
						100%			100%	33.445	100%	40.500	100%	41.715	100%	42.966	100%	158.626	KECAMATAN MEMBALONG
						100%			100%	50.000	100%	52.000	100%	53.560	100%	55.167	100%	210.727	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	80.000										100%	80.000	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	10.000										100%	10.000	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	10.000										100%	10.000	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	10.000										100%	10.000	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	10.000										100%	10.000	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	238.950	100%	243.950	100%	251.269	100%	258.807	100%	992.975	KECAMATAN TANJUNGPANDAN

						100%			100%	35.000	100%	45.000	100%	46.350	100%	47.741	100%	174.091	KECAMATAN BADAU
						100%			100%	83.800	100%	84.000	100%	86.520	100%	89.116	100%	343.436	KECAMATAN SIJUK
						100%			100%	35.673	100%	85.375	100%	87.936	100%	90.574	100%	299.558	KECAMATAN MEMBALONG
						100%			100%	118.000	100%	119.000	100%	122.570	100%	126.247	100%	485.817	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**25**	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	1.030.133	100%	885.000	100%	935.122	100%	963.176	100%	992.071	100%	4.805.501	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**26**	Program Penguatan Kewaspadaan	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	100%	410.225	100%	453.000	100%	498.300	100%	513.249	100%	528.646	100%	2.403.420	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**27**	Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya	Persentase terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya	100%	100%	488.925	100%	268.000	100%	294.800	100%	303.644	100%	312.753	100%	1.668.122	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**28**	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Persentase peran partai politik dalam pembangunan	100%	100%	341.450	100%	602.000	100%	662.200	100%	682.066	100%	693.221	100%	2.980.937	KESBANGPOL
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	496.300	100%	473.000	100%	620.300	100%	638.909	100%	641.376	100%	2.869.885	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	338.854	100%	538.000	100%	549.750	100%	566.243	100%	583.230	100%	2.576.076	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	12.000	100%	58.800	100%	59.000	100%	60.770	100%	62.593	100%	253.163	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	50.000									100%	50.000	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	50.000	100%	50.000	100%	51.500	100%	53.045	100%	204.545	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	40.000	100%	40.000	100%	41.200	100%	42.436	100%	163.636	KESBANGPOL
				TOTAL				**714.090.428**		**935.454.351**		**945.330.568**		**964.671.126**		**975.676.075**			

Tabel 7.4

Perubahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Belitung

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**															
1	01				**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**															
1	01	01			**Pendidikan**								**246.727.033.523**		**236.096.510.152**		**285.534.881.078**		**768.358.424.753**	
1	01	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								170.717.431.268		182.034.337.417		188.657.086.550		541.408.855.235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-				75,00%		75,00%		78,00%		78,00%			
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
1	01	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan								76.009.602.255		54.062.172.735		96.370.329.528		226.442.104.518	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100%				100%		100%		100%		100%			
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD	94,99%				97,84%		98,24%		98,64%		98,64%			
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100%				100%		100%		100%		100%			
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81,18%				82,89%		83,29%		83,69%		83,69%			
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	59,88%				65,93%		67,43%		68,93%		68,93%			
						Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	55,78%				66,67%		83,33%		100,00%		100,00%			
1	01	01	03		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menggunakan Kurikulum Muatan Lokal Daerah	-								1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	105.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	04		Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan											402.465.000		402.465.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV									89,03%		89,03%			
						Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik									85,03%		85,03%			

1	01	02		**Kesehatan**								**243.314.946.743**		**272.808.040.292**		**262.625.912.847**			
1	01	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								99.416.074.103		143.071.536.030		144.656.489.471		387.144.099.604	Dinas Kesehatan
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
1	01	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								137.632.316.858		126.676.476.112		117.734.069.446		382.042.862.416	Dinas Kesehatan
					Terw ujudnya rumah sakit kelas B berstandar internasional	-							100,00%		100,00%		100,00%			
					Puskesmas terakreditasi Madya	66,70%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
1	01	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	-					100%	5.956.409.782	100%	3.042.500.000	100%	122.382.593	100%	9.121.292.375	Dinas Kesehatan
1	01	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan amakanan minuman	-					100%	207.573.000			100%	98.743.838	100%	306.316.838	Dinas Kesehatan
1	01	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-					100%	102.573.000	100%	17.528.150	100%	14.227.500	100%	134.328.650	Dinas Kesehatan
1	01	03		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								**112.331.254.790**		**134.914.258.713**		**145.139.544.133**			
1	01	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								8.815.325.710		11.629.879.760		13.090.062.873		33.535.268.343	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			

1	01	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	34,52%					36,61%	5.981.132.000	41,54%	4.999.741.100	45,10%	13.446.220.000	45,10%	24.427.093.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang layak	-							81,55%	6.316.566.683	82,09%	6.109.870.000	82,09%	19.013.166.133	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	80,48%					81,00%	6.586.729.450							
1	01	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pengolahan air limbah pemukiman	53,88%					53,98%	1.703.700.000	54,14%	4.315.000.000	54,30%	4.620.000.000	54,30%	10.638.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	12,73%					15,50%	799.320.000	18,83%	1.600.000.000	22,15%	2.200.000.000	22,15%	4.599.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	07	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	13,06%					14,46%	5.837.295.750	15,86%	2.835.000.000	17,26%	2.931.750.000	17,26%	11.604.045.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	08	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	-							15%	312.000.000	17,5%	1.425.000.000	15,00%	1.737.000.000	
1	01	03	09	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap kabupaten	70,01%					72,32%	75.188.788.315	72,55%	100.670.841.700	72,78%	99.140.681.260	72,78%	275.000.311.275	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60,00%					60%	165.644.270	60%	198.184.080	60%	205.210.000	60,00%	569.038.350	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-					100%	1.655.143.920	100%	2.037.045.390	100%	1.970.750.000	100%	5.662.939.310	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	15,87%					18,59%	5.598.175.375					100%	5.598.175.375	
1	01	04		**Perumahan dan Kawasan Permukiman**								**4.079.419.770**		**9.576.961.125**		**11.545.480.000**			
1	01	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	-							67%	254.500.000	100	154.500.000	100%	539.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
					Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%					100%	130.000.000							
1	01	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh	-							80,77%	303.547.700	0,00%	784.000.000	0,00%	3.268.785.020	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
					Persentase Luasan kawasan kumuh	15,39%					85,77%	2.181.237.320							
1	01	4	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	-							99,51%	1.563.401.600	99,80%	1.686.980.000	99,80%	3.250.381.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase taman terkelola	100%					100%	1.768.182.450						18.143.694.275	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					persentase PSU yang dikelola	-							53,60%	7.455.511.825	66,29%	8.920.000.000	66,29%		

1	**01**	**05**		**Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							**17.198.730.200**		**16.611.887.960**		**34.156.825.300**			
1	**01**	**05**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.692.954.400		5.106.429.400		8.749.259.600		18.548.643.400	SATPOLPP
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**01**	**05**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.265.593.200		3.633.363.650		11.365.440.000		18.264.396.850	BPBD
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**01**	**05**	**02**	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	-					100,00%	6.644.902.700	100,00%	5.441.719.400	100,00%	8.960.565.700	100,00%	21.047.187.800	SATPOLPP
1	**01**	**05**	**03**	Program Penanggulangan Bencana							2.025.872.600		1.831.210.910		3.351.560.000		7.208.643.510	BPBD
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	64,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**01**	**05**	**04**	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-					100,00%	569.407.300	100,00%	599.164.600	100,00%	1.730.000.000	100,00%	2.898.571.900	BPBD

1	**01**	**06**		**Sosial**								**7.466.847.583**		**7.425.178.163**		**20.652.058.142**			
1	**01**	**06**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100,00%					100,00%	5.332.073.488	100,00%	5.463.486.988	100,00%	17.204.662.218	100,00%	28.000.222.694	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		80,00%		80,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**01**	**06**	**02**	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	-					-		100,00%	490.077.975	100,00%	725.406.882	100,00%	1.703.197.242	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	100,00%					100,00%	487.712.385							
					Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	80,00%					90,00%								
1	**01**	**06**	**04**	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng diluar panti yang mendapat layanan rehabiitasi sosial	86,47%					100,00%	644.553.400	100,00%	641.561.990	100,00%	959.078.659	100,00%	2.245.194.049	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**01**	**06**	**05**	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100,00%					100,00%	408.296.850	100,00%	341.383.450	100,00%	510.096.171	100,00%	1.259.776.471	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**01**	**06**	**06**	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	100,00%					100,00%	589.319.860	100,00%	481.946.100	100,00%	548.814.214	100,00%	1.620.080.174	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**01**	**06**	**07**	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlaw an	Taman Makam Pahlaw an yang tertata	100,00%					100,00%	4.891.600	100,00%	6.721.660	100,00%	704.000.000	100,00%	715.613.260	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**02**			**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**															
2	**02**	**07**		**Tenaga Kerja**								**0**		**50.826.400**		**710.000.000**			
2	**02**	**07**	**03**	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	-									85,00%	400.000.000	85,00%	400.000.000	Dinas KUKMPTK
2	**02**	**07**	**04**	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	-									40,00%	100.000.000	40,00%	100.000.000	Dinas KUKMPTK

2	02	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan harmonisasi hubungan industrial	-							10,00%	50.826.400	20,00%	210.000.000	20,00%	260.826.400	Dinas KUKMPTK
2	02	08		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								**1.109.170.505**		**777.127.710**		**873.641.181**			
2	02	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	-					0,50%	284.039.940	0,50%	276.124.990	0,50%	285.789.366	0,50%	845.954.296	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	100,00%					100,00%	511.202.700	100,00%	126.410.700	100,00%	130.835.075	100,00%	768.448.475	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	100,00%							100,00%	27.260.825	100,00%	28.214.954	100,00%	55.475.779	
2	02	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	100,00%					100,00%	44.142.340	25,00%	42.727.420	25,00%	44.222.880	25,00%	131.092.640	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama					Pratama	204.002.000	Pratama	239.615.450	Pratama	317.315.991	Pratama	760.933.441	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00%					100,00%	65.783.525	100,00%	64.988.325	100,00%	67.262.916	100,00%	198.034.766	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundan Anak
2	02	09		**Pangan**								**783.808.770**		**757.575.460**		**1.082.775.000**			
2	02	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Data Nilai Tukar Petani (NTP)	-					1 Dokumen	119.625.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	449.625.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	02	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	-					95,70%	615.400.720	95,70%	462.127.910	95,70%	851.592.000	95,70%	1.929.120.630	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	02	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan.	-					12,20%	14.489.450	12,20%	14.579.450	10,20%	15.308.000	10,20%	44.376.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	02	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	100%					89,29%	34.293.600	89,29%	80.868.100	89,29%	85.875.000	89,29%	201.036.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	02	10		**Pertanahan**															
2	02	10	01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tertibnya Administrasi Tanah garapan										100,00%	100.000.000	100,00%	100.000.000	Sekretaruat Daerah

2	**02**	**11**		**Lingkungan Hidup**							**14.789.191.624**		**15.382.940.298**		**18.093.644.163**				
2	**02**	**11**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							6.176.536.445		6.570.739.400		7.611.314.615		20.358.590.460	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		85,00%		85,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
2	**02**	**11**	**02**	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100,00%					100,00%	116.445.000	100,00%	208.962.500	100,00%	500.000.000	100,00%	825.407.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**03**	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	-					15,00%	1.393.365.239	20,00%	926.169.908	22,00%	1.409.766.508	22,00%	3.729.301.655	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**04**	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayat	-					47,79%	57.860.700	47,79%	50.809.500	47,79%	110.000.000	47,79%	218.670.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**05**	ProgramPengendalian Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	Persentase Pengendalian Limbah B3	-					45,00%	15.587.200	50,00%	40.051.400	55,00%	88.052.300	55,00%	143.690.900	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**06**	Program Pembinaan dan Pengaw asan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	-					25,00%	48.544.260	28,00%	46.396.450	35,00%	295.000.000	35,00%	389.940.710	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Karifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal yang ada di Kabupaten Belitung	-							30,00%	103.651.600	60,00%	213.651.600	60,00%	317.303.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**07**	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	-					32 Klmpk	55.059.450	36 Klmpk	63.300.500	38 klmpk	335.000.000	38 klmpk	453.359.950	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**08**	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%					100,00%	17.890.400	100,00%	25.471.140	100,00%	25.471.140	100,00%	68.832.680	Dinas Lingkungan Hidup
2	**02**	**11**	**09**	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	40,00%					45,00%	6.907.902.930	50,00%	7.347.387.900	55,00%	7.505.388.000	55,00%	21.760.678.830	Dinas Lingkungan Hidup

2	**02**	**12**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**5.914.807.340**		**5.615.071.010**		**7.751.120.970**			
2	**02**	**12**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.897.661.050		5.109.365.010		5.976.133.000		15.983.159.060	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah								75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2	**02**	**12**	**02**	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%					83%	925.129.130	84%	400.050.900	85%	1.125.009.970	85%	2.450.190.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**02**	**12**	**03**	Program Pencatatan Sipil	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	92%					93%	25.750.960	94%	37.730.100	95%	464.603.000	95%	528.084.060	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**02**	**12**	**04**	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data	80%					85%	6.790.000	100%	8.448.800	100%	110.875.000	100%	126.113.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**02**	**12**	**05**	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	100%					100%	59.476.200	100%	59.476.200	100%	74.500.000	100%	193.452.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**02**	**13**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							**6.514.657.187**		**7.113.611.006**		**7.102.811.309**		**20.731.079.502**	
2	**02**	**13**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.989.513.746		4.673.995.825		5.451.684.628		15.115.194.199	DPPKBPMD
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

2	**02**	**13**	**04**	Program Administrasi Pemerintahan Desa							1.041.554.931		1.939.712.731		926.723.281		3.907.990.943	DPPKBPMD
					Persentase BUMDesa aktif	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
					Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
					Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
2	**02**	**13**	**05**	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa Aktif						483.588.510	95,00%	499.902.450	100,00%	724.403.400	100,00%	1.707.894.360	DPPKBPMD
2	**02**	**13**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							**2.786.462.055**		**2.674.820.350**		**3.039.659.900**		**8.500.942.305**	
2	**02**	**13**	**02**	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)	100%						70%	40.666.000	80%	321.567.000	80%	362.233.000	DPPKBPMD
2	**02**	**13**	**03**	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	-					13%	1.619.860.455	14%	933.218.550	15%	1.221.457.900	15%	3.774.536.905	DPPKBPMD
2	**02**	**13**	**04**	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	75,00%					76,00%	1.166.601.600	77,00%	1.700.935.800	78,00%	1.496.635.000	78,00%	4.364.172.400	DPPKBPMD
2	**02**	**15**		**Perhubungan**							**30.227.242.376**		**28.342.705.960**		**26.052.967.800**		**84.622.916.136**	
2	**02**	**15**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							7.957.442.337		10.327.448.400		9.466.052.000		27.750.942.737	Dinas Perhubungan
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		100,00%		100,00%	
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
2	**02**	**15**	**02**	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik	54,26%					67,83%	9.107.612.039	100,00%	12.296.814.060	100,00%	14.289.382.800	100,00%	35.693.808.899	Dinas Perhubungan
2	**02**	**15**	**03**	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan	-					100%	13.162.188.000	100%	5.718.443.500	100%	2.297.533.000	100%	21.178.164.500	Dinas Perhubungan

2	**02**	**16**		**Komunikasi dan Informatika**								**8.484.779.953**		**8.590.264.940**		**8.813.880.000**		**25.888.924.893**	
2	**02**	**16**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								5.633.608.743		6.034.424.835		6.075.400.000		17.743.433.578	DISKOMINFO
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
2	**02**	**16**	**02**	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	73,9%					80%	673.594.970	100%	464.843.685	100%	450.715.000	100%	1.589.153.655	DISKOMINFO
2	**02**	**16**	**03**	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terintegrasinya Sistem Infomasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	96,60%					100%	2.177.576.240	100%	2.090.996.420	100%	2.287.765.000	100%	6.556.337.660	DISKOMINFO
2	**02**	**17**		**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								**8.008.367.440**		**8.154.970.640**		**10.155.951.730**		**26.319.289.810**	
2	**02**	**17**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								6.927.663.160		6.990.941.870		8.393.478.400		22.312.083.430	Dinas KUKMPTK
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
2	**02**	**17**	**05**	Program Pendidikan dan Pelatihan Pengkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	-									50,00%	138.452.000	50,00%	138.452.000	Dinas KUKMPTK
2	**02**	**17**	**06**	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat w aktu	-					85,00%	327.902.040	40,00%	375.960.340	45,00%	400.960.340	45,00%	1.104.822.720	Dinas KUKMPTK
2	**02**	**17**	**07**	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	40,00%					45,00%	566.164.560	50,00%	407.780.530	50,00%	503.060.990	50,00%	1.477.006.080	Dinas KUKMPTK
2	**02**	**17**	**07**	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	-					45,00%	186.637.680	50,00%	380.287.900	52,00%	720.000.000	52,00%	1.286.925.580	Dinas KUKMPTK

2	**02**	**18**		**Penanaman Modal**								**5.524.755.657**		**6.039.069.393**		**14.506.365.473**		**26.070.190.523**	
2	**02**	**18**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								4.973.360.142		5.572.182.468		13.612.545.399		24.158.088.009	DPMPTSPP
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2	**02**	**18**	**02**	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang di Berikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	87 Investor					50 Investor	20.283.205	50 Investor	189.993.775	50 Investor	290.000.000	50 Investor	500.276.980	DPMPTSPP
2	**02**	**18**	**03**	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	-					60%	280.589.300	60%	119.429.310	60%	435.000.000	60%	835.018.610	DPMPTSPP
2	**02**	**18**	**04**	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	88%					75%	77.200.980	75%	111.865.570	75%	121.625.865	75%	310.692.415	DPMPTSPP
2	**02**	**18**	**05**	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal	100%					100%	173.322.030	100%	45.598.270	100%	47.194.209	100%	266.114.509	DPMPTSPP
2	**02**	**19**		**Kepemudaan dan Olahraga**								**12.386.868.288**		**16.647.901.495**		**13.321.931.966**		**42.356.701.749**	
2	**02**	**19**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%					100%	4.244.501.458	100%	5.184.573.050	100%	5.277.278.504	100%	14.706.353.012	DISPORA
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2	**02**	**19**	**02**	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-					80%	1.372.725.130	85%	1.592.593.730	90%	1.698.477.087	90%	4.663.795.947	DISPORA
2	**02**	**19**	**03**	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memenuhi Standar	-					70%	5.951.641.700	75%	9.470.734.715	80%	5.926.176.375	80%	21.348.552.790	DISPORA
					Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Prestasi dan Even Olahraga Rekreasi	-					13 Event		13 Event		13 Event		39 Event		
2	**02**	**19**	**04**	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Organisasi Kepramukaan yang difasilitasi dalam Pengembangan Organisasi Kepramukaan						1 Lembaga	818.000.000	1 Lembaga	400.000.000	1 Lembaga	420.000.000	1 Lembaga	1.638.000.000	DISPORA

2	**02**	**20**		**Statistik**								**227.263.770**		**287.486.940**		**362.486.940**		**877.237.650**	
2	02	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase pemanfaatan data statistik daerah	72,5%					80%	227.263.770	90%	287.486.940	90%	362.486.940	90%	877.237.650	DISKOMINFO
2	**02**	**21**		**Persandian**								**186.672.770**		**138.926.540**		**138.927.060**		**469.388.279**	
2	02	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan informasi	Level II					Level II	186.672.770	Level II	138.926.540	Level II+	143.788.969	Level II+	469.388.279	DISKOMINFO
2	**02**	**22**		**Kebudayaan**								**4.912.653.052**		**3.936.182.654**		**4.833.404.858**		**13.682.240.564**	
2	02	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan Daerah yang Terlestarikan						50%	1.196.744.740	60%	1.054.786.360	75%	1.168.297.238	75%	3.419.828.338	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
2	02	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya kualitas pengelolaan kesenian tradisional	-									50%	195.000.000	50%	195.000.000	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
2	02	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah lokal	-									60%	403.680.000	60%	403.680.000	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
2	02	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%							30%	219.620.000	30%	227.700.000	30%	447.320.000	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
2	02	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat	-					55	3.715.908.312	60	2.661.776.294	70	2.838.727.620	70	9.216.412.226	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
2	**02**	**23**		**Perpustakaan**								**5.365.966.160**		**5.004.564.525**		**10.984.925.570**		**21.355.456.255**	
2	02	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%					100%	4.431.189.550	100%	4.420.173.000	100%	5.373.425.570	100%	14.224.788.120	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2	02	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka Per Tahun	-					343.501 Pemustaka	934.776.610	343.501 Pemustaka	584.391.525	343.501 Pemustaka	5.611.500.000	343.501 Pemustaka	7.130.668.135	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**02**	**24**		**Kearsipan**								**158.041.470**		**85.327.800**		**434.850.000**		**678.219.270**	
2	02	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	50%					50%	158.041.470	50%	85.327.800	65%	434.850.000	65%	678.219.270	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	**3**			**Urusan Pilihan**															
1	**03**	**25**		**Kelautan dan Perikanan**								**12.770.804.605**		**16.237.683.630**		**17.263.007.893**		**46.271.496.128**	
1	**03**	**25**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%					100%	7.493.566.345	100%	7.621.659.310	100%	8.232.144.160	100%	23.347.369.815	Dinas Perikanan
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**03**	**25**	**03**	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	52912					48000	3.786.968.100	49000	5.105.938.825	50000	5.344.667.688	147.000	14.237.574.613	Dinas Perikanan
1	**03**	**25**	**04**	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	152					219	846.009.200	223	1.408.231.320	227	1.479.072.105	669	3.733.312.625	Dinas Perikanan
1	**03**	**25**	**05**	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	8,62%					7,82%	343.891.360	7,89%	421.654.975	8,15%	442.906.170	8,15%	1.208.452.505	Dinas Perikanan
1	**03**	**25**	**06**	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	8.400,00					8400	300.369.600	8500	1.680.199.200	8600	1.764.217.770	25.500	3.744.786.570	Dinas Perikanan
1	**03**	**26**		**Pariwisata**								**17.110.149.332**		**18.385.845.074**		**27.298.876.899**		**62.794.871.305**	
1	**03**	**26**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								6.059.046.253		6.987.690.182		7.263.440.452		20.310.176.887	Dinas Pariwisata
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**03**	**26**	**02**	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	73%					80%	8.934.613.744	83,82%	7.274.756.186	83,82%	15.685.087.021	83,82%	31.894.456.951	Dinas Pariwisata
1	**03**	**26**	**03**	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100%					100%	301.594.950	100%	2.652.809.670	100%	2.745.757.296	100%	5.700.161.916	Dinas Pariwisata
1	**03**	**26**	**05**	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	50%					63,50%	1.814.894.385	84,58%	1.470.589.036	90,00%	1.604.592.130	90,00%	4.890.075.551	Dinas Pariwisata

1	**03**	**27**		**Pertanian**								**20.293.485.398**		**29.006.158.095**		**30.745.610.000**		
1	**03**	**27**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								16.137.785.798		18.009.248.770		18.761.531.000		52.908.565.568	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**03**	**27**	**02**	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kebutuhan sarana pertanian	-					12,30%	1.304.954.600	26,00%	1.528.971.375	35,00%	1.405.301.000	35,00%	4.239.226.975	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	**03**	**27**	**03**	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								2.389.305.000		6.634.036.500		9.551.244.000		18.574.585.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase prasarana yang digunakan	-					34,47%		42,07%		49,07%		49,07%		
					Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	-					66%		70%		70%		70%		
1	**03**	**27**	**04**	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase (%) penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%					100%	241.003.800	100%	306.939.600	100%	282.764.000	100%	830.707.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	**03**	**27**	**05**	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100%					100%	140.186.200	100%	201.761.450	100%	210.566.000	100%	552.513.650	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	**03**	**27**	**06**	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-									100%	75.023.000	100%	75.023.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	**03**	**27**	**07**	Program Penyuluh Pertanian	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	-					6,30%	80.250.000	43 Kelembagaan Petani	2.325.200.400	43 Kelembagaan Petani	459.181.000	43 Kelembagaan Petani	2.864.631.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	**03**	**30**		**Perdagangan**								**173.166.500**		**244.782.600**		**765.520.000**		**1.131.949.100**	
1	**03**	**30**	**03**	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Refresentatif	100%									100%	315.000.000	100%	315.000.000	Dinas KUKMPTK
1	**03**	**30**	**04**	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan bahan penting	100%							100%	59.577.600	100%	66.000.000	100%	125.577.600	Dinas KUKMPTK
1	**03**	**30**	**06**	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	78%					90%	173.166.500	92%	185.205.000	95%	333.000.000	95%	691.371.500	Dinas KUKMPTK
1	**03**	**30**	**07**	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Taat Aturan	-									100%	51.520.000	100%	51.520.000	Dinas KUKMPTK

1	**03**	**31**		**Perindustrian**								**273.992.600**		**274.007.650**		**660.000.000**		**1.208.000.250**	
1	**03**	**31**	**02**	Program Perencanaan dan Pembangunan ndustri	Pertumbuhan Jumlah IKM	-					40	273.992.600	40	274.007.650	40,00	660.000.000	80,00	1.208.000.250	DPMPTSPP
1	**04**			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**															
1	**04**	**01**		**Sekretariat Daerah**								**54.774.773.017**		**61.102.024.390**		**67.672.792.003**		**183.549.589.410**	
1	**04**	**01**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								36.910.799.253		41.764.972.200		47.318.562.753		125.994.334.206	Sekretariat Daerah
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-											100,00%		
1	**04**	**01**	**02**	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Pemerintah Transparan dan Akuntabel	100%					100%	14.839.551.019	100%	15.903.216.635	100%	16.667.492.564	100%	47.410.260.218	Sekretariat Daerah
1	**04**	**01**	**03**	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung							3.024.422.745	100%	3.433.835.555	100%	3.686.736.686	100%	10.144.994.986	Sekretariat Daerah
1	**04**	**02**		**Sekretariat DPRD**								**32.831.081.570**		**35.533.423.230**		**37.553.296.250**		**105.917.801.050**	
1	**04**	**02**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								22.438.332.320		23.339.669.580		23.774.545.000		69.552.546.900	Sekretariat DPRD
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Presentase Pelayanan Administrasi DPRD	-											100,00%		
1	**04**	**02**	**02**	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase (%) peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	100%					100%	10.392.749.250	100%	12.193.753.650	100%	13.778.751.250	100%	36.365.254.150	Sekretariat DPRD

1	**05**			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**														
1	**05**	**01**		**Perencanaan**							**9.769.000.362**		**10.073.282.684**		**15.136.861.622**		**34.979.144.668**	
1	**05**	**01**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.024.218.902		9.350.952.184		13.915.724.639		32.290.895.725	BAPPEDA
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**05**	**01**	**02**	ProgramPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100%					100%	590.193.870	100%	604.387.920	100%	1.027.638.043	100%	2.222.219.833	BAPPEDA
1	**05**	**01**	**03**	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								154.587.590		117.942.580		193.498.940		466.029.110	BAPPEDA
					Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%					100%		100%		100%		100%		
					Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%					100%		100%		100%		100%		
					Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan pembangunan daerah	100%					100%		100%		100%		100%		

1	**05**	**02**		**Keuangan**							**137.028.071.172**		**137.539.798.404**		**143.704.203.388**		**418.272.072.964**	
1	**05**	**02**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.054.600.130		8.727.231.304		9.335.618.029		27.117.449.463	BPKAD
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**05**	**02**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.867.453.840		10.063.352.877		11.662.286.400		31.593.093.117	BPPRD
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	**05**	**02**	**02**	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	100%					100%	115.008.463.122	100%	114.861.263.518	100%	118.891.714.344	100%	348.761.440.984	BPKAD
1	**05**	**02**	**02**	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	100%					100%	162.985.650	100%	415.532.500	100%	398.700.000	100%	977.218.150	BPPRD
1	**05**	**02**	**03**	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	92,31%					100%	1.614.475.505	100%	1.798.577.155	100%	1.861.564.615	100%	5.274.617.275	BPKAD
1	**05**	**02**	**04**	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-					11,29%	1.320.092.925	25,58%	1.673.841.050	33%	1.554.320.000	33,00%	4.548.253.975	BPPRD

1	**05**	**03**		**Kepegawaian**								**9.825.985.783**		**11.488.894.893**		**11.957.388.000**		**33.272.268.676**	
1	**05**	**03**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								8.253.944.458		8.163.282.688		8.479.218.000		24.896.445.146	BKPSDM
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		78,00%		78,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
1	**05**	**03**	**02**	Program Kepegawaian Daerah	Terkelolanya Manajemen Kepegawaian Daerah	100%					100%	1.572.041.325						8.375.823.530	BKPSDM
					Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah	-							100%	3.325.612.205	100%	3.478.170.000	100%		
1	**05**	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**								**977.736.520**		**1.448.569.760**		**1.498.722.000**		**3.925.028.280**	
1	**05**	**04**	**02**	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	80%					85%	977.736.520	87%	1.448.569.760	90%	1.498.722.000	90%	3.925.028.280	BKPSDM
1	**05**	**04**		**Penelitian dan Pengembangan**								**19.029.870**		**33.935.820**		**435.123.574**		**488.089.264**	
1	**05**	**05**	**02**	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	100%					100%	19.029.870	100%	33.935.820	100%	435.123.574	100%	488.089.264	BAPPEDA
1	**06**			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**															
1	**06**	**01**		**Inspektorat Daerah**								**10.541.365.655**		**12.977.043.843**		**19.723.342.273**		**43.241.751.771**	
1	**06**	**01**	**01**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								9.485.732.695		11.635.822.823		18.461.388.673		39.582.944.191	Inspektorat
					Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%			
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			

1	06	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan							826.883.310		897.167.520		844.204.600		2.568.255.430	Inspektorat
						Persentase Laporan Keuangan OPD yang Sesuai Ketentuan	78%					92%							
						Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%					100%							
						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pengawasan APIP	88%					90%							
						Level Kapabilitas APIP	-							Level 3		Level 3		Level 3		
						Persentase Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Area Pengawasan (Evaluasi Internal)	-							65%		75%		75%		
1	06	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Kebijakan yang diimplentasikan	100%					100%	228.749.650		444.053.500		417.749.000	100%	1.090.552.150	Inspektorat
						Menurunnya Persentase Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat dari Tahun Sebelumnya	100%					100%						100%		
						Hasil penilaian mandiri Perangkat daerah terhadap :														
						- RB	-							58,00		59,00		59,00		
						- SPIP	-							3,0		3,2		3,2		
1	07				**Unsur Kewilayahan**															
1	07	01			**Kecamatan**								**26.949.003.026**		**28.742.745.175**		**36.498.723.010**		**92.190.471.211**	
1	07	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								11.718.363.406		13.723.903.577		14.170.434.030		39.612.701.013	Kecamatan Tanjungpandan
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

1	07	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.412.927.644		2.335.565.470		2.352.610.546		7.101.103.660	Kecamatan Badau
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	07	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.854.578.180		2.960.971.450		3.458.500.000		9.274.049.630	Kecamatan Sijuk
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	07	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.295.298.040		3.150.741.645		8.270.963.000		14.717.002.685	Kecamatan Membalong
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

1	07	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.825.735.341		1.890.659.006		2.753.275.000		6.469.669.347	Kecamatan Selat Nasik
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	07	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%					100%	1.318.161.000	100%	1.317.961.000	100%	1.317.961.000	100%	3.954.083.000	Kecamatan Tanjungpandan
1	07	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan														Kecamatan
												100%	2.169.992.090	100%	990.706.184	100%	1.159.488.984	100%	4.320.187.258	Kecamatan Tanjungpandan
												100%	151.134.140	100%	158.916.243	100%	202.933.150	100%	512.983.533	Kecamatan Badau
												100%	100.908.060	100%	55.999.650	100%	215.000.000	100%	371.907.710	Kecamatan Sijuk
												100%	52.789.350	100%	49.558.615	100%	173.650.000	100%	275.997.965	Kecamatan Membalong
												100%	76.156.750	100%	156.067.750	100%	292.425.000	100%	524.649.500	Kecamatan Selat Nasik
1	07	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum														Kecamatan
												100%	479.014.175	100%	698.494.890	100%	752.642.730	100%	1.930.151.795	Kecamatan Tanjungpandan
												100%	62.133.150	100%	266.794.010	100%	267.124.010	100%	596.051.170	Kecamatan Badau
												100%	66.957.500	100%	215.741.150	100%	230.000.000	100%	512.698.650	Kecamatan Sijuk
												100%	58.342.500	100%	347.864.525	100%	388.330.000	100%	794.537.025	Kecamatan Membalong
												100%	58.447.250	100%	197.265.000	100%	200.600.000	100%	456.312.250	Kecamatan Selat Nasik

1	07	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi													Kecamatan
							87,50%					90,00%	65.591.680	90,00%	67.711.680	95,00%	70.201.680	95,00%	203.505.040	Kecamatan Tanjungpandan
							87,50%					90,00%	55.492.680	90,00%	29.403.730	95,00%	65.685.880	95,00%	150.582.290	Kecamatan Badau
							87,50%					90,00%	47.082.730	90,00%	57.991.900	95,00%	78.000.000	95,00%	183.074.630	Kecamatan Sijuk
							87,50%					90,00%	37.858.000	90,00%	26.486.200	95,00%	32.520.000	95,00%	96.864.200	Kecamatan Membalong
							87,50%					90,00%	42.039.360	90,00%	43.941.500	95,00%	46.378.000	95,00%	132.358.860	Kecamatan Selat Nasik
1	07				**Unsur Pemerintahan Umum**															
1	07	01			**Kesatuan Bangsa dan Politik**								**7.130.559.750**		**6.963.435.400**		**7.321.580.364**		**21.415.575.514**	
1	07	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								4.215.976.380		4.569.360.100		5.022.717.864		13.808.054.344	Kesbangpol
						Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-					75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%					100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	07	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%					100%	276.940.470	100%	174.738.600	100%	150.075.000	100%	601.754.070	Kesbangpol
1	07	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik	100%					100%	1.432.001.700	100%	1.486.447.000	100%	1.471.380.000	100%	4.389.828.700	Kesbangpol
1	07	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbina	100%					100%	48.067.200					100%	48.067.200	Kesbangpol

1	07	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%					100%	201.204.300	100%	202.890.800	100%	129.375.000	100%	533.470.100	Kesbangpol
1	07	01	06		Program Peningkatan Kew aspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persenatase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100%					100%	956.369.700	100%	529.998.900	100%	548.032.500	100%	2.034.401.100	Kesbangpol
					TOTAL								**1.078.967.146.186**		**1.157.083.840.174**		**1.306.249.092.693**		**3.542.300.079.053**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu Tahun 2018 – 2023. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran dan memenuhi kriteria kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), rasional (*relevant*), batas waktu pencapaian (*time bond*), bersifat terus menerus meningkatkan kualitas kinerja (*continuously improve*). Selain untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, indikator kinerja juga merupakan instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel 8.1 diuraikan Indikator Makro Pembangunan Daerah yang memuat 20 (dua puluh) indikator yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia, indikator angka kemiskinan, indikator angka harapan hidup, indikator rata-rata lama sekolah, indikator pengeluaran per kapita, indikator status desa “maju”, indikator indeks reformasi birokrasi, indikator opini BPK, indikator Sakip Kabupaten Belitung, indikator indeks profesionalitas ASN, indikator survey kepuasan masyarakat,

indikator pertumbuhan ekonomi, indikator Jumlah kunjungan wisatawan, indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB, indikator nilai omset koperasi, indikator nilai omset usaha mikro, indikator investasi, indikator pemenuhan infrastruktur kewilayahan, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator cakupan pelayanan persampahan.

8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, yang diturunkan dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

8.2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang dijabarkan target-target pencapaian setiap tahunnya. Indikator Kinerja Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Belitung ada sebanyak 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator : (a) indeks pembangunan manusia dan (b) angka kemiskinan.
2. Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan indikator : indeks reformasi birokrasi.
3. Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator : laju pertumbuhan ekonomi.
4. Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator : Indeks kualitas lingkungan hidup.

Jadi dari 4 (empat) tujuan yang dijabarkan dari visi dan misi, diperoleh 5 (lima) indikator kinerja tujuan, yang semuanya ditetapkan target-target capaiannya, sehingga bisa diukur secara valid.

Keterkaitan dan konstitusi antara tujuan, indikator kinerja tujuan dan target-target selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 8.1, berikut ini:

8.2.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Oleh karena itu sasaran menjadi sangat penting untuk bisa diukur, dengan indikator yang tepat dan target-target yang tepat pula.

Ketiga tujuan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut ke dalam Indikator kinerja dari ke 14 (empat belas) sasaran yang telah dirumuskan dan diperoleh 18 (delapan belas) indikator kinerja saaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya dejarat kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja : angka harapan hidup
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator kinerja : rata-rata lama sekolah
3. Sasaran 3 : meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator kinerja : pengeluaran per kapita.
4. Sasaran 4 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator kinerja : status desa “maju”.
5. Sasaran 5 : Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja : (a) opini BPK dan (b) nilai SAKIP Kabupaten Belitung.
6. Sasaran 6 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional, dengan indikator kinerja : indeks profesionalitas ASN.
7. Sasaran 7 : Birokrasi yang mengedepankan masyarakat yang berkualitas, dengan indikator kinerja : survey kepuasan masyarakat.
8. Sasaran 8 : Meningkatnya pengembangan pariwisata, dengan indikator kinerja : jumlah kunjungan wisatawan.
9. Sasaran 9 : Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan, dengan

indikator kinerja : konstribusi sektor pertanian, kehutann, periknanan terhadap PDRB.

10. Sasaran 10 : Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro, dengan indikator kinerja : (a) nilai omset koperasi dan (b) nilai omset usaha mikro.
11. Sasaran 11 : Meningkatnya investasi, dengan indikator kinerja : nilai investasi.
12. Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur kewilayahan, dengan indikator kinerja : persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan.
13. Sasaran 13 : meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan, dengan indikator kinerja : (a) indeks kualitas air, (b) indeks kualitas udara, (c) indeks kualitas tutupan lahan.
14. Sasaran 14 : meningkatnya pengelolaan sampah, dengan indikator kinerja : persentase cakupan pelayanan persampahan.

Ke 14 (empat belas) sasaran dengan Ke 18 (delapan belas) indikator kinerjanya, telah ditetapkan target-target selama lima tahun, sebagaimana yang tertera dalam tabel 8.2 berikut ini:

Tabel 8.1 Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Belitung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal RPJMD	Target dan Realisasi							Kondisi Akhir RPJMD
				2019		2020		2021	2022	2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	70,93	71,56	72,46	71,87	72,51				
			72,51					**72,88**	**73,37**	**74,21**	**74,21**
		Angka Kemiskinan	7,56	7,1	6,29	6,85	6,27				
			6,27					**5,97**	**5,69**	**5,41**	**5,41**
2	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	CC				
			CC					**B**	**BB**	**BB**	**BB**
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,29	5,5	3,42	5,63	-2,31				
			-2,31					**3,2-3,6**	**4,0-4,4**	**4,4-5,1**	**4,4-5,1**
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,18	60,78	64,82	62,73	67,62				
			67,62					**67,86**	**68,37**	**68,88**	**68,88**

Tabel 8.2 Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Belitung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Target dan Realisasi							Kondisi Akhir RPJMD
				2019		2020		2021	2022	2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,44	70,54	70,94	70,60	71,05				
			71,05					**71,22**	**71,34**	**71,47**	**71,47**
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,11	8,14	8,41	8,15	8,46				
			8,46					**8,46**	**8,51**	**8,56**	**8,56**
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (dalam ribu)	12.910	13.298	13.662	13.496	13.554				
			13.554					**13.671**	**13.862**	**14.049**	**14.049**
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Status desa"Maju"	10	15	20	20	23				
			23					**25**	**28**	**31**	**31**
5	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	B	WTP	WDP	WTP	WTP				
			WTP					**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	CC	CC	CC	B	B				
			B					**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Target dan Realisasi							Kondisi Akhir RPJMD
				2019		2020		2021	2022	2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	62,00	76,00	79,00	77,00	72,86				
			72,86					**75,00**	**75,00**	**76,00**	**76,00**
7	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	76,81	80,00	82,54	83,00	84,80				
			84,80					**85,00**	**87,00**	**88,00**	**88,00**
8	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	467.571	500.000	348.153	600.000	134.266				
			134.266					**150.000**	**250.000**	**400.000**	**800.000**
9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	26,19	27,21	25,01	27,31	27,83				
			27,83					**27,83**	**27,83**	**27,83**	**27,83**
10	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)	55.550.754	72.215.980	75.826.775	93.880.774	78.302.227				
			78.302.227					**80.651.293**	**83.070.832**	**85.562.956**	
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	973.000.000	1.118.950.000	1.174.897.000	1.286.792.500	1.372.650.000				
			1.372.650.000					**1.479.811.375**	**1.701.783.081**	**1.957.050.000**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Target dan Realisasi							Kondisi Akhir RPJMD
				2019		2020		2021	2022	2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Meningkatnya investasi	Nilai investasi (juta rupiah)	981.694	1.225.191	1.566.750	1.780.878	2.171.376				
			2.171.376					**2.519.187**	**3.507.975**	**5.023.529**	**5.023.529**
12	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	35,18	41,89	41,87	46,25	52,47				
			52,47					**54,35**	**57,96**	**59,94**	**57,34**
13	Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	57,34	60,13	50,00	62,22	53,16				
			53,16					**53,26**	**53,36**	**53,46**	**53,46**
		Indeks Kualitas Udara	89,40	90,80	96,32	91,85	92,63				
			92,63					**93,63**	**93,73**	**93,83**	**93,83**
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35,40	38,75	52,31	41,26	46,19				
			46,19					**46,41**	**48,38**	**50,35**	**50,35**
14	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	0,79	3,10	3,10	4,20	15,02				
			15,02					**15,50**	**15,75**	**16,00**	**16,00**

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**									
	1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
	1. PDRB kabupaten :									
	a. Atas dasar harga berlaku (milyar rupiah).	8.738,2	10.058,2	9.856.802	10.733,2	9.838.613	11.407,8	12.082,4	12.757,1	12.757,1
	b. Atas dasar harga konstan (milyar rupiah).	5.969,5	6.457,6	6.502.017	6.714,9	6.352.027	6.972,4	7.229,7	7.487,1	7.487,1
	2. Laju inflasi (%).	2,72	3-5	3.19	3-5	2,11	3-5	3-5	3-5	3-5
	3. Pendapatan per Kapita (ribu rupiah)	47.902	53.797	50.057	56.765	51.994	59.732	62.700	65.667	65.667
	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,29	5,50	3,36	5,63	-2,31	3,2-3,6	4,0-4,4	4,7-5,1	4,7-5,1
	5. Angka Kemiskinan	7,56	7,1	6,29	6,85	6,27	6,25	6,23	6,2	6,2
	6. Indeks Pembangunan Manusia	70,93	71,69	72,46	71,87	72,51	72,88	73,37	74,21	74,21
2.	**Aspek Daya Saing Daerah**									
	1. Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu)	12.910	13.298	13.662	13.496	13.554	13.671	13.862	14.049	14.049
	2. Persentase pemenuhan infratruktur kewilayahan	35,18	41,89	41,87	46,25	52,47	54,35	57,96	59,94	59,94
3.	**Aspek Pelayanan Umum**									
	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	1. Pendidikan									
	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,15	8,41	8,41	8,45	8,46	8,46	8,51	8,56	8,56
	2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,83	11,84	11,84	11,86	11,85	11,88	11,90	11,92	11,92
	3. Persentase Angka Putus Sekolah jejang SD	0,14	0,14	0,13	0,13	0,15	0,12	0,11	0,10	0,10
	4. Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP	0,17	0,16	0,11	0,15	0,30	0,14	0,13	0,12	0,12
	5. Angka Melanjutkan (AM) SD	96,59	98,83	99,83	98,85	96,70	98,87	98,89	98,91	98,91
	6. Angka Melanjutkan (AM) SMP	94,33	97,98	94,33	98,00	87,11	98,02	98,04	98,06	98,06

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	7. Persentase Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	90,57	90,57	90,57	91,51	98,96	92,45	93,40	94,34	94,34
	8. Persentase Jumlah SD yang terakreditasi A	8,33	8,33	8,33	10,00	10,66	11,67	13,33	15,00	15,00
	9. Persentase Jumlah SMP yang terakreditasi A	55,17	55,17	46,88	62,07	46,88	65,52	68,97	72,41	72,41
	10. Persentase Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal S1/DIV	75,05	78,05	88,84	81,03	80,30	84,05	87,02	89,03	89,03
	11. Persentase Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik	60,93	65,03	75%	70,03	42,39	75,03	80,03	85,03	85,03
	12. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	61,43%	62,93%	55,20%	64,43%	59,88%	65,93%	67,43%	68,93%	68,93%
	13. APK SD (Laki-laki dan Perempuan)	119,17%	100%	105,71%	100%	102,69%	100%	100%	100%	100%
	14. APM SD (Laki-laki dan Perempuan)	96,64%	97,64%	94,39%	97,44%	94,99%	97,84%	98,24%	98,64%	98,64%
	15. APK SMP (Laki-laki dan Perempuan)	100,10%	100%	102,01%	100%	103,8%	100%	100%	100%	100%
	16. APM SMP (Laki-laki dan Perempuan)	81,69%	82,09%	78,6%	82,49%	N/A	82,89%	83,29%	83,69%	83,69%
	17. Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16,67%	33,33%	62,36%	50%	55,78%	66,67%	83,33%	100%	100%
	18. Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	60,63%	65,03%	79,56%	70,03%	80,30%				80,30%
	19. Pesentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75,05%	78,05%	88,22%	81,03%	80,30%				80,30%
	20. Persentase(%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	88,22%	90%	80,30%				80,30%
	11. Indeks Pemerataan Guru PNS									
	Jenjang SD									
	a. Guru Kelas						0,1	0,08	0,08	0,08
	b. Guru Mata Pelajaran						0,18	0,17	0,17	0,17
	Jenjang SMP									
	a. Guru Mata Pelajaran						0,34	0,32	0,32	0,32

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
		2.	Kesehatan										
			1.	Puskesmas terakreditasi madya	33.33%	33.33%	66,7%	66.67%	66,7%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	98%	100%	93,10%	100%	95,46%				95,46%
			3.	Persentase Penanganan Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%				100%
			4.	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	100%	100%	100%	100%				100%
			5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,72%	100%	132,6%	100%	107,38%				107,38%
			6.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,87%	100%	101%	100%	98,28%				98,28%
			7.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18%	100%	70,94%	100%	70,94%				70,94%
			8.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						100%	100%	100%	100%
			9.	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman						100%	100%	100%	100%
			10.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan						100%	100%	100%	100%
		3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
			1.	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak	n/a	49,35%	-	51,93%	50,32%	53,54%	55,15%	56,76%	56,76%
			2.	Persentase pemenuhan infratruktur kewilayahan	35,18%	41,89%	41,87%	46,25%	52,47%	53,90%	56,50%	59,17%	59,17%
			3.	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	76.08%	77%	79,31%	78%	80,48%	81%	81,55%	82,09%	82,09%
			4.	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	60,14%	46,85%	50,57%	59,35%	62,22%	15,50%	18,27%	21,04%	21,04%
			5.	Persentase pengolahan air limbah pemukiman	52,80%	53%	83,80%	54%	53,88%	53,98%	54,08%	54,17%	54,17%
			6.	Persentase sawah yang terairi irigasi	53,79%	52,10%	49,61%	54,72%	54,02%				54,02%
			7.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%	76%	76%	76%	88,09%				88,09%
			8.	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani	5,23%	6,52%	7,18%	26,50%	10,07%				10,07%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			9.	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	10,56%	14,20%	-	17,40%	13,06%	14,46%	15,86%	17,26%	17,26%
			10.	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	10%	10,95%	10,98%	15%	10%	20%	15,00%	17,50%	17,50%
			11.	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan Gedung negara	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			12.	Dokumen tata ruang	1	2	2	3	0				0
			13.	Dokumen tata ruang yang telah di Perdakan	1	0	0	1	0				0
			14.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	Belum tersedia	100%	80%	100%	97,60%				97,60%
			15.	Ketaatan terhadap RTRW	Belum tersedia	100%	100%	100%	100%				100%
			16.	Persentase Tenaga Terampil bersertifikat Konstruksi	21,17%	36,94%	95,1%	53%	71,4%				71,4%
			17.	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	Belum tersedia	6%	-	12%	11,76%				11,76%
			18.	Persentase taman terkelola	Belum tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			19.	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik						36,61%	38,13%	39,65%	39,65%
			20.	Persentase jalan mantap kabupaten						72,32%	74,62%	76,93%	76,93%
			21.	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten						60%	60%	60%	60%
			22.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang (penyelenggaraan tata ruang yang telah dikerjakan harus dikerjakan)						100%	100%	100%	100%
		4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
			1.	Persentase luasan Kawasan kumuh	51,28%	22%	35,61%	15,39%	6,78%				6,78%
			2.	Persentase pengurangan luasan Kawasan kumuh						85,77%	80,77%	0,00%	0,00%
			3.	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	100%	77,29	100%	100%	100%	77,29%
			4.	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni Korban Bencana						100%	67%	100%	100%
			5.	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman						-	99,51%	99,80%	99,80%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				kumuh di luar Kawasan kumuh									
			6.	Persentase PSU yang dikelola						100%	53,60%	66,29%	66,29%
		5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
			1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	84%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Belum tersedia	100%	n/a	100%	64%	100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum tersedia	100%	n/a	100%	50%	100%	100%	100%	100%
			4.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5.	Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%	100%	82%	100%	84,3				84,3%
			6.	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	84,3%					100%	100%	100%	100%
			7.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%				100%
			8.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan kebakaran						100%	100%	100%	100%
		6.	Sosial										
			1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	95%	100%	86,26%	100%	86,47%				86,47%
			2.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng di luar panti yang mendapat layanan rehabilitasi social	86,47%					100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Tidak terjadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	bencana								
			4.	Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	20%	20%	-	40%	80%	90%	95%	100%	100%
			5.	Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	88,28%	87,83%	-	87,38%	87,38%				87,38%
			6.	Persentase PSKS aktif	75%	80%	100%	85%	94,77%	90%	95%	100%	100%
			7.	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100%					100%	100%	100%	100%
			8.	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan social	100%					100%	100%	100%	100%
			9.	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100%					100%	100%	100%	100%
		Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
		7.	Tenaga Kerja										
			1.	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	-	-	66%	100%				100%
			2.	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	30,30%	31%	5,16%	32%	6,34%				6,34%
			3.	Persentase peluang kerja mandiri/berwirausaha	15%	16%	-	17%	18%				18%
			4.	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	-								
			5.	Persentase penyerapan tenaga kerja	n/a							100 orang	100 orang
			6.	Persentase peningkatan harmonisasi hubungan industrial	-					10%	10%	20%	20%
		8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
			1.	Status KLA (Kabupaten Layak Anak) Pratama	Deklarasi	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
			2.	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,9%	5,8%	44%	5,7%	2,85%	5,5%	5,3%	5,2%	5,2%
			3.	Persentase penanganan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten						100%	100%	100%	100%
			5.	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga	50%	51%	62%	52%	10,52%	53%	54%	55%	55%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				pemerintah									
			6.	Partisipasi Angkatan kerja perempuan	20%	22%	62%	25%	33,59%	27%	29%	30%	30%
			7.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD							0,5%	0,5%	0,5%
			8.	Persentase keluarga yang terlayani							100%	100%	100%
			9.	Persentase layanan perlindungan perempuan						100%	100%	100%	100%
			10.	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)						25%	25%	25%	25%
		9.	Pangan										
			1.	Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	22%	18%	84,85%	36%	0%	55%	73%	91%	91%
			2.	Persentase (%)Tingkat Keamanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	89,29%	89,29%	89,29%	89,29%
			3.	Persentase ketersediaan cadangan pangan	5,59%	14.69%	14,70%	35.66%	35,66%	56.64%	77.62%	100%	100%
			4.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,56%	93,00%	80,53%	94,00%	82,20%	95,00%	96,00%	97,00%	97,00%
			5.	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi	n/a					95,7%	95,7%	95,7%	95,7%
			6.	Persentase penurunan status desa/kelurahan rawan pangan	n/a					12,24%	12,20%	10,20%	10,20%
		10.	Pertanahan										
			1.	Persentase penegasan batas wilayah dalam kabupaten (kecamatan)	Belum tersedia	0	0	25%	0				25%
			2.	Persentase pemenuhan kebutuhan lahan pelayanan publik	Belum tersedia	0	0	20%	0				20%
		11.	Lingkungan Hidup										
			1.	Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	34.10%	39%	44.07%	44%	45,21%	28%	28%	35%	35%
			2.	Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten	23	26	25	29	28	32	35	38	28

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase jumlah sampah yang ditangani	30,84%	35%	96,95%	40%	44%	45%	50%	55%	44%
	5. Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	4	11	14	14	18	17	20	23	18
	6. Keseuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	n/a					100%	100%	100%	100%
	7. Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Belitung	n/a					15%	22%	22%	22%
	8. Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	n/a					47,79%	47,79%	47,79%	47,79%
	9. Persentase pengendalian limbah B3	n/a					45%	50%	55%	55%
	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Belitung	n/a					15%	20%	22%	22%
	11. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	n/a					32 kelompok	98 kelompok	108 kelompok	108 kelompok
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	n/a					100%	100%	100%	100%
	12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1. Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%	79%	84,85%	81%	82,65%	83%	84%	86%	86%
	2. Persentase capaian pencatatan sipil	92%	93%	99,83%	94%	93,41%	94%	94%	95%	95%
	3. Persentase pemanfaatan data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase penyajian data kependudukan						100%	100%	100%	100%
	13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Belum tersedia	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
			2.	Persentase ketersediaan data dan informasi desa (Profil Desa) yang mutakhir	46.94%	61.22%	-	71.43%	87,85%	100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	97.62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	Persentase kelembagaan desa aktif	98.93%	99.07%	99,07%	99.20%	99,20%	99.53%	99.87%	100%	100
			5.	Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	27.27%	28.57%	27,27%	29.73%	28,57%	30.77%	32.50%	37.50%	37.50%
			6.	Persentase BUMDesa aktif tiap desa	69.05%	76.19%	85,7%	83.33%	85,71%	90.48%	97.62%	100%	100%
			7.	Persentase pengsian Prodeskel yang sesuai dengan peraturan yang berlaku						100%	100%	100%	100%
		14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
			1.	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8.99%	8.59%	8,25%	8.19%	7,36%				6.50%
			2.	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	22%	21.60%	81,01%	21.20%	28,20%	18,50%	76%	78%	78%
			3.	Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	20%	19.50%	2,26%	19%	7,92%				17.50%
			4.	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (GDPK)	n/a n/a					-	70%	80%	80%
			5.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang	n/a					14%	14%	15%	15%
		15.	Perhubungan										
			1.	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	32.12%	39.03%	65,65%	54.26%	89,71%				89.71%
			2.	Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar	17.98%	20.29%	75,31%	22.60%	96,35%				96,35%
			3.	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan	50%	42%	81,48%	34%	89,71%				89,71%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				berlalu lintas									
			4.	Persentase pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten	12.50%	100%	-	100%	69,64%				69,64%
			5.	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	13.81%	100%	-	100%	91,57%				91,57%
			6.	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang laik	n/a					100%	100%	100%	100%
			7.	Persentase Pelabuhan pengumpan lokal yang dioperasikan	n/a					100%	100%	100%	100%
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	32,12%	39,03%	65,65%	54,26%	96,21%	67,83%	100%	100%	100%
		16.	Komunukasi dan Informatika										
			1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	2,51	n/a	2,6	3,26	3	3,6	3,8	3,8
			2.	Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	n/a	62,51%	79,21	65%	86,62%	75%	90%	95%	95%
			3.	Kelancaran diseminasi, informasi dan pendistribusian informasi daerah	100%	100%	100%						
			4.	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	25%	50%	82,75%	65%	90,63%	80%	100%	100%	100%
			5.	Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	Belum tersedia	90%	-	90%	98,69%	90%	90%	90%	90%
			6.	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	40%	40%	100%	60%	100%	80%	100%	100%	100%
		17.	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah										
			1.	Penumbuhan usaha mikro	17,596	17,748	4,11%	17,898	19.779	18,048	18,198	18,348	18,348
			2.	Persentase (%) usaha mikro yang omsetnya meningkat	42%	47%	4,11%	20%	43%	57%	62%	67%	67%
				Persentase (%) Koperasi aktif	70%	75%	71,12%	80%	71,42%	85%	90%	95%	95%
				Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang	14%	42%	28,57%	56%	56%	70%	84%	100%	100%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				dibangun									
			1.	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	n/a					100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaiakan RAT tepat waktu	40%					40%	40%	45%	45%
			3.	Persentase pertumbuhan usaha mikro	6,26%					18.048 unit usaha	50%	52%	52%
			4.	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	n/a						50%	52%	52%
		18.	Penanaman Modal										
			1.	Peningkatan jumlah investor	87	100	92	120	382	144	174	214	214
			2.	Indeks kepuasan masyarakat	87.21%	88%	95,24% (3,81)	88%	85,07% (3,4)	86%	86%	87%	87%
			3.	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal.	80%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	n/a					50 investor	50 investor	50 investor	50 investor
			5.	Peningkatan promosi penanaman modal	n/a					60%	60%	60%	60%
			6.	Kepatuhan investor/pelaku usaha terhadap peraturan/perundang-undangan penanaman modal	n/a					100%	100%	100%	100%
		19.	Kepemudaan dan Olahraga										
				Jumlah kelompok olahraga masyarakat aktif	20	25	24	30	12				12
				Jumlah atlet berprestasi yang aktif	1013	1083	-	1137	400				400
				Jumlah pelatih bersertifikasi yang aktif	532	559	48%	587	0				0
				Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	60%	70%	85%	75%	53,13%				53,13%
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	85%	85%	80%	85%	42,90%				42,90%
				Persentase wirausaha pemula	75%	80%	-	80%	80%	85%	85%	90%	00%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	n/a					90%	90%	100%	100%
	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	n/a					-	1294 orang	1294 orang	2588 orang
	Organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	n/a					1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	3 lembaga
	20. Statistik									
	1. Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Belum tersedia	75%	100%	70%	100%	80%	90%	90%	90%
	2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	n/a	75%	100%						
	21. Persandian									
	1. Tingkat kemtangan keamanan informasi	Level II	Level II	Level I	Level III	Level II	Level II	Level III	Level III+	Level III+
	22. Kebudayaan									
	1. Persentase nilai budaya yang berkembang	80%	82%	82%	84%	84%	86%	88%	90%	90%
	2. Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	10%					16%	18%	20%	20%
	3. Kebudayaan daerah yang terlestarikan	n/a					50%	60%	75%	75%
	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan kesenian tradisional	n/a					-	50%	50%	50%
	5. Persentase cagar budaya yang dilestarikan	n/a					-	30%	30%	30%
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a					55%	60%	70%	70%
	23. Perpustakaan									
	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perpustakaan	n/a	85	85,75	90	86,05	90	95	95	95
	2. Persentase Perpustakaan yang terkelola dengan baik	80	83	83,75	85	85,77				85,77
	3. Persentase Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3%					7%	9%	11%	11%
	4. Jumlah pemustaka per tahun	332.661	333.611	333.611	339.861	339.327	343.501	347.101	350.701	350.701
	5. Jumlah koleksi buku yang dipinjam	89.811	91.711	81.207	93.611	92.478	95.511	97.411	99.311	99.311
	24. Kearsipan									

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Persentase pengelola arsip Perangkat Daerah yang mengelola dokumen arsip sesuai ketentuan	-	15	10	30	36,59	45	60	75	75
	2. Persentase arsip Perangkat Daerah yang terkelola dengan baik dan tersimpan di Depo arsip	30	40	15	55	54,8				85
	3. Persentase arsip statis dan arsip dinamis OPD yang tersimpan di Depo arsi	54,8					65	75	85	85
	4. Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	30	-	-	50	87,3	65	75	85	85
	Layanan Urusan Pilihan									
	1. Kelautan dan Perikanan									
	1. Kontribusi sub sector perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung	n/a	16,37	n/a	19,91	n/a	19,93	19,95	19,97	19,97
	2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	n/a	102,01	102,01	110,3	110,3	111	112	113	113
	3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	n/a	98,48	98,48	100,4	100,4	102	104	106	106
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	n/a	n/a	3,704	-	3,714	3,724	3,734	3,734
	3. Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	65,723	66,381	56.845,62	67,044	52.912,48	48.000	49.000	50.000	50.000
	4. Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10.71%	10.82%	9,26%	10.92%	8,63%	7,82	7,98%	8,15%	8,15%
	5. Produksi Perikanan budidaya (Ton /tahun)	207.2	211	176,48	215	152,96	219	223	227	227
	6. Peningkatan produksi benih yang berkualitas	3.78%	6.09%	114,10%	8.70%	9,48%				9,48%
	7. Produksi pengolahan hasil perikanan	8.452	8.311	-	8.096	-	8.400	8.500	8.600	8.600
	2. Pariwisata									
	1. Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	467.571 orang	500.000 orang	348.154 orang	600.000 orang	134.266 orang	115.000 orang	150.000 orang	250.000 orang	250.000 orang
	2. Persentase peningkatan kualitas daya tarik wisata	67%	73%	73%	79%	79%	81,16%	83,82%	83,82%	83,82%
	3. Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	Belum tersedia	7,1%	22,47%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			5.	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	50%	50%	50%	56,25%	56,25%				56,25%
			6.	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	56,25%					84,58%	84,58%	90%	90%
		3.	Pertanian										
			1.	Produksi Tanaman Pangan Strategis (Ton Gabah Kering Giling) (Padi)	2.386	2.436	1.454,89	2.605	2.204,96				2.204,96
			2.	Produksi Tanaman Pangan Lokal (Ton)	1.520	1.596	1.223	1.672	1.262,10				1.262,10
			3.	Produksi tanaman Hortikultura (Ton)	1.193	1.236	1.087,84	1.279	3.143,16				3.143,16
			4.	Peningkatan Mutu Produk Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (jumlah produk)	4	6	7	8	6				6
			5.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton)	8.1	8.5	-	8.9	9,55				9,55
			6.	Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan (jenis)	2	3	-	2	2				2
			7.	Jumlah Populasi ternak besar sapi	1751	1773	1.778	1800	1.802				1.802
			8.	Jumlah Populasi ternak ayam	2.958.901	3.106.846	4.929.237	3.262.188	3.802.627				3.802.627
			9.	Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	5.000	6.200	9.765	8.000	10.444				10.444
			10.	Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	43	49	59	55	55				55
			11.	Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani "Madya"	0	1	-	2	2				2
			12.	Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"	0	1	-	2	2				5
			13.	Peningkatan Luas Areal Tanam Padi (Ha)	425	445	810	465	705				705
			14.	Persentase kebutuhan sarana pertanian	n/a					26%	26%	35%	35%
			15.	Persentase prasarana yang digunakan	n/a					34,47%	42,07%	49,54%	49,54%
			16.	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	n/a					66%	70%	74%	74%
			17.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	n/a					100%	100%	100%	100%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	18. Persentase penanggulangan bencana pertanian	n/a						100%	100%	100%
	4. Perdagangan									
	1. Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	62%	78%	78%	88%	88%	92%	92%	95%	95%
	2. Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Pasar Representatif (Persentase pasar memenuhi standar)	20%			60%	60%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase pelaku usaha taat aturan	n/a					0%	100%	100%	100%
	5. Perindustrian									
	1. Persentase (%) Penataan Struktur Industri	0%	20%	20%						20%
	2. Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.155	2.195	2.195	2.235	2.242	2.275	2.315	2.355	2.355
	3. Tingkat kepatuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah	22,59%	23%	30,21	23,1%	23%	24%	25%	26%	26%
	4. Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	12.50%	25%	25%	37.50%	50%	50%	62.50%	75%	75%
	5. Jumlah sentra IKM	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	6. Pertumbuhan Jumlah IKM	n/a						40 IKM	40 IKM	40 IKM
	Penunjang Urusan Pemerintahan									
	1. Perencanaan									
	1. Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan program perencanaan daerah	100%	100%	90.48%	100%	96%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan program	100%	100%	100%	100%	94,03%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				perencanaan daerah									
			4.	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	100%	100%	90,12%	100%	94,44%	100%	100%	100%	100%
		2.	Keuangan										
			1.	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	92,31%	92,31%	89%	92,31%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Optimalisasi penerimaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	99,65%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	Peningkatan pendapatan asli daerah	0,46%			16,22%	-13,44%	16,36%	25,24%	27,30%	27,30%
		3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
			1.	Terkelolanya manajemen kepegawaian daerah	-					100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	-					75%	75%	90%	90%
		4.	Fungsi Lainnya										
			1.	Penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel	-					100%	100%	100%	100%
			2.	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan Kabupaten Belitung	-					100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	100%	100%	100%	100%	96,39%	80%	80%	855	85%
			4.	Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai ketentuan	-					100%	100%	100%	100%

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
			5.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh: - BPK-RI - APIP	20,28%	78% -	38% -	75% -	61% -	90% 85%	85% 90%	100% 100%	100% 100%
			6.	Persentase jumlah kebijakan yang diimplementasikan	100%	100%	68,3%	40%	71,43%	100%	100%	100%	100%
			7.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	79,45%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
			8.	Persentase parpol dan lembaga pendidikan politik yang mendapatkan pendidikan politik	100%					100%	100%	100%	100%
			9.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terbina	100%					100%	100%	100%	100%
			10.	Persentase meningkatnya pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	70,84%	100%	25%	100%	100%	100%	100%
			11.	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	100%	28,77%	100%	30%	100%	100%	100%	100%
			12.	Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang keamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			13.	Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten	40 prestasi			50 prestai	12 prestasi				
			14.	Persentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang kelurahan terhadap prioritas perencanaan Kabupaten	87%	90%	100%	100%	100%				
			15.	Persentase sarana dan prasarana lingkungan kelurahan dalam kondisi baik	n/a			20%	20%				
			16.	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	88,88%			100%	100%	100%	100%
			17.	Persentase desa dan/atau kelurahan taat administrasi	79,84%	80,84$	87,5%	87,5%	87,5%	90%	90%	87,5%	87,5%

BAB IX
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi dan program Kepala Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Belitung selama periode 2018-2023 yang sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan provinsi dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dukungan seluruh *stakeholder* pemangku pembangunan dan seluruh masyarakat Kabupaten Belitung.

Dengan Visi “Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”, merupakan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mencapai visi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung yaitu Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

